



PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



BIRO ORGANISASI

Jl. RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung

biroorganisasi.lampungprov.go.id

biroorganisasilampung@gmail.com

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

Kata Pengantar



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat mencakup informasi dan analisis capaian kinerja dan anggaran dalam mencapai visi dan misi dalam kurung waktu tertentu melalui pengukuran indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dengan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berkenaan dengan itu, kami berharap melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya serta membawa arah perbaikan dan perubahan kinerja ke arah pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

Telukbetung, 26 Maret 2026

GOVERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL





Ikhtisar Eksekutif

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu RPD Provinsi Lampung 2025-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 yang menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 dan perubahannya. Hal ini membawa dampak terhadap dokumen LKj Provinsi Lampung dimana kedua dokumen perjanjian kinerja harus dijawab dalam dokumen LKj.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut: Rentang Capaian lebih dari 90% (sangat memuaskan), 80%-90% (memuaskan), 70%-80% (sangat baik), 60%-70% (baik), 50%-60% (cukup), < 50% (kurang).

Berikut ini capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 berdasarkan dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026:

Tabel Capaian kinerja Provinsi Lampung mengacu pada RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	target, realisasi, dan % capaian							Ket.
				Target PK 2025	Realisasi 2025	%	Target Akhir RPD 2026	%	Realisasi nas	%	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,57	4.9-5.3	5,28	107,75	5.0-5.4	97,7	5,11	103,32	BPS
		2. Indeks Gini	0,301	0.28-0.29	0,287	100,01	0.27-0.29	100,00%	0,363	126,4	BPS
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3.8-3.5	4,21	90,26%	3.7-3.4	87,89%	4,85	115,20	BPS
3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	4. Pertumbuhan PMTB	1,78	2,9-5,6	5,28	94,2	2,1-6,4	82,5	5,09	103,73	BPS
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Inflasi	5,51	1.5-3.5	1,25	83,33%	1.5-3.5	83,3	2,92	83,3	BPS
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	6. IPM	73,13	71,59	73,98	103,39	71,97	102,79%	75,90%	97,47%	BPS
		7. Prevalensi Stunting	15,9	10	15,9	62,89	9	56,60	19,8	124,5	BPS (2024)
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	8. Indeks Perlindungan Anak	64,78	69,8	71,58	102,55	70,1	102,11	71,02	100,78	Kemen PPPA
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender	9. Indeks Ketimpangan Gender	0,399	0,453- 0,454	0,399	113,53	0,452- 0,453	113,28	0,421	105,51	Kemen PPPA (2024)
8	Menurunkan Angka Kemiskinan	10. Persentase Angka Kemiskinan	10,62	9.5-10	9,66	101,68%	9.25- 9.75	101,68	8,25	85,40	BPS
9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11. Tingkat Infrastruktur Wilayah	88,34	74,9	88,34	117,94	75,9	116,38	-	-	BAPPEDA (2024)
10	Meningkatnya Ketahanan Energi	12. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	16,3 (34,551,502.5 juta ton CO2e)	125,38%	13.25	123,01%	165,31 juta ton CO2e	20,6	BAPPENAS (angka sementara 2025)
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indek Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	69,93	73,81	105,55	70,35	104,92	78,76	93,71	Kemen LH
12	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	14. Indeks Resiko bencana	130,1	141,85	124,59	113,85	141,15	113,29	131,05	105,18	BNPB
13	Meningkatkan Penyelenggaraan RB	15. Indeks Reformasi Birokrasi	A (82,34)	BB (70-80)	A (82,52)	103,15	BB (70-80)	103,15	71,55	115,33	Kemen PANRB (sementara)
14	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	16. Indeks Pelayanan Publik	A- (4,27)	A-	A- (4,19)	104,48	A (4,51-5,0)	92,90	A-(4,01)	104,48	Kemen PANRB
15	Memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	17. Indeks Demokrasi Indonesia	72,62	79.26 – 82.61	72,62	91,62	80-83	90,78	78,50	92,50	BPS (2024)
16	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	18. Indeks Kerukunan Umat Bergama	74,04	74,13	80,39	108,44	75,15	106,97	77,89	102,71	Kemennag
17	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang berbudaya	19. Indeks Pembangunan kebudayaan	60,97	57.91	60,97	105,28	59.01	103,32	59,98	101,23	Kemendik budristek (2024)
18	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	20. Indeks kewaspadaan dini	84,44	91.89	84,44	91,89	92.39	91,39	-	-	2023

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2026.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, terdapat 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung;
2. Penetapan target yang menjadi dasar dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 dan RKPD Provinsi Lampung 2025;
3. Realisasi 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung bersumber dari data rilis oleh Kementerian/Lembaga dan sebagian berdasarkan dari PD Provinsi Lampung;
4. Capaian dari 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung terdapat 18 (delapan belas) IKU dengan kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) IKU dengan kategori Memuaskan dan 1 (satu) IKU dengan kategori Baik;
5. Terdapat 2 (dua) IKU yang tidak memiliki perbandingan dengan nasional atau daerah lain yaitu IKU Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah dan Indeks Kewaspadaan Dini. Penyebabnya adalah karena definisi operasional yang disusun berdasarkan kapasitas, kualitas, sumber daya PD di Provinsi Lampung dan karena adanya rilis data dari pusat (Kemendagri terhadap IKD) yang tidak secara periodik.
6. Terdapat 8 (delapan) IKU yang menggunakan data rilis realisasi tahun 2024 sebagai dasar realisasi 2025. Hal ini karena adanya *time frame* data rilis yang berbeda-beda.
7. Terdapat 11 (sebelas) IKU Provinsi Lampung dimana realisasinya lebih tinggi dari realisasi nasional.

Dalam mencapai target kinerja di atas, pagu APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.7.632.909.717.848,00 (Tujuh triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Berikut ini capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029:

Tabel Capaian kinerja Provinsi Lampung mengacu pada RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	kondisi awal 2024	Target, realisasi dan % capaian kinerja							Ket.
			Target P-PK 2025	Realisasi 2025	%	Target akhir 2029	%	nas	%	
1. Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,2	5,28	107,75	6,8	77,64	5,11	103,32	BPS
	2. Gini Rasio	0,301	0,300-0,295	0,287	103,78	0,271-0,275	95,81	0,363	126,64	BPS
2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	3. Indeks Ketahanan Pangan	82,58	83,07	86,95 (9 indk) 73,05 (12 indk)	104,67	85,11	103,16	68,87	106,06	BPN
3. Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	4. Persentase Desa Mandiri	14,68 (data idx desa)	21,42	22,89	106,86	25,22	90,76	24,5	93,43	Kemendes
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	78,08	78,29	79,79	101,92	87,95	90,72	92,32	86,42	BMBK
	6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	25,92	26,21	26,82	102,35	27,35	98,06	-	-	PKPCK
5. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	10,62	9,5-10,0	9,66	101,68	5,79-6,69	69,25	8,25	85,71	BPS
	8. Tingkat Inflasi	1,5	2,5 ± 1	1,25	83,33	2,5±1	83,33	2,92	83,3	BPS
	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,86 - 4,0	4,21	95,01	3,25-3,73	88,6	4,85	115,20	BPS
6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia	IMM: 0,53 IPM: 73,13	IMM: 0,55 IPM: 71,59	IMM: - IPM: 73,98	103,33	0,58	-	IMM: - IPM: 75,90	IPM: 97,4	BAPPEDA
7. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda	55,67	57,00	55,67	103,33	54,19	85,64	58,33	95,43	Kemenpora (2024)
8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak	64,78	66,22	71,58	108,1	72,1	99,28	71,02	100,78	Kemen PPPA
	13. Indeks Ketimpangan Gender	0,399	0,42	0,399	105,76	0,387	96,99	0,421	105,51	Kemen PPPA (2024)
9. Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi	82,34	83,5	82,52	98,83	87,01-88,00	94,83	71,55	111,81	KemenPANRB (angka sementara)
10. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	60,64	62,79	60,64 (34,551,502.5 juta ton CO2e)	96,57	72,13	84,07	165,31 juta ton CO2e	20,6	BAPPEDA (angka sementara 2025)
	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	70,99	73,81	103,91	71,84	103,74	78,76	93,71	Kemen LH
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	17. Indeks Resiko Bencana	130,1	129,97	124,59	104,31	121,85-125,86	96,83	131,05	105,18	BNPB
	18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	25,22	36	36,32	100,89	37,8	96,08	14,7	247,07	ESDM
12. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	19. Indeks Demokrasi Provinsi	72,62	79,5	72,62	91,34	81-82	96,54	78,5	92,50	BPS (2024)
	20. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,97	58,5	60,97	104,2	63	96,78	59,98	101,65	Kemendikbudristek (2023)

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2026.



Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, terdapat 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung;
2. Penetapan target yang menjadi dasar dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung 2025;
3. Realisasi 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung bersumber dari data rilis oleh Kementerian/Lembaga dan sebagian berdasarkan dari PD Provinsi Lampung;
4. Capaian dari 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung terdapat 19 (Sembilan belas) IKU dengan kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) IKU dengan kategori Memuaskan;
5. Terdapat 1 (satu) IKU yang tidak memiliki perbandingan dengan nasional atau daerah lain yaitu IKU Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah karena definisi operasional yang disusun berdasarkan kapasitas, kualitas, sumber daya PD di Provinsi Lampung.
6. Terdapat 6 (enam) IKU yang menggunakan data rilis realisasi tahun 2024 sebagai dasar realisasi 2025. Hal ini karena adanya *time frame* data rilis yang berbeda-beda.
7. Terdapat 10 (sepuluh) IKU Provinsi Lampung dimana realisasinya lebih tinggi dari realisasi nasional.

Pagu Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 yang dikelola dalam mencapai 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 senilai **Rp.7.813.044.281.370,32** (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah). Terdapat penambahan anggaran sebesar 2,35% senilai dengan Rp.180.134.563.522,04 (seratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) dari awal APBD menjadi P-APBD Provinsi Lampung Tahun 2025. Realisasi anggaran P-APBD tahun 2025 senilai **Rp.6.685.281.948.466,80** (Enam triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam) sehingga realisasi anggaran **85,57%**.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja pada 20 (dua puluh) IKU yang mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 maka seluruh capaian kinerja lebih tinggi daripada tingkat serapan anggaran masing-masing IKU. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing IKU telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xv
Daftar Gambar	xvii
Bab I Pendahuluan	1-14
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	3
1.3 Landasan Hukum	11
1.4 Sistematika Penulisan	13
Bab II Perencanaan Kinerja	15-35
2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	15
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	17
2.3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025	26
2.4 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025	27
2.5 Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025	28
2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025	30
2.7 Keselarasan target Dokumen SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2025	32
2.8 Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2025	35



Bab III Akuntabilitas Kinerja	36-275
3.1 Pengukuran Kinerja	36
3.2 Pengukuran, dan Analisis, Evaluasi Kinerja	
Provinsi Lampung Tahun 2025	41
A. Capaian kinerja berdasarkan RPD	
Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	41-82
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	41
2. Indeks Gini	42
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	43
4. Pertumbuhan PMTB	44
5. Inflasi	47
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	48
7. Prevelansi Stunting	49
8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	57
9. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	58
10. Presentase Angka Kemiskinan	59
11. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	60
12. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	61
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62
14. Indeks Resiko Bencana	63
15. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	64
16. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	65
17. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	72
18. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73
19. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	79
20. Indeks Kewaspadaan Dini (IDI)	80
B. Capaian kinerja berdasarkan RPJMD	
Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	83-249
1. Pertumbuhan Ekonomi	83
2. Gini Ratio	91
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	95
4. Persentase Desa Mandiri	102
5. Kemantapan Jalan	112
6. Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar	125
7. Tingkat Kemiskinan	137



8. Tingkat Inflasi	141
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	146
10. Indeks Modal Manusia	163
11. Indeks Pembangunan Pemuda	169
12. Indeks Perlindungan Anak	174
13. Indeks Ketimpangan Gender	183
14. Indeks Reformasi Birokrasi	187
15. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	192
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	203
17. Indeks Resiko Bencana	215
18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	222
19. Indeks Demokrasi Provinsi	237
20. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	244
3.3 Akuntabilitas Keuangan	250
3.4 Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2025	252
3.5 Refokusing Provinsi Lampung Tahun 2025	254
3.6 Tindak Lanjut LHE Provinsi Lampung Tahun 2025.....	256
3.7 Prestasi dan Penghargaan Provinsi Lampung Tahun 2025	266
3.8 Daftar Inovasi	269
Bab IV Penutup	276-283
4.1 Kesimpulan	276
4.2 Rekomendasi	280



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Luas wilayah dan jumlah pulau di Provinsi Lampung	3
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	16
Tabel 2.2 Arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.3 Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.4 IKU Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	22
Tabel 2.5 RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025.....	26
Tabel 2.6 Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025	27
Tabel 2.7 PK Provinsi Lampung Tahun 2025	28
Tabel 2.8 Anggaran PK Provinsi Lampung Tahun 2025.....	29
Tabel 2.9 Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2025.....	30
Tabel 2.10 Anggaran Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2025	31
Tabel 2.11 Keselarasan Target IKU Provinsi Lampung pada RPD 2025-2026, RKPD 2025, dan PK 2025	32
Tabel 2.12 Keselarasan Target IKU Provinsi Lampung pada RPJMD 2025-2029, P-RKPD 2025, dan P-PK 2025.....	33
Tabel 3.1 Kategori capaian indikator kinerja	36
Tabel 3.2 Capaian kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	38
Tabel 3.3 Capaian kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	39
Tabel 3.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	41
Tabel 3.5 Capaian Indeks Gini	42
Tabel 3.6 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka.....	43
Tabel 3.7 Capaian Pertumbuhan PMTB.....	44
Tabel 3.8 PDRB Provinsi Lampung Tahun 2023-2025	45
Tabel 3.9 Faktor pendukung, penghambat dan Solusi pertumbuhan PMTB	46
Tabel 3.10 Capaian pengendalian inflasi	47
Tabel 3.11 Capaian Indeks Pembangunan Manusia	48
Tabel 3.12 Capaian Prevelansi Stunting	49
Tabel 3.13 Tren Stunting Provinsi Lampung	50
Tabel 3.14 Faktor pendukung dan penghambat Prevelansi Stunting	52
Tabel 3.15 Capaian Indeks Perlindungan Anak	57



Tabel 3.16 Capaian Indeks Ketimpangan Gender	58
Tabel 3.17 Capaian Angka Kemiskinan	59
Tabel 3.18 Capaian infrastruktur dasar wilayah	60
Tabel 3.19 Capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca	61
Tabel 3.20 Capaian Indeks kualitas lingkungan hidup	62
Tabel 3.21 Capaian Indeks Resiko Bencana	63
Tabel 3.22 Capaian Indeks reformasi birokrasi	64
Tabel 3.23 Capaian Indeks Pelayanan Publik	65
Tabel 3.24 Kategori Indeks Pelayanan Publik	65
Tabel 3.25 IPP Provinsi se-Indonesia	66
Tabel 3.26 PD Implementator Pelayanan Publik	67
Tabel 3.27 Hasil SKM melalui aplikasi Sisma Siger Provinsi Lampung tahun 2025	68
Tabel 3.28 MPP di Provinsi Lampung	70
Tabel 3.29 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	72
Tabel 3.30 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama	73
Tabel 3.31 Dimensi dan range indeks KUB	74
Tabel 3.32 Capaian IKUB berdasarkan Provinsi	74
Tabel 3.33 Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Aksi IKUB	78
Tabel 3.34 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	79
Tabel 3.35 Capaian Indeks Kewaspadaan Dini	80
Tabel 3.36 Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Aksi IKD	82
Tabel 3.37 Capaian Pertumbuhan Ekonomi	83
Tabel 3.38 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (%)	87
Tabel 3.39 Ringkasan catatan peristiwa pertumbuhan PDRB Lampung c to c Menurut lapangan usaha tw I-IV	88
Tabel 3.40 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran (%)	89
Tabel 3.41 Ringkasan catatan peristiwa pertumbuhan PDRB Lampung c to c Menurut pengeluaran tw I-IV	90
Tabel 3.42 Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Aksi PE	90
Tabel 3.43 Capaian Gini Ratio	91
Tabel 3.44 Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Aksi Indeks Gini	94



Tabel 3.45 Capaian Indeks Ketahanan Pangan.....	91
Tabel 3.46 IKP Nasional se-Sumatera Tahun 2025	96
Tabel 3.47 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi IKP	101
Tabel 3.48 Capaian Desa Mandiri	102
Tabel 3.49 Perbandingan skor dan status desa	103
Tabel 3.50 Perbandingan total status IDM tahun 2024-2025	104
Tabel 3.51 Mapping status desa Provinsi Lampung tahun 2019-2025	106
Tabel 3.52 Capaian kemantapan jalan	112
Tabel 3.53 Penanganan jalan tahun 2025	113
Tabel 3.54 Data kemantapan jalan Provinsi Lampung tahun 2025	114
Tabel 3.55 Mapping jalan berdasarkan Kawasan	115
Tabel 3.56 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Kemantapan jalan	117
Tabel 3.57 Daftar ruas jalan Provinsi Lampung	120
Tabel 3.58 Ruas jalan dengan jenis permukaan Telford/kerikil	123
Tabel 3.59 Capaian Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	125
Tabel 3.60 Penanganan RTLH Provinsi Lampung tahun 2025	127
Tabel 3.61 Data Capaian Akses Layanan Air Limbah Tahun 2025 Provinsi Lampung ...	129
Tabel 3.62 Indeks resiko TPA	131
Tabel 3.63 Capaian Akses Air Minum Aman Provinsi Lampung	133
Tabel 3.64 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	134
Tabel 3.65 Capaian tingkat kemiskinan	137
Tabel 3.66 Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin 147.....	131
Tabel 3.67 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi Angka Kemiskinan	140
Tabel 3.68 Capaian Pengendalian Inflasi	141
Tabel 3.69 Pengendalian unflasi se-Sumatera	141
Tabel 3.70 Andil Inflasi dan Deflasi Terbesar di Provinsi Lampung 2025	143
Tabel 3.71 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program inflasi	145
Tabel 3.63 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	146
Tabel 3.64 Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja	151
Tabel 3.65 Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas	158
Tabel 3.66 Pekerja migran Indonesia asal Provinsi Lampung	151
Tabel 3.67 Data pencari kerja, pekerja dan penempatan	161
Tabel 3.68 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program TPT	162
Tabel 3.69 Capaian Indeks Modal Manusia	163



Tabel 3.70 IPM Lampung menurut komponen	166
Tabel 3.71 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda	169
Tabel 3.72 IPP se-Sumatera	169
Tabel 3.73 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program IPP	173
Tabel 3.74 Capaian Indeks Perlindungan Anak	174
Tabel 3.75 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi IPA	180
Tabel 3.76 Capaian Indeks Ketimpangan Gender	183
Tabel 3.77 IKG Lampung menurut komponen	184
Tabel 3.78 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi IKG	187
Tabel 3.79 Capaian indeks reformasi birokrasi	187
Tabel 3.80 Kategori Nilai RB	188
Tabel 3.81 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2025	188
Tabel 3.82 Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung Tahun 2025	189
Tabel 3.83 Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung Tahun 2024-2025	189
Tabel 3.84 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi Indeks RB	191
Tabel 3.85 Capaian penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca	192
Tabel 3.86 Aksi mitigasi bidang kehutanan dan lahan gambut	197
Tabel 3.87 Aksi Mitigasi Bidang transportasi	198
Tabel 3.88 Aksi Mitigasi Bidang Pengelolaan Limbah	199
Tabel 3.89 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi intensitas emisi GRK	200
Tabel 3.90 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	203
Tabel 3.91 Rentan nilai IKLH	204
Tabel 3.92 IKLH Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2024-2025	206
Tabel 3.83 IKA Kab/Kota se Provinsi Lampung	207
Tabel 3.84 IKU Kab/Kota se Provinsi Lampung	208
Tabel 3.85 IKL Kab/Kota se Provinsi Lampung	210
Tabel 3.86 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi IKLH	214
Tabel 3.87 Capaian Indeks Resiko Bencana	215
Tabel 3.88 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IRB	219
Tabel 3.89 Capaian porsi EBT dalam bauran energi primer	222
Tabel 3.90 Benchmarking realisasi nasional dan provinsi lain	224
Tabel 3.91 Konsumsi energi Provinsi Lampung tahun 2024	225
Tabel 3.92 Bauran EBT Provinsi Lampung Tahun 2024	227
Tabel 3.93 Biogas yang telah dibangun di Provinsi Lampung	230



Tabel 3.94 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi EBT	235
Tabel 3.95 Capaian Indeks Demokrasi Provinsi	237
Tabel 3.96 Indikator IDI Provinsi Lampung tahun 2024	241
Tabel 3.97 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IDI	243
Tabel 3.98 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	244
Tabel 3.99 IPK Nasional dan Provinsi Lampung	245
Tabel 3.100 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IPK	248
Tabel 3.101 Realisasi P-APBD Tahun 2025	249
Tabel 3.102 Efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran tahun 2025	252
Tabel 3.103 Refokusing Provinsi Lampung tahun 2025	254
Tabel 3.104 Tindak Lanjut LHE Provinsi Lampung Tahun 2025	256
Tabel 3.105 Daftar Inovasi Daerah	271



Daftar Grafik

Grafik 3.1 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	41
Grafik 3.2 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	42
Grafik 3.3 TPT Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	43
Grafik 3.4 Pertumbuhan PMTB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	44
Grafik 3.5 Laju inflasi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	47
Grafik 3.6 IPM Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	48
Grafik 3.7 Prevelansi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	49
Grafik 3.8 Prevelansi Stunting Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2024	50
Grafik 3.9 Stunting Provinsi Lampung berdasarkan usia	51
Grafik 3.10 IPA Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	56
Grafik 3.11 IKG Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	58
Grafik 3.12 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	59
Grafik 3.13 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	60
Grafik 3.14 Penurunan GRK Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	61
Grafik 3.15 IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	62
Grafik 3.16 Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	63
Grafik 3.17 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	64
Grafik 3.18 Indeks PP Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	65
Grafik 3.19 IDI Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	72
Grafik 3.20 IKUB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	73
Grafik 3.21 IPK Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	79
Grafik 3.22 IKD Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	80
Grafik 3.23 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	83
Grafik 3.24 Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha (c to c) (%)	86
Grafik 3.25 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran (%)	89
Grafik 3.26 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	89
Grafik 3.27 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2025	92
Grafik 3.28 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	93
Grafik 3.29 IKP Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	95
Grafik 3.30 Desa Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	102



Grafik 3.31 Kemantapan jalan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025.....	112
Grafik 3.32 Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur	126
Grafik 3.33 Angka kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	137
Grafik 3.34 Angka kemiskinan se-Sumatera tahun 2025	137
Grafik 3.35 Pengendalian inflasi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	141
Grafik 3.36 Perkembangan inflasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2025	142
Grafik 3.37 TPT Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	146
Grafik 3.38 TPT menurut Provinsi	147
Grafik 3.39 Grafik distribusi dan perubahan bekerja menurut lapangan usaha	152
Grafik 3.40 Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan kegiatan	153
Grafik 3.41 Persentase penduduk bekerja menurut Pendidikan tertinggi	153
Grafik 3.42 Persentase penduduk bekerja menurut jam kerja	154
Grafik 3.44 Karakteristi pengangguran	155
Grafik 3.45 IMM Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	163
Grafik 3.46 IPM se Sumatera	165
Grafik 3.47 Perkembangan IPM Lampung	165
Grafik 3.48 Perkembangan komponen IPM Lampung	165
Grafik 3.49 Perkembangan dimensi Pendidikan IPM	166
Grafik 3.50 Perkembangan dimensi standar hidup layak	166
Grafik 3.51 IPP Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	169
Grafik 3.52 IPA Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	174
Grafik 3.53 IKG Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	183
Grafik 3.54 IKG se-Sumatera tahun 2025	183
Grafik 3.55 Penurunan IKG Provinsi Lampung 2019-2024	184
Grafik 3.56 Indeks RB Provinsi Lampung tahun 2024-2025	186
Grafik 3.57 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2024.....	194
Grafik 3.58 IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	203
Grafik 3.59 tren IKA Provinsi Lampung	207
Grafik 3.60 IRB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	215
Grafik 3.61 Porsi EBT dalam bauran energi primer Provinsi Lampung 2019-2024	222
Grafik 3.62 Realisasi EBT Provinsi Lampung dengan daerah lain	223
Grafik 3.63 Bauran Energi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	225
Grafik 3.64 IDI Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	237
Grafik 3.65 IPK Provinsi Lampung Tahun 2024-2025	244
Grafik 3.66 IPK Provinsi Lampung berdasarkan komponen	245

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta administrasi Pemerintah Provinsi Lampung	4
Gambar 1.2 Pola hubungan kerja Pemerintah Provinsi Lampung.....	7
Gambar 3.1 Angka Stunting Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024	50
Gambar 3.2 Maladministrasi PP	69
Gambar 3.3 Dokumentasi Aksi Peningkatan PP Provinsi Lampung tahun 2025	69
Gambar 3.4 IKUB Nasioanal tahun 2025	74
Gambar 3.5 Perayaan Imlek Provinsi Lampung tahun 2025	75
Gambar 3.6 Kegiatan toleransi Umat Hindu dan Nasrani pada Bulan Ramadhan	76
Gambar 3.7 Natal Oikumene Lampung 2025	76
Gambar 3.8 PE se-Indonesia Tahun 2025.....	83
Gambar 3.9 PE Lampung Triwulan IV-2025	84
Gambar 3.10 Kepadatan penduduk dan kawasan produktif Lampung.....	114
Gambar 3.11 RTLH Provnisi Lampung tahun 2025	128
Gambar 3,12 Sanitasi oleh PKPCK Provinsi Lampung Tahun 2025	130
Gambar 3,13 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan tahun 2025.....	132
Gambar 3,14 Kegiatan air minum oleh dinas PKPCK tahun 2025	133
Gambar 3.15 Gambar komponen TPT	148
Gambar 3.16 Infografis ketenagakerjaan Provinsi Lampung tahun 2025	150
Gambar 3.17 AKA dan AKAD tahun 2025	157
Gambar 3.18 Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas tahun 2025	158
Gambar 3.19 Penghargaan Ketenagakerjaan	160
Gambar 3.20 Pemulangan tenaga migran	160
Gambar 3.21 IPM Kabupaten/kota Provinsi Lampung 2025	167
Gambar 3.22 Bimtek kepemimpinan perempuan pedesaan	186
Gambar 3.23 Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan	228
Gambar 3.24 pendataan Potensi Biogas	229



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan pengertian SAKIP dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Dimana AKIP tentunya akan dievaluasi guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Komponen yang menjadi kriteria penilaian dalam evaluasi AKIP antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk pencapaian yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi. kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.



Evaluasi AKIP selanjutnya memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable antara lain perencanaan (15%) dan pengukuran kinerja (15%), pelaporan kinerja (10%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (20%) terhadap implementasi SAKIP.

Berdasarkan komponen pelaporan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja wajib menjawab perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan secara berjenjang dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pada dasarnya pada komponen pelaporan kinerja terdapat sub komponen dan kriteria pelaporan yang hendaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggambarkan laporan yang menggambarkan kinerja, dengan kriteria: dokumen disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu.
2. Memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, dengan kriteria: dokumen disusun dengan berkualitas sesuai standar, mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya, dan *benchmark* kinerja. Selain itu, menginfokan efisiensi sumber daya serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, penting sekali suatu instansi pemerintah menyusun laporan kinerja dengan harapan akan membawa perbaikan kinerja dan sebagai langkah awal dalam pengambilan arah kebijakan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40' - 105°50' Bujur Timur dan 6°45' - 3°45' Lintang Selatan. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- ✓ Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- ✓ Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda.
- ✓ Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.
- ✓ Barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

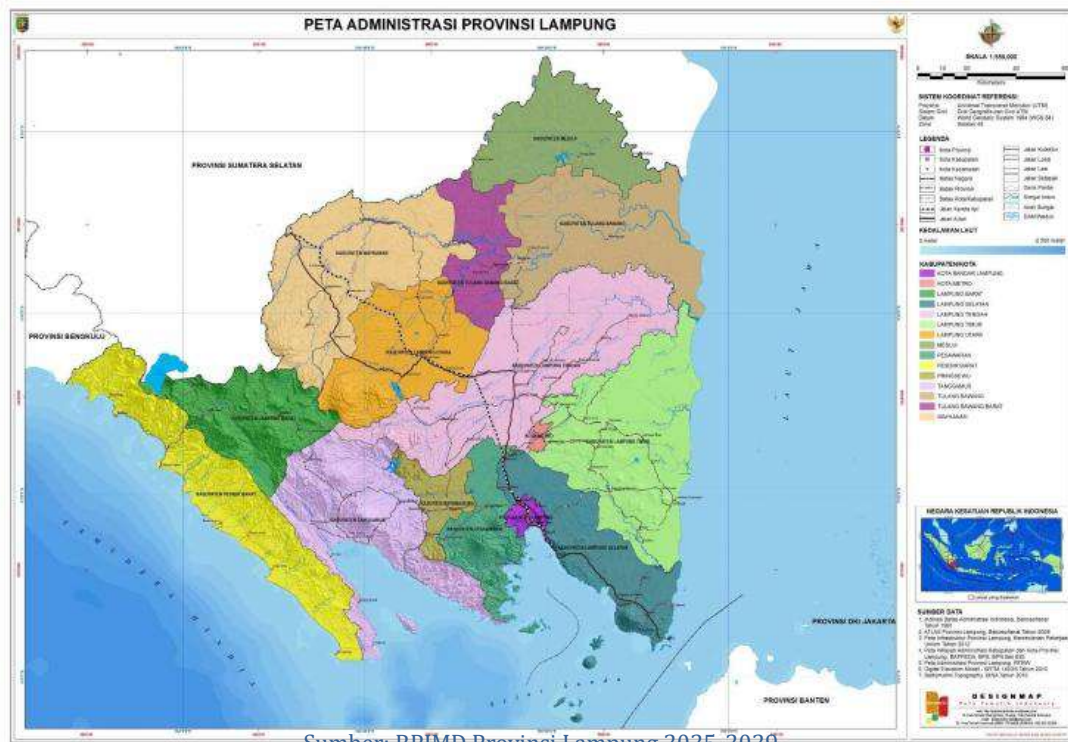
Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 2043, cakupan wilayah Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	1Panaragan	-
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
	Provinsi Lampung	33.570,26		172

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

Dalam menjalankan sistem ke pemerintahannya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepala Daerah

A. Tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;



- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang:

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Kepala Daerah

A. Tugas

- 1) Membantu kepala daerah dalam :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

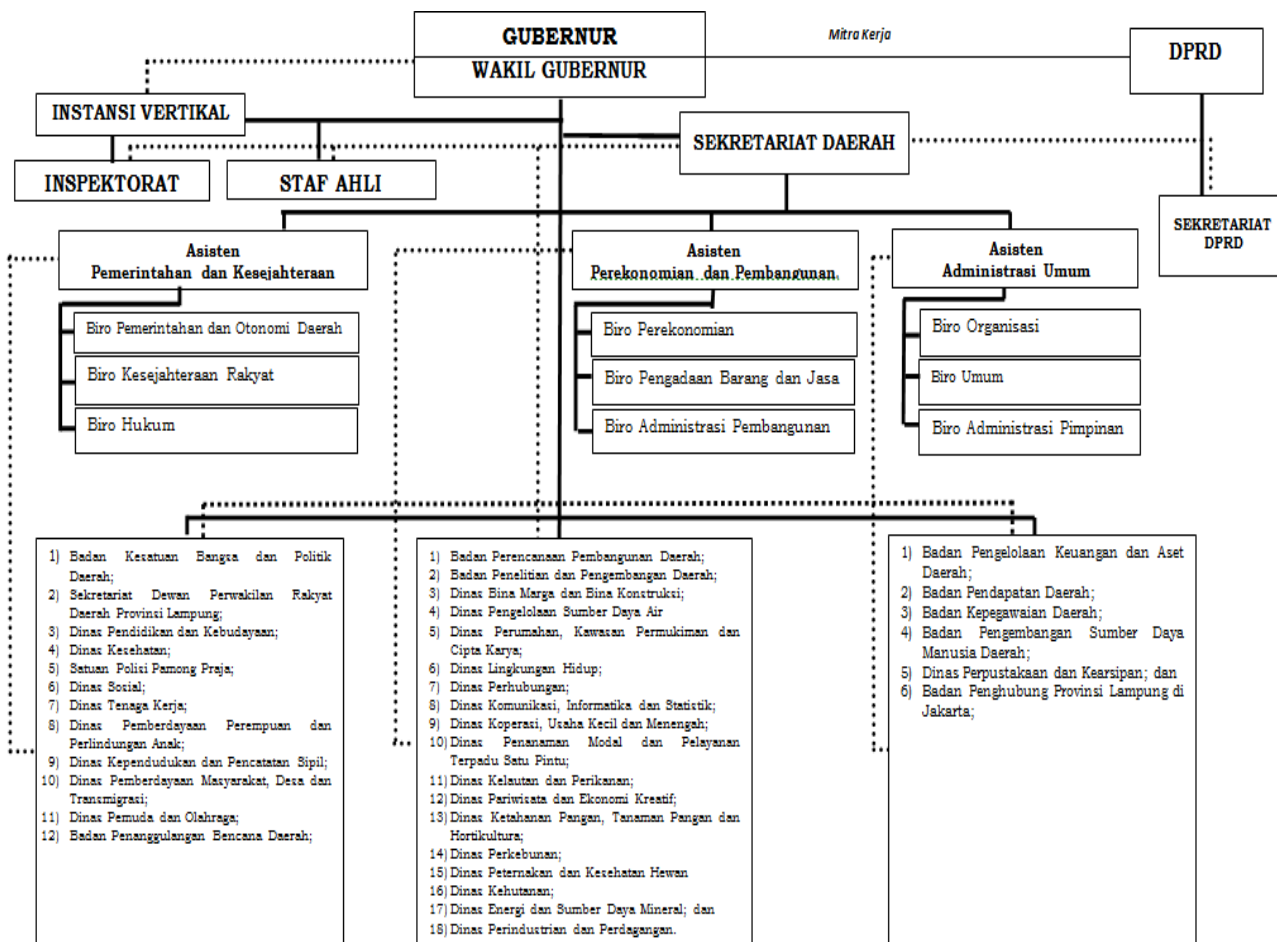
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan kewajiban kepala daerah dan wakilnya maka dibentuklah pola hubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi dimana didalamnya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai visi dan misi. ASN yang dimaksud terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, fungsional serta pelaksana. Berdasarkan rekap data ASN Provinsi Lampung dalam aplikasi Simpedu BKD Provinsi Lampung per tanggal 7 Januari 2026 ASN Provinsi Lampung sejumlah 25.592 pegawai, dengan rincian sebagai berikut: CPNS berjumlah 363 pegawai, PNS berjumlah 12.400 pegawai, PPPK berjumlah 12.829 pegawai.

Dengan terbentuknya pola hubungan kerja dalam perangkat daerah maka secara sistematis akan mencapai visi dan misi dari kepala daerah serta dapat menjawab isu strategis yang ada di daerah tersebut. Pola hubungan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Pola hubungan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

Gambar 1. 2 Pola Hubungan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Lampung di Tengah Gejolak Global melalui Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi. Di tengah peperangan dan ketidakstabilan geopolitik, Provinsi Lampung menghadapi tantangan strategis terkait ketahanan pangan dan energi. Sebagai lumbung pangan dan sentra komoditas ekspor, Lampung rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok. Oleh karena itu, strategi utama adalah diversifikasi pasar ekspor dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah serta mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

- Langkah ini diperkuat dengan upaya untuk memperkuat infrastruktur logistik dan kemitraan internasional agar dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan lemahnya daya ungkit sektor produktif, terutama di pedesaan yang kaya potensi namun belum tergarap maksimal. Ketergantungan pada sektor primer bernilai tambah rendah, minimnya investasi, keterbatasan infrastruktur dan akses pembiayaan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kesenjangan juga tampak dalam sektor pertanian dan perikanan, di mana kebutuhan benih unggul belum terpenuhi akibat data yang tidak akurat, distribusi alat pertanian yang tidak tepat sasaran, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali, yang berdampak pada penurunan produktivitas. Di sektor perikanan, menurunnya produksi akibat penyakit ikan, mahalnya pakan karena bahan impor, dan belum optimalnya distribusi solar bersubsidi memperparah kondisi nelayan kecil.
 3. Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang tercermin dari disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan untuk Provinsi Lampung. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus berjalan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara masyarakat pedesaan, terutama petani dan nelayan, masih berjuang dengan pendapatan yang rendah dan akses terbatas terhadap fasilitas dasar.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas penerimaan dan belanja daerah. Salah satu tantangan utama adalah penetapan target penerimaan pajak daerah yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi riil yang dimiliki. Formulasi penetapan target yang cenderung bersifat inkremental dan belum berbasis pada data wajib pajak yang valid mengakibatkan terjadinya gap antara potensi dan realisasi penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan potensi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat selisih potensi pajak yang cukup signifikan, yakni lebih dari Rp58 miliar, yang hingga kini belum dapat digarap secara optimal.

5. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Lampung menjadi isu yang semakin mendesak, terutama di tengah tingginya dominasi penggunaan energi fosil seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Ketergantungan terhadap sumber energi tersebut tidak hanya melemahkan ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi hambatan dalam percepatan transisi menuju energi bersih. Tantangan utama dalam proses transisi ini meliputi belum memadainya infrastruktur energi, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan energi terbarukan. Selain itu, masih terjadi ketimpangan akses energi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana sejumlah wilayah perdesaan menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik yang andal. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mendorong percepatan pembangunan II - 323 RANPERDA RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029 energi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
6. Belum optimalnya dukungan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang signifikan, utamanya disebabkan oleh belum meratanya pusat-pusat kegiatan ekonomi serta ketimpangan konektivitas antarwilayah.
7. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyerapan tenaga kerja secara optimal. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) akan terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Disisi lain, angka ketergantungan (dependency ratio) cenderung berada pada posisi yang relatif rendah atau dibawah 50 %. Kondisi dominannya penduduk usia produktif dan angka ketergantungan yang relatif rendah ini disebut sebagai Bonus Demografi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama dalam hal produktivitas sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan dukungan agar lebih sehat, terdidik dan berdaya saing.
8. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek dan Inovasi) menjadi katalis strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital secara masif diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Lampung memiliki potensi besar sebagai

daerah inovatif, sebagaimana tercermin dalam penggunaan teknologi tepat guna di desa, tumbuhnya layanan teknologi informasi di wilayah perkotaan, dan berbagai inovasi lokal yang dikembangkan melalui perguruan tinggi serta Badan Penelitian II - 329 RANPERDA RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029 dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Namun, pengembangan ekosistem inovasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan industri, keterbatasan insentif bagi riset yang aplikatif, serta rendahnya tingkat adopsi dan komersialisasi hasil inovasi.

9. Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
10. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung menghadapi tekanan serius terhadap kualitas lingkungan hidup akibat dampak perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 menunjukkan angka 73,11 (kategori baik), capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada kategori sedang (62,97) akibat pencemaran limbah domestik dan pertanian, sementara Indeks Kualitas Lahan menunjukkan angka yang memprihatinkan (38,49), mencerminkan masifnya alih fungsi kawasan lindung dan praktik pemanfaatan tanah yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan, menurunkan produktivitas lahan, serta meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pesisir.
11. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan menekankan pada transparansi, efisiensi, dan integritas. Provinsi Lampung saat ini telah mencapai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,68 dengan kategori "A", sebuah capaian positif yang mencerminkan keberhasilan penguatan kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui Penguatan birokrasi yang berintegritas di Provinsi Lampung.
12. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlintar. Dalam konteks pembangunan daerah, "No One Left Behind" atau "tidak ada satu pun yang tertinggal" menjadi target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development



Goals (SDGs), yang tidak hanya mencerminkan komitmen global, tetapi juga menjadi prinsip moral dan strategi pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial dan inklusivitas di Provinsi Lampung.

1.4 Landasan Hukum

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun 2025;
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Tahun 2025-2026
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025;
20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan perencanaan pada periode RPD 2025-2026 beserta IKU, RPJMD 2025-2029 beserta IKU dengan definisi operasional, RKPD 2025, Perubahan RKPD 2025, PK 2025, Perubahan PK 2025, Keselarasan dokumen SAKIP 2025, Program Unggulan 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

3.1 Standarisasi pengukuran yang digunakan dalam analisis dan evaluasi capaian kinerja;

3.2 Capaian kinerja berdasarkan perodesasi perencanaan:

3.2.1 RPD 2025-2026 dan

3.2.2 RPJMD 2025-2029

Pada sub bab ini capaian kinerja harus menggambarkan perbandingan kinerja antara target dan realisasi tahun berjalan, tahun-tahun sebelumnya, *benchmark* nasional/daerah lain, informasi mendetail (definisi operasional) tentang pencapaian IKU, analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian IKU serta penjabaran inovasi yang mendukung dan factor keberhasilan/kegagalannya.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan IKU pada RPD 2025-2026 dan RPJMD 2025-2029.

3.4 Efektifitas dan efisiensi sumber daya berdasarkan IKU pada RPD 2025-2026 dan RPJMD 2025-2029.

3.5 Prestasi dan penghargaan tahun 2025

3.6 Inovasi Tahun 2025

3.7 Tindak Lanjut LHE Tahun 2025



Bab IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

Pada sub bab ini menggambarkan capaian IKU keseluruhan berdasarkan kategori pengukuran, persentase serapan anggaran, tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya.

4.2 Rekomendasi

Pada sub bab ini menguraikan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan terhadap perbaikan kinerja mendatang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja PPTP dan lainnya yang mendukung laporan kinerja.

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 merupakan rujukan penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2025-2026. Dengan disusunnya dokumen ini, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Terkait penyusunan RPD dan Renstra PD Provinsi Lampung 2025-2026, salah satu yang menjadi perhatian penting adalah agar keberhasilan pembangunan dan kebijakan yang berdampak bagi pemajuan masyarakat Lampung, agar dapat dipertahankan dan menjadi keberlanjutan untuk periode pembangunan selanjutnya. Penyusunan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dijelaskan bahwa terdapat tujuan daerah berjumlah 6 (enam) dengan indikator tujuan sebanyak 8 (delapan) indikator. Tujuan ini dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama. Dimana pada pelaksanaan pembangunan dalam periode 2025-2026 ini memiliki prioritas pada bidang:

- 1) Reformasi Birokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas hidup SDM;
- 3) Pembangunan Infrastruktur;
- 4) Penanggulangan Kemiskinan;
- 5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
- 6) Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis; dan
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 maka penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:



Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan		Ket.
							2025	2026	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.0-5.4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4.9-5.3	5.0-5.4	
		Indeks Gini	0.27-0.29		2. Indeks Gini	0,313	0.28-0.29	0.27-0.29	
				Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	3.8-3.5	3.7-3.4	
				Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	4. Pertumbuhan PMTB	2,38	2.9-5.6	2.1-6.4	
				Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Inflasi	5,51	1.5-3.5	1.5-3.5	
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,97	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	6. IPM	70,45	71,59	71,97	
					7. Prevalensi Stunting	15,2	10,00	9,00	
				Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	8. Indeks Perlindungan Anak	61,61	69,8	70,1	
				Meningkatnya pengarusutamaan gender	9. Indeks Ketimpangan Gender	68,24	69,08	69,36	
3	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9.25-9.75	Menurunkan Angka Kemiskinan	10. Persentase Angka Kemiskinan	11,57	9.5-10	9.25- 9.75	
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tingkat Infrastruktur Wilayah	75,9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11. Tingkat Infrastruktur Wilayah	-	74,9	75,9	
				Meningkatnya Ketahanan Energi	12. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	13.25	
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indek Kualitas Lingkungan Hidup	69,10	69,93	70,35	
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	14. Indeks Resiko bencana	142,55	141,85	141,15	
5	Meningkatkan Penyelenggaraan RB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatkan Penyelenggaraan RB	15. Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	
				Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	16. Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A	
6	Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia	80-83	Memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	17. Indeks Demokrasi Indonesia	80,18	79.26 – 82.61	80-83	
				Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	18. Indeks Kerukunan Umat Bergama	71,07	74,13	75,15	
				Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang berbudaya	19. Indeks Pembangunan kebudayaan	55.71	57.91	59.01	
				Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	20. Indeks kewaspadaan dini	90,89 (2023)	91.89	92.39	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2026.



2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Visi dan Misi Provinsi Lampung dalam perodesasi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Visi Pembangunan Daerah 2025-2029

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

dengan makna sebagai berikut:

- 1) **Bersama:** Kemajuan Pembangunan Daerah adalah keniscayaan, menjadi tujuan, kewajiban sekaligus tantangan. Tidak semata menjadi tugas Pemerintah Daerah, karena tidak akan terwujud hanya mengandalkan kemampuan sepihak. Kebersamaan adalah kunci. Sinergi dan kolaborasi harus dilakukan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan harus dilibatkan. Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi, akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita sekaligus tanggung jawab bersama
- 2) **Lampung Maju:** Lampung mengalami lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman, lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan layanan publik yang ramah. Dalam pencapaian Visi LAMPUNG MAJU dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
- 3) **Indonesia Emas:** menggambarkan posisi Indonesia pada tahun 2045 akan berumur 100 tahun atau 1 abad. Pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera.

B. Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada Visi “**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3. Tiga cita Provinsi Lampung tahun 2025-2029

Cita ke-1	Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
Cita ke-2	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
Cita Ke-3	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Misi/cita dijabarkan melalui 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan yang merupakan rangkaian kerja penjabaran misi selaras dengan strategi pembangunan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Rincian arah kebijakan yang dimaksud pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran	IKU	Ket.
1	Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	
			2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	2. Gini Rasio	
				3. Indeks Ketahanan Pangan	
			3. Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	4. Persentase Desa Mandiri	
			4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	
				6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	
			5. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	
				8. Tingkat Inflasi	
				9. Tingkat Pengangguran Terbuka	

No	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran	IKU	Ket	
2	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia		
			7. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda		
			8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak		
				13. Indeks Ketimpangan Gender		
3	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Mewujudkan Tata Kelola Berintegritas	9. Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi		
		Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	10. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	16. Indeks Resiko Bencana		
		17. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer				
		12. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya.			18. Indeks Demokrasi Provinsi
						19. Indeks Pembangunan Kebudayaan

C. Tujuan, sasaran dan indikator berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan, 8 (delapan) indikator tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran, sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Namun dari penjabaran tersebut yang dipilih menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah 5 (lima) tujuan, 8 (delapan) indikator tujuan, 12 (dua belas) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Berikut ini adalah penjabaran tabel tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3 Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2029	Sasaran	IKU	Base on 2024	Target						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Pertumbuhan Ekonomi	6,8	1. Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,2	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2	
		Gini Rasio	0,271-0,275		2. Gini Rasio	0,301	0,300-0,301	0,274-0,280	0,273-0,279	0,272-0,277	0,271-0,275	0,270-0,275	
		Nilai Tukar Petani	131,50		3. Indeks Ketahanan Pangan	82,58	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	
				2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	4. Persentase Desa Mandiri	14,68 (data idx desa)	21,42	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45	
				3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	78,08	78,00	80,88	82,33	84,75	87,95	91,79	
					6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	25,92	26,21	26,49	26,78	27,07	27,35	27,63	
				5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	10,62	9,50-10,0	8,79-9,9	7,79-8,79	6,79-7,79	5,79-6,69	5,00-5,79	
					8. Tingkat Inflasi	1,5	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
					9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,86-4,0	3,51-3,95	3,4-3,85	3,30-3,80	3,25-3,73	3,10-3,70	
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	6. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,53	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	
				7. Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda	53,17	53,51	53,68	53,85	54,02	54,19	54,36	
				8. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak	64,78	66,22	67,94	69,66	71,38	72,1	74,64	
					13. Indeks Ketimpangan Gender	0,430	0,420	0,411	0,401	0,392	0,387	0,383	



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2029	Sasaran	IKU	Base on 2024	Target						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	87,01 – 88,00	9. Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi	82,34	83,00-84,00	84,01-85,00	85,01-86,00	86,01-87,00	87,01-88,00	88,01-89,00	
4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	72,13	10. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Penurunan Omtensotas Emisi Gas Rumah Kaca	9,15	62,79	64,03	66,73	69,43	72,13	74,17	
					16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	70,99	71,2	71,41	71,63	71,84	72,05	
				11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	17. Indeks Resiko Bencana	130,1	129,97	127,94-128,94	125,91-127,91	123,88-126,88	121,85-125,86	119,82-124,83	
					18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	25,22	36	36,6	37	37,4	37,8	38,2	
5	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	5.1. Indeks Demokrasi Provinsi	81 – 82	12. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	19. Indeks Demokrasi Provinsi	78,32	79-80	80-81	80-81	81-82	81-82	82-83	
		5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	63		20. Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,82	58,5	59,6	60,8	61,9	63	63,5	

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2026.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan definisi operasional yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja Provinsi Lampung. Berikut tabel definisi operasional IKU Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4 IKU Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
1.	Tujuan: Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T : Periode tertentu T-1 : Periode sebelumnya	-
		2. Gini Rasio	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran. $GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi - 1]$ Keterangan : GR =Gini Ratio Fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i	-
	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	2. Indeks Ketahanan Pangan	Rumus Indeks Ketahanan Pangan: $IKP = \sum_{i=1}^n w_i \cdot N_i$ Keterangan: • w_i = bobot dari indikator ke-iii (dapat disetarakan per dimensi atau ditentukan secara empiris) • N_i = nilai ternormalisasi dari indikator ke-i (misalnya dengan skala 0 - 100 atau Z-score) • n = jumlah indikator	Dinas KPTPH, Disbun, Dinas PSDA, Disperindag, DKP
1.3	Sasaran: Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri (berdasarkan indeks desa)	Definisi Persentase Desa Mandiri adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri dari total seluruh desa di suatu wilayah tertentu. Desa mandiri sendiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat baik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara optimal, sesuai dengan yang diukur melalui alat ukur tunggal yang menilai kinerja pembangunan desa secara komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Indeks Desa). Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT. Persentase desa mandiri = $\frac{\sum \text{desa mandiri yang menjadi target}}{\sum \text{total desa di Provinsi Lampung}} \times 100\%$	Dinas PMDT, Diskop UKM, Dinsos, Disdikbud, Dinkes, BMBK, Disparekrif, Bappeda, Disnaker, Disperindag, PKPCK,
1.5	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan dan Energi Berkelanjutan	1. Kemantapan Jalan 2. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Kemantapan Jalan $\text{Kemantapan jalan} = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$ Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar $I = \frac{(a + b + c)}{3}$ Keterangan: I = Tingkat Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar a = Persentase Rumah tidak layak huni yang tertangani b = persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman c = persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi aman	BMBK, Dishub, Bappeda, PKCPK, Disdikbud, Dinkes, Dinas LH, Dinsos

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
1.6.	Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	1. Tingkat kemiskinan	$\text{Tingkat Kemiskinan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Penduduk miskin: Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. <i>Garis Kemiskinan (GK) = GKP - GKNP</i> - Garis Kemiskinan Pangan (GKP): Nilai minimum kebutuhan energi makanan (2100 kkal/orang/hari) dikalikan dengan harga per satuan komoditas. - Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKNP): Nilai kebutuhan dasar non-pangan (perumahan, pendidikan, transportasi, dll).	Bappeda, Dinsos, DPMDT, Disnaker, Disdikbud, Dinkes, Diskop UKM, Dishut, Satpol PP, PPPA, BPBD, BMBK, PKPCK
		2. Tingkat Inflasi	$\text{Inflasi} = \left(\frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: IHK_t = Indeks Harga Konsumen pada bulan/tahun berjalan IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen pada bulan/tahun sebelumnya - Inflasi bisa dihitung dalam: - Inflasi bulanan: perbandingan IHK bulan ini dan bulan lalu - Inflasi tahunan (year-on-year): perbandingan IHK bulan ini dan bulan yang sama tahun lalu - Inflasi tahun kalender (year-to-date): akumulasi inflasi dari Januari hingga bulan berjalan	Disperindag, KPTPH, Diskop UKM, Biro Perekonomian, Dishub
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\text{TPT} = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah Penganggur: Orang yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. - Jumlah Angkatan Kerja: Orang yang bekerja + orang yang menganggur. - Tidak termasuk penduduk bukan angkatan kerja (seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dll).	Disnaker, Diskop UKM, Disperindag, DPMDT, PMPTSP
2.	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) <i>adult survival rate</i> yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:	-

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
2.2.	Sasaran: Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	$IPP = \left(\prod_{i=1}^n D_i^{w_i} \right)^{\frac{1}{\sum w_i}}$ Keterangan: D_i = Nilai indeks dimensi ke-iii (yang sudah ternormalisasi dalam skala 0-100) w_i = Bobot dari dimensi ke-iii n = Jumlah dimensi (lima dimensi utama) - Pendekatan agregasi geometrik digunakan untuk menggabungkan dimensi (menghindari kompensasi berlebihan antar dimensi)	Dispora, Disnaker, Dikop UKM, Disdikbud, Dinkes,
2.4.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	1. Indeks Perlindungan Anak	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ Keterangan: - IPA adalah Indeks Perlindungan Anak W_j adalah Bobot Kluster ke-j K_j adalah nilai indeks kluster ke-j dimana untuk mendapatkan nilai K_j melalui persamaan berikut: $Indeks K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: SX_{ji} adalah nilai indikator i pada Kluster ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator kluster ke-j - Indeks K_j Indeks kluster ke-j	PPPA, Dinsos, Disdikbud, Dinkes
		2. Indeks Ketimpangan Gender	$IKG = 1 - \left[\frac{H^{\frac{1}{3}} \cdot E^{\frac{1}{3}} \cdot L^{\frac{1}{3}}}{H^* \cdot E^* \cdot L^*} \right]$ Keterangan - HHH: dimensi Kesehatan Reproduksi - EEE: dimensi Pemberdayaan - LLL: dimensi Partisipasi Ekonomi H^*, E^*, L^*: nilai ideal dari ketiga dimensi jika tidak ada ketimpangan gender	PPPA, Disdikbud, Disnaker, Dinkes
3.1.	Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan Nilai Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB dengan pertimbangan mengukur sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. $Nilai IRB = \sum_{i=1}^n (Bobot_i \times Nilai_i)$ Keterangan: IRB = Indeks Reformasi Birokrasi	BPKAD, Bappeda, Inspektorat

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PD PENGAMPU
4.1.	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan: IKLH Provinsi: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi IKA: Indeks kualitas air IKU: Indeks kualitas udara IKTL: Indeks kualitas tutupan lahan	DLH, Dinas Kehutanan, DKP
		2. Indeks Resiko Bencana	Risk = Hazard x Vulnerability/Capacity Keterangan: Risiko (risk): potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom. Bahaya/Ancaman (hazard): suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan (vulnerability): suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	E = A x EF Keterangan : E = jumlah emisi A = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi) EF = faktor emisi	Dinas Kehutanan, KPTPH, Perkebunan, DKP, DLH, PKPCK, ESDM, Perindag, Perhubungan, Disnakeswan,
		4. Porsi EBT dalam Bauran Energi primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Provinsi) % : $\text{Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi EBT dalam Provinsi}}{\text{Total Energi Primer dalam Provinsi}}$ $\text{Indeks Dj} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : SX_{ji} adalah nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-j Indeks Dj Indeks dimensi ke-j	ESDM, Dinas LH, Perindag, Disbun,
5.1.	Sasaran: Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	1. Indeks Demokrasi Provinsi	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ Keterangan: IDI: Indeks Demokrasi Indonesia P_i: nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) I(A_i): indeks aspek ke-i (i=1): aspek kebebasan sipil (i=2): hak-hak politik (i=3): lembaga demokrasi	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinsos
		2. Ekspresi Budaya	$D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: D_j = Nilai indeks dimensi ke-j SX_{ij} = Nilai indikator ke-i dalam dimensi ke-j yang telah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator pada dimensi ke-j	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra
			Indikator dalam Dimensi Ekspresi Budaya: • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran dalam rapat selama satu tahun terakhir • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni • Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara ada	

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Januari 2026

2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025

RKPD adalah penjabaran perencanaan RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif anggaran tahun berkenaan. Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahun pertama periode RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 dan RPJPD Tahun 2025 -2045. Berikut matrik RKPD Provinsi Lampung tahun 2025:

Tabel 2.5 RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal 2022	Target 2025		Ket.
				RPD 2025-2026	RKPD 2025	
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4.9-5.3	4,9-5,3	
		2. Indeks Gini	0,313	0.28-0.29	0,28-0,29	
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	3.8-3.5	3,8-3,5	
3.	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	4. Pertumbuhan PMTB	2,38	2,9-5,6	2,9-5,6	
4.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Inflasi	5,51	1.5-3.5	1,5-3,5	
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	6. Indeks Pembangunan Manusia	70,45	71,59	71,59	
		7. Prevalensi Stunting	15,2	10,00	10,00	
6.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	8. Indeks perlindungan anak	61,61	69,8	69,8	
7.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	9. Indeks ketimpangan gender	68,24	69,08	69,08	
8.	Menurunkan Angka Kemiskinan	10. Persentase Angka Kemiskinan	11,57	9.5-10	9,5-10	
9.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	85,62	94,83	74,9	
10.	Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah	12. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	13	
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indeks kualitas lingkungan hidup	69,10	69,93	69,93	
12.	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	14. Indeks resiko bencana	142,55	141,85	141,85	
13.	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	BB	
14.	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	16. Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	
15.	Memantapkan Kehidupan Masyarakat Lampung yang religius, Aman, Berbudaya dan Demokratis	17. Indeks Demokrasi Indonesia	80,18	79.26 - 82.61	79,26- 82,61	
16.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	18. Indeks Kerukunan Umat Beragama	71,07	74,13	74,13	
17.	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang Berbudaya	19. Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,71	57.91	57,91	
18.	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	20. Indeks Kewaspadaan Dini	90,89	91.89	91,89	

Sumber: RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, Januari 2026.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 terdapat 18 sasaran dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kondisi awal tahun 2022.

2.4 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD 2025)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025 maka Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan arah kebijakan daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD 2025 - 2029, yaitu:

Tabel 2.6 Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2024	Target 2025		Ket.
				RPJMD 2025-2029	P-RKPD 2025	
1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,2	5,2-5,5	
		2. Gini Rasio	0,301	0,300-0,301	0,300-0,295	
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	3. Indeks Ketahanan Pangan	82,58	83,07	83,07	
3		4. Persentase Desa Mandiri	14,68 (data idx desa)	21,42	23,67	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	78,08	78,00	78,29	
		6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	25,92	26,21	20,17	
5	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	10,62	9,50-10,0	10-9,5	
		8. Tingkat Inflasi	1,5	2,5±1	2,5±1	
		9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,86-4,0	4-3,86	
6.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,53	0,55	0,53	
7	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda	53,1	53,51	57,00	
8	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak	64,78	66,22	66,22	
		13. Indeks Ketimpangan Gender	0,430	0,420	0,422	
9	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi	82,34	83,00-84,00	83,5	
10	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Penurunan Omtemsotas Emisi Gas Rumah Kaca	9,15	62,79	79,5	
		16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	70,99	70,99	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	17. Indeks Resiko Bencana	130,1	129,97	129,97	
		18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	25,22	36	36	
12	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	19. Indeks Demokrasi Provinsi	78,32	79-80	79,5	
		20. Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,82	58,5	37,31	

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, Januari 2026.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 terdapat 12 sasaran dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kondisi awal tahun 2024.

2.5 Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan dan sasaran pembangunan Lampung Tahun 2025-2026 sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Selanjutnya perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025. Matrik sasaran strategis dan IKU tahun 2025 dalam PK dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 PK Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,3
		2. Indeks Gini	0,28–0,29
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8-3,5
3.	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	4. Pertumbuhan PMTB	2,9 – 5,6
4.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Inflasi	1,5 – 3,5
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	6. Indeks Pembangunan Manusia	71,59
		7. Prevalensi Stunting	10,00
6.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	8. Indeks perlindungan anak	69,8
7.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	9. Indeks ketimpangan gender	69,08
8.	Menurunkan Angka Kemiskinan	10. Persentase Angka Kemiskinan	9,5 – 10
9.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	74,9
10.	Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah	12. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indek kualitas lingkungan hidup	69,93
12.	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	14. Indeks resiko bencana	141,85
13.	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
14.	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	16. Indeks Pelayanan Publik	A-
15.	Memantapkan Kehidupan Masyarakat Lampung yang religius, Aman, Berbudaya dan Demokratis	17. Indeks Demokrasi Indonesia	79,26-82,61
16.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	18. Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,13
17.	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang Berbudaya	19. Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,91
18.	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	20. Indeks Kewaspadaan Dini	91,89

Sumber : Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung 2025, Januari 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung, maka telah ditetapkan bahwa terdapat 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang akan dicapai di tahun 2025.



Tabel 2.8 Anggaran PK Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	IKU	Pagu APBD	
1.	Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rp.	225.707.536.730,31
2	Inflasi	Rp.	1.417.515.000,00
3	Indeks Gini	Rp.	21.116.249.353,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp.	74.350.470.824,60
5	Pertumbuhan PMTB	Rp.	43.669.611.267,65
6	Indeks Pembangunan Manusia	Rp.	15.384.452.626,80
7	Prevalensi Stunting	Rp.	776.166.300,00
8	Indeks Perlindungan Anak	Rp.	1.182.779.999.033,37
9	Indeks Ketimpangan Gender	Rp.	80.045.353.035,85
10	Persentase Angka Kemiskinan	Rp.	22.011.792.408,40
11	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Rp.	2.478.744.028.067,52
12	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca	Rp.	55.101.546.015,57
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	181.627.252.590,38
14	Indeks Resiko Bencana	Rp.	1.000.000.000,00
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp.	11.941.616.000,00
16	Indeks Pelayanan Publik	Rp.	419.000.000,00
17	Indeks Demokrasi Indonesia	Rp.	2.905.336.667.952,15
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rp.	149.940.853.187,00
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rp.	155.460.967.685,90
20	Indeks Kewaspadaan Dini	Rp.	26.078.639.769,78
Total		Rp.	7.632.909.717.848,28

Sumber : Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2026

Pagu APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.7.632.909.717.848,28 (Tujuh triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Provinsi Lampung Tahun 2025

P-PK adalah dokumen penyesuaian terhadap perjanjian kinerja sebelumnya. Dokumen ini disusun karena adanya perubahan target, anggaran serta pejabat/pimpinan yang bertanggungjawab atas jabatan tertentu. Dokumen ini memberikan gambaran atas target kinerja dari sasaran strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Lampung mengacu RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Tabel 2.9 Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Visi : BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS			
Misi 1 : Mendorong Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif			
1.	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,2
		2. Gini Rasio	0,300 – 0,301
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	3. Indeks Ketahanan Pangan	83,07
3.	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	4. Persentase Desa Mandiri	21,42
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	78
		6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	26,21
5.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	9,5 – 10,0
		8. Tingkat Inflasi	2,5 ± 1
		9. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86 – 4,0
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif			
6.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,55
7.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda	53,51
8.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak	66,22
		13. Indeks Ketimpangan Gender	0,420
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, Dan Lingkungan Berkelanjutan Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Berintegritas			
9.	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi	83,00 – 84,00
10.	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	62,79
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99
		17. Indeks Resiko Bencana	129,97
		18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	36
12.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	19. Indeks Demokrasi Provinsi	79 – 80
		20. Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,5

Sumber : PK Provinsi Lampung Tahun 2025, Januari 2026.

Sasaran strategis Provinsi Lampung Tahun 2025 terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.10 Anggaran Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Pagu APBD
1	Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 262.668.005.475,52
2	Gini Rasio	Rp. 991.889.278.857,37
3	Tingkat Kemiskinan	
4	Indeks Ketahanan Pangan	Rp. 246.156.511.020,55
5	Persentase Desa Mandiri	Rp. 38.107.903.814,17
6	Kemantapan Jalan	Rp. 1.051.591.016.568,84
7	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Rp. 434.670.511.793,85
8	Tingkat Inflasi	Rp. 3.445.330.020,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp. 38.588.824.684,00
10	Indeks Modal Manusia	Rp. 2.102.620.015.116,25
11	Indeks Pembangunan Pemuda	Rp. 71.236.451.772,52
12	Indeks Perlindungan Anak	Rp. 1.514.498.200,00
13	Indeks Ketimpangan Gender	Rp. 1 1.557.838.316,00
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 2.290.211.350.657,12
15	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Rp. 63.223.885.508,00
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 15.994.410.395,44
17	Indeks Resiko Bencana	Rp. 53.740.065.754,00
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Rp. 18.630.015.381,10
19	Indeks Demokrasi Provinsi	Rp. 78.368.071.198,01
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rp. 7.483.779.820,00
	Total	Rp. 7.781.697.764.370,32

Sumber : Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2026.

Dalam mencapai IKU di atas, total pagu anggaran belanja bersumber dari Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.7.781.697.764.370,32 (Tujuh triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).**

2.7 Keselarasan target dokumen SAKIP 2025

Berdasarkan data pada dokumen perencanaan di atas maka dapat dilihat keselarasan antar target pada masing-masing dokumen yang menjadi acuan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja akhir tahun berdasarkan perodesasinya. Berikut ini keselarasan target IKU berdasarkan perodesasi:

A. Keselarasan target IKU Provinsi Lampung pada dokumen RPD 2025-2026, RKPD 2025 dan PK 2025 dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.11 Keselarasan Target IKU Provinsi Lampung pada RPD 2025-2026, RKPD 2025, dan PK 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target			Ket.
				RPD 2025-2026	RKPD 2025	PK 2025	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4.9-5.3	4,9-5,3	4,9 – 5,3	Sesuai
		2. Indeks Gini	0,313	0.28-0.29	0,28-0,29	0,28-0,29	Sesuai
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	3. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	3.8-3.5	3,8-3,5	3,8-3,5	Sesuai
3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	4. Pertumbuhan PMTB	2,38	2.9-5.6	2,9-5,6	2,9 – 5,6	Sesuai
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Inflasi	5,51	1.5-3.5	1,5-3,5	1,5 – 3,5	Sesuai
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	6. IPM	70,45	71,59	71,59	71,59	Sesuai
		7. Prevalensi Stunting	15,2	10,00	10,00	10,00	Sesuai
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	8. Indeks Perlindungan Anak	61,61	69,8	69,8	69,8	Sesuai
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender	9. Indeks Ketimpangan Gender	68,24	69,08	69,08	69,08	Sesuai
8	Menurunkan Angka Kemiskinan	10. Persentase Angka Kemiskinan	11,57	9.5-10	9,5-10	9,5 – 10	Sesuai
9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11. Tingkat Infrastruktur Wilayah	-	94,83	74,9	74,9	Sesuai
10	Meningkatnya Ketahanan Energi	12. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	13	13	Sesuai
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,10	69,93	69,93	69,93	Sesuai
12	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	14. Indeks Resiko bencana	142,55	141,85	141,85	141,85	Sesuai
13	Meningkatkan Penyelenggaraan RB	15. Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	BB	Sesuai
14	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	16. Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-	Sesuai
15	Memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	17. Indeks Demokrasi Indonesia	80,18	79.26 – 82.61	79,26-82,61	79,26-82,61	Sesuai
16	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	18. Indeks Kerukunan Umat Bergama	71,07	74,13	74,13	74,13	Sesuai
17	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang berbudaya	19. Indeks Pembangunan kebudayaan	55.71	57.91	57,91	57,91	Sesuai
18	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	20. Indeks kewaspadaan dini	90,89 (2023)	91.89	91,89	91,89	Sesuai

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2026.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa 20 (dua puluh) IKU telah sesuai dalam penetapan target dalam RPD 2025-2026, RKPD 2025, dan PK 2025.

B. Keselarasan target IKU Provinsi Lampung pada RPJMD 2025-2029, P-RKPD 2025 dan P-PK 2025 dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.12 Keselarasan Target IKU Provinsi Lampung pada RPJMD 2025-2029, P-RKPD 2025, dan P-PK 2025

No	Sasaran	IKU	Base on 2024	Target 2025			Ket.
				RPJMD 2025-2029	P-RKPD	P-PK 2025	
1	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,2	5,2-5,5	5,2	Sesuai
		2. Gini Rasio	0,301	0,300-0,301	0,300-0,295	0,300-0,295	Perubahan
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	3. Indeks Ketahanan Pangan	82,58	83,07	83,07	83,07	Sesuai
3	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	4. Persentase Desa Mandiri	14,68 (data idx desa)	21,42	21,42	21,42	Sesuai
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	5. Kemantapan Jalan	78,08	78,00	78,29	78,29	Perubahan
		6. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	25,92	26,21	20,17	26,21	Sesuai
5	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	7. Tingkat Kemiskinan	10,62	9,50-10,0	10-9,5	9,5 – 10,0	Sesuai
		8. Tingkat Inflasi	1,5	2,5±1	2,5±1	2,5 ± 1	Sesuai
		9. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,86-4,0	4-3,86	3,86 – 4,0	Sesuai
6.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,53	0,55	0,53	0,55	Perubahan
7	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	11. Indeks Pembangunan Pemuda	53,17	53,51	53,51	53,51	Sesuai
8	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	12. Indeks Perlindungan Anak	64,78	66,22	66,22	66,22	Sesuai
		13. Indeks Ketimpangan Gender	0,430	0,420	0,422	0,420	Sesuai
9	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	14. Indeks Reformasi Birokrasi	82,34	83,00-84,00	83,5	83,5	Sesuai
10	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	15. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	60,64	62,79	79,5	62,79	Perubahan
		16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	70,99	70,99	70,99	Sesuai
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	17. Indeks Resiko Bencana	130,1	129,97	129,97	129,97	Sesuai
		18. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	25,22	36	36	36	Sesuai
12	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	19. Indeks Demokrasi Provinsi	78,32	79-80	79,5	79,5	Sesuai
		20. Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,82	58,5	37,31	58,5	Perubahan

Sumber: Data olahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2026

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyusunan P-PK Provinsi Lampung tahun 2025 telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan dokumen P-RKPD Provinsi Lampung tahun 2025.
2. Terdapat 6 (enam) IKU yang mengalami perubahan target. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap capaian tahun lalu dan faktor lainnya seperti perubahan metode perhitungan.
3. Terdapat 14 (empat belas) IKU yang memiliki keselarasan antar dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029, P-RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dan P-PK Provinsi Lampung tahun 2025.

2.8 Program Unggulan 2025

Program unggulan dalam mewujudkan visi dan misi berasal dari 3 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 3 program prioritas berdasarkan visi dan misi Gubernur serta kebijakan prioritas sesuai permasalahan utama Pembangunan yaitu Program Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan kemantapan jalan desa serta program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. Tujuh program unggulan tersebut, didukung oleh program perangkat daerah dan diturunkan ke Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program unggulan yang dimaksud adalah:

- a. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Langkah awal menuju Lampung Maju untuk mencapai Indonesia Emas harus diwujudkan dengan 3 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Program Terbaik Cepat (PHTC) terdiri dari:
 1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes/ Koperasi
 2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan
 3. Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal

b. Program Unggulan

Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan yang merupakan program yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Program Unggulan tersebut adalah:

1. Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi
3. Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional
4. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan
5. Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar local
6. Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan
7. Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan kemantapan jalan di desa

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi daerah ataupun organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban menjawab perjanjian kinerja dalam laporan tersebut sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan PemenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan kesimpulan capaian kinerja, Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
3	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
4	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
5	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
6	Kurang dari 50 %	Kurang

Sumber: Permenpan 88/21, Januari 2026.

Pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 terbagi menjadi 2 periodisasi. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode RPD sekaligus tahun awal dalam masa jabatan gubernur terpilih sehingga terdapat

perubahan sasaran strategis serta indikator. Sehingga pengukuran yang dilaksanakan mengacu pada PK Provinsi Lampung 2025 dan perubahannya.

Metode pengukuran yang menjadi dasar dalam dokumen ini mengacu pada peraturan yang berlaku, dimana capaian kinerja didapat berdasarkan perhitungan antara Target (T) dan Realisasi (R) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun berjalan ($T : R \text{ tahun } n = T : R \text{ tahun } 2025$);
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya ($R \text{ tahun } n : R \text{ Tahun } n-1 = R 2025 : R 2024$);
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun akhir perencanaan ($R \text{ tahun } 2025 : T \text{ tahun } 2026$ untuk RPD 2025-2026, dan 2029 untuk RPJMD 2025-2029 = $R 2025 : T 2026$ atau $R 2025 : T 2029$);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi nasional/daerah lain ($R 2025 : R \text{ nasional/daerah lain}$);
5. Menggunakan nilai absolut pada target yang menggunakan range nilai dengan perhitungan:
 - a. mengambil nilai dasar atas range sebagai pembagi/penyebut dari target kinerja apabila realisasi kinerja mencapai $>90,01\%$ dari target.
 - b. mengambil nilai tengah range sebagai pembagi/penyebut dari target kinerja apabila realisasi kinerja mencapai $50,01\%-90\%$ dari target;
 - c. mengambil nilai dasar bawah range sebagai pembagi/penyebut dari target kinerja apabila realisasi kinerja mencapai $\leq 50\%$ dari range.

Berikut ini adalah capaian IKU Provinsi Lampung tahun 2025 berdasarkan 2 dokumen perencanaan, yaitu RPD dan RPJMD Provinsi Lampung:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Lampung 2025-2026:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	target, realisasi, dan % capaian							Ket.
				Target PK 2025	Realisasi 2025	%	Target Akhir RPD 2026	%	Realisasi nas	%	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan	21. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,57	4.9-5.3	5,28	107,75	5.0-5.4	97,7	5,11	103,32	BPS
		22. Indeks Gini	0,301	0.28-0.29	0,287	100,01	0.27-0.29	100,00%	0,363	126,4	BPS
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	23. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3.8-3.5	4,21	90,26%	3.7-3.4	87,89%	4,85	115,20	BPS
3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	24. Pertumbuhan PMTB	1,78	2,9-5,6	5,28	94,2	2,1-6,4	82,5	5,09	103,73	BPS
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	25. Inflasi	5,51	1.5-3.5	1,25	83,33%	1.5-3.5	83,3	2,92	83,3	BPS
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	26. IPM	73,13	71,59	73,98	103,39	71,97	102,79%	75,90%	97,47%	BPS
		27. Prevalensi Stunting	15,9	10	15,9	62,89	9	56,60	19,8	124,5	BPS
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	28. Indeks Perlindungan Anak	64,78	69,8	71,58	102,55	70,1	102,11	71,02	100,78	Kemen PPPA
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender	29. Indeks Ketimpangan Gender	0,399	0,453- 0,454	0,399	113,53	0,452- 0,453	113,28	0,421	105,51	Kemen PPPA
8	Menurunkan Angka Kemiskinan	30. Persentase Angka Kemiskinan	10,62	9.5-10	9,66	101,68%	9.25- 9.75	101,68	8,25	85,40	BPS
9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	31. Tingkat Infrastruktur Wilayah	88,34	74,9	88,34	117,94	75,9	116,38	-	-	BAPPEDA
10	Meningkatnya Ketahanan Energi	32. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,84	13	16,3 (34,551,502.5 juta ton CO ₂ e)	125,38%	13.25	123,01%	165,31 juta ton CO ₂ e	20,6	BAPPENAS (angka sementara 2025)
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	33. Indek Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	69,93	73,81	105,55	70,35	104,92	78,76	93,71	Kemen LH
12	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	34. Indeks Resiko bencana	130,1	141,85	124,59	113,85	141,15	113,29	131,05	105,18	BNPB
13	Meningkatkan Penyelenggaraan RB	35. Indeks Reformasi Birokrasi	A (82,34)	BB (70-80)	A (82,52)	103,15	BB (70-80)	103,15	71,55	115,33	Kemen PANRB (sementara)
14	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	36. Indeks Pelayanan Publik	A- (4,27)	A-	A- (4,19)	104,48	A (4,51-5,0)	92,90	A-(4,01)	104,48	Kemen PANRB
15	Memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis	37. Indeks Demokrasi Indonesia	72,62	79.26 – 82.61	72,62	91,62	80-83	90,78	78,50	92,50	BPS
16	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,04	74,13	80,39	108,44	75,15	106,97	77,89	102,71	Kemennag
17	Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang berbudaya	39. Indeks Pembangunan kebudayaan	60,97	57.91	60,97	105,28	59.01	103,32	59,98	101,23	Kemendik budristek
18	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	40. Indeks kewaspadaan dini	84,44	91.89	84,44	91,89	92.39	91,39	-	-	2023



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	kondisi awal 2024	Target, realisasi dan % capaian kinerja							Ket.
			Target P-PK 2025	Realisasi 2025	%	Target akhir 2029	%	nas	%	
13. Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	21. Pertumbuhan Ekonomi	4,57	5,2	5,28	107,75	6,8	77,64	5,11	103,32	BPS
	22. Gini Rasio	0,301	0,300-0,295	0,287	103,78	0,271-0,275	95,81	0,363	126,64	BPS
14. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	23. Indeks Ketahanan Pangan	82,58	83,07	86,95 (9 indk) 73,05 (12 indk)	104,67	85,11	103,16	68,87	106,06	BPB
15. Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	24. Persentase Desa Mandiri	14,68 (data idx desa)	21,42	22,89	106,86	25,22	90,76	24,5	93,43	Kemendes
16. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pembangunan	25. Kemantapan Jalan	78,08	78,29	79,79	101,92	87,95	90,72	92,32	86,42	BMBK
	26. Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	25,92	26,21	26,82	102,35	27,35	98,06	-	-	PKPCK
17. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	27. Tingkat Kemiskinan	10,62	9,5-10,0	9,66	101,68	5,79-6,69	69,25	8,25	85,71	BPS
	28. Tingkat Inflasi	1,5	2,5 ± 1	1,25	83,33	2,5±1	83,33	2,92	83,3	BPS
	29. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,86 - 4,0	4,21	95,01	3,25-3,73	88,6	4,85	115,20	BPS
18. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	30. Indeks Modal Manusia	IMM: 0,53 IPM: 73,13	IMM: 0,55 IPM: 71,59	IMM: - IPM: 73,98	103,33	0,58	-	IMM: - IPM: 75,90	IPM: 97,4	BAPPEDA
19. Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	31. Indeks Pembangunan Pemuda	55,67	57,00	55,67	103,33	54,19	85,64	58,33	95,43	Kemenpora
20. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	32. Indeks Perlindungan Anak	64,78	66,22	71,58	108,1	72,1	99,28	71,02	100,78	Kemen PPPA
	33. Indeks Ketimpangan Gender	0,399	0,42	0,399	105,76	0,387	96,99	0,421	105,51	Kemen PPPA
21. Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	34. Indeks Reformasi Birokrasi	82,34	83,5	82,52	98,83	87,01-88,00	94,83	71,55	111,81	KemenPANRB (angka sementara)
22. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berkatahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	35. Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	60,64	62,79	60,64 (34,551,502.5 juta ton CO2e)	96,57	72,13	84,07	165,31 juta ton CO2e	20,6	BAPPEDA
	36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,11	70,99	73,81	103,91	71,84	103,74	78,76	93,71	Kemen LH
23. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	37. Indeks Resiko Bencana	130,1	129,97	124,59	104,31	121,85-125,86	96,83	131,05	105,18	BNPB
	38. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	25,22	36	36,32	100,89	37,8	96,08	14,7	247,07	ESDM
24. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	39. Indeks Demokrasi Provinsi	72,62	79,5	72,62	91,34	81-82	96,54	78,5	92,50	BPS
	40. Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,97	58,5	60,97	104,2	63	96,78	59,98	101,65	Kemendikbudristek (2023)

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mencapai sasaran strategis dalam dokumen RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 telah ditetapkan 20 (dua puluh) IKU. Realisasi 20 IKU yang dimaksud terhitung berdasarkan formulasi yang telah dibahas pada BAB II dan bersumber dari berbagai pihak yang mempublikasikan data rilis. Berikut ini adalah perincian capaian kinerja Provinsi Lampung berdasarkan kategori kinerja:
 - a. Terdapat 18 (delapan belas) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Sangat Memuaskan;
 - b. Terdapat 1 (satu) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Memuaskan;
 - c. Terdapat 1 (satu) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Baik.
2. Dalam mencapai sasaran strategis dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 telah ditetapkan 20 (dua puluh) IKU. Realisasi 20 IKU yang dimaksud terhitung berdasarkan formulasi yang telah dibahas pada BAB II dan bersumber dari berbagai pihak yang mempublikasikan data rilis. Berikut ini adalah perincian capaian kinerja Provinsi Lampung berdasarkan kategori kinerja:
 - a. Terdapat 19 (sembilan belas) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja **Sangat Memuaskan**, dan
 - b. Terdapat 1 (satu) IKU dengan Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja kategori **Memuaskan**.
3. Terdapat beberapa IKU yang masih menggunakan data rilis tahun sebelumnya, hal ini karena data rilis kinerja tahun 2025 belum dipublikasikan.
4. Terdapat 2 (dua) IKU yang menggunakan metode hitung konversi, yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Indeks Pembangunan Pemuda karena adanya perubahan metode hitung dari evaluator pusat yang merilis nilai indeks.
5. Pada IKU IMM menggunakan data capaian kinerja IPM karena data capaian IMM belum dirilis. Namun komponen dari IMM menyerupai dengan IPM.

3.2 Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini akan dijabarkan capaian kinerja Provinsi Lampung berdasarkan periodisasi perencanaan yang dimaksud.

A. Capaian kinerja berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

1. IKU Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi					
Sasaran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan				
IKU	Pertumbuhan Ekonomi				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	4,57	-	-
2	2025	4,9-5,3	5,28	107,75	-
3	2026	5,0-5,4	-	97,7	-
4	Nas	-	5,11	103,32	-

Grifik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2024	4,57
2025	5,28
2026 (Nas)	5,11

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan memiliki indikator dengan realisasi kinerja sebesar 5,28 dari target sebesar 4,9-5,3 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **107,75%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 4,57. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,71%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 97,7%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka kinerja lebih tinggi 0,17% dengan capaian 103,32%.

Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 83-90.

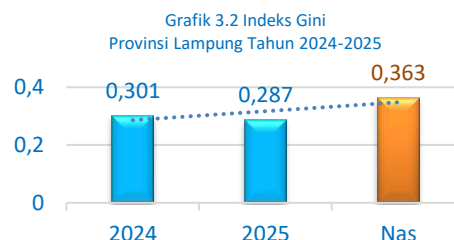
2. Indeks Gini

Tabel 3.5 Capaian Indeks Gini					
Sasaran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan				
IKU	Indeks Gini				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	0,301		-
2	2025	0,28-0,29	0,287	100,01	-
3	2026	0,27-0,29	-	100	-
4	Nas	-	0,363	126,4	-

Grafik 3.2 Indeks Gini
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks Gini
2024	0,301
2025	0,287
Nas	0,363

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan memiliki indikator indeks gini dengan realisasi kinerja sebesar 0,287 dari target sebesar 0,28-0,29 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100,01%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 0,313. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya, realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Hal ini menggambarkan ketimpangan lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian saat ini masih relevan dengan target 2026 karena target pada IKU ini bersifat range.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka kinerja 2025 lebih tinggi 0,076% dengan capaian 126,4%.

Indikator indeks gini merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 91-94.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.6 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja				
IKU	Tingkat Pengangguran Terbuka				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	4,19	-	-
2	2025	3,8-3,5	4,21	90,26	-
3	2026	3,7-3,4	-	87,89	-
4	Nas	-	4,85	115,20	-

5

4,5

4

3,5

4,19

4,21

4,85

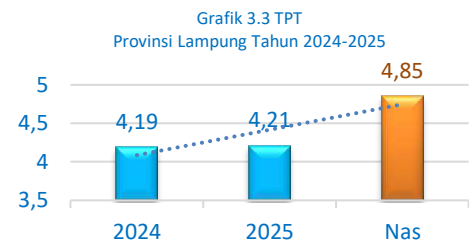
2024

2025

Nas

Grafik 3.3 TPT
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026



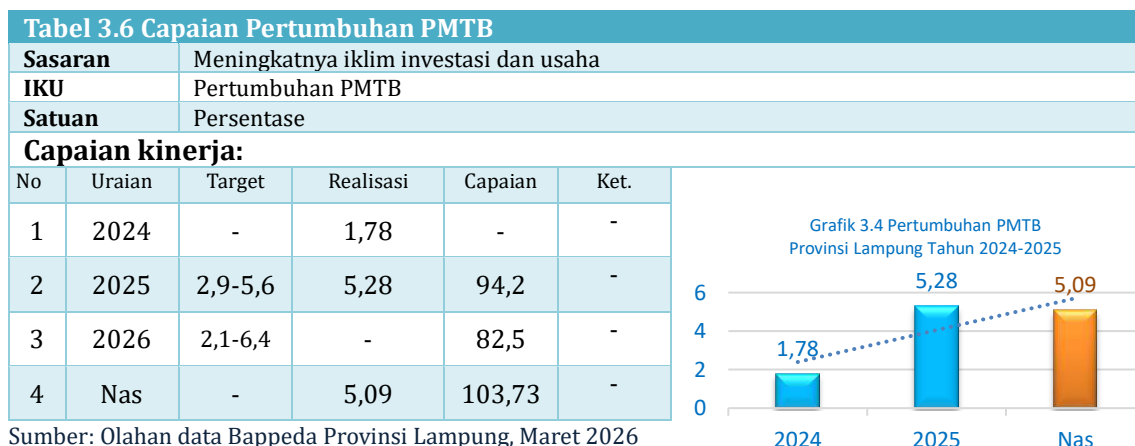
Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka indikator yang menjadi tolak ukur adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan realisasi kinerja sebesar 4,21% dari target kinerja 3,8%-3,5% yang direncanakan dalam PK Provinsi Lampung Tahun 2025 dan capaian kinerja sebesar **90,26%**. Kategori kinerja **sangat memuaskan**. Realisasi ini menggambarkan bahwa semakin kecil angka TPT maka semakin baik dan Provinsi Lampung belum dapat menjangkau range target angka TPT.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 4,19. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya maka kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,02%. Hal ini menggambarkan pengangguran Provinsi Lampung meningkat.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 87,88%.
4. Realisasi Kinerja 2025 sebesar 4,21% apabila dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 4,85% maka capaian TPT Provinsi Lampung lebih tinggi 0,64% dari nasional sehingga capaian kinerja mencapai 115,20%. Dengan metode perhitungan TPT yang menggambarkan semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin baik, maka Provinsi Lampung memiliki pengangguran lebih rendah dari nasional.

Indikator tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029

dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 146-162.

4. Pertumbuhan PMTB



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya iklim investasi dan usaha memiliki indikator pertumbuhan PMTB dengan realisasi kinerja sebesar 5,28% dari target sebesar 2,9-5,6 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **94,2%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 1,78%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 3,5%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 82,5%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,32% poin dengan capaian 103,73%.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen PDRB dari sisi pengeluaran yang mencerminkan aktivitas investasi fisik dalam suatu perekonomian. PMTB mencakup pengadaan barang modal yang mempunyai umur pakai lebih dari satu tahun, seperti bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, CBR, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Secara teori, PMTB berperan penting sebagai penggerak kapasitas produksi jangka menengah dan panjang, karena investasi hari ini akan menentukan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Tabel 3.8 PDRB Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,84	4,94	62,35	63,19	62,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,59	11,91	4,73	1,72	1,82	1,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,01	4,85	-0,13	6,60	6,57	6,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,14	1,78	5,28	32,33	31,09	30,99
5. Perubahan Inventori	-	-	-	0,25	-0,24	0,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,84	11,94	7,20	51,80	55,71	55,49
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6,13	9,93	7,05	55,05	58,14	57,49
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,55	4,57	5,28	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Maret 2026

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,20 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,28 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,73 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB) tumbuh sebesar 7,05 persen.

Tabel 3.9 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Pertumbuhan PMTB

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Adanya factor eksternal seperti factor alam yang berpengaruh terhadap perkebunan, pertanian, dan sektor lainnya yang menjadi bahan industry dan terpengaruh karena adanya factor eksternal.	Adanya kolaborasi crosscutting dalam upaya peningkatan LPE Provinsi Lampung baik dalam lingkup internal maupun lintas sectoral secara langsung terhadap pertumbuhan PMTB.	Meminimalisirkan resiko terhadap kinerja dengan mensosialisasikan dan menerapkan manajemen resiko kepada para petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha agar aktifitas produksi, perdagangan tidak terlalu berpengaruh terhadap factor eksternal serta meningkatkan investasi dan motivasi kinerja industri.	Forum investasi dan promosi dalam Lampung economic and investment forum.
	Pemanfaatan IT dalam mempermudah pekerjaan dan memperluas jangkauan tersebarnya data informasi terkait sub sektor peningkatan PMTB		Program pemprov lampung “Ngopi pagi sinergi pelaku usaha” membuka peluang agar terciptanya sinergitas dalam usaha, modal, industry dan hilirasi daerah.
	Adanya komitmen pimpinan dalam implementasi langkah kebijakan yang mendukung peningkatan PMTB seperti stimulus fiscal peerintah, pembangunan desa.		Bantuan peralatan dalam pengadaan alat mesin pertanian sehingga meningkatkan hasil pertanian dan industry.

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

5. Inflasi

Tabel 3.10 Capaian Pengendalian Inflasi

Sasaran	Meningkatnya daya beli masyarakat				
IKU	Inflasi				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	5,51	-	-
2	2025	1,5-3,5	1,25	83,3	-
3	2026	1,5-3,5	-	83,3	-
4	Nas	-	2,92	83,3	-

Grafik 3.5 Laju Inflasi
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Laju Inflasi (%)
2024	5,51
2025	1,25
2026	2,92

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya daya beli masyarakat memiliki indikator tingkat inflasi dengan realisasi kinerja sebesar 1,25% dari target sebesar 1,5-3,5% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **83,3%** dengan **kategori memuaskan**. Hal ini menggambarkan inflasi yang berada diluar angka range target mencerminkan stabilitas harga yang relatif masih terjaga sepanjang tahun.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 5,51. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 4,26%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 83,33%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 1,20 poin dengan capaian 83,3%. Perhitungan dengan asumsi bahwa nasional berada di dalam range target nasional yang ditetapkan pusat maka capaian nasional adalah 100%, maka capaian Provinsi Lampung tahun 2025 berbanding dengan Nasional adalah 83,3%. Perhitungan ini merupakan perhitungan yang berbeda dengan IKU lainnya.

Indikator tingkat inflasi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 141-145.

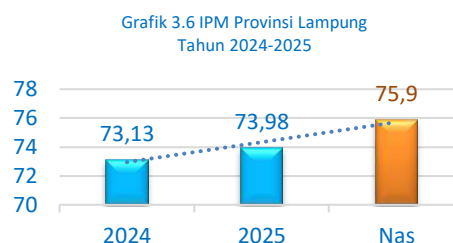
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 3.11 Capaian Indeks Pembangunan Manusia					
Sasaran	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
IKU	Indeks pembangunan manusia (IPM)				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	73,13	-	-
2	2025	71,59	73,98	103,39	-
3	2026	71,97	-	102,79	-
4	Nas	-	75,90	97,47	-

Grafik 3.6 IPM Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IPM
2024	73,13
2025	73,98
Nas	75,9

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia memiliki indikator IPM dengan realisasi sebesar 73,98 dari target sebesar 71,59 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,39%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 73,13. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,85%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 102,79%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 1,92% dengan capaian 97,47%.
5. Berdasarkan realisasi dan capaian 2025 yang sudah melebihi target tahun 2026 maka target IPM tahun mendatang perlu adanya penyesuaian kembali.

Indikator tingkat inflasi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan indikator indeks modal manusia. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 163-168.

7. Prevelansi Stunting

Capaian 3.12 Capaian Prevelansi Stunting					
Sasaran	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
IKU	Prevelansi stunting				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	15,9	-	-
2	2025	10	15,9	62,89	2024
3	2026	9	-	56,60	-
4	Nas	-	19,8	124,5	-

Grafik 3.7 Prevelansi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Prevelansi Stunting (%)
2024	15,9
2025	19,8

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia memiliki indikator prevelansi stunting dengan realisasi kinerja sebesar 15,9% dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **62,89%** dengan **kategori baik**. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024 karena data dan informasi terkait realisasi 2025 belum dirilis oleh pusat. Realisasi dan capaian ini menggambarkan bahwa semakin kecil maka kondisi stunting semakin sedikit di Provinsi Lampung.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 56,60%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih kinerja Provinsi Lampung lebih tinggi 3,9% dengan capaian 124,5% dari nasional.
4. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 masih belum dapat diketahui namun apabila melihat dari rentang antara target dan realisasi maka perlu adanya penyesuaian kinerja di tahun mendatang karena apabila kinerja belum tercapai maka kecil kemungkinan untuk mencapai kinerja yang targetnya ditinggikan lagi.

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat akibat kurangnya gizi yang baik, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi badan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan belajar dan kesehatan jangka panjang anak. Kekurangan gizi pada balita bersifat multidimensional dan merupakan indikator utama ketidakmandirian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi baik secara akut (seperti underweight dan Stunting) maupun kronis (stunting) berkontribusi terhadap

peningkatan angka kejadian penyakit, kematian, serta gangguan perkembangan fisik dan kognitif. Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga meluas ke aspek ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan dan penurunan produktivitas masa depan. Oleh karena itu, pengendalian dan pencegahan masalah gizi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kondisi Stunting di Provinsi Lampung dan Nasional



Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Lampung selalu dibawah capaian Nasional, dan masuk dalam 5 besar Provinsi dengan capaian stunting terendah. tahun 2024 secara nasional,

Berdasarkan tabel di samping, ada 10 Kabupaten/ Kota yang meningkat prevalensi stuntingnya di tahun 2024. Peningkatan paling tinggi ada di Kabupaten Mesuji yang meningkat sekitar 130%, diikuti Kota Metro dengan peningkatan sebesar 108,4%, Kabupaten Pesawaran sebesar 55% dan Kabupaten Tanggamus sebesar 45%, yang menyebabkan Tanggamus menjadi Kabupaten dengan prevalensi Stunting tertinggi di Provinsi Lampung.

Tabel 3.10 TREND STUNTING PROV LAMPUNG					
	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	
KAB LAMPUNG BARAT	22,7%	16,6%	24,6%	20,5%	🟡
KAB TANGGAMUS	25,0%	20,4%	17,1%	24,3%	🔴
KAB LAMPUNG SELATAN	16,3%	9,9%	10,3%	10,4%	🟡
KAB LAMPUNG TENGAH	20,8%	8,7%	16,7%	15,5%	🟡
KAB WAY KANAN	20,7%	18,4%	22,7%	13,9%	🟡
KAB PRINGSSEWU	19,0%	16,2%	15,8%	19,5%	🔴
KAB TULANG BAWANG BARAT	22,1%	16,4%	10,5%	13,4%	🔴
KAB PESISIR BARAT	22,8%	16,7%	16,1%	19,8%	🔴
KOTA BANDAR LAMPUNG	19,4%	11,1%	13,4%	14,8%	🟡
KOTA METRO	19,7%	10,4%	7,1%	14,8%	🔴
KAB LAMPUNG TIMUR	15,3%	18,1%	14,2%	14,0%	🟡
KAB LAMPUNG UTARA	20,2%	24,7%	23,5%	20,0%	🟡
KAB TULANGBAWANG	9,5%	10,2%	9,8%	18,3%	🔴
KAB PESAWARAN	17,6%	25,1%	10,0%	15,5%	🔴
KAB MESUJI	21,8%	22,5%	5,0%	11,1%	🔴
PROVINSI LAMPUNG	18,5%	15,2%	14,9%	15,9%	🟡



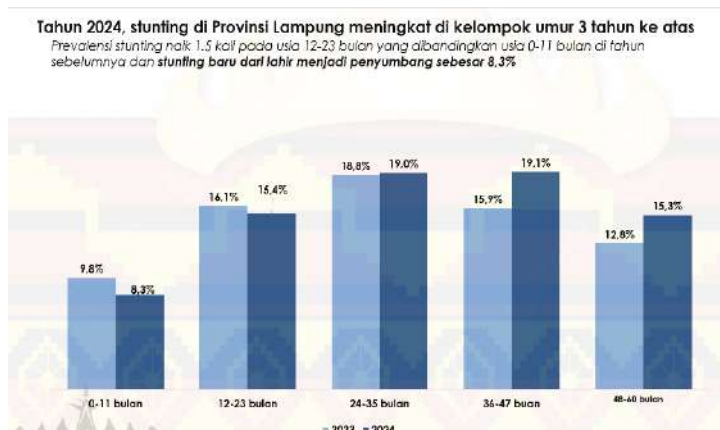
Gambar 3.1 Angka Stunting Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Dari 10 Kabupaten / Kota yang meningkat prevalensi Stuntingnya, semua diikuti dengan peningkatan status gizi lainnya (Wasting atau Underweight).

Prevalensi stunting di Provinsi Lampung mulai menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun dan capaian prevalensi stunting di Provinsi Lampung selalu berada dibawah angka nasional. Berdasarkan hasil survei Riskesdas Tahun 2018 sebesar 27,3%, menurun pada tahun 2019 berdasarkan hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi 26,26%. Dilanjutkan pada tahun 2021 melalui survey yang sama angka tersebut menurun menjadi 18,5%. Sampai pada tahun 2023 melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka prevalensi stunting Provinsi Lampung berada di 14,9%. Namun ditahun 2024 melalui survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting mengalami kenaikan menjadi 15,9%, capaian ini masih menjadikan Provinsi Lampung secara nasional menduduki peringkat ke lima Provinsi dengan prevalensi stunting terendah.

Grafik 3.9 Stunting Provinsi Lampung berdasarkan usia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Maret 2026

Prevalensi Stunting di Provinsi Lampung tahun 2024 dapat dilihat sebarannya berdasarkan kelompok umur pada gambar di samping, terlihat stunting sejak usia 0-11 bulan sebesar 8,3%, hal ini merupakan manifestasi dari pemeriksaan ibu hamil yang belum maksimal, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.

Yang kemudian meningkat sebanyak 1,5 kali lipat menjadi 15,4% di kelompok usia 1 – 23 bln, yang kemungkinan besar disebabkan oleh permasalahan pemberian ASI Eksklusif yang tidak adekuat, Pemberian Makanan untuk bayi (PMBA) tidak sesuai umur dan pemberian MP ASI yang belum tinggi protein hewani, imunisasi dan kualitas tatalaksana balita bermasalah gizi mulai dari balita tidak naik berat badan, balita berat badan kurang dan balita gizi kurang masih belum sesuai standar. Pada kelompok umur selanjutnya terlihat data stabil dan cenderung menurun pada kelompok umur 48 – 60 bulan. Jika dilihat penyebab peningkatan angka stunting pada kelompok umur, terlihat terjadi peningkatan pada kelompok umur 36 – 47 bulan, kemungkinan besar disebabkan karena banyak balita tidak terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu, bisa dikaitkan dengan telah lolosnya pemberian imunisasi dasar lengkap sehingga keluarga tidak memanfaatkan Posyandu secara rutin. Untuk itu diperlukan revitalisasi Posyandu baik dari segi sarana prasarana maupun peran aktif masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu setiap bulan.

Tabel 3.14 Faktor pendukung dan penghambat Prevelansi Stunting

Faktor Pendukung Penanganan Stunting	Faktor Penghambat Penanganan Stunting
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melatih sebanyak 362 konselor menyusui, 182 konselor Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA) dan 126 tim tatalaksana gizi buruk yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota	Perpindahan tenaga Kesehatan yang telah dilatih, sehingga dibutuhkan upaya kembali untuk melatih nakes baru
7396 alat antropometri terstandar sudah tersedia di 8465 Posyandu di provinsi Lampung	Masih dibutuhkan 1069 alat antropometri terstandar di Posyandu
Pelaksanaan posyandu setiap bulan sebagai upaya pemantauan pertumbuhan balita	- Partisipasi masyarakat, khususnya ibu balita dalam memanfaatkan posyandu masih perlu diingkatkan. - Masih beredar pemahaman disebagian masyarakat, bahwa penimbangan dan pengukuran balita hanya dilakukan saat bulan pemberian vitamin A (Februari dan Agustus), faktanya pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan setiap bulan di Posyandu.

Faktor Pendukung Penanganan Stunting	Faktor Penghambat Penanganan Stunting
Pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk balita bermasalah gizi di seluruh Puskesmas	• Capaian anak gizi kurang mendapat PMT thn 2025 70,38% (Target 65%). Namun dengan dana yang tersedia di BOK Puskesmas, seharusnya dapat mencapai 80% - 85% • Masih ada beberapa keluarga yang menolak pemberian PMT dari Puskesmas, dengan alasan malu • Pemahaman Masyarakat tentang pola pemberian makan anak bayi dan balita yang baik masih rendah • Biaya distribusi ke sasaran yang belum mencukupi
• Praktek Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) melalui konselor – konselor terlatih yang tersebar di Puskesmas • Recall 24 jam pemberian MP ASI di Posyandu setiap 3 bulan sekali untuk anak usia 6 – 24 bulan	Capaian Pemberian MP ASI baik untuk anak usia 6 – 23 bln sebesar 93,67%, namun balita usia 6 – 23 bln di wawancara baru sekitar 51% dari sasaran.
Pelaksanaan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali selama masa hamil termasuk pemeriksaan USG di Puskemas, untuk mencegah terjadinya Berat Bayi Lahir rendah (BBLR).	Ibu hamil terlambat untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas sehingga dapat meningkatkan angka kasus Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), BBLR merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya Stunting pada balita. Akibat terlambat dalam pemeriksaan ibu hamil, mengakibatkan terlambat dalam intervensi ibu hamil KEK, yang berkontribusi dalam melahirkan bayi BBLR. Capaian ANC thn 2025 sebesar 79% dari target 80%



Langkah-Langkah Pencegahan Stunting

Berikut ini upaya percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan 11 intervensi spesifik berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) **Skiring anemia bagi remaja putri.** Pelaksanaan skrining anemia remaja putri di seluruh SMP dan SMA (sederajat) dilakukan 1 tahun sekali pada masa tahun ajaran baru
- 2) **Konsumsi TTD (tablet tambah darah) bagi remaja putri.** Penyediaan TTD (tablet tambah darah) untuk seluruh sasaran remaja putri di SMP dan SMA sebanyak 1 tablet per minggu untuk mencegah anemia pada remaja.
- 3) **Pemeriksaan kehamilan/ANC (Ante Natal Care) bagi Ibu hamil.** Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung skrining janin dimasa kehamilan. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi program tersebut maka Pemprov Lampung memberikan dukungan berupa penyediaan alat USG di seluruh Puskesmas sampai tahun 2024 dan pelatihan penggunaan USG bagi 320 dokter Puskesmas di Provinsi Lampung. Serta penyediaan buku Kesehatan Ibu Anak (Buku KIA) sebagai panduan komprehensif untuk memantau kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, dan balita hingga usia 6 tahun untuk 2.500 ibu hamil,
- 4) **Konsumsi TTD (tablet tambah darah) bagi Ibu hamil.** Penyediaan TTD (tablet tambah darah) untuk seluruh sasaran ibu hamil di Provinsi Lampung dengan mengkonsumsi minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
- 5) **Bantuan berupa tambahan asupan gizi pada Ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis).** Penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal diseluruh desa melalui Puskesmas di 15 Kabupaten/Kota.
- 6) **Pemantauan Pertumbuhan balita.** Pelaksanaan posyandu aktif untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita sebagai salah satu kegiatan skrining balita stunting yang dilakukan setiap bulan, disertai dengan penyediaan alat antropometri yang digunakan untuk memantau tinggi badan dan berat badan balita diseluruh posyandu di 15 Kabupaten/Kota.
- 7) **Promosi ASI Eksklusif.** Bayi usia kurang dari 6 bulan wajib mendapatkan ASI Eksklusif. Oleh karena itu kegiatan promosi ini dimulai dari ibu hamil dengan dukungan Penyediaan kelengkapan alat ruang laktasi bagi 15 Kabupaten/Kota untuk mendukung program ASI Eksklusif dan pelatihan konselor ASI bagi petugas Kesehatan.



- 8) **Pengenalan MP ASI (Makanan Pendamping ASI).** Pentingnya pengenalan kepada masyarakat untuk anak usia 6–23 bulan agar mendapatkan MP ASI (Makanan Pendamping ASI) maka melalui kegiatan peningkatan kapasitas kader Kesehatan di semua Puskesmas dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat khususnya ibu balita dalam pemberian MP ASI yang tepat sesuai umur bayi/badutanya. Serta pelatihan tenaga gizi di 322 Puskesmas melalui Pelatihan Pemberian Makan Bayi Anak Balita. Selain itu menyediakan Buku resep Makanan tambahan berbasis pangan lokal sebanyak 1.208 buah sebagai panduan dalam pelaksanaan pemberian PMT Lokal di Posyandu,
- 9) **Tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang.** Penyediaan makanan tambahan berbasis pangan lokal diseluruh desa melalui Puskesmas di 15 Kabupaten/Kota untuk sasaran balita gizi kurang selama 56 hari. Selain itu, meningkatkan monitoring evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu Anak di 15 Kabupaten / Kota secara rutin dan berkala setiap triwulan. Serta penyediaan kartu konseling untuk edukasi pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA) sebanyak 618 buah,
- 10) **Penerapan imunisasi dasar lengkap pada bayi.** Melalui kegiatan penyediaan vaksin serta peningkatan akses layanan kesehatan ke masyarakat dan peningkatan pengetahuan Masyarakat untuk meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan balita.
- 11) **Desa bebas BABS (buang air besar sembarangan).** Mewujudkan Lingkungan Sehat Tanpa Buang Air Besar Sembarangan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit, pencemaran sumber air, dan mengganggu kesehatan lingkungan
- 12) **Mengedukasi masyarakat dan kerjasama berbagai pihak bidang Kesehatan.** Pencegahan stunting memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga keluarga. Mari dukung program-program yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak dengan cara :
 - a. Membawa anak bayi dan balita ke posyandu setiap bulan untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya dengan membawa buku KIA.
 - b. Berikan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) untuk anak usia 6 – 23 dengan menu yang beragam dan tinggi protein hewani.
 - c. Berikan imunisasi anak dengan lengkap.
 - d. Segera ke Puskesmas apabila anak sakit atau berat badan anak tidak naik dari bulan sebelumnya.



Strategi utama dalam pencapaian IKU Prevelansi Stunting di Provinsi Lampung

Penanganan Stunting pada anak balita melibatkan pendekatan Preventif dan promotive melalui pemenuhan gizi spesifik melalui strategi sebagai berikut:

1. Penggerakan peran serta aktif masyarakat:

Masyarakat didukung agar berperan aktif dalam upaya pencegahan, penanganan, pemantauan dan rehabilitasi kasus gizi kurang/buruk dengan memanfaatkan layanan Posyandu yang ada di setiap desa serapi bulannya.

2. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik pada sasaran 1000 HPK dan 8000 HPK, yang meliputi kegiatan :

- Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan.
- Pemberian makanan pada bayi dan anak yang sesuai umurnya, seperti pemberian hanya ASI saja untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Yang akan ditunjang oleh tenaga Kesehatan terlatih yang ada di Puskesmas dan desa.
- Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita di Posyandu setiap bulan untuk menjaring balita bermasalah gizi.
- Intervensi balita bermasalah gizi (balita tidak naik berat badan, balita dengan berat badan kurang dan balita gizi kurang) dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal yang tersedia disemua Puskesmas.
- Pemantauan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) yang baik kepada anak sesuai 6 – 24 bulan secara rutin setiap 3 bulan sekali di Posyandu
- Pemberian Imunisasi dasar lengkap untuk memberikan perlindungan bagi balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- Skrining anemia pada remaja putri dan pemberian tablet Tambah Darah bagi remaja putri

3. Upaya Penyediaan alat antropometri terstandar untuk semua posyandu, sehingga status gizi seluruh balita dapat terpantau.

4. Pemberian layanan rawat inap untuk semua bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk (dengan/tanpa komplikasi) dan balita 6-59 bulan dengan komplikasi.

8. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Tabel 3.15 Capaian Indeks Perlindungan Anak					
Sasaran	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak				
IKU	Indeks Perlindungan Anak (IPA)				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	64,78	-	-
2	2025	69,8	71,58	102,55	-
3	2026	70,1	-	102,11	-
4	Nas	-	71,02	100,78	-

Grafik 3.10 IPA Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IPA
2024	64,78
2025	71,58
Nas	71,02

Sumber: Olahan data PPPA Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan realisasi kinerja sebesar 671,58 dari target sebesar 69,8 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **102,55%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 64,78%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,68%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 102,11%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 0,56% dengan capaian 100,78%.

Indikator tingkat inflasi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 174-182.

9. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

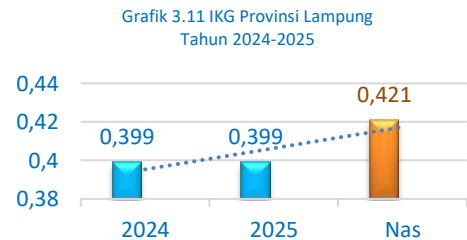
Tabel 3.16 Capaian Indeks Ketimpangan Gender

Sasaran	Meningkatnya pengarusutamaan gender				
IKU	Indeks ketimpangan gender (IKG)				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	0,399	-	-
2	2025	0,453-0,454	0,399	113,53	2024
3	2026	0,453-0,452	-	113,28	
4	Nas	-	0,421	105,51	

Grafik 3.11 IKG Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IKG
2024	0,399
2025	0,399
Nas	0,421

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender memiliki indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan realisasi kinerja sebesar 0,399% dari target sebesar 0,453-0,454 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **113,53%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi atas kinerja tahun 2025 baru akan di rilis dipertengahan/akhir tahun 2026. Perhitungan indeks ini menggambarkan bahwa angka realisasi yang semakin kecil maka ketimpangan akan semakin sedikit dan kondisi menjadi lebih baik.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 113,28%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,022% dengan capaian 105,51%. Hal ini menggambarkan kondisi Provinsi Lampung lebih baik dari nasional atau sebagian dari provinsi lainnya.
4. Realisasi pada tahun 2025 telah mencapai target tahun mendatang. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap target perencanaan tahun mendatang.

Indikator tingkat inflasi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 183-187.

10. Persentase Angka Kemiskinan

Tabel 3.17 Capaian Angka Kemiskinan					
Sasaran	Menurunkan angka kemiskinan				
IKU	Persentase angka kemiskinan				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	10,62	-	-
2	2025	9,5-10	9,66	101.68	-
3	2026	9,25-9,75	-	101,68	
4	Nas	-	8,25	85,40	

Grifik 3.12 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Angka Kemiskinan (%)
2024	10,62
2025	9,66
Nas	8,25

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

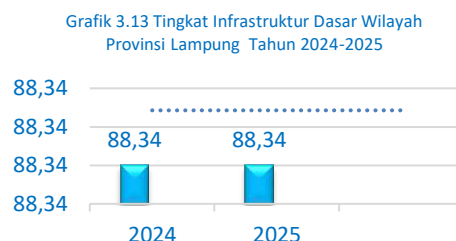
1. Sasaran menurunkan angka kemiskinan memiliki indikator persentase angka kemiskinan dengan realisasi kinerja sebesar 9,66% dari target sebesar 9,5%-10% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **101,68%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Perhitungan ini menggambarkan semakin kecil angka kemiskinan maka kondisi akan semakin baik.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 10,62%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,96%. Hal ini menggambarkan adanya pengurangan terhadap kemiskinan.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 101,68%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka realisasi Provinsi Lampung lebih rendah 1,41% dengan capaian 85,40%. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Lampung masih dibawah kondisi nasional atau sebagian daerah lainnya.

Indikator persentase angka kemiskinan merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 137-140.

11. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah

Tabel 3.18 Capaian Infrastruktur Dasar Wilayah					
Sasaran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
IKU	Tingkat infrastruktur dasar wilayah				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	88,34	-	-
2	2025	74,9	88,34	117,94	2024
3	2026	75,9	-	116,38	-
4	Nas	-	-	-	-

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki indikator tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah dengan realisasi kinerja sebesar dari target sebesar 88,34% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **117,94%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi tahun 2025 baru akan dirilis pertengahan tahun 2026.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 116,38%.
3. Realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target tahun mendatang sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap target perencanaan tahun mendatang pada IKU ini.

Indikator tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang selaras dengan IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 125-136.

12. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tabel 3.19 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					
Sasaran	Meningkatkan ketahanan energi				
IKU	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	12,84	-	-
2	2025	13	16,3 (34,551,5 02.5 juta ton CO2e)	125,38	Semen- tara
3	2026	13,25	-	123,01	
4	Nas	-	165,31 juta ton CO2e	20,87	Semen- tara

Grifik 3.14 Penurunan GRK Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Penurunan GRK (%)
2024	34,5
2025	34,5
Nas	165,3

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatkan ketahanan energi memiliki indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca dengan realisasi kinerja sebesar 16,3% dari target sebesar **13%** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **125%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan angka sementara 2025 yang dikeluarkan oleh Aksara BAPPENAS.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 12,84%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,26%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 100,37%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka kinerja Provinsi Lampung sudah memenuhi akumulasi nasional sebesar 20,87%.

Indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya ketahanan energi. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 192-202.

13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 3.20 Capaian Indeks kualitas lingkungan hidup					
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
IKU	Indeks kualitas lingkungan hidup				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	73,11	-	-
2	2025	69,93	73,81	105,55	-
3	2026	70,35	-	104,92	-
4	Nas	-	78,76	93,71	-

80
75
70
65

73,11 73,81 78,76

73,11 73,81 78,76

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan realisasi kinerja sebesar 73,81% dari target sebesar 69,93% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **105,55%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 73,11%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,70%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 104,92%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 4,95% dengan capaian 93,71%.
5. Realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian target pada perencanaan tahun mendatang.

Indikator indeks kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 203-214.

14. Indeks Resiko Bencana

Tabel 3.21 Capaian Indeks resiko bencana					
Sasaran	Meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana				
IKU	Indeks resiko bencana				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	130,1	-	-
2	2025	141,85	124,59	113,85	-
3	2026	141,15	-	113,29	-
4	Nas	-	131,05	105,18	-

Grifik 3.16 Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks Resiko Bencana
2024	130,1
2025	131,05

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana memiliki indikator indeks resiko bencana dengan realisasi kinerja sebesar 124,59% dari target sebesar 141,85% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **113,85%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Perhitungan ini menggambarkan bahwa semakin rendah angka realisasi maka kondisi akan semakin baik.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 130,1%. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya maka realiasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,51%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 113,29%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 6,46% dengan capaian 105,18%.
5. Realisasi tahun 2025 telah mencapai target tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian terhadap target pada perencanaan tahun mendatang.

Indikator indeks resiko bencana merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 215-221.

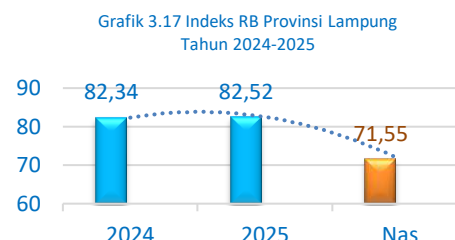
15. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Tabel 3.22 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi					
Sasaran	Meningkatkan penyelenggaraan RB				
IKU (5/20)	Indeks reformasi birokrasi				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	A (82,34)	-	-
2	2025	BB (70-80)	A (82,52)	103,15	Semen- tara
3	2026	BB (70-80)	-	103,15	Semen- tara
4	Nas		B (71,55)	115,33	2024

Grifik 3.17 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks RB
2024	82,34
2025	82,52
Nas	71,55

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi kinerja sebesar A (82,52) dari target sebesar BB yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,15%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan angka sementara pada aplikasi PortalRB tahun 2025 karena realisasi tahun 2025 saat ini masih pada masa sanggah dan belum rilis.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 82,34. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja tahun 2025 (angka sementara) mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 103,15%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 10,97 poin dengan capaian 115,334%.
5. Realisasi tahun 2025 (angka sementara) telah mencapai target tahun mendatang sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap target perencanaan tahun mendatang.

Indikator indeks reformasi birokrasi merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya birokrasi berintegrasasi. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 187-191.

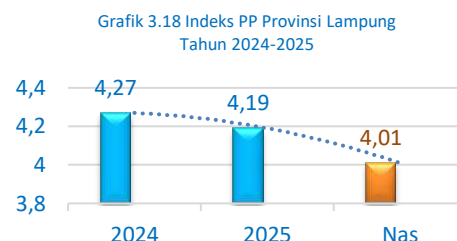
16. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3.23 Capaian Indeks Pelayanan Publik					
Sasaran	Meningkatkan pelayanan publik prima				
IKU (5/20)	Indeks pelayanan publik				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	A- (4,27)	-	-
2	2025	A-(4,01-4,50)	A- (4,19)	104,48	-
3	2026	A(4,51-5,0)	-	92,90	-
4	Sumsel	-	A- (4,01)	104,48	-

Grifik 3.18 Indeks PP Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks
2024	4,27
2025	4,19
2026	4,01

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya pelayanan publik prima memiliki indikator indeks pelayanan publik dengan capaian sebesar A- dari target sebesar A- yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,75%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 82,68 dengan capaian kinerja 118,68. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin. Namun apabila dilihat dari capaiannya menurun 14,93%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 92,90%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi pada Provinsi Sumatera Selatan maka kinerja Provinsi Lampung lebih tinggi 0,18 poin dengan capaian 104,48%.

Perhitungan indeks dan kategori pelayanan publik didasarkan pada hasil perhitungan tim evaluator Kementerian PAN RB dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP

Tabel 3.24 Kategori Indeks Pelayanan Publik

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel disamping. Provinsi mendapat nilai indeks 4,19 dengan kategori A.

Tabel 3.25 IPP Provinsi se-Indonesia

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4.75	A
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.73	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4.72	A
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	4.71	A
5	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4.69	A
6	Pemerintah Provinsi Bali	4.68	A
7	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.63	A
8	Pemerintah Provinsi Aceh	4.56	A
9	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4.56	A
10	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4.48	A-
11	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.48	A-
12	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.41	A-
13	Pemerintah Provinsi Banten	4.35	A-
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	4.35	A-
15	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.34	A-
16	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.27	A-
17	Pemerintah Provinsi Riau	4.27	A-
18	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.21	A-
19	Pemerintah Provinsi Lampung	4.19	A-
20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.18	A-
21	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	4.17	A-
22	Pemerintah Provinsi Bengkulu	4.11	A-
23	Pemerintah Provinsi Jambi	4.03	A-
24	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4.01	A-
25	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3.97	B
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3.96	B
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	3.89	B
28	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3.86	B
29	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.70	B
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3.44	B-
31	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	3.17	B-
32	Pemerintah Provinsi Maluku	2.91	C
33	Pemerintah Provinsi Papua	2.79	C
34	Pemerintah Provinsi Papua Barat	N/A	N/A
35	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A
36	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
37	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
38	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2026

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup dalam pelayanan publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Pada implementasinya, pelayanan publik akan dipantau dan dievaluasi setiap tahunnya..

Pelayanan Publik di Provinsi Lampung

Pelayanan publik di Lingkungan Provinsi Lampung dilaksanakan oleh 49 Perangkat Daerah (PD). Dimana masing-masing PD dapat mengampu lebih dari 1 jenis pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berikut ini daftar PD dengan jenis pelayanan yang diberikan:

Perangkat Daerah			Ket
Pelayanan Barang Publik	Pelayanan Barang Jasa	Pelayanan Administratif	
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas PKPCK; 5. Dinas PSDA; 6. Dinas BMBK; 7. Biro Kesejahteraan Rakyat; 8. Dinas Perhubungan.	1. RSUD Abdoel Moeloek; 2. RSUD Bandar Husada; 3. RSJD; 4. SatPol PP; 5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.	49 (empat puluh sembilan) PD di Lingkungan Pemprov Lampung	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi kepada pimpinan terkait dengan pelayanan publik dan budaya pelayanan prima agar kepala PD dapat mengintervensi positif kepada ASN terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat baik itu pelayanan barang dan jasa serta administratif.

2. Pembinaan serta pengkaderisasi setiap ASN yang dapat menjadi *role model* dalam implementasi pada 49 PD di Lingkungan Pemprov Lampung.
3. Penerapan standar pelayanan yang konsisten dan jelas pada setiap PD di Lingkungan Pemprov Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
4. Meningkatkan inovasi pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini Provinsi Lampung telah memiliki 48 (empat puluh delapan) inovasi yang telah masuk dalam penilaian IID dari total 93 (sembilan puluh tiga) inovasi yang diajukan di tahun 2025.
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui **SISMA SIGER**. Provinsi Lampung telah mengembangkan aplikasi SISMA Siger yang merupakan platform SKM yang membantu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik secara periodik.

Tabel 3.27 hasil SKM melalui aplikasi Sisma Siger Provinsi Lampung tahun 2025

No	Uraian	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur									IKM	Kategori	Jumlah responden
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Rata-Rata Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1	2025	85.75	85.75	85.25	92.75	87.25	87.25	86.25	85.75	94.25	86.02	Baik	612
2	Rata-Rata Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 2	2025	85.25	85.00	83.25	93.00	85.00	85.75	86.50	84.5	94.75	86.90	Baik	1.475
Rata-rata			85.50	85.37	84.25	92.87	86.12	86.50	87.37	85.12	94.50	87.46	Baik	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

Berdasarkan data hasil SKM yang telah dilaporkan pada Semester 1 Tahun 2025 dan hasil SKM pada Semester 2 Tahun 2025, maka dapat diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,46 dengan kategori “Baik”. Nilai tersebut dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Seluruh unsur pelayanan telah berada pada range mutu pelayanan yang dinilai adalah:

1. Unsur Persyaratan Pelayanan (U1),
2. Unsur Prosedur Pelayanan (U2),
3. Unsur Waktu Pelayanan (U3),
4. unsur Biaya/Tarif Pelayanan (U4),
5. Unsur Produk Jenis Pelayanan (U5),
6. Unsur Kompetensi Pelaksana (U6),
7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan (U7),
8. Unsur Sarana dan Prasarana (U8), dan
9. Penanganan Pengaduan dan Saran (U9).



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

6. Pengelolaan pengaduan pelayanan **Lampung-In**. Aplikasi ini merupakan aplikasi *smart city* resmi Pemerintah Provinsi Lampung yang dirancang sebagai pusat layanan digital terpadu untuk mempermudah akses informasi, pengaduan masyarakat, dan layanan publik secara *real-time*.



Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

Dalam aplikasi terdapat menu pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, terdapat aplikasi SPAN Lapor yang dikembangkan oleh Diskominfo Provinsi Lampung

7. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, Provinsi Lampung bersama Ombudsman meningkatkan pengawasan terhadap maladministrasi pelayanan publik pada 3 PD yang memberikan layanan jasa dan barang serta administrasi yaitu: RSUD Abdoel Moeloek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial. Berikut ini adalah nilai Maladministrasi pelayanan publik dari 3 PD yang dimaksud.

Gambar 3.2 Maladministrasi PP

OPTIK OMBUDSMAN RI: PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025									
Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi Lampung Periode Observasi : September-November 2025									
No.	Unit Layanan	Deteksi				Kapasitas Berkas	Nilai	No.	LIRIS HA Sajian Penyampaian Berkas menilai
		Input	Proses	Output	Pengalihan				
1	Unitas Sosial	23.32	19.36	9.38	10.97	25.82	89.25		
2	Komisi Satuk Unitas Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek	23.65	19.47	9.38	12.63	24.01	89.15		
3	Unitas Pendidikan dan Kebudayaan	23.42	19.77	9.38	11.99	22.48	87.08		
Nilai Akhir:						89.49			
Kategori Kualitas Pelayanan						Sangat Baik			
								Kategori Tingkat Kepuasan	Tingkat Kepuasan
								Optim	Kualitas Tinggi

Sumber: Ombudsman, Maret 2026

8. Pembinaan kabupaten/kota agar meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung (15 Kabupaten/Kota) yang telah memiliki dan sedang berproses.

Gambar 3.3 Dokumentasi Aksi Peningkatan PP Provinsi Lampung tahun 2025



Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

Tabel 3.28 MPP di Provinsi Lampung

NO.	NAMA MPP	TGL PERESMIAN	JUMLAH LAYANAN	INSTANSI TERINTEGRASI
1.	Kabupaten Tulang Bawang	05 November 2020	198	14
2.	Kota Metro	05 Desember 2022	72	16
3.	Kabupaten Lampung Selatan	12 Mei 2023	228	27
4.	Kabupaten Lampung Utara	12 Mei 2023	72	16
5.	Kabupaten Lampung Tengah	12 Mei 2023	72	16
6.	Kabupaten Tulang Barat	31 Oktober 2023	120	21
7.	Kabupaten Mesuji	07 Maret 2024	188	21
8.	Kabupaten Pringsewu	08 Oktober 2024	46	15
9.	Kabupaten Pesisir Barat	08 Oktober 2024	163	11
10.	Kota Bandar Lampung	12 Desember 2024	154	26
11.	Kabupaten Lampung Barat	11 November 2024	77	8
12.	Kabupaten Lampung Timur	11 Juni 2026	56	14
13.	Kabupaten Way Kanan	Tahap penyelesaian pembangunan gedung lama		
14.	Kabupaten Tanggamus	Tahap Perencanaan		
15.	Kabupaten Pesawaran	Tahap Perencanaan		

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

Berdasarkan data di atas seluruh kabupaten/kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki MPP baik itu sudah terealisasi secara fisik maupun sedang dalam tahap perencanaan. Hal ini membawa dampak yang baik dalam meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat.



Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan pelayanan public:

A. Pendukung:

1. Seluruh PD (49 PD) di Lingkungan Provinsi Lampung telah mengimplementasikan pelayanan prima melalui penetapan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pemberian *Reward* dan *Punishment* serta berbagai kebijakan pelibatan masyarakat seperti SKM, forum konsultasi publik, dan pengaduan lewat kanal SP4N LAPOR! dan Lampung in.
2. Proses penilaian pusat yang belum sepenuhnya transparan terhadap pelayanan publik Provinsi Lampung yang telah diberikan kepada masyarakat. Provinsi Lampung sampai saat ini belum mendapatkan mendapatkan/mengakses kertas kerja secara rinci oleh tim evaluator pusat. Dengan adanya kertas kerja secara rinci dapat menjadi dasar dan langkah kebijakan dalam perbaikan pelayanan public.

B. Penghambat:

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan alur birokrasi dan kurangnya kegiatan mengedukasi masyarakat yang berada jauh dari pusat kota.

C. Solusi :

Peningkatan kegiatan yang bersifat memberikan motivasi perbaikan budaya kinerja dan orientasi kepuasan masyarakat.

17. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Tabel 3.29 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia					
Sasaran	Memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis				
IKU	Indeks Demokrasi Indonesia				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	72,62	-	-
2	2025	79,26-82,61	72,62	91,62	2024
3	2026	80,00-83,00	-	90,78	-
4	Nas		78,5	92,5	2024

72,62

72,62

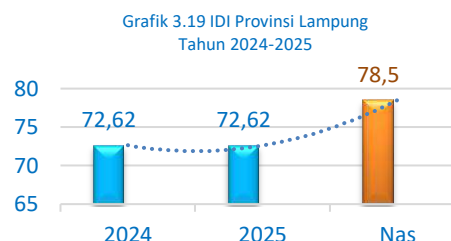
78,5

2024

2025

Nas

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran memantapkan kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya, dan demokratis memiliki indikator **Indeks Demokrasi Indonesia** dengan realisasi kinerja sebesar 72,62 dari target sebesar 79,26-82,61 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **91,62%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi kinerja ini merupakan kinerja tahun 2024. Hal ini karena IDI Provinsi Lampung baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2026.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 90,78%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 5,88% dengan capaian 92,5%.
4. Apabila realisasi kinerja tahun 2025 yang baru akan dikeluarkan pertengahan tahun 2026 telah belum mencapai target tahun 2025 maka perlu adanya penyesuaian terkait target perencanaan tahun mendatang.

Indikator indeks demokrasi indonesia merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya kehidupan Masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 237-243.

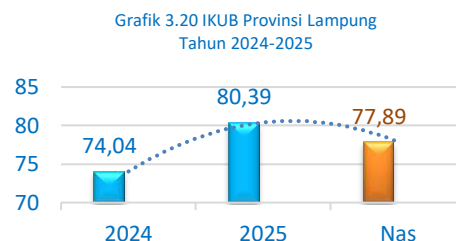
18. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Tabel 3.30 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)					
Sasaran	Meningkatnya kerukunan umat beragama				
IKU	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	74,04	-	-
2	2025	74,13	80,39	108,44	-
3	2026	75,15	-	106,97	-
4	Nas	-	77,89	102,71	-

Grafik 3.20 IKUB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IKUB
2024	74,04
2025	80,39
Nas	77,89

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

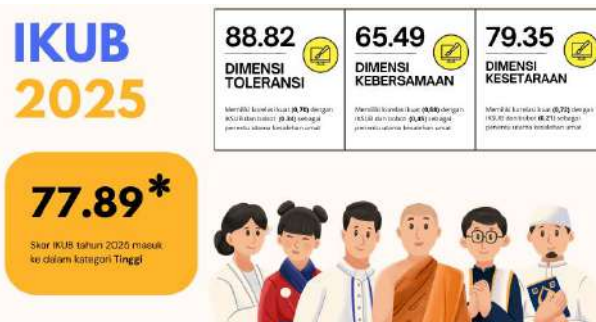


Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama memiliki indikator **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** dengan realisasi kinerja sebesar 80,39 dari target sebesar 74,13 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **108,44%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 74,04. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 6,35 poin.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 106,97%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 2,5 poin dengan capaian 102,71%.

Konsepsi dasar yang menjadi harapan dari KUB sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yaitu: “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Gambar 3.4 IKUB Nasional Tahun 2025



Sumber: Kemenag, Maret 2026.

Kerukunan hidup umat beragama ialah: “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta kebersamaan dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berikut ini adalah capaian IKUB Nasional:

Berdasarkan rumusan itulah Survei Evaluasi Kerukunan Umat Beragama ini menarik tiga unsur untuk dijadikan indikator utama dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Toleransi,
2. Kesetaraan, dan
3. Kebersamaan.



Masing-masing konstruk IKUB memiliki indikator dimana indikator tersebut memiliki bobot penilaian, kemudian hasil bobot tersebut akan diakumulasi dan membentuk angka Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 3.31 Dimensi dan range indeks KUB

Dimensi	Subdimensi	Indikator
Toleransi	Penerimaan	11.1 Penerimaan Antar/antar
		11.2 Penerimaan teman beda agama di sekolah/belajar
		11.3 Menjaga: Tetangga beda agama/Kali
	Menghormati	11.4 Konflik Sosial & Potensinya
		11.5 Tanggapi dengan seremoni keagamaan
		11.6 Memberi jaminan/perlindungan kegiatan agama lain
Kebersamaan	Partisipasi	11.7 Tidak ada terhadap orang yang menyatakan ajaran/gerakan orang lain
		11.8 Apa memuat kelompok minoritas dan menegakkan perbedaan
Kesetaraan	Partisipasi	12.1 Partisipasi Kegiatan Sosial Umat Agama
		12.2 Partisipasi dalam Kegiatan Komunitas Terkait Rumah ibadah
		12.3 Mengalami diskriminasi
	Perlindungan dan anti-diskriminasi	13.1 Ada tidaknya aturan dalam pemerintahan sosial
		13.2 Penyebaran informasi yg memisahkan agama lain
	Budaya dan fasilitas	13.4 Hak Mendapatkan agama agama
		13.5 Tersedia fasilitas rumah ibadah agama lain
		13.6 Membangun Rumah ibadah
		13.7 Hak perlindungan menjalankan ibadah

KATEGORISASI NILAI IKUB

Skala	Keterangan
0 - 20.00	Sangat Rendah
20.01 - 40.00	Rendah
40.01 - 60.00	Sedang
60.01 - 80.00	Tinggi
80.01 - 100.00	Sangat Tinggi

Tabel 3.32 Capaian IKUB berdasarkan Provinsi

IKUB PER PROVINSI TAHUN 2025											
No	Provinsi	Toleransi	Kebersamaan	Kesetaraan	KUB	No	Provinsi	Toleransi	Kebersamaan	Kesetaraan	KUB
1	Sumatera Utara	92.66	68.68	83.15	81.56	18	Sulawesi Tenggara	88.94	80.85	79.77	86.52
2	Sumatera Selatan	86.3	75.67	77.68	79.88	19	Lampung	81.31	89.31	80.47	80.36
3	Sumatera Barat	86.79	89.09	79.18	85.02	20	Maluku	81.92	43.13	71.87	65.64
4	Bengkulu	87.52	41.48	79.87	69.62	21	DKI Jakarta	91.05	66.21	77.7	78.32
5	Kalimantan Timur	83.13	83.57	78.13	78.29	22	Jambi	88.33	80.65	77.61	76.53
6	Kepulauan Bangka Belitung	92.6	79.57	85.86	85.41	23	Maluku Utara	70.11	41.76	67.94	59.93
7	Riau	81.45	47.65	73.37	67.49	24	Papua Barat	84.77	72.29	81.83	82.97
8	Kalimantan Selatan	83.29	52.35	76.69	70.31	25	Jawa Tengah	89.26	68.98	81.96	80.07
9	Jawa Barat	89.34	89.98	78.97	79.42	26	Sulawesi Barat	88.59	73.64	80.88	81.03
10	Aceh	80.38	67.65	80.28	76.11	27	Riau Tenggara Timur	90.99	56.04	82.47	76.83
11	Jawa Timur	89.64	69.77	79.82	76.31	28	Gorontalo	90.79	63.3	75.43	77.49
12	DI Yogyakarta	83.65	79.9	80.92	80.82	29	Riau Tenggara Barat	87.44	52.86	81.58	73.84
13	Kalimantan Barat	91.82	41.09	78.87	70.59	30	Banten	91.43	66.5	70.62	76.85
14	Kalimantan Tengah	80.57	59.96	81.15	77.23	31	Kepulauan Riau	86.34	82.65	80.06	83.68
15	Sulawesi Tengah	87.9	56.2	77.85	73.99	32	Kalimantan Utara	93.38	84.43	83.88	87.23
16	Sulawesi Selatan	90.14	76.13	80.63	82.3	33	Papua	91	70.79	81.15	80.98
17	Bali	89.10	65.45	77.77	77.47	34	Sulawesi Utara	95.84	74.69	85.27	86.27

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKUB Provinsi Lampung sebesar 80,36 dengan perincian capaian masing-masing dimensi sebagai berikut:

- i. Dimensi toleransi sebesar 91,31;
- ii. Dimensi kebersamaan sebesar 69,31, dan
- iii. Dimensi kesetaraan sebesar 80,47.

Dalam meningkatkan KUB dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, menghargai, toleransi, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan, peraturan negara/pemerintah.

Berdasarkan peraturan yang ada, dimensi utama dalam indeks KUB meliputi:

TOLERANSI

- A. Provinsi Lampung, sebagai bagian dari Sai Bumi Ruwa Jurai, adalah rumah bagi keragaman budaya, agama, dan suku. Salah satu wujud toleransi yang telah dilaksanakan adalah:

Gambar 3.5 Perayaan Imlek Provinsi Lampung 2025, Maret 2026



1. Dalam rangka menyambut Perayaan Tahun Baru Imlek 2025, tahun Ular Kayu, berbagai rangkaian perayaan di Provinsi Lampung yang melibatkan berbagai lini diantaranya: Vihara Amurwa Bhumi dan Thay Hin Bio di Telukbetung Selatan menjadi pusat peribadatan utama, di mana persiapan telah dilakukan sejak H-1;

Pertunjukan barongsai memeriahkan berbagai titik di Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Selatan melaksanakan pengamanan vihara dan memastikan kenyamanan umat, perayaan juga dirayakan di lingkungan pendidikan, seperti SMP Xaverius 3 Bandar Lampung yang menggelar acara special.



Gambar 3.6 Kegiatan Toleransi Umat Hindu dan Nasrani pada Bulan Ramadhan, Maret 2026

2. Umat Hindu dan Nasrani di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung melakukan patroli malam untuk menjaga rumah warga yang melaksanakan salat Tarawih sebagai bagian dari aksi toleransi antar umat beragama selama bulan Ramadhan. Pada saat melakukan patroli, satu per satu rumah warga didatangi dan dicek, mulai dari pintu pagar hingga memastikan kendaraan yang berada di pagar rumah warga dalam keadaan aman.

Kegiatan patroli ini rutin dilakukan selama bulan Ramadhan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saat pelaksanaan Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka juga membantu menjaga rumah warga yang melaksanakan salat Id atau mudik ke kampung halaman.

3. Dukungan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Perayaan Natal Oikoumene yang menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan, solidaritas, dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. Memperkuat toleransi dan menjaga harmoni agar Lampung tetap damai dan sejahtera serta mewujudkan kasih Kristus melalui pelayanan, kepedulian sosial, dan kontribusi nyata untuk pembangunan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Gambar 3.7

Natal Oikoumene Lampung 2025 Jadi Momentum Penguatan Keluarga, Solidaritas, dan Kepedulian Lingkungan



Pemprov Lampung Siap Kawal Puncak Arus Balik Lebaran 2025 dengan Sinergi dan Layanan Maksimal



Gambar 3.5 Lebaran 2025, Maret 2026

KESETARAAN

Kesetaraan dalam KUB merupakan perlakuan yang sama kepada semua umat beragama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Provinsi Lampung mendukung adanya perayaan hari besar tanpa membeda-bedakan. Selain itu Provinsi Lampung bekerja sama membangun kenyamanan dalam beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya dengan berkolaborasi pihak-pihak swasta, Kesehatan, keamanan. Hal ini menumbuhkan rasa dihargai dimata masyarakat.

KERJASAMA

4. Gubernur Lampung bersinergi dengan IAS Polda Lampung, tim Kesehatan dan berbagai pihak lainnya dalam menjamin kenyamanan arus mudik lebaran 2025. Berbagai posko keamanan disebar dalam beberapa titik di jalur lintas Sumatera.
1. Kemenag Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung untuk menjadi “Agen Kerukunan” di Lingkungan Pendidikan melalui tenaga pendidik sekolah se Provinsi Lampung. Agen kerukunan yang dimaksud bertujuan untuk menanamkan toleransi dalam beragama sejak dini.
 2. Provinsi Lampung bersama Lembaga dan stakeholder lainnya melaksanakan pengamanan pada setiap perayaan hari besar keagamaan di Lingkungan Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial serta meningkatnya toleransi dan menjamin kelancaran selama proses ibadah.

Tabel 3.33 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi IKUB

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN FKUB			
1. Kurang optimalnya kegiatan pada FKUB. 2. Minimnya wawasan manajerial dan organisasi sebagian Pengurus FKUB 3. Belum adanya persamaan persepsi Pengurus dan Pemda tentang tata kelola FKUB yang sesuai dengan regulasi yang ada	1. Semangat juang dan kerelawanan/ volunterisme sebagian besar pengurus FKUB dan para pegiat kerukunan 2. Adanya Iktikad baik untuk meningkatkan wawasan menejerial para pengurus dan semangat pengabdian yang tinggi. 3. FKUB Lampung telah memiliki PBM Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Pergub No. 20 tahun 2013 tentang FKUB dan AD / ART tentang FKUB Provinsi Lampung	1. Menstimulasi para Pengurus untuk terus semangat mengabdikan mewujudkan kerukunan umat sebagai tugas suci dari Tuhan YME 2. Melakukan sosialisasi tentang tata kelola kelembagaan FKUB berdasarkan PBM, Pergub dan AD /ART FKUB 3. Melakukan sosialisasi tentang memiliki PBM Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Pergub No. 20 tahun 2013 tentang FKUB dan AD / ART tentang FKUB Provinsi Lampung	Kegiatan: 1. Menyusun AD / ART FKUB sebagai panduan acuan dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. 2. Membekali seluruh Pengurus dengan Buku Saku PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 beserta Tanya Jawabnya. 3. Membekali seluruh Pengurus dengan Buku Kompilasi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Kerukunan Umat Beragama. 4. Mengikutsertakan fungsionaris FKUB mengikuti rakortahunan dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agama. 5. Mengadakan rakor dengan pengurus FKUB se Provinsi Lampung 6. Mengikutsertakan Pengurus FKUB untuk mengikuti pelatihan dan workshop tentang Moderasi Beragama dan memperoleh Sertifikat sebagai Pemateri Moderasi Beragama
BIDANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH			
1. Masih minimnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah, baik Pengurus / Panitia Pendirian rumah ibadah, calon pengguna, masyarakat maupun aparatatur Pemerintahan 2. Adanya rasa saling curiga di antara warga masyarakat tentang pendirian rumah ibadah yang dikaitkan dengan penyebrang agama tertentu. 3. Adanya fanatisme buta dan pemahaman agama yang sempit tentang eksistensi dan fungsi rumah ibadah. 4. Belum adanya Standard Operasional Prosedure (SOP) Pendirian rumah ibadah.	1. Sudah ada regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, baik dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri No, 9 dan No, 8 Tahun 2006 maupun dalam Peraturan Gubernur Lampung No, 20 Tahun 2013. 4. Adanya modal sosial berupa masyarakat yang religius dan cinta damai serta nilai nilai adat istiadat Lampung (Piil Pesenggiri) yang sangat ramah dengan seluruh warga masyarakat Lampung tanpa melihat suku dan agamanya.	1. Mengedukasi kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia 2. Melakukan dialog tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat 3. Mempersiapkan penyusunan SOP pendirian rumah ibadah 4.	1. Melakukan sosialisasi regulasi tentang pendirian rumah ibadah, baik yang terdapat dalam PBM maupun Pergub. 2. Melakukan monitoring ke FKUB Kabupaten Kota dalam rangka mendeteksi probelm pendirian rumah ibadah serta mengantisipasi adanya potensi konflik antar umat beragama. 3. Melakukan kampanye toleransi dan kerukunan umat beragama, termasuk tentang toleran terhadap agama Melakukan mediasi antar kelompok penganut agama yang berbeda tentang konflik pendirian rumah ibadah.

Sumber : Badan Kesbangpol, Februari 2026

19. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Tabel 3.34 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan					
Sasaran	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya				
IKU	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	60,97	-	-
2	2025	57,91	60,97	105,28	2024
3	2026	59,01	-	103,32	-
4	Nas	-	59,98	101,23	-

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat berbudaya memiliki indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan** dengan realisasi kinerja sebesar 60,97 dari target sebesar **57,91** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **105,28%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 60,97 yang sekaligus digunakan sebagai dasar perhitungan tahun 2025 karena realisasi tahun 2025 baru akan dirilis pertengahan tahun 2026.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 103,32%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 1,20 poin dengan capaian 101,23%.
5. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 sudah mencapai target dan melebihi target tahun mendatang sehingga perlu adanya penyesuaian target dalam perencanaan tahun 2026.

Indikator indeks pembangunan kebudayaan merupakan salah satu IKU dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 sekaligus menjadi IKU dalam RPJMD 2025-2029 dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Oleh karena itu, penjelasan dan analisis secara mendetail terkait indikator ini akan dibahas lebih lanjut pada halaman 244-249.

20. Indeks Kewaspadaan Dini (IKD)

Tabel 3.35 Capaian Indeks Kewaspadaan Dini					
Sasaran	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah				
IKU	Indeks Kewaspadaan Dini (IKD)				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	84,44	-	2023
2	2025	91,89	84,44	91,89	2023
3	2026	92,39	-	91,39	2023
4	Nas	-	-	-	-

Grafik 3.22 IKD Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IKD
2024	72,62
2025	72,62
2026	78,5

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah memiliki indikator **Indeks Kewaspadaan Dini** dengan capaian sebesar **A** dari target sebesar **B** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,75%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 82,68 dengan capaian kinerja 118,68. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin. Namun apabila dilihat dari capaiannya menurun 14,93%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2026 maka capaian mencapai 98,88%.
4. Realisasi Kinerja 2025 belum dapat dibandingkan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 1,20 poin dengan capaian 98,57%.

Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung difokuskan pada penguatan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terutama melalui peran Badan Kesbangpol. Upaya ini mencakup sosialisasi P4GN (narkoba), pembinaan tokoh masyarakat/pemuda, serta pemetaan risiko bencana (tsunami/gempa) guna menciptakan wilayah yang aman dan kondusif.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Lampung dalam menjaga Indeks Kewaspadaan dini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Ideologi dan Politik:

Badan Kesbangpol aktif mengadakan pembinaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kewaspadaan terhadap ATHG bagi pemuda, pelajar, mahasiswa, serta tokoh agama. aktif mengadakan pembinaan kepada tokoh masyarakat, agama, dan pelajar/mahasiswa untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap kesatuan bangsa



2. Pencegahan Narkoba (P4GN):

Sosialisasi intensif dilakukan untuk menciptakan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai bagian dari pertahanan ketahanan masyarakat.



3. Kewaspadaan Bencana (Mitigasi): Pemprov Lampung meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemasangan seismometer, *Warning Receiver System* (WRS), dan pemetaan jalur evakuasi di zona merah (pesisir Lampung Selatan dan Bandar Lampung). Selain itu Pemprov Lampung memperkuat kesiapsiagaan di wilayah pesisir (Bandar Lampung & Lampung Selatan) dengan 18 titik seismometer dan 19 *Warning Receiver System* (WRS). Terdapat juga 15 titik evakuasi dan 13 *shelter* (sekolah/masjid) untuk menghadapi risiko tsunami. Kegiatan lainnya adalah mengedukasi kepada publik untuk segera mengungsi dalam waktu 20 menit ke ketinggian minimal 20 meter jika merasakan gempa selama 20 detik.

4. Sinergi Keamanan: Penguatan koordinasi antara BPBD, TNI/Polri, dan pemerintah daerah untuk merespons potensi gangguan keamanan dan bencana secara cepat dan terintegrasi.



Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkis segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini (Permendagri No 2 Tahun 2018). Indeks Kewaspadaan Dini (IKD) di Provinsi Lampung diampu oleh beberapa Perangkat Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Perkebunan.

Untuk angka capaian Indeks Kewaspadaan Dini (IKD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan Tahun 2025 belum rilis, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023.

Tabel 3.36 Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Aksi IKD

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
1	- Peningkatan Kapasitas Daerah terhadap Penanggulangan Bencana yang terintegrasi - Urusan Bencana merupakan Urusan Bersama lintas sektoral	- Kurangnya Pelayanan Informasi kewaspadaan dini - Kurangnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Menyediakan Informasi kewaspadaan dini di Provinsi Lampung, dengan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap kewaspadaan dini daerah, melalui: - Penyusunan Rencana peningkatan kewaspadaan dini daerah - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) kewaspadaan dini Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan melakukan : - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026.

B. Capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

1. Pertumbuhan ekonomi

Tabel 3.37 Capaian Pertumbuhan Ekonomi					
Sasaran	Terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif				
IKU	Pertumbuhan ekonomi				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	4,57	-	-
2	2025	5,2	5,28	107,75	-
3	2029	6,8	-	77,64	-
4	Nas	-	5,11	103,32	-

Grifik 3.23 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2024	4,57
2025	5,28
Nas	5,11

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

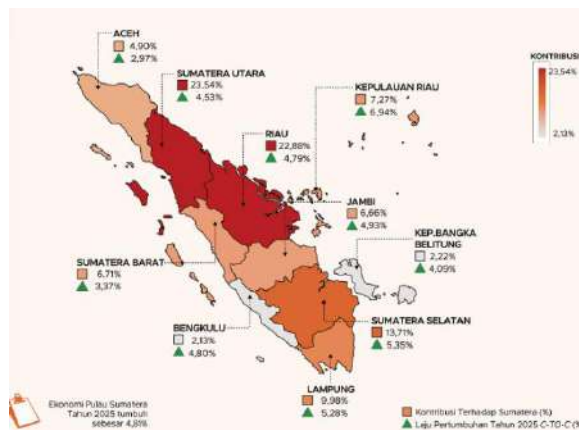


Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif memiliki indikator pertumbuhan ekonomi dengan realisasi kinerja sebesar 5,28 dari target sebesar 5,2 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **107,75%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 4,57. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,71%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 77,64%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,17% dengan capaian 103,32%.

Gambar 3.8 PE se-Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada tahun 2025 mencapai 4,81 persen. Berdasarkan wilayah regional Sumatera, seluruh provinsi mengalami pertumbuhan positif, Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu tumbuh sebesar 6,94 persen, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen dan Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen.

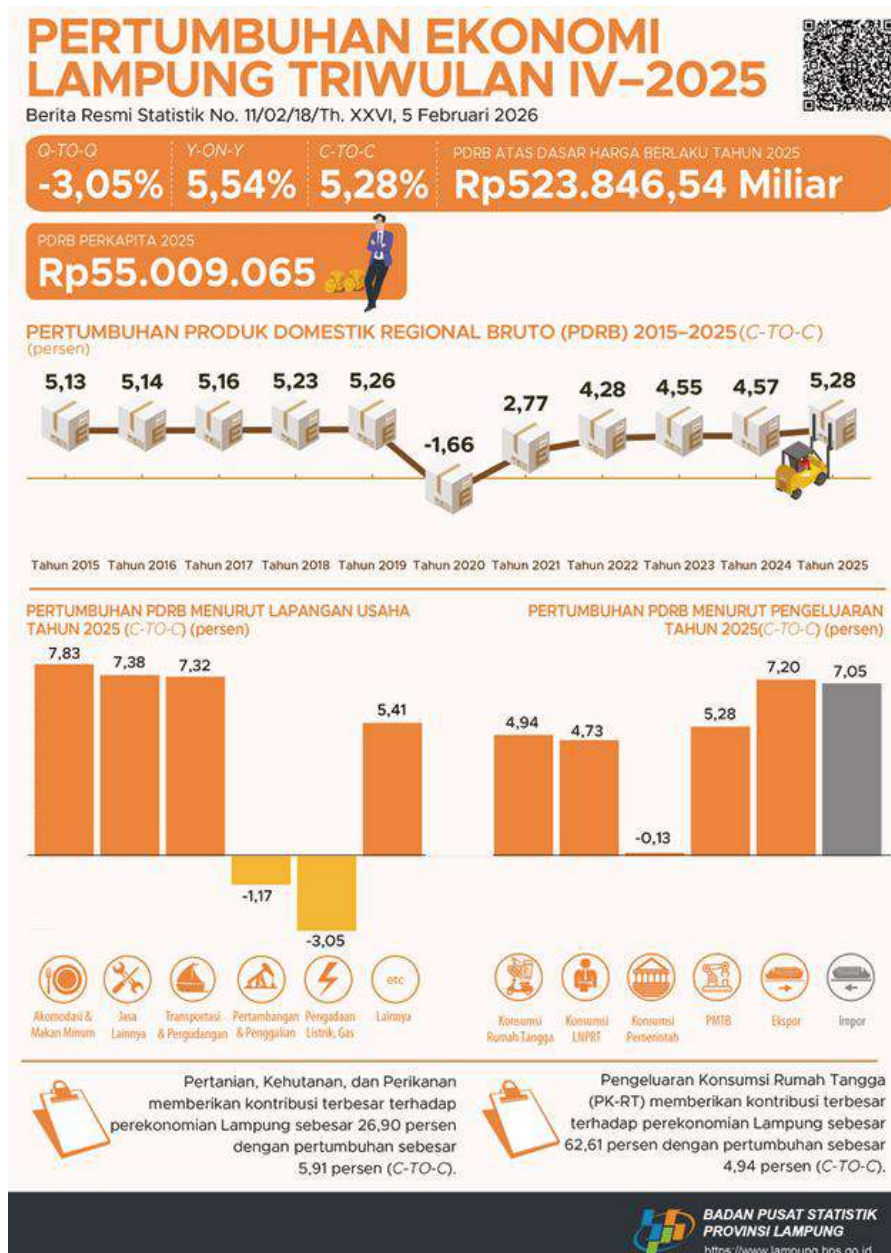


Sumber: BPS, Maret 2026

Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang ada pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2025-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029. Berikut ini informasi dan analisis mendalam terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari tahun ke tahun berumbuh. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, aktivitas ekonomi Lampung sepanjang tahun 2025 mengalami penguatan meskipun masih dihadapkan pada dinamika sektoral dan tekanan eksternal. Pertumbuhan ini dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh perubahan harga.

Gambar 3.9





Ekonomi Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 tumbuh solid sebesar 5,28 persen (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang kuat. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,57 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu pendorong utama dari sisi produksi. Berikut adalah poin-poin penting pertumbuhan ekonomi Lampung 2025:

- **Realisasi Tahunan:** Ekonomi Lampung tahun 2025 tumbuh 5,28% (yoy).
- **Triwulan IV-2025:** Tumbuh kuat sebesar 5,54% (yoy).
- **Kinerja Triwulan III-2025:** Tumbuh 5,04% (yoy) dan 5,19% (c-to-c), menjadikannya salah satu yang tertinggi di Sumatera.
- Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 7,83 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,20 persen.
- Pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga (tumbuh 4,94%), investasi/PMTB (6,05%), serta kinerja ekspor dan sektor pariwisata.
- **Investasi:** Realisasi investasi di beberapa wilayah, seperti Lampung Selatan, menembus angka Rp3,04 triliun pada 2025, melampaui target.
- **Indikator Sosial:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2025 meningkat menjadi 73,98, dan jumlah pengangguran berkurang.
- Perekonomian Lampung tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp523.846,54 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp296.420,65 miliar.

Secara keseluruhan, ekonomi Lampung tahun 2025 menunjukkan momentum pemulihan dan stabilitas yang menguat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh sektor lapangan usaha yang produktif. Berikut ini kondisi eksisting Provinsi Lampung tahun 2025:

PDRB menurut lapangan usaha

Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 7,83 persen dan 7,38 persen. Lapangan usaha Transportasi dan

Pengudangan juga mengalami pertumbuhan cukup besar mencapai 7,32 persen, yang diikuti Industri Pengolahan serta Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 6,32 persen dan 5,96 persen. Di sisi lain, terdapat lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,05 persen, serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 1,17 persen.

Grafik 3.24 Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha (c to c) (%)



Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2025 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 26,90 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,11 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,36 persen; serta Konstruksi sebesar 9,30 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,67 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2025

sebesar 5,28 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,44 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,16 persen, serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,80 persen. Sementara itu sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,88 persen.

Tabel 3.40 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,55	-1,95	5,91	27,30	26,29	26,90
B. Pertambangan dan Penggalian	2,96	4,86	-1,17	5,25	5,11	4,66
C. Industri Pengolahan	1,43	8,96	6,32	18,01	18,90	19,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,36	-6,43	-3,05	0,13	0,11	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	-0,31	2,54	0,10	0,10	0,09
F. Konstruksi	7,02	2,76	5,55	9,86	9,46	9,30
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,77	7,20	5,40	13,97	14,24	14,36
H. Transportasi dan Pergudangan	16,54	9,84	7,32	7,17	7,42	7,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,38	5,54	7,83	1,61	1,61	1,64
J. Informasi dan Komunikasi	7,50	8,62	4,53	3,88	3,90	3,75
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,19	4,81	5,96	2,02	1,99	1,99
L. Real Estat	0,86	6,76	3,96	2,61	2,63	2,60
M,N. Jasa Perusahaan	5,79	8,99	4,26	0,16	0,17	0,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	7,06	2,75	3,03	3,09	3,01
P. Jasa Pendidikan	2,23	1,49	1,85	2,82	2,83	2,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,87	7,29	2,25	0,98	1,00	0,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	15,38	10,63	7,38	1,11	1,16	1,18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,55	4,57	5,28	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Maret 2026

Tabel 3.41

Ringkasan Catatan Peristiwa Pertumbuhan PDRB Lampung C-to-C Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I s.d IV-2025

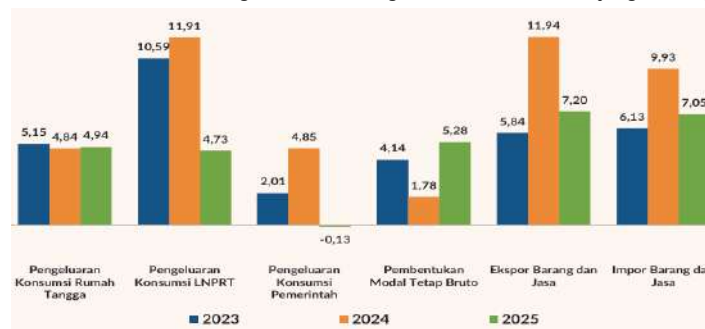
Kategori		Catatan Peristiwa
(1)	(2)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan seiring dengan kembali normalnya masa panen raya pada tahun 2025 2. Terjadi kenaikan produksi pada perkebunan tahunan, peternakan, dan perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian	Penurunan Produksi Minyak Bumi
C	Industri Pengolahan	Peningkatan aktivitas industri makanan dan minuman pada skala usaha besar dan sedang maupun mikro dan kecil
D	Pengadaan Listrik, Gas	Penurunan aktivitas penyaluran gas kota
E	Pengadaan Air	Peningkatan produksi air bersih
F	Konstruksi	Peningkatan penyelesaian kegiatan konstruksi yang ditandai dengan kenaikan Indeks Nilai Konstruksi yang diselesaikan dan realisasi pengadaan semen
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1. Menguatnya aktivitas perdagangan eceran didukung oleh berbagai momen libur panjang nasional 2. Terjadi peningkatan aktivitas ekspor dan impor barang luar negeri
H	Transportasi dan Pergudangan	Peningkatan arus penumpang pada angkutan rel, angkutan darat, ASDP, dan angkutan udara sejalan dengan berbagai momen libur panjang nasional
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Menguatnya aktivitas penyediaan makan-minum seiring dengan meningkatnya mobilitas selama berbagai momen libur panjang nasional 2. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makan-minum jadi
J	Informasi dan Komunikasi	1. Peningkatan <i>traffic</i> seluler dan internet selama berbagai momen libur panjang nasional 2. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang & jasa informasi dan komunikasi
K	Jasa Keuangan	Peningkatan aktivitas jasa perantara keuangan, asuransi & dana pensiun, serta jasa keuangan lainnya
L	Real Estate	1. Adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah 2. Peningkatan aktivitas penyewaan <i>venue</i> untuk pelaksanaan <i>event-event</i>
M, N	Jasa Perusahaan	Peningkatan aktivitas agen dan biro perjalanan wisata selama berbagai momen libur panjang nasional serta stimulus ekonomi pemerintah
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1. Peningkatan realisasi belanja pegawai oleh pemerintah 2. Adanya pengangkatan ASN PPPK di berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Lampung
P	Jasa Pendidikan	Peningkatan Jumlah Siswa Negeri dan Swasta pada jenjang SMP dan SMA
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Peningkatan aktivitas jasa kesehatan baik milik pemerintah dan swasta
R, S, T, U	Jasa lainnya	1. Peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan lampung 2. Pembukaan tempat wisata baru

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

PDRB menurut pengeluaran

Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,20 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,28 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,73 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB) tumbuh sebesar 7,05 persen. Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,61 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 55,49 persen; Komponen PMTB sebesar 30,99 persen; Komponen PK-P sebesar 6,25 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,80 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,35 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 57,49 persen.

Grafik 3.25 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran (%)



Grafik 3.25 PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran (%)

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,84	4,94	62,35	63,19	62,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,59	11,91	4,73	1,72	1,82	1,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,01	4,85	-0,13	6,60	6,57	6,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,14	1,78	5,28	32,33	31,09	30,99
5. Perubahan Inventori	-	-	-	0,25	-0,24	0,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,84	11,94	7,20	51,80	55,71	55,49
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	6,13	9,93	7,05	55,05	58,14	57,49
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,55	4,57	5,28	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.41

**Ringkasan Catatan Peristiwa Pertumbuhan PDRB Lampung C-to-C
Menurut Pengeluaran, Triwulan I s.d IV-2025**

Komponen		Catatan Peristiwa
(1)		(2)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Momen hari besar keagamaan mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada pengeluaran makanan, listrik, transportasi dan rekreasi
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	Peningkatan didorong meningkatnya konsumsi listrik kategori sosial
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Penurunan belanja barang dan jasa disebabkan oleh penurunan realisasi APBN dan APBD
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya realisasi pengadaan semen dan belanja modal APBD
5	Ekspor Barang dan Jasa	1. Peningkatan volume dan nilai ekspor barang terutama didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas utama diantaranya lemak dan minyak hewan; dan Kopi, teh, rempah-rempah 2. Peningkatan jumlah tamu asing yang menginap di hotel berbintang
6	Impor Barang dan Jasa	1. Peningkatan volume dan nilai impor barang terutama didorong oleh meningkatnya impor komoditas utama diantaranya lokomotif dan peralatan kereta api, bahan bakar mineral, dan ampas 2. Peningkatan jumlah perjalanan wisatawan ke luar negeri

Tabel 3.32 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Pertumbuhan Ekonomi

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Adanya factor eksternal seperti factor alam yang berpengaruh terhadap produksi pertanian, Kesehatan hewan dan aktivitas perdagangan.	Adanya kolaborasi crosscutting dalam upaya peningkatan LPE Provinsi Lampung baik dalam lingkup internal maupun lintas sectoral. Pemanfaatan IT dalam mempermudah pekerjaan dan memperluas jangkauan tersebarnya data informasi terkait sub sektor peningkatan LPE Adanya komitmen pimpinan dalam implementasi langkah kebijakan yang mendukung peningkatan LPE	Meminimalisirkan resiko terhadap kinerja dengan mensosialisasikan dan menerapkan manajemen resiko kepada para petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha agar aktifitas produksi, perdagangan tidak terlalu berpengaruh terhadap factor eksternal.	Hilirisasi komoditas sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kegiatan promosi investasi dalam Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) Stimulus fiskal pemerintah dalam kegiatan produksi pertanian, Perkebunan, peternakan serta bantuan modernisasi alat industry. Pemberian beasiswa pada bidang pertanian kepada anak petani guna meningkatkan minat usaha bidang pertanian

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

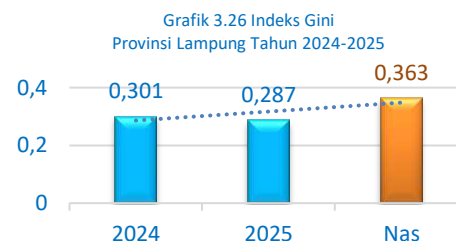
2. Gini rasio

Tabel 3.43 Capaian Gini Ratio					
Sasaran	Terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif				
IKU	Gini Rasio				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	0,301	-	-
2	2025	0,300-0,295	0,287	102,78	-
3	2029	0,271-0,275	-	95,81	-
4	Nas	-	0,363	126,64	

Grafik 3.26 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks Gini
2024	0,301
2025	0,287
2029	0,363

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif memiliki indikator **gini rasio** dengan realisasi kinerja sebesar 0,287 dari target sebesar **0,300-0,295** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,78% dengan **kategori sangat memuaskan**. Perhitungan didapat dari realisasi tahun 2025 berbanding dengan batas atas (perhitungan negatif maksudnya nilai baik akan semakin kecil).
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 0,301. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Hal ini menggambarkan ketimpangan lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2026 maka capaian mencapai 95,81%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian saat ini masih relevan dengan target 2026 karena target pada IKU ini bersifat range.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,076% dengan capaian 126,64%.

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Komponen Penyusun Indeks Gini

Indeks Gini disusun berdasarkan distribusi kumulatif pengeluaran penduduk yang digambarkan melalui Kurva Lorenz. Secara konseptual, komponen utama penyusun Indeks Gini meliputi:

1. Distribusi pengeluaran antar rumah tangga, yang menggambarkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok penduduk.
2. Proporsi pengeluaran kelompok penduduk, khususnya perbandingan antara kelompok 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.
3. Kesenjangan wilayah, terutama perbedaan pola pengeluaran antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
4. Struktur ekonomi dan kesempatan kerja, yang memengaruhi variasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
5. Semakin kecil jarak distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk, maka nilai Indeks Gini akan semakin rendah, yang mencerminkan kondisi pemerataan yang lebih baik.

Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2025

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Lampung yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,287. Angka ini turun 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,292 dan turun 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,301.

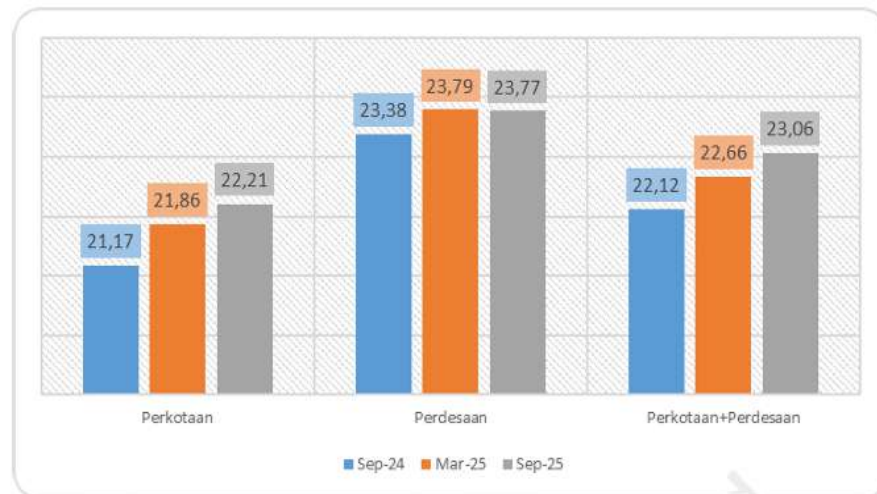
Grafik 3.27 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,312, turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,319 serta Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,329. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,265; naik dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,261 tetapi turun dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,270.

Grafik 3.28 Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Pada September 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 23,06 persen yang berarti Lampung berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2025 mengalami kenaikan 0,40 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2025. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 22,21 persen atau tergolong ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2025 sebesar 23,77 persen yang juga berarti pada kategori ketimpangan rendah. Tren ini mengindikasikan bahwa:

- Pertumbuhan ekonomi daerah relatif dapat dinikmati oleh kelompok penduduk yang lebih luas,
- Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah memberikan dampak positif,
- Kesenjangan antar kelompok ekonomi tidak mengalami pelebaran, bahkan cenderung menyempit.

Dengan demikian, perkembangan Indeks Gini Lampung mencerminkan proses pembangunan yang semakin inklusif.

Tabel 3.44 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Indeks Gini

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Ketimpangan sektoral di perkotaan lebih tinggi daripada sektor tradisional di pedesaan yang terlihat lebih lambat.	Program pusat dan daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta subsidi efektif dalam menjaga daya beli masyarakat (pasar murah)	Meminimalisirkan resiko terhadap kinerja dengan mensosialisasikan dan menerapkan manajemen resiko kepada para petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha agar aktifitas produksi, perdagangan meningkat dan tingkat pendapatan meningkat.	Hilirisasi komoditas sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Masih adanya pengangguran tertentu yang menghambat distribusi pendapatan yang merata karena tidak berproduksi tetap	Terkendalinya inflasi daerah sehingga harga komoditas menjadi lebih stabil.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan usia aktif guna meningkatkan skill dan menurunkan angka pengangguran terbuka sehingga pendapatan merata	Kegiatan promosi investasi dalam Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) Stimulus fiskal pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian beasiswa pada bidang pertanian kepada anak petani guna meningkatkan minat usaha bidang pertanian

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

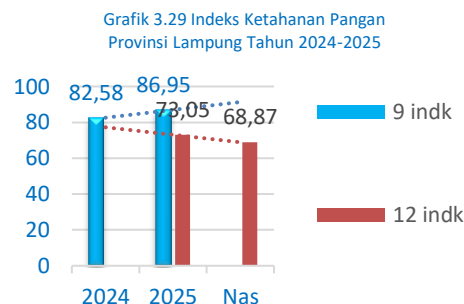
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Tabel 3.45 Capaian Indeks ketahanan pangan					
Sasaran	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional				
IKU	Indeks ketahanan pangan				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	82,58	-	9 indk
2	2025	83,07 (9 indk)	86,95 (9 indk) setaraf dg 73,05 (12 indk)	104,67	Perubahan metode hitung
3	2029	85,11	-	102,16	9 indk
4	Nas	-	68,87	106,06	12 indk

Grafik 3.29 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	9 indk	12 indk
2024	82,58	86,95
2025	73,05	68,87

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 202



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya produktivitas sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional memiliki indikator indeks ketahanan pangan dengan realisasi kinerja sebesar 86,95 (metode hitung 9 indikator) yang merupakan hasil konversi dari 73,05 (metode hitung 12 indikator) dari target sebesar 83,07 (metode hitung 9 indikator) yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **104,67%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Perubahan metode hitung dari 9 ke 12 indikator ditetapkan pada bulan oktober 2025.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 82,58 dengan menggunakan metode hitung 9 indikator. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,37%. Realisasi tahun 2024 merupakan realisasi dengan metode perhitungan 9 indikator.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2026 maka capaian mencapai 106,06% dengan metode hitung 9 indikator.
4. Realisasi Kinerja tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional dengan metode hitung 12 inikator maka kinerja Provinsi Lampung lebih tinggi 4,18% dari nasional dengan capaian 106,06%.
5. Perlu adanya perubahan target pada indikator IKP karena adanya perubahan metode perhitungan oleh pusat. Sehingga target tahun mendatang akan mendapatkan realisasi kinerja berdasarkan perhitungan metode baru, bukan lagi dari hasil konversi dengan metode perhitungan lama.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang tinggi menunjukkan sistem ketahanan pangan daerah Provinsi Lampung yang kuat sehingga mendukung peran Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung selama 5 tahun berturut-turut termasuk dalam katagori sangat tahan pangan ($> 75,68$) dan jauh diatas nilai indeks ketahanan pangan secara nasional. Indeks Ketahanan Pangan yang tinggi ini didukung oleh kinerja tiga pilar utamanya yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Berikut ini peringkat IKP nasional Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2025, Lampung menduduki peringkat 15 Nasional dengan IKP sebesar 73,05 dengan menggunakan metode perhitungan 12 Indikator.

Tabel 3.46 IKP Nasional se-Sumatera Tahun 2025

NO	KODE PROV	PROVINSI	TAHUN	IKP	PERINGKAT
1	11	ACEH	2025	69.9998339779704	25
2	12	SUMATERA UTARA	2025	71.4663313318733	22
3	13	SUMATERA BARAT	2025	77.7238279911911	7
4	14	RIAU	2025	70.4190034922395	23
5	15	JAMBI	2025	76.1605704297545	9
6	16	SUMATERA SELATAN	2025	79.3096701296974	4
7	17	BENGKULU	2025	69.8867217749869	26
8	18	LAMPUNG	2025	73.0594723108079	15
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2025	76.1999436233039	5
10	21	KEPULAUAN RIAU	2025	71.9564162333589	19

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Maret 2026

Berdasarkan tabel di atas, kondisi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah berada pada level yang baik dan relatif lebih kuat dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya.

Ketahanan pangan daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ketahanan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan



pangan yang berkualitas dan bergizi. IKP disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Dengan pendekatan tersebut, IKP tidak hanya mencerminkan kecukupan pasokan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan secara layak serta kualitas konsumsi yang mendukung kesehatan dan produktivitas.

Indeks Ketahanan Pangan yang tinggi ini didukung oleh kinerja tiga pilar utamanya yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Aspek ketersediaan pangan karena tersedia pangan yang cukup, stabil, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan produksi pangan utama (padi, jagung, umbi, protein hewani) yang mencukupi kebutuhan daerah, adanya cadangan pangan pemerintah/masyarakat yang memadai dan dukungan infrastruktur pertanian (irigasi, lahan, sarana produksi) yang berfungsi baik.

Aspek keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengakses pangan secara ekonomi dan fisik, antara lain harga pangan relatif stabil dan terjangkau di Provinsi Lampung, distribusi pangan lancar hingga wilayah terpencil dan akses pasar dan infrastruktur transportasi memadai sehingga masyarakat mampu membeli pangan secara rutin dan risiko kerawanan pangan menurun

Aspek pemanfaatan pangan terlihat dari pangan yang tersedia dan terjangkau tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan memiliki nilai gizi. Hal ini tercermin dari pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), prevalensi stunting, gizi buruk, dan penyakit terkait pangan rendah, akses air bersih dan sanitasi layak sehingga meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional melakukan pemutakhiran metodologi dalam penyusunan FSVA dan IKP. Ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengimplementasikan kerangka kerja FSVA yang modern dan responsif dalam



mengukur situasi ketahanan pangan. FSVA dan IKP tahun 2025 ini adalah edisi pertama dengan metodologi baru. Pemutakhiran ini tidak hanya soal teknis, tetapi menyangkut bagaimana data dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung penguatan cadangan pangan, mendorong konsumsi pangan lokal berbasis sumber daya lokal, serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Pemutakhiran dilakukan secara inklusif melibatkan berbagai instansi sumber data, pengelola FSVA di pusat dan daerah, pengguna, serta para pakar melalui beberapa kali diskusi terpumpun (Focus Group Discussion). Perubahan indikator IKP dari 9 menjadi 12 untuk tahun 2025 bertujuan untuk mencakup dimensi ketahanan pangan yang lebih komprehensif (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, stabilitas) dan menangkap isu-isu terkini seperti dampak perubahan iklim, kualitas pangan, serta kondisi sosial-ekonomi yang tidak sepenuhnya terwakili sebelumnya, menjadikannya baseline baru yang lebih akurat untuk intervensi strategis dan evaluasi pembangunan pangan nasional, termasuk penurunan stunting dan penguatan cadangan pangan.

Alasan utama perubahan yaitu :

1. Komprehensif dan Holistik : Mengintegrasikan lebih banyak aspek dari empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan (produksi, logistik), keterjangkauan (kemiskinan, harga), pemanfaatan (gizi, sanitasi), dan stabilitas (ketahanan pangan jangka panjang).
2. Menangkap Isu Baru: Menambahkan indikator untuk mengatasi tantangan seperti penurunan lahan pertanian, kualitas pangan, diversifikasi pangan, dan kerentanan akibat ketidakstabilan global.
3. Baseline Baru: Edisi 2025 menjadi fondasi baru untuk evaluasi kinerja ketahanan pangan ke depan, memastikan data yang digunakan lebih relevan dan terkini.
4. Intervensi Lebih Tepat : Dengan indikator lebih kaya, pemerintah pusat dan daerah dapat menentukan prioritas program yang lebih efektif, dari penanganan stunting hingga penguatan cadangan pangan, ungkap Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional.
5. Adaptasi Metodologi : Perubahan ini juga mencerminkan penyesuaian metodologi penghitungan IKP agar lebih sensitif terhadap dinamika pangan nasional.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) versi 9 indikator (untuk Kabupaten) dan 12 indikator (versi lebih komprehensif/kota) memiliki kesamaan pada pilar dasar (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan) namun berbeda pada jumlah dan spesifikasi indikatornya, dengan IKP 9 fokus pada ketersediaan komoditas dasar (padi, jagung), akses (miskin, air bersih, listrik), dan pemanfaatan (stunting, lama sekolah perempuan, angka harapan hidup), sementara versi 12 (sering disebut IKP 12) memasukkan indikator lebih rinci seperti kepemilikan ternak, kepemilikan aset, dan indikator gizi tambahan, mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas untuk gambaran lebih utuh ketahanan pangan suatu wilayah.

Persamaan:

1. Dasar Pilar: Keduanya berbasis pada tiga pilar utama ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan (akses), dan pemanfaatan (utilisasi) pangan, bahkan ada yang menambahkan dimensi stabilitas.
2. Tujuan: Mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah untuk perbandingan dan perencanaan kebijakan.
3. Komponen Inti: Beberapa indikator dasar seperti persentase penduduk miskin, akses air bersih, dan stunting sering muncul di kedua versi.

Perbedaan

1. Jumlah Indikator: IKP 9 memiliki 9 indikator utama, sementara IKP 12 memiliki 12 indikator yang lebih detail.
2. Fokus:
 - a. IKP 9 (Kabupaten): Lebih fokus pada ketersediaan komoditas pangan pokok (padi, jagung, dll.), akses dasar (miskin, air bersih, listrik), dan aspek pemanfaatan/kesehatan dasar (stunting, lama sekolah perempuan, angka harapan hidup).
 - b. IKP 12: Menambahkan indikator untuk memperdalam dimensi seperti stabilitas dan kualitas, contohnya kepemilikan ternak, kepemilikan aset, konsumsi pangan beragam, serta indikator lain yang mencakup lebih banyak aspek ketahanan pangan secara holistik.
3. Kedalaman Analisis: IKP 12 memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena mencakup indikator yang lebih spesifik terkait kualitas, keberlanjutan, dan keragaman pangan, tidak hanya ketersediaan pokok.

Perubahan indikator IKP dari 9 menjadi 12 untuk tahun 2025 bertujuan untuk mencakup dimensi ketahanan pangan yang lebih komprehensif (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, stabilitas) dan menangkap isu-isu terkini seperti

dampak perubahan iklim, kualitas pangan, serta kondisi sosial-ekonomi yang tidak sepenuhnya terwakili sebelumnya, menjadikannya baseline baru yang lebih akurat untuk intervensi strategis dan evaluasi pembangunan pangan nasional, termasuk penurunan stunting dan penguatan cadangan pangan.

Maka implikasi berdasarkan perubahan indikator ini, komposit Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan perhitungan 9 Indikator sebesar **82,58** yang ekuivalen dengan komposit Indeks Ketahanan Pangan berdasarkan perhitungan 12 Indikator sebesar 71,90. Penurunan nilai IKP tersebut bukan murni penurunan kualitas, namun menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan indikator akan berimplikasi pada adanya variabel yang belum optimal, seperti masalah harga pangan dan lahan. Pada tahun 2025 berdasarkan perhitungan 12 Indikator, komposit Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebesar **73,05**. Terjadi kenaikan komposit IKP sebesar 1,15 dengan peningkatan sebesar 1,6 %.

Apabila kinerja 2025 yang terhitung dari 12 indikator mencapai 73,05 dikonversikan dengan perhitungan 9 indikator maka kinerja Provinsi Lampung menjadi 86,95. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya:

1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui kegiatan gerakan pangan murah (GPM).

GPM terlaksana sebanyak 2 kali di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat memperoleh kemudahan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan mengurangi beban pengeluaran.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan operasional petugas kios pangan pada Dinas KPTPH sebanyak 1 (satu) orang selama 10 Bulan untuk Tahun Anggaran 2025. GPM terlaksana pada 3 tempat, yaitu: Masjid Airan Raya, TVRI Lampung, dan Aktivitas Kios Pangan di Dinas KPTPH.



2. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan UPTD BPMKP melalui kegiatan pemantauan/pengawasan pangan segar asal tumbuhan di Provinsi Lampung dengan uji cepat (rapid test) sampel komoditi sayur dan buah-buahan (Terdapat 18 sampel yang diuji) di 3 Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pasar Natar (Lampung Selatan),
2. Pasar Cendrawasih (Kota Metro), dan
3. Pasar Pekalongan (Lampung Timur).



Selain itu, UPTD BPMKP melaksanakan pembayaran iuran tahunan kepada Lembaga Sertifikasi Produk Organik (LsPro Organik) sebesar Rp1.500.000 per tahun pada Tahun Anggaran 2025, guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan sertifikasi produk organik

Data Tambahan		REKAPITULASI DATA	
No. Urut	Isi	No. Urut	Isi
1	Anggota Tim	1	Anggota Tim
2	Anggota Tim	2	Anggota Tim
3	Anggota Tim	3	Anggota Tim
4	Anggota Tim	4	Anggota Tim
5	Anggota Tim	5	Anggota Tim
6	Anggota Tim	6	Anggota Tim
7	Anggota Tim	7	Anggota Tim
8	Anggota Tim	8	Anggota Tim
9	Anggota Tim	9	Anggota Tim
10	Anggota Tim	10	Anggota Tim
11	Anggota Tim	11	Anggota Tim
12	Anggota Tim	12	Anggota Tim
13	Anggota Tim	13	Anggota Tim
14	Anggota Tim	14	Anggota Tim
15	Anggota Tim	15	Anggota Tim
16	Anggota Tim	16	Anggota Tim
17	Anggota Tim	17	Anggota Tim
18	Anggota Tim	18	Anggota Tim

Tabel 3.47 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Indeks Ketahanan Pangan

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Adanya factor eksternal seperti factor alam yang berpengaruh terhadap produksi pertanian, Kesehatan hewan dan aktivitas perdagangan.	Adanya kolaborasi crosscutting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan Provinsi Lampung baik dalam lingkup internal maupun lintas sectoral.	Meminimalisirkan resiko terhadap kinerja dengan mensosialisasikan dan menerapkan manajemen resiko kepada para petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha agar aktifitas produksi, perdagangan tidak terlalu berpengaruh terhadap factor eksternal.	Hilirisasi komoditas sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Fluktuasi harga input sehingga kenaikan harga pupuk, bibit menekan jumlah luas tanam tanaman produksi.	Pemanfaatan IT dalam mempermudah pekerjaan dan memperluas jangkauan tersebarnya data informasi terkait sub sektor peningkatan LPE		Stimulus fiscal pemerintah dalam kegiatan produksi pertanian, Perkebunan, peternakan serta bantuan modernisasi alat industry.
	Stimulus pemerintah dalam hilirasi komoditas serta bantuan alat pertanian, Perkebunan, industry serta pendukung lainnya seperti infrastruktur pengairan.		Pemberian beasiswa pada bidang pertanian kepada anak petani guna meningkatkan minat usaha bidang pertanian

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

4. Persentase Desa Mandiri

Tabel 3.48 Capaian Desa Mandiri					
Sasaran	Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa				
IKU	Persentase desa mandiri				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	14,68	-	-
2	2025	21,42	22,89	106,9	-
3	2029	25,22	-	90,76	-
4	Nas	-	24,5	93,43	-

Grafik 3.30 Desa Mandiri
 Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Persentase (%)
2024	14,68
2025	22,89
2029	27,2

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa memiliki indikator **persentase desa mandiri** dengan realisasi kinerja sebesar 22,89 dari target sebesar 21,42 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **106,9** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 14,68. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 8,22 poin.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 90,76%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka realisasi kinerja Provinsi Lampung lebih rendah 1,61 poin dengan capaian kinerja sebesar 93,43%.

Berdasarkan pendataan 2025 oleh Kemendes PDTT (Juni 2025), tercatat total **20.503 desa mandiri** di seluruh Indonesia. Provinsi Lampung belum masuk dalam 10 besar Desa Mandiri terbanyak secara nasional. Namun pada awal tahun 2026, tercatat bahwa Provinsi Lampung berada di tingkat 10 besar nasional untuk kategori pertumbuhan kemandirian desa.





Berikut merupakan capaian indikator Persentase Desa Mandiri dibandingkan dengan Nasional.

Tabel 3.49. Perbandingan Skor & Status Desa

Indikator	Provinsi Lampung	Nasional (Rata-rata)
Status Desa Tertinggal	0% (Bebas Desa Tertinggal)	Masih terdapat ±9.366 desa (11%)
Persentase Desa Mandiri	22,9% (561 dari 2.446 desa)	±24,5% (20.503 dari 83.762 desa)
Jumlah Desa Mandiri	561 Desa	20.503 Desa
Fokus Pembangunan	Smart Village & Penguatan BUMDes	Layanan Dasar & Ketahanan Pangan

Sumber: Dinas PMDT Provinsi Lampung, Maret 2026

Berdasarkan Statistik Nasional 2025, Total desa/kelurahan di Indonesia pada 2025 mencapai **83.762 unit**. Pencapaian ini didukung oleh alokasi **Dana Desa 2025 sebesar Rp71 triliun** yang diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi melalui BUMDes. Berdasarkan klasifikasi terbaru, komposisi desa secara nasional adalah:

- Mandiri:** 20.503 desa
- Maju:** 23.579 desa
- Berkembang:** 21.813 desa
- Tertinggal:** 4.672 desa
- Sangat Tertinggal:** 4.694 desa

Berdasarkan hasil pemutakhiran data **Indeks Desa (ID) 2025**, Provinsi Lampung menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan dengan **rata-rata nasional**, terutama dengan keberhasilannya menghapus status desa tertinggal. Data yang diperoleh dari Dinas PMDT Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa klasifikasi desa di Lampung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Mandiri:** 561 desa (Naik signifikan dari 360 desa di 2024).
- Maju:** 1.186 desa.
- Berkembang:** 699 desa.
- Tertinggal/Sangat Tertinggal:** 0 desa.

Berikut adalah detail peringkat dan pencapaian Lampung tahun 2025:

- Peringkat Desa Maju:** Lampung menempati urutan ke-6 secara nasional dengan jumlah **1.186 Desa Maju**.
- Peringkat Desa Mandiri:** Secara keseluruhan, Lampung masuk dalam jajaran **10 besar nasional** dengan total **561 Desa Mandiri** per Januari 2026.



- c) **Berkembang:** 699 desa.
- d) **Prestasi Nasional:** Provinsi Lampung meraih **Terbaik 3 Nasional** dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 berkat efektivitas program "**Desaku Maju**" dalam mendorong kemandirian desa.
- e) **Status Wilayah:** Per awal 2026, Lampung telah dinyatakan **100% bebas dari status Desa Tertinggal** dan Desa Sangat Tertinggal.

Persentase Desa Mandiri adalah ukuran statistik menunjukkan proporsi jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri dari total seluruh desa di suatu wilayah tertentu. Desa mandiri sendiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat baik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara optimal, sesuai dengan yang diukur melalui alat ukur tunggal yang menilai kinerja pembangunan desa secara komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Indeks Desa).

Status Desa Mandiri Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menggeser paradigma pembangunan desa dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju kemandirian yang berkelanjutan. Indikator **Persentase Desa Mandiri** ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan utama dalam membina desa-desa di Lampung. Indikator ini menggunakan Indeks Desa (ID) sebagai instrumen nasional memastikan bahwa penilaian status desa dilakukan secara objektif melalui 6 dimensi utama. Desa Mandiri merepresentasikan entitas yang memiliki kemampuan manajerial dan sumber daya yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara berdikari. Indeks Desa Membangun (IDM) antara tahun 2024 dan 2025 (mengacu pada baris terakhir sebagai total kumulatif):

Tabel 3.50 Perbandingan Total Status IDM tahun 2024 dan 2025

Status Desa	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Sangat Tertinggal	0	0	Tetap
Tertinggal	4	0	Turun 4 (0%)
Berkembang	911	699	Turun 212
Maju	1.171	1.186	Naik 15
Mandiri	360	561	Naik 201

Sumber: Dinas PMDT Provinsi Lampung, Maret 2026

Berdasarkan table diatas, maka kondisi eksisteing status desa Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



1. **Peningkatan Signifikan pada Desa Mandiri:** Terjadi lonjakan jumlah Desa Mandiri dari 360 desa menjadi 561 desa (bertambah 201 desa).
2. **Penurunan Desa Berkembang:** Jumlah desa dengan status Berkembang berkurang drastis (turun 212 desa), yang mengindikasikan sebagian besar desa tersebut telah naik kelas menjadi desa Maju atau Mandiri.
3. **Pengentasan Desa Tertinggal:** Pada tahun 2025, tercatat sudah tidak ada lagi desa dengan status "**Tertinggal**" (dari sebelumnya 4 desa pada tahun 2024).
4. **Tren Positif:** Secara keseluruhan, data menunjukkan tren pembangunan yang positif dengan pergeseran status desa dari kategori rendah (Tertinggal/Berkembang) menuju kategori yang lebih tinggi (Maju/Mandiri).

Klasifikasi status desa pada tahun **2026** menggunakan instrumen **Indeks Desa (ID)**, yang mengukur tingkat kemajuan berdasarkan enam dimensi utama: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Peningkatan jumlah Desa Mandiri ditujukan untuk memperkuat struktur ketahanan daerah. Dengan semakin banyaknya desa yang mencapai status tertinggi ini, beban ketergantungan terhadap bantuan stimulan dari pusat/daerah akan berkurang, digantikan oleh tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan inovatif.

ID menjadi alat ukur dalam menentukan status desa secara nasional, dan merupakan alat pengukuran resmi yang diakui secara nasional. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Kementrian Desa PDTT RI sebagai instansi pembina setiap tahunnya. Perkembangan persentase Desa Mandiri di Provinsi Lampung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, dengan capaian sebesar **22,9 persen pada tahun 2025**. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penguatan kapasitas desa serta efektivitas berbagai program pembangunan perdesaan yang telah dilaksanakan. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 27,2 persen, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan desa guna meningkatkan status kemandirian desa secara lebih merata. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian desa masih menghadapi keterbatasan pada aspek ekonomi, pelayanan dasar, maupun tata kelola pemerintahan desa.

Tabel 3.51 Maping Status Desa Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2025

NO	KABUPATEN	Jumlah KEC	Jumlah DESA	STATUS IDM 2019					STATUS IDM 2020					STATUS IDM 2021					STATUS IDM 2022					STATUS IDM 2023					STATUS IDM 2024					STATUS ID 2025				
				SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TER TINGGAL	TER TINGGAL	BER KEMBANG	MAJU	MANDIRI					
1	LAMPUNG SELATAN	17	256	-	13	206	37	-	-	8	196	52	-	0	6	187	63	0	0	1	165	90	0	0	0	145	109	2	0	0	122	114	20	0	0	95	121	40
2	LAMPUNG TENGAH	28	301	-	26	221	54	-	-	11	207	83	-	0	3	174	121	3	0	0	138	147	16	0	0	103	168	30	0	0	64	189	48	0	0	47	185	69
3	LAMPUNG UTARA	23	232	-	104	121	7	-	-	44	171	17	-	0	24	186	22	0	0	2	194	36	0	0	0	189	43	0	0	0	152	75	5	0	0	124	90	18
4	LAMPUNG BARAT	15	131	-	14	85	30	2	-	1	76	44	10	0	0	30	61	40	0	0	21	63	47	0	0	16	64	51	0	0	11	57	63	0	0	14	49	68
5	TULANG BAWANG	15	147	3	37	102	5	-	-	9	122	15	1	0	3	119	24	1	0	3	107	33	4	0	0	95	48	4	0	0	65	65	17	0	0	39	75	33
6	TANGGAMUS	20	299	4	53	223	19	-	-	24	236	39	-	0	6	242	51	0	0	3	220	76	0	0	0	189	108	2	0	0	148	140	11	0	0	123	142	34
7	LAMPUNG TIMUR	24	264	-	63	182	19	-	-	31	214	19	-	0	22	204	38	0	0	4	160	96	4	0	0	137	114	13	0	0	90	131	43	0	0	43	139	82
8	WAY KANAN	15	221	6	78	134	3	-	-	21	180	20	-	0	19	172	29	1	0	2	155	54	10	0	0	98	97	26	0	0	48	127	46	0	0	41	101	79
9	PESAWARAN	11	148	-	11	118	12	3	-	3	123	12	6	0	1	123	13	7	0	0	103	31	10	0	0	93	44	11	0	0	69	51	28	0	0	53	58	37
10	PRINGSEWU	9	126	-	11	94	20	1	-	-	86	37	3	0	0	56	64	6	0	0	32	82	12	0	0	25	82	19	0	0	14	76	36	0	0	18	68	40
11	MESUI	7	105	3	26	62	14	-	1	15	71	18	-	0	11	66	28	0	0	9	51	45	0	0	0	45	51	9	0	0	38	51	16	0	0	28	56	21
12	TULANG BAWANG BARAT	9	100	-	12	73	8	-	-	8	77	8	-	0	4	75	13	1	0	0	64	28	1	0	0	49	40	11	0	0	43	39	18	0	0	29	47	24
13	PESIR BARAT	11	116	3	56	53	4	-	5	51	53	6	1	0	29	71	15	1	0	14	79	22	1	0	4	69	40	3	0	4	47	56	9	0	0	45	55	16
	JUMLAH	204	2446	19	504	1674	232	6	6	226	1812	370	21	0	128	1705	542	60	0	38	1489	803	105	0	4	1253	1008	181	0	4	911	1171	360	0	0	699	1186	561

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Januari 2026

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pengentasan Desa Tertinggal:** Provinsi Lampung menunjukkan progres signifikan dengan berhasil menghapus status **Sangat Tertinggal** sepenuhnya sejak tahun 2021. Pada proyeksi/data tahun 2025, status **Tertinggal** juga mencapai angka **0**.
- Pertumbuhan Desa Mandiri:** Terjadi lonjakan drastis jumlah Desa Mandiri, dari hanya **6 desa** di 2019 menjadi **561 desa** pada tahun 2025.
- Dominasi Status:** Sejak tahun 2024, jumlah **Desa Maju** telah melampaui jumlah Desa Berkembang, menandakan pergeseran kualitas kemandirian desa yang semakin membaik secara kolektif.
- Kabupaten dengan Desa Mandiri Terbanyak (2025):**
 - Lampung Timur:** 82 Desa Mandiri.
 - Way Kanan:** 79 Desa Mandiri.
 - Lampung Tengah :** 69 Desa Mandiri.
 - Lampung Barat :** 68 Desa Mandiri.
- Pada tahun 2025, perkembangan status desas dari total 2.446 desa diketahui proporsinya dengan perincian desa mandiri: 22,9%; maju: 48,5% (Hampir separuh dari total desa di Lampung); berkembang: 28,6% dan tertinggal & sangat tertinggal: 0%.

Program-program unggulan dan inovasi tersebut diharapkan dapat terus terlaksana secara berkelanjutan dan terus dikembangkan dikemudian hari agar target tujuan sasaran pembangunan daerah provinsi Lampung sesuai visi misi daerah provinsi Lampung.



DESAKU Maju

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan melalui Program Desaku Maju sebagai salah satu program unggulan daerah. Program Desaku Maju adalah inovasi Sistem Ekonomi Desa yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan secara inklusif dan berkelanjutan. Program ini berfokus pada penguatan perekonomian desa melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan nilai tambah produk unggulan desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Program Desaku Maju juga menempatkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sebagai instrumen penting untuk memperluas akses pasar produk desa. Integrasi sektor pariwisata turut menjadi bagian dari strategi program, guna membangun ekosistem ekonomi desa yang adaptif, produktif, dan berdaya saing. Sebagai wadah promosi dan pemasaran, Program Desaku Maju memfasilitasi pengenalan produk unggulan desa ke pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat jejaring pelaku usaha lokal. Berbagai kegiatan dan event berbasis potensi budaya, ekonomi kreatif, serta kearifan lokal terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa tanpa menghilangkan identitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi motor penggerak pembangunan Desa di Provinsi Lampung menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan cita-cita Provinsi Lampung melalui Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Lampung, Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan, Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Kelurahan serta Pembinaan dan Pelaksanaan Transmigrasi.

Posyandu

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka prevalensi stunting di Provinsi Lampung masih berada pada angka 15,9%. Meski sempat menunjukkan tren positif, angka ini masih melampaui ambang batas yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa ribuan balita di 15 kabupaten/kota masih dihantui risiko gangguan pertumbuhan akibat keterbatasan asupan gizi kronis. Di saat yang sama, Posyandu masih sering dipandang secara sempit hanya sebagai tempat menimbang



bayi secara seremonial. Tata kelola administrasinya pun masih tertinggal dan belum selaras dengan mandat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang menuntut layanan lebih modern dan terintegrasi dengan 6 Standar Layanan Minimal (SPM) yakni, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Sosial dan Bidang Tantribumlinmas.

Sebagai langkah konkret menghadapi data tersebut, Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung menginisiasi intervensi melalui pemberian bantuan gizi tambahan sebanyak 10.000 liter yang dialokasikan khusus untuk 2.500 balita sasaran. Upaya ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi percepatan penurunan stunting yang menasar langsung pada akar masalah, yakni pemenuhan nutrisi di tingkat akar rumput

Perubahan besar juga terjadi pada aspek kelembagaan. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Tim Pembina Provinsi turun langsung ke desa-desa untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi revitalisasi. Hasilnya, para Stakeholder dan pemangku kepentingan kini memiliki pemahaman yang jauh lebih tajam mengenai revitalisasi Posyandu. Posyandu tidak lagi berjalan secara konvensional, melainkan mulai bertransformasi mengikuti 6 Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta regulasi terbaru yang lebih profesional dan terukur.

Melalui pendampingan dan revitalisasi sesuai regulasi terbaru, Posyandu kini bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang lebih berdaya., Tim Pembina Posyandu kini memiliki peran strategis sebagai pusat layanan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya memantau timbangan, tetapi menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah stunting secara berkelanjutan demi mencetak generasi emas Lampung yang lebih sehat.

Desa TAPIS

Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) adalah program inovatif dari Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang fokus memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menguatkan ekonomi lokal melalui sinergi antara pemerintah, PKK, dan masyarakat,



dengan kegiatan seperti dukungan gizi, penguatan ekonomi perempuan (UEP/AUPZK), pelatihan, hingga program ketahanan pangan berbasis desa. Inovasi ini bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat desa.
2. Memperkuat kemandirian keluarga dan pemberdayaan perempuan.
3. Mencapai ketahanan pangan dan gizi, termasuk penurunan stunting.
4. Memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha produktif.

Kegiatan dan bantuan yang telah diberikan diantaranya:

1. **Bidang kesehatan dan gizi** yaitu: modul Posyandu, susu balita, sembako, alat bantu lansia & disabilitas.
2. **Bidang ekonomi** yaitu: mesin jahit untuk Usaha Ekonomi Perempuan (UEP), pelatihan perempuan kepala keluarga.
3. **Bidang ketahanan pangan** yaitu: bantuan bibit cabai untuk program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah Nyaman PKK).
4. **Bidang infrastruktur** yaitu: peningkatan jalan desa untuk konektivitas.

BUMDes Maju

Program **BUMDes Maju** merupakan bagian integral dari program unggulan Gubernur yang disebut "**Desaku Maju**". Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Program ini dijalankan melalui mekanisme **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)** dengan fokus pada:

- **Hilirisasi Komoditas:** Mendorong BUMDes dan Gapoktan untuk mengelola produksi hingga pascaproduksi pada tiga komoditas utama: padi, jagung, dan singkong.
- **Inkubasi BUMDes:** Melakukan pembinaan intensif untuk mengubah status BUMDes dari berkembang menjadi **Maju** melalui penguatan kelembagaan dan profesionalisme manajerial.
- **Digitalisasi Desa:** Integrasi sistem promosi produk BUMDes melalui platform digital (seperti TikTok dan media sosial lainnya) untuk memperluas akses pasar.
- **Bimbingan Teknis (Bimtek):** Penyelenggaraan pelatihan tata kelola bisnis agar BUMDes dapat mengelola aset dan pendapatan secara transparan dan akuntabel.



Meskipun Lampung telah bebas desa tertinggal, Dinas PMDT Provinsi Lampung masih menghadapi hambatan signifikan untuk menaikkan status 1.885 desa (699 Berkembang & 1.186 Maju) menjadi Mandiri.

Berikut adalah hambatan utama yang dihadapi:

1. Standar Kualitas Infrastruktur yang Tinggi: Untuk mencapai status "Mandiri", desa harus memiliki enam dimensi pembangunan dengan kualitas "Baik atau Tinggi". Hambatannya adalah biaya besar untuk memastikan seluruh dusun memiliki akses jalan mantap, fasilitas kesehatan lengkap, dan sekolah yang memadai, bukan sekadar tersedia.
2. Kesenjangan Kapasitas SDM Perangkat Desa: Masih terdapat kendala dalam pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa, terutama dalam mengelola administrasi secara digital. Kurangnya keterampilan kader desa dalam pemberdayaan masyarakat menjadi penghambat optimalisasi potensi lokal.
3. Efektivitas Ekonomi BUMDes: Banyak BUMDes yang sudah terbentuk namun belum masuk kategori "Maju". Hambatannya meliputi tata kelola bisnis yang belum profesional, keterbatasan modal, dan kesulitan dalam menembus pasar digital yang kompetitif.
4. Kendala Teknis Smart Village: Implementasi digitalisasi desa sering terhambat oleh masalah infrastruktur teknologi seperti area *blank spot* dan ketidaksiapan perangkat desa dalam melakukan pembaruan data secara *real-time* di aplikasi IDM/Prodeskel.
5. Koordinasi Lintas Sektor (Ego Sektoral): Program peningkatan desa mandiri memerlukan "pengeroyokan" dari berbagai OPD. Hambatannya adalah sinkronisasi anggaran dan program kerja antar dinas (seperti PU, Pendidikan, dan Kesehatan) agar intervensi di lokasi yang sama dapat berjalan bersamaan.
6. Validitas Data Lapangan: Seringkali terdapat ketidaksesuaian antara input data di aplikasi dengan fakta di lapangan. Data yang tidak valid menghambat akurasi intervensi program dari pemerintah provinsi.

Berikut adalah "Tantangan-tantangan" utama yang dihadapi:

1. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Ekstrim: Status Mandiri mensyaratkan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas tinggi di seluruh dusun. Tantangannya adalah memastikan akses jalan mantap, fasilitas kesehatan yang lengkap, dan sekolah yang memadai di wilayah pelosok agar skor indeks meningkat dari kualitas "sedang" ke "baik/tinggi".



2. Optimalisasi BUMDes sebagai Sumber PADes: Banyak BUMDes di Lampung yang sudah terbentuk namun belum berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Tantangannya adalah mengubah [unit usaha BUMDes](#) agar lebih kompetitif, memiliki tata kelola profesional, dan mampu bersaing di pasar digital.
3. Kesiapan Digitalisasi (Smart Village): Implementasi program *Smart Village* menghadapi kendala pada kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam mengoperasikan sistem digital secara konsisten. Selain itu, masih terdapat masalah [infrastruktur teknologi](#) (seperti area *blank spot*) di beberapa titik desa transmigrasi.
4. Validitas dan Pembaruan Data: Akurasi intervensi program sangat bergantung pada pemutakhiran data di aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Tantangan dinas adalah mendorong aparatur desa untuk melakukan *input* data potensi sesuai fakta lapangan secara berkala, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
5. Sinergi Lintas Sektor (Program Desaku Maju): Mewujudkan desa mandiri tidak bisa dilakukan oleh Dinas PMDT sendirian. Tantangannya adalah menjaga konsistensi "pengeroyokan" program oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dinas PU untuk jalan, Dinas Pendidikan untuk sekolah, dsb) agar pembangunan di desa berjalan selaras.

5. Kemantapan Jalan

Tabel 3. 52 Capaian kemantapan jalan

Sasaran	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan				
IKU	Persentase kemantapan jalan				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	78,08	-	-
2	2025	78,29	79,79	101,92	-
3	2029	87,95	-	90,72	
4	Nas	-	92,32	86,42	

Grifik 3.31 Kemantapan Jalan
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Persentase (%)
2024	78,8
2025	79,79
Nas	92,32

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan memiliki indikator Persentase kemantapan jalan dengan realisasi kinerja sebesar 79,79% dari target sebesar 78,29% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,92% dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 78,08. Apabila dibandingkan dari kinerja tahun sebelumnya maka realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,71%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 90,72%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih kinerja lebih rendah sebesar 12,53% dengan capaian 86,42%.

Kemantapan jalan provinsi merupakan proporsi dari panjang jalan provinsi yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan provinsi. Kondisi ini menggambarkan kondisi ideal jalan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan ekonomis kepada pengguna jalan. Peningkatan kemantapan jalan ini disebabkan oleh faktor pengoptimalan pemeliharaan rutin jalan yang mampu menekan tingkat degradasi jalan; dan adanya peningkatan anggaran APBD pada tahun 2025.

Meningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan

jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Berdasarkan hasil survey kondisi jalan tahun 2025, kuantitas jalan yang merupakan IKU Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dapat melampaui target 78%, yakni mencapai 79,79%. Dengan pencapaian tersebut, maka sepanjang 1.352,8 Km ruas jalan provinsi berada dalam kondisi mantap.

Pada tahun 2025, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kondisi kuantitas jalan dengan penanganan jalan berupa:

Tabel 3.53 Penanganan jalan tahun 2025

No	Pekerjaan (Sub-Kegiatan)	Target	Realisasi
1	Pembangunan Jalan	1 Km	0 Km
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	2,1 Km	2,109 Km
3	Rekontruksi Jalan	32,6 Km	53,373 Km
4	Rehabilitasi Jalan	8,73 Km	10,728 Km
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	181.82 Km	728,065 Km
6	Pembangunan Jembatan	4 Jembatan	4 Jembatan
7	Penggantian Jembatan	10 Jembatan	10 Jembatan
8	Rehabilitasi Jembatan	7 Jembatan	14 Jembatan
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	180 Jembatan	269 Jembatan

Sumber : Hasil Analisa Dinas BMBK Provinsi Lampung, Desember 2025

Dalam menjaga kondisi kuantitas jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melakukan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC yang dilaksanakan oleh UPTD Wilayah I s.d. VI, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 728,065 Km, dengan Pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 269 Jembatan. Dengan adanya pemeliharaan rutin tersebut tingkat kerusakan jalan dapat terus dijaga sehingga target umur rencana jalan berjalan sesuai dengan perencanaannya.

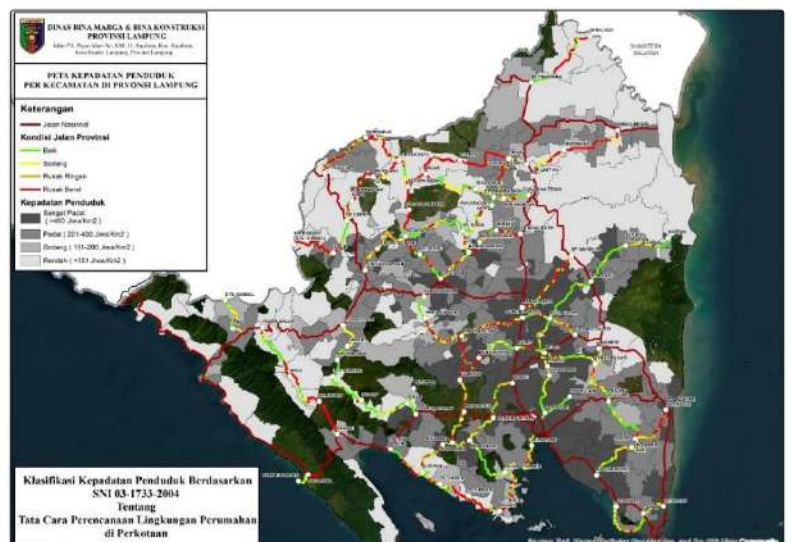
Tabel 3. 54 Data Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
1	Bandar Lampung	9,379	100	-
2	Pringsewu	40,247	82,14	17,86
3	Pesawaran	142,442	92,09	7,91
4	Lampung Selatan	104,468	91,92	8,08
5	Lampung Timur	134,930	95,85	4,15
6	Lampung Tengah	270,214	89,15	10,85
7	Metro	15,848	92,64	7,36
8	Lampung Utara	156,328	93,58	6,42
9	Way Kanan	261,199	58,74	41,26
10	Tanggamus	196,633	72,96	27,04
11	Lampung Barat	112,937	79,30	20,70
12	Pesisir Barat	11,996	95,22	4,78
13	Tulang Bawang	67,847	49,03	50,97
14	Tulang Bawang Barat	129,936	68,04	31,96
15	Mesuji	41,045	78,99	21,01
TOTAL		1695,479	79,79	20,21

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jalan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Way Kanan dengan panjang jalan mencapai 261,199 km, sedangkan panjang jalan provinsi terpendek berada di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 9,379 kilometer. Penentuan status jalan provinsi ini dengan memperhatikan fungsi jalan provinsi yaitu menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota maupun menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan kemandapan jalan provinsi Kota Bandar Lampung menempati posisi pertama yaitu sebesar 100%, sementara untuk kemandapan jalan provinsi terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebesar 49,03.

Pada Tahun 2025-2029 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung selaras dengan RPJMN fokus untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada ruas-ruas jalan yang padat penduduk serta akses menuju kawasan-kawasan produktif. Berikut adalah peta kepadatan penduduk di Provinsi Lampung.

Gambar 3.10 Kepadatan penduduk dan Kawasan produktif Lampung



Sumber : Bidang Bipram Dinas BMBK Provinsi Lampung, Januari 2025



Dengan memperhatikan kepadatan penduduk tersebut dan akses menuju kawasan produktif seperti kawasan sentra pangan, pariwisata maka ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas dalam penanganan jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55 Mapping jalan berdasarkan kawasan

No	Ruas Jalan	Lokasi	Persentase Kerusakan (%)	Panjang Jalan	Tingkat Kepadatan Penduduk	Mendukung Kawasan
1	Jabung – Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	20,90%	22,962	Sangat Tinggi	Perikanan budidaya dan tangkap
2	Sp. Korpri – Purwotani	Lampung Selatan	41,23%	14,551	Sangat Tinggi	Akses ke exit tol Kotabaru
3	Bandar Jaya – Sp. Mandala	Lampung Tengah	23,18%	37,016	Tinggi	Konektivitas dan kawasan industri
4	Kalirejo – Bangunrejo	Lampung Tengah	42,60%	14,086	Sangat Tinggi	Pertanian dan perkebunan
5	Padang Ratu – Pekurun Udik	Lampung Tengah	20,97%	24,796	Sangat Tinggi	Pertanian dan perkebunan
6	Padang Ratu – Kalirejo	Lampung Tengah	31,41%	22,603	Sangat Tinggi	Pertanian dan perkebunan
7	Jalan RE Martadinata (Bandar Lampung)	Bandar Lampung	0,00%	5,873	Tinggi	Pariwisata
8	Lempasing – Padang Cermin	Pesawaran	2,40%	29,157	Tinggi	Pariwisata dan perikananbudidaya dan tangkap
9	Padang Cermin – Sp. Teluk Kiluan	Pesawaran	18,47%	31,732	Sangat Tinggi	Pariwisata dan perikanan budidaya dan tangkap
10	Sp. Umbar – Putih Doh	Tanggamus	46,67%	23,830	Rendah	Pariwisata dan perikanan tangkap
11	Suoh – Sp. Blok 9	Lampung Barat	61,41%	30,447	Rendah	Pariwisata dan Perkebunan Kopi
12	Kasui – Air Ringkih (Bts. Sumsel)	Way Kanan	52,90%	26,295	Tinggi	Perkebunan karet dan kelapa sawit
13	Tegal Mukti – Tajab	Way Kanan	24,19%	36,000	Rendah	Perkebunan kelapa sawit dan tebu
14	Gedong Aji – Umbul Mesir	Tulang Bawang	72,63%	31,500	Rendah	Perkebunan dan pertanian
15	Brabasan – Wiralaga	Mesuji	39,54%	29,443	Rendah	Akses ke Pusat Pemerintahan Kab.Mesuji dan Perkebunan Kelapa Sawit serta Karet.

Sumber : Bidang Bipram Dinas BMBK Provinsi Lampung, Januari 2025

Beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada ruas-ruas jalan diatas yaitu :

1. Pekerjaan Rekontruksi Ruas Jalan Padang Ratu - Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1,59 Km.



2. Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Padang Ratu -Pekurun Udik di Kabupaten Lampung Utara sepanjang 1,15 Km



3. Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Kalirejo – Bangun Rejo di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1,4 Km.



Tabel 3.56 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, Program dan Kegiatan Kemantapan Jalan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Kegiatan Pendukung
1. Dukungan Gubernur pada Misi ke-1 tentang mendorong ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif 2. Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan di Desa. 3. Tematik Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2029 yaitu pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan penurunan angka kemiskinan; 4. Mendukung PSN konektivitas dan kawasan Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas 5. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang baik seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat; 6. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung; 7. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari dana transfer pusat	1. Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung pada tahun 2025 masih menunjukkan capaian yang belum optimal. 2. Belum terintegrasinya kelas jalan antar level pemerintahan, yaitu jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ketidakterpaduan ini menghambat terciptanya konektivitas yang efektif dan berkelanjutan	1. Peningkatan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Swasembada Pangan, Energi, Pariwisata) serta Memperlancar Transportasi pada Wilayah Padat Penduduk dan Potensi Ekonomi Tinggi 2. Peningkatan Konektivitas untuk Menekan Biaya Logistik dan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Mengurangi Pengeluaran Masyarakat	Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Sumber: BMBK Provinsi Lampung, Maret 2026



Peningkatan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (Swasembada Pangan, Energi, Pariwisata) serta Memperlancar Transportasi pada Wilayah Padat Penduduk dan Potensi Ekonomi Tinggi

Peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu kunci strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai daerah penyangga pangan Nasional, penghasil komoditas energi, serta destinasi pariwisata yang berkembang, Lampung membutuhkan sistem jaringan jalan yang memadai, handal, dan terintegrasi. Kondisi infrastruktur jalan yang belum merata dan masih terdapat ruas-ruas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat menjadi kendala utama dalam distribusi hasil pertanian, mobilitas energi, serta akses menuju kawasan wisata strategis.

Dukungan terhadap Swasembada Pangan merupakan upaya terintegrasi untuk memastikan ketersediaan pangan nasional secara mandiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada impor. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan program ini. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting dalam sektor pertanian karena jalan yang memadai mempermudah transportasi hasil pertanian dari lahan produksi ke pasar, gudang, atau pelabuhan. Petani bisa memasarkan produk lebih cepat, menjaga kesegaran produk terutama untuk komoditas mudah rusak seperti sayur dan buah.

Dukungan terhadap Swasembada Energi merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional secara mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dukungan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, regulasi, dan pemanfaatan potensi energi lokal, baik fosil maupun terbarukan. Dalam konteks energi, khususnya energi terbarukan jalan yang baik memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik tenaga surya, air, atau bioenergi di daerah terpencil. Infrastruktur jalan menjadi penunjang utama untuk pengembangan kawasan-kawasan baru berbasis energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dalam mendukung swasembada pangan dan energi sangat luas dan berdampak jangka panjang bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan.

Penyediaan akses jalan yang baik dan berkualitas memiliki peranan strategis dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata, terutama di daerah-daerah yang

memiliki potensi wisata namun masih kurang berkembang akibat keterbatasan infrastruktur karena menentukan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam menjangkau destinasi. Jalan yang baik tidak hanya mempercepat waktu tempuh dan menurunkan biaya perjalanan, tetapi juga memberikan kesan pertama yang positif terhadap pengalaman wisata. Banyak potensi wisata di daerah terpencil yang belum tergarap optimal karena terbatasnya akses infrastruktur, terutama jalan penghubung antar wilayah dan jalan menuju lokasi objek wisata. Ketika akses jalan ditingkatkan maka mobilitas wisatawan akan meningkat, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar destinasi wisata. Selain itu, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi mengalami tekanan lalu lintas yang tinggi, sehingga menimbulkan perlambatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dinas BMBK berupaya untuk mengatasi masalah dalam Rencana Lima tahun kedepan, salah satu solusi adalah dengan Pelebaran jalan. Ruas-ruas jalan Provinsi masih banyak yang berdimensi sub-standar (di bawah 6 meter untuk lebar), dan diupayakan menjadi standar Provinsi setidaknya 6 meter, sedangkan lalu lintas harian (LHR) mencapai ≥ 5000 SMP/hari. LHR adalah istilah baku yang digunakan dalam menghitung jumlah lalu lintas rata-rata pada suatu ruas jalan dan merupakan dasar dalam proses perencanaan peningkatan jalan.

Gambar 2.12 : Peta Lalu Lintas Harian Rata-rata Jalan Provinsi Lampung





Tabel 3.57 Daftar Ruas jalan Provinsi dengan lebar kurang dari 6 Meter LHR mencapai ≥ 5000 SMP/hari

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Jenis Perkerasan (Km)				Rencana Pelebaran (Meter)
				Rigid	Hotmix/Lapen	Telford/Kerikil	Tanah	
KABUPATEN PESAWARAN								
1	037	BRANTI - GEDONG TATAAN	24,124	6,140	17,984	-	-	6
2	042	LEMPASING - PADANG CERMIN	29,157	0,180	28,977	-	-	6
3	043	PADANG CERMIN - SP TELUK KILUAN	31,732	10,282	21,450	-	-	6
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN								
1	002	KALIANDA - KUNYIR - GAYAM	30,250	0,070	30,180	-	-	6
2	004	SP. SIDOMULYO - BELIMBING SARI	25,012	4,442	20,570	-	-	6
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR								
1	009	NYAMPIR - TANJUNG KARI	7,876	-	7,876	-	-	6
2	010	TANJUNG KARI - PUGUNG RAHARJO	24,491	2,930	21,561	-	-	6
3	014	SUKADAMAI - KIBANG	4,419	1,013	3,406	-	-	6
KABUPATEN PRINGSEWU								
1	033	KALIREJO - PRINGSEWU	16,392	6,640	9,752	-	-	6
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH								
1	018	METRO - KOTA GAJAH	14,222	1,650	12,572	-	-	6
2	021	SEPUTIH SURABAYA - SADEWA	24,230	0,950	23,280	-	-	6
3	027	WATES - METRO	12,415	3,575	8,840	-	-	6
4	032	PADANG RATU - KALIREJO	22,603	9,780	12,823	-	-	6
KABUPATEN LAMPUNG UTARA								
1	062	KOTA BUMI - BANDAR ABUNG	19,725	-	19,725	-	-	6
2	063	BANDAR ABUNG - BANDAR SAKTI	7,957	-	7,957	-	-	6
3	070	KOTA BUMI - KETAPANG	17,578	0,042	17,536	-	-	6
4	071	KETAPANG - NEGARA RATU	12,336	-	12,336	-	-	6
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT								
1	064	BANDAR SAKTI - SP. DAYA MURNI	10,099	-	10,099	-	-	6
2	065	SP. DAYA MURNI - GUNUNG BATIN	12,389	0,970	11,419	-	-	6
3	090	ADIJAYA - TULUNG RANDU	38,130	8,040	24,670	5,420	-	6
KABUPATEN WAY KANAN								
1	089	TAJAB - ADIJAYA	23,600	2,390	8,750	12,460	-	6
KABUPATEN TULANG BAWANG								
1	086	BUJUNG TENUK - PENUMANGAN	12,432	0,300	12,132	-	-	6

Sumber : Bidang Bipram Dinas BMBK Provinsi Lampung, Januari 2025

Tabel diatas menunjukkan terdapat 22 ruas jalan provinsi lampung yang tersebar di 9 kabupaten memiliki beban lalu lintas mencapai 5000 SMP/hari, hal tersebut tidak didukung dengan lebar jalan yang saat ini belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal kriteria jalan Provinsi yaitu 6 meter. Dari 22 ruas jalan tersebut merupakan ruas-ruas jalan yang terdapat kawasan industri maupun pariwisata, mendukung pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan wisata unggulan, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai konektivitas antar wilayah. Untuk pelebaran



jalan menyesuaikan ketersediaan anggaran. BMBK Provinsi Lampung berencana meningkatkan ruas tersebut menjadi jalan standar dengan lebar perluasan 6 meter mengingat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus digalang oleh pemerintah pusat, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran perekonomian masyarakat. Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergerakaknya ekonomi lokal.

Peningkatan konektivitas jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi krusial untuk menurunkan biaya logistik, meminimalkan kehilangan hasil panen, serta mempercepat distribusi bahan baku dan produk ke pasar. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi industri yang tengah dikembangkan, di mana bahan mentah tidak hanya diekspor, tetapi diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lokal. infrastruktur jalan juga menjadi tulang punggung dalam pengembangan wilayah aglomerasi Lampung Raya, yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan sekitarnya. Kawasan ini memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Konektivitas antarwilayah dalam aglomerasi ini, termasuk akses ke Pelabuhan Panjang, Kawasan Industri Tanjung Bintang, dan pusat logistik regional, memerlukan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berkualitas. Demikian pula, pengembangan Kawasan Kotabaru sebagai wilayah baru yang potensial untuk perluasan permukiman, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sangat membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Tanpa aksesibilitas yang baik, investasi dan pembangunan kawasan akan terhambat.

Peningkatan Konektivitas untuk Menekan Biaya Logistik dan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Mengurangi Pengeluaran Masyarakat

Akibat buruknya pelayanan transportasi biaya logistik tentunya akan tinggi, kondisi ini menjadi isu strategis Dinas BMBK Provinsi Lampung, yang mana pada daerah terpencil dengan akses jalan yang sulit sehingga biaya transportasi jadi mahal, hal ini sangat berpengaruh terhadap segala upaya masyarakat untuk meningkatkan produksi mereka, bahkan hal ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya



pelaksanaan program-program asistensi pemerintah, masuknya lembaga-lembaga pendukung serta kurangnya informasi yang aktual tentang harga pasar, permintaan pasar serta aksesibilitas terhadap kemungkinan-kemungkinan lapangan pekerjaan yang tersedia di sekitar daerahnya.

Penguatan konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara merupakan strategi utama dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Efisiensi logistik ini berdampak langsung pada daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur konektivitas yang baik (jalan nasional, tol, jalur kereta barang, pelabuhan) dapat mengurangi waktu dan biaya distribusi barang, dimana biaya logistik Indonesia saat ini masih tinggi (sekitar 20% dari PDB), dan penguatan konektivitas dapat memangkas biaya ini secara signifikan. Dengan logistik yang lebih murah, **produk pertanian, perikanan, dan industri lokal** dapat dijual dengan harga bersaing baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Meningkatkan **akses pasar bagi UMKM dan petani** di daerah pelosok atau tertinggal. Barang kebutuhan pokok, bahan bangunan, dan produk konsumsi dapat dijual lebih murah karena biaya transportasi yang rendah. Konektivitas antar daerah menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan tangguh serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang merata.

Infrastruktur jalan yang berkualitas termasuk pelebaran jalan, peningkatan permukaan jalan, pembangunan jalan, serta sistem transportasi cerdas dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan dan mempercepat pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Penguatan infrastruktur jalan di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang besar sangat penting untuk menjamin kelancaran mobilitas, efisiensi logistik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya infrastruktur jalan yang mumpuni, pemerintah dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing kota atau kawasan industri, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor domestik maupun asing. Dengan beriringnya tahun perkembangan wilayah dan peningkatan penduduk semakin meningkat serta menumbuhkan berbagai aktivitas di wilayah tersebut namun pembangunan terkesan sangat lamban.



Adapun ruas yang memiliki jenis permukaan telford atau kerikil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58 Ruas jalan dengan Jenis Permukaan Telford atau Kerikil

NO	LINK	NAMA RUAS	JENIS PERKERASAN (KM)
			TELFORD/ KERIKIL
1	2A	3	4
1	044	SP TELUK KILUAN - SP. UMBAR	11,94
2	045	SP. UMBAR - PUTIH DOH	4,86
3	048	PEKON BALAK - SUOH	2,18
4	049	SUOH - SP. BLOK 9	6,85
5	050	SP. BLOK 9 - SANGGI	14,40
6	075	KASUI - AI RINGKIH (BTS SUMATERA SELATAN)	4,04
7	077	BLAMBANGAN UMPU - SRI REJEKI	11,42
8	078	SRI REJEKI - PAKUAN RATU	9,76
9	079	PAKUAN RATU - BUMIHARJO	1,74
10	082	SP. SOPONYONO - SERUPA INDAH	0,40
11	088	TEGAL MUKTI - TAJAB	6,41
12	089	TAJAB - ADIJAYA	12,46
13	090	ADIJAYA - TULUNG RANDU	5,42
14	091	PENUMANGAN - UNIT VI	3,29
15	092	SP. UNIT VIII - GEDONG AJI	6,55
16	093	GEDONG AJI - UMBUL MESIR	13,98
17	095	BRABASAN - WIRALAGA	0,65
total			116,347

Sumber : Bidang Bipram Dinas BMBK Provinsi Lampung, Januari 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 17 Ruas jalan Provinsi yang tersebar di Provinsi Lampung memiliki jenis permukaannya masih terdapat telford atau kerikil. Jenis permukaan tersebut belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. BMBK Provinsi Lampung berdasarkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD dalam rencana strategis berencana menangani ke 17 Ruas tersebut, sehingga kedepan tidak terdapat lagi Ruas Provinsi yang jenis permukaannya masih terdapat telford atau kerikil diupayakan memiliki jenis perkerasan minimal aspal. Sehingga ditahun 2029 ruas jalan Provinsi dengan konektivitas rendah akan semakin berkurang.



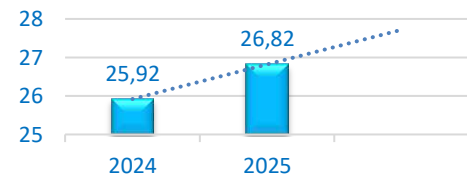
Infrastruktur jalan memegang peranan strategis dalam mendukung pencapaian Program Unggulan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, sebagai infrastruktur dasar yang menopang konektivitas wilayah, keberadaan jalan secara fungsional menjadi penopang utama bagi keberhasilan program unggulan, Dukungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung berupa perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis (MBG) serta Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan kemantapan jalan di desa. Pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan elemen kunci dalam tematik pembangunan Provinsi Lampung, peningkatan dan pemerataan infrastruktur jalan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga strategi utama dalam tematik pembangunan Provinsi Lampung untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Investasi di bidang jalan akan membuka peluang ekonomi, meningkatkan akses layanan dasar, dan menghubungkan masyarakat miskin dengan sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

6. Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar

Tabel 3.59 Capaian Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar

Sasaran	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan				
IKU	Tingkat akses Masyarakat terhadap infrastruktur dasar				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	25,92	-	-
2	2025	26,21	26,82	102,32	
3	2029	27,35	-	98,062	
4	Nas	-	-	-	

Grafik 3.32 Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2024-2025



Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan memiliki indikator tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dengan realisasi kinerja sebesar 26,82% dari target sebesar 26,21% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **102,32%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 25,92%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,9%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 98,062%.
4. Realisasi Kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi nasional atau pun daerah lain karena metode perhitungan berdasarkan formulasi daerah.

Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan daerah. Secara umum, akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Di kawasan perkotaan, infrastruktur dasar relatif lebih lengkap dan mudah diakses, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas layanan.

Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar merupakan capaian yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$I = \frac{(a+b+c)}{3}$$

Keterangan:

I : Tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar

a : Persentase rumah layak huni yang tertangani

b : Persentase penduduk yang memiliki akses air minum aman

c : Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi minum aman

Rincian Perhitungan =

$$I = \frac{66,13\% + 12,51\% + 1,84\%}{3} = \frac{80,48\%}{3} = 26,82$$

Grafik berikut menyajikan capaian indikator Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar di Provinsi Lampung Tahun 2025. Indikator ini hanya ditampilkan untuk tahun 2025 karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, data capaian tahun 2025 menjadi data awal dalam pengukuran kinerja indikator tersebut pada periode perencanaan dimaksud.

Dalam Meningkatkan Kualitas infrastruktur pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kolaborasi kinerja perangkat daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar pada berbagai bidang yang mempengaruhi, diantaranya :

A. Bidang Perumahan

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dari kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan keandalan, keamanan dan keselamatan bangunan, memenuhi kesehatan penghuni serta kecukupan luas bangunan. Upaya yang dilakukan oleh dinas Perumahan,



Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni yaitu melalui program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera atau biasa disingkat BSMS. BSMS Adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam melakukan peningkatan kualitas rumah sebagai hunian.

Tabel 3.60 Penanganan RTLH Provinsi Lampung tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	APBN	APBD Prov	APBD Kab/Kot	CSR/BAZNAS	SWADAYA	TOTAL
1	Lampung Barat	309		0	0	124	433
2	Tanggamus	287		12	1	0	300
3	Lampung Selatan	901		0	0	0	901
4	Lampung Timur	50		155	4	0	209
5	Lampung Tengah	50		240	33	0	323
6	Lampung Utara	1292		30	0	0	1322
7	Way Kanan	453		0	0	49	502
8	Tulang Bawang	10		43	13	0	66
9	Pesawaran			29	34	0	63
10	Pringsewu	10		80	34	0	124
11	Mesuji	50		0	0	0	50
12	Tulang Bawang Barat			23	0	0	23
13	Pesisir Barat	165		17	0	0	182
14	Kota Bandar Lampung	197		35	0	0	232
15	Kota Metro			7	2	0	9
Rekap		3774	0	671	121	173	4739
Total Rekap		4739					

Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

Total Capaian Rumah Tidak Layak Huni :

- Jumlah Rumah = 2.783.258
- Jumlah RTLH 2024 = 947.421
- Jumlah penanganan 2025 = 4.739
- Jumlah RTLH 2025 = 942.682
- Jumlah RLH + Penanganan 2025 = 1.840.576
- Persentase Capaian RLH = 66,13

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Rumah}}{\text{Jumlah RLH} + \text{Penanganan 2025}} \times 100 \% \\
 &= \frac{(1.590.318 - 1.483.337)}{1.590.318} \times 100 \% \\
 &= 66,13 \%
 \end{aligned}$$

Capaian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan adanya kemajuan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat di Provinsi Lampung. Dari total 2.783.258 unit rumah, jumlah RTLH pada tahun 2024 tercatat sebanyak 947.421 unit. Melalui berbagai program penanganan pada tahun 2025, telah dilakukan intervensi terhadap 4.739 unit rumah, sehingga jumlah RTLH pada tahun 2025 menurun menjadi 942.682 unit. Jika dikaitkan dengan total rumah layak huni (RLH) yang telah tertangani dan kondisi eksisting, persentase capaian RLH tahun 2025 tercatat sebesar 66,13 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan peningkatan kualitas rumah telah terpenuhi, namun masih terdapat proporsi RTLH yang cukup besar sehingga memerlukan upaya percepatan penanganan secara berkelanjutan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa program perumahan dan kawasan permukiman telah memberikan dampak positif, tetapi skala permasalahan RTLH yang masih tinggi menuntut penguatan sinergi pendanaan pusat-daerah, peningkatan kualitas basis data perumahan, serta perluasan skema bantuan stimulan perumahan swadaya. Dengan langkah tersebut, diharapkan penurunan RTLH dapat berlangsung lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini gambar dokumentasi untuk kegiatan RTLH yang telah dilaksanakan Dinas PKPCK tahun 2024:

Gambar 3.11 RTLH Provinsi Lampung tahun 2025



Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

B. Bidang Sanitasi

1. Air Limbah

Sanitasi aman merupakan kondisi pengelolaan air buangan (air limbah domestik) yang memenuhi standar teknis dengan kata lain sudah memiliki tangki septik dengan bidang resapan seperti kegiatan MCK yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kab/Kota atau unit kerja Ke PU-an lainnya, tidak mencemari lingkungan dan tidak berisiko terhadap kesehatan. Air limbah domestik yang memenuhi baku mutu diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. Perhitungan capaian akses sanitasi menggunakan indikator jumlah penduduk atau (jiwa).

Pada tahun 2025, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi layak sebesar 86,82% dengan penduduk terlayani sanitasi aman sebesar 1,84%. Hasil tersebut merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung (BPBPK) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Faktor pendukung IKU dapat tercapai tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi. Program sanitasi yang akan direalisasikan pada tahun 2026 (APBN) antara lain Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu/Komunal (Tangki Septik), Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat, dan Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi.

Tabel 3.61 Data Capaian Akses Layanan Air Limbah Tahun 2025 Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2024	Jumlah KK	Penambahan 2024				Total SR	Penduduk Terlayani 2024		Jumlah Penduduk 2025	Kegiatan APBN 2025		Penduduk Terlayani 2025	
				INPRES	Kab/ Kota	MCK Tambahan Provinsi (SR)	MCK Provinsi (Unit)		Aman (%)	Layak (%)		Sanimas (Jiwa)	LPK (Jiwa)	Aman	Layak
1	Lampung Barat	315.920	63.184					0	0,35	95,75	319.467	1215	200	0,79	94,69
2	Tanggamus	670.370	134.074					0	0,26	85,86	677.866	135		0,28	84,71
3	Lampung Selatan	1.119.310	223.862		206		30	3	325	1,00	97,98	1.133.245	810	1,05	96,47
4	Lampung Timur	1.153.770	230.754	41				41	0,02	88,56	1.164.622	675		0,06	87,73
5	Lampung Tengah	1.525.090	305.018	1202		70		7	1272	0,42	92,12	1.541.695	270	0,43	91,12
6	Lampung Utara	659.690	131.878	940			10	1	950	3,92	75,23	667.520	1350	4,08	74,37
7	Way Kanan	497.255	99.452					0	0	70,87	503.265	270		0,05	70,02
8	Tulang Bawang	450.340	90.069					0	4,25	79,78	455.557	675	300	4,42	78,87
9	Pesisir Bar	500.305	100.060					0	0	63,7	505.913			-	82,77
10	Pringsatu	424.690	84.936	682				682	8,30	84,80	429.360			8,21	83,87
11	Mesuji	241.630	48.320					0	0	83	245.160		100	0,04	81,79
12	Tulang Bawang Barat	296.700	59.740					0	1	82,6	301.896		100	1,02	81,73
13	Pesisir Barat	172.320	34.464					0	0	79,4	174.708			-	78,31
14	Bandar Lampung	1.214.330	242.866			20		2	20	3,75	92,74117			3,71	91,80
15	Metro	175.710	35.142			30		3	30	11,29	96,49			11,17	96,50
Provinsi Lampung		9.419.590	1.883.918						1,86	87,78	9.524.501	5.400	700	1,84	86,82
Total		9.419.590,00	1.883.918,00			160			2,32	86,12					
Total Aman														0,17	
Total Layak														0,18	

Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

Target Pemerintah Provinsi Lampung terhadap akses sanitasi adalah sebesar 100% pada tahun 2045. Oleh karena itu diharapkan dengan tingkat kenaikan akses sebesar 1-3% pertahun dapat memiliki akses sanitasi layak dan pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2045 didapatkan hasil bahwa 100% penduduk Provinsi Lampung terlayani sanitasi layak. Berikut ini gambar dokumentasi untuk kegiatan Sanitasi yang telah dilaksanakan Dinas KPCK tahun 2025:

Gambar 3.12 Sanitasi oleh KPCK Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber: Olahan data Dinas KPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional di bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja persampahan serta pengendalian dampak lingkungan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan perencanaan sektor persampahan melalui Kegiatan Penilaian Indeks Risiko Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Provinsi Lampung.



Kegiatan Penilaian Indeks Risiko TPA ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan perlunya evaluasi dan pengendalian risiko lingkungan pada fasilitas TPA existing.

Penilaian Indeks Risiko TPA merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat risiko lingkungan dan operasional TPA berdasarkan kondisi eksisting yang meliputi aspek lokasi, teknis operasional, perlindungan lingkungan, kondisi sosial serta pengelolaan dan kelembagaan. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan, peningkatan kinerja TPA, serta rekomendasi tindak lanjut berupa rehabilitasi, peningkatan teknologi, atau perubahan sistem pengelolaan TPA.

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Penilaian Indeks Risiko TPA Provinsi Lampung dilaksanakan pada lima (5) kabupaten, yaitu:

- Kabupaten Pringsewu
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kabupaten Lampung Tengah

Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh gambaran tingkat risiko masing-masing TPA secara objektif dan terukur, sebagai dasar perencanaan peningkatan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penilaian Indeks Risiko TPA dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.62 Indeks Risiko TPA

No.	Kegiatan	Wilayah	Score	Status
1	Penilaian Indeks Risiko TPA Wilayah 1	Kab. Pringsewu	503,22	Rehabilitasi
2	Penilaian Indeks Risiko TPA Wilayah 2	Kab. Pesawaran	494,5	Rehabilitasi
3	Penilaian Indeks Risiko TPA Wilayah 3	Kab. Lampung Tengah	417,99	Rehabilitasi
4	Penilaian Indeks Risiko TPA Wilayah 4	Kab. Lampung Timur	507,5	Rehabilitasi
5	Penilaian Indeks Risiko TPA Wilayah 5	Kab. Lampung Selatan	520,97	Rehabilitasi

Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

Berikut ini gambar dokumentasi untuk kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang telah dilaksanakan Dinas PKPCK tahun 2025:

Gambar 3.13 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025



Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

C. Bidang Air Minum

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Aman merupakan target pemenuhan pelayanan dasar dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (KNSP-SPAM), untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai dalam kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Air minum yang dikatakan aman adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi syarat baku mutu Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

Pada tahun 2025 di Provinsi Lampung Akses Air Minum aman sudah mencapai 12,51% dengan jumlah jiwa sebanyak 1.131.628 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman merupakan perhitungan kumulatif yang bersumber dari Aplikasi Simspam pada status periode I tahun 2026. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung melalui Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota. Kebijakan pengembangan air minum harus mampu menjangkau semua daerah kawasan permukiman perkotaan khususnya daerah



rawan air serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung meliputi: SPAM Regional Zona Way Sabu, Zona Argoguruh, Zona Margatiga dan Zona Way Tulang Bawang.

Tabel 3.63 Capaian Akses Air Minum Aman Provinsi Lampung

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Jiwa	Target			Capaian			
			Jumlah Wil. Administrasi	SR	Jumlah Jiwa	%	Jumlah Wil. Administrasi	SR	% Terhadap Target
1	LAMPUNG BARAT	310,990	79,996		424,708	136,57	25,890		22,53
2	TANGGAMUS	633,921	17,063		68,252	10,77	15,879		93,42
3	LAMPUNG SELATAN	1,101,376	29,227		116,908	10,61	21,070		78,32
4	LAMPUNG TIMUR	1,113,901	25,536		168,144	15,1	11,043		29,25
5	LAMPUNG TENGAH	1,381,765	24,168		95,416	6,91	15,933		73,36
6	LAMPUNG UTARA	666,618	10,539		42,156	6,32	10,858		160,52
7	WAY KANAN	488,864	8,037		32,148	6,58	12,366		172,14
8	TULANGBAWANG	425,248	18,079		71,206	16,74	17,413		100,32
9	PESAWARAN	490,488	66,729		266,916	54,42	21,838		36,53
10	PRINGSEWU	437,222	75,184		1,426,155	326,19	13,267		4,16
11	MESUJI	236,477	13,747		54,988	23,25	18,630		156,5
12	TULANG BAWANG BARAT	305,278	7,231		25,840	8,46	15,253		239,15
13	PESISIR BARAT	173,695	6,012		24,423	14,06	6,677		112,45
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	1,100,109	3,410,101		13,640,404	1,239,91	56,091		1,64
15	KOTA METRO	178,381	28,314		113,256	63,49	2,506		9,19
Total		9,044,333	3,819,963		16,570,920	183,22	264,714		6,83

Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

Gambar 3.14 Kegiatan Air Minum oleh Dinas PKPCK Tahun 2025



Sumber: Olahan data Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Maret 2026

Tabel 3.64 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Kegiatan Pendukung
- Dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur. - Peran pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui SNVT dan Balai perumahan dan kawasan permukiman serta peran pemerintah kabupaten kota dalam hal penanganan penyediaan rumah layak huni tahun 2023. - Telah terdapat satuan analisa dan harga satuan dalam penyusunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. - amanat pencapaian indikator pada rancangan RPJP dan RPJM	- Kegiatan pembangunan / rehabilitasi terkadang bersamaan waktunya dengan pembukaan pintu air pada saat pola tanam - Kendala cuaca - Kurangnya Regulasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota. - Terdapat Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar SK Kawasan Kumuh - Permasalahan Sertifikat Lahan, Lokasi yang tidak sesuai seperti di sepadan sungai, penentuan calon penerima yang kurang tepat - Perbedaan kondisi lapangan Dengan SK Kawasan Kumuh. - Regulasi yang belum lengkap, keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang belum memadai, belum tumbuhnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya fungsi kelembagaan. - Penyesuaian analisa dan harga satuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya	- Dalam Rapat Komisi Irigasi salah satunya membahas penyesuaian jadwal buka tutup pintu air - Berkordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca. - Penyusunan Dokumen Deliniasi Kumuh Provinsi Lampung serta penyediaan basis data secara elektronik dengan mengembangkan Sistem Informasi Kawasan Permukiman yang akan diintegrasikan dengan database keciptakarya - Menginventarisasi lokus kegiatan penerima bantuan rumah tidak layak huni yang lebih prioritas sehingga terdapat penerima bantuan yang mengalami penundaan untuk dilaksanakan ditahun depan. - Melakukan perhitungan kembali terhadap base line data dalam hal porsi penanganan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sehingga pemenuhan target renstra ditahun 2024 terpenuhi.	- Pembangunan/ rehabilitasi irigasi dan rawa, bendung, embung dan air baku - OP irigasi, rawa, sungai, danau dan Pantai, waduk, bendung, embung dan bangunan air lainnya - Penyusunan Peraturan/ Kebijakan bidang Sumber Daya Air - Rekomendasi Teknis Sumber Daya Air - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia - Pemanfaatan Sumber Daya Air - Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air - Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan darurat terhadap kerusakan jaringan sumber daya air yang mengganggu proses pengairan

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

Inovasi dalam meningkatkan infrastruktur dasar wilayah yaitu:

SIRAIIS MASTERLANG (Operasi Pelihara Irigasi Masyarakat Terlibat Langsung) merupakan kegiatan Operasi dan Peliharaan yang melibatkan P3A setempat. Dalam pengelolaan jaringan irigasi khususnya operasi dan pemeliharaan memiliki permasalahan terkait pembagian air, pengambilan air secara illegal dari saluran (sodet), kerusakan ringan prasarana irigasi (pintu air tidak dapat berfungsi dengan baik, berkarat, kebocoran ringan saluran), sedimen, sampah pada saluran irigasi, adanya tumbuhan liar yang mengganggu kelancaran saluran.



Sirais Masterlang P3A



Operasi & Peliharaan Saluran Irigasi dengan P3A

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut dan pelestarian dan keberlanjutan pengelolaan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan maka perlu adanya pemanfaatan dan pemeliharaan yang optimal oleh masyarakat. pemberdayaan masyarakat mengupayakan pengembangan dan penguatan peran serta masyarakat.



PROGRAM KEMARI BERSAPA

KEMARI BERSAPA (Kelola Mandiri Irigasi Bersama P3A) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengelolaan dalam rangka pengembangan infrastruktur efisiensi produksi. Program ini mengembalikan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dengan pola padat karya serta pelaksanaan mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan.





Selama ini masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A bergantung pada pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier serta masyarakat petani belum terlibat pada pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier.

Memperhatikan masalah dan kondisi kinerja organisasi di atas, diperlukan gagasan inovatif yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier secara partisipatif melalui Program Kelola Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi “penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

7. Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.65 Capaian tingkat kemiskinan

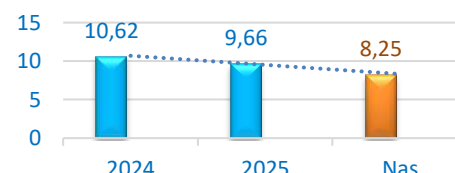
Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat				
IKU	Tingkat kemiskinan				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	10,62	-	-
2	2025	9,5-10	9,66	101,68	
3	2029	5,79-6,69	-	69,25	
4	Nas	-	8,25	85,71	

Grafik 3.33 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Angka Kemiskinan
2024	10,62
2025	9,66
Nas	8,25

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

Grafik 3.33 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

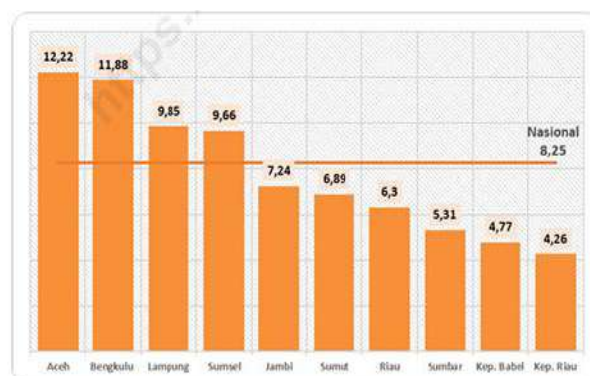


Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat memiliki indikator tingkat kemiskinan dengan realisasi kinerja sebesar 9,66% dari target sebesar 9,5-10 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **101,68%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 10,62%. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,96%. Realisasi ini menggambarkan kondisi yang semakin baik.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 69,25%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 1,41 poin dengan capaian 85,71%.

Jika dilihat perkembangan penduduk miskin se-Sumatera, persentase penduduk miskin terbesar September 2025 ditempati Provinsi Aceh yaitu 12,22 persen diikuti Provinsi Bengkulu sebesar 11,88 persen. Provinsi Lampung berada pada posisi ketiga. Sementara itu, persentase terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau masing masing sebesar 4,77 persen dan 4,26 persen.

Grafik 3.34 angka kemiskinan se-Sumatera tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas



Pengukuran kemiskinan didasarkan pada pendekatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga penurunan angka kemiskinan menunjukkan semakin berkurangnya rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan membaiknya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Garis kemiskinan disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan merepresentasikan nilai kebutuhan konsumsi minimum setara 2.100 kkal per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan nonmakanan mencerminkan kebutuhan dasar lain seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan pengeluaran kelompok penduduk berpendapatan rendah, yang mencerminkan meningkatnya daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Selain itu, peningkatan akses terhadap peluang ekonomi, seperti kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih stabil, turut berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sekaligus mempersempit kesenjangan kesejahteraan.

Perkembangan angka kemiskinan menunjukkan tren yang positif. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,69 persen, dan menurun menjadi 10,00 persen pada Maret 2025. Penurunan sebesar 0,69 poin persentase dalam satu tahun tergolong signifikan dan mencerminkan kemajuan yang konsisten dalam pengurangan kemiskinan.

Tren ini mengindikasikan mulai terlihatnya dampak kebijakan pembangunan sosial-ekonomi, khususnya dalam:

- peningkatan daya beli rumah tangga miskin,
- penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta
- pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sumber kehidupan masyarakat.

Penurunan kemiskinan ini juga sejalan dengan perbaikan distribusi pengeluaran, tercermin dari penurunan Indeks Gini Provinsi Lampung dari 0,301 menjadi 0,292 pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi berlangsung lebih inklusif.

Kondisi eksisting kemiskinan di Provinsi Lampung:

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2025 mencapai 860,13 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 26,89 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 79,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun 0,34 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,97 persen poin terhadap September 2024.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode Maret 2025–September 2025, garis kemiskinan naik Rp21.611,00 atau sebesar 3,53 persen, yaitu dari Rp612.451,00 per kapita per bulan pada Maret 2025 menjadi Rp634.062,00 perkapita per bulan pada September 2025. Sementara jika dibandingkan September 2024, terjadi kenaikan sebesar 5,85 persen.

Tabel 3.66 **Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung, Maret 2021–September 2025**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Perubahan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Perubahan (000)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar-21	471.439	3,05	1.083,93	-7,21	12,62	-0,14
Sep-21	492.620	4,49	1.007,02	76,91	11,67	-0,95
Mar-22	514.039	4,35	1.002,41	4,61	11,57	-0,10
Sep-22	545.992	6,22	995,59	-6,82	11,44	-0,13
Mar-23	559.011	2,38	970,67	-24,92	11,11	-0,33
Mar-24	586.551	4,93	941,23	-29,40	10,69	-0,42
Sept-24	599.018	2,13	939,30	-1,93	10,62	-0,07
Mar-25	612.451	2,24	887,02	-52,28	10,00	-0,62
Sept-25	634.062	3,53	860,13	-26,89	9,66	-0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Secara umum, angka kemiskinan Lampung masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Pada periode September 2021–September 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Penurunan angka kemiskinan Lampung ini sejalan dengan kemiskinan nasional yang juga mengalami penurunan pada September 2025.

Tabel 3.67 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1. Terbukanya pasar tenaga kerja global 2. Regulasi investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1. Kenaikan harga pada bahan makanan di tengah masyarakat; 2. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan 3. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan akibat pandemi <i>covid-19</i>	Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha sesuai dengan potensi daerah pada berbagai sektor melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Maret 2026

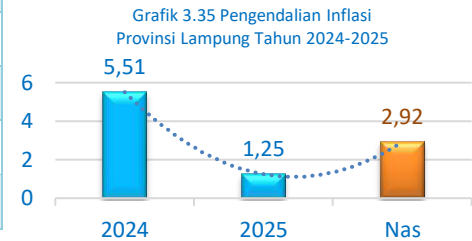
8. Tingkat Inflasi

Tabel 3.68 Capaian Pengendalian Inflasi					
Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat				
IKU	Tingkat inflasi				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	1,5	-	-
2	2025	2,5±1	1,25	83,3	
3	2029	2,5±1	-	83,3	
4	Nas	-	2,92	83,3	

Grafik 3.35 Pengendalian Inflasi
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Inflasi
2024	5,51
2025	2,92

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

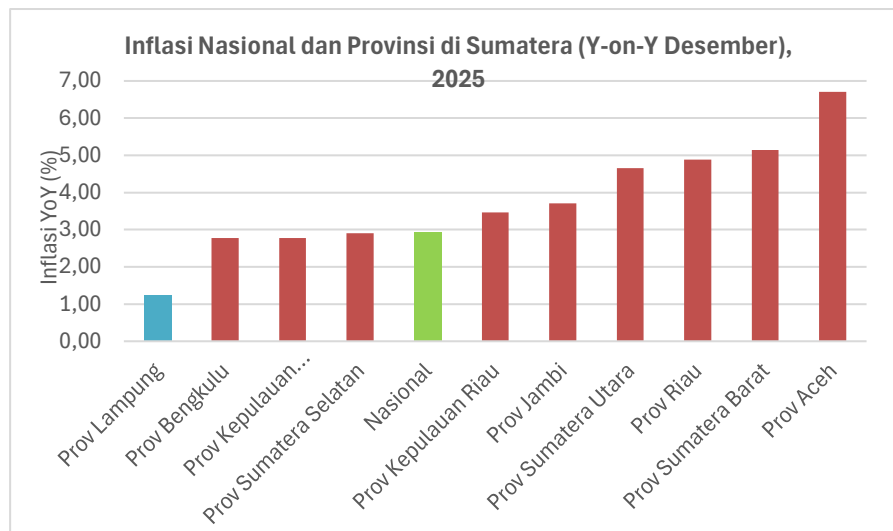
1. Sasaran meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat memiliki indikator **tingkat inflasi** dengan realisasi kinerja sebesar 1,25% dari target sebesar 2,5±1 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **83,3%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 1,5%. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja menggambarkan bahwa pengendalian inflasi Provinsi Lampung sudah masuk dalam range pengendalian inflasi sedangkan tahun 2025 Provinsi Lampung berada diluar range.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 83,3%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 0,25% dengan capaian 83,3%.

Berdasarkan rilis BPS Indonesia, diketahui beberapa realisasi pengendalian Inflasi di beberapa provinsi se Sumatera. Rata-ratanya beberapa provinsi berada diluar range target nasional. Tabel disamping Adalah inflasi Nasional dan Provinsi di Sumatera (Y-on-Y Desember), 2025

Tabel 3.69 Pengendalian inflasi se-sumatera 2025

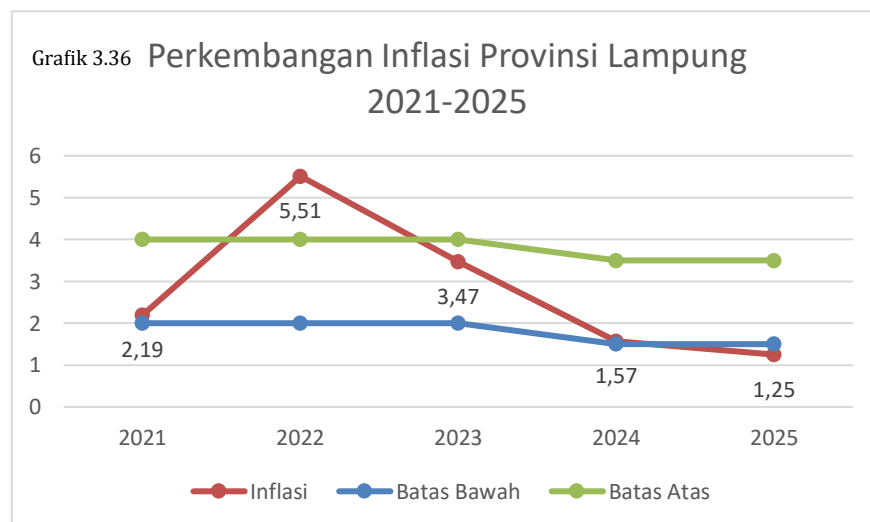
Wilayah	Inflasi
(1)	(2)
Nasional	2.92
Prov Aceh	6.71
Prov Sumatera Utara	4.66
Prov Sumatera Barat	5.15
Prov Riau	4.88
Prov Jambi	3.71
Prov Sumatera Selatan	2.91
Prov Bengkulu	2.77
Prov Lampung	1.25
Prov Kepulauan Bangka Belitung	2.77
Prov Kepulauan Riau	3.47

Grafik Inflasi Nasional dan se-Sumatera 2025



Sumber: BPS Lampung, Maret 2026

Penurunan nilai inflasi di tahun 2025 ini merupakan kelanjutan tren penurunan nilai inflasi yang juga terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Selama lima tahun terakhir, tercatat tiga kali penurunan setelah pada 2022 inflasi mencapai 5,51 dan berada di luar rentang batas target inflasi.



Sumber: BPS Lampung, Maret 2026

Inflasi sebesar 1,25 % untuk Provinsi Lampung didorong oleh perkembangan harga dari beberapa komoditas. Lima komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah Emas Perhiasan, Cabai Merah, Bawang Merah, Cabai Rawit, dan Beras. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi dan menahan laju inflasi adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Tomat, Bawang Putih, dan Cumi-cumi.

Tabel 3.70 Andil Inflasi dan Deflasi Terbesar di Provinsi Lampung 2025

Inflasi		Deflasi	
Komoditas	Andil Inflasi (%)	Komoditas	Andil Deflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Emas Perhiasan	0,53	Sekolah Menengah Atas	-0,85
Cabai Merah	0,36	Sekolah Menengah Pertama	-0,39
Bawang Merah	0,27	Tomat	-0,14
Cabai Rawit	0,16	Bawang Putih	-0,08
Beras	0,14	Cumi-cumi	-0,07

Sumber: BPS, Maret 2026

Inflasi merupakan salah satu indikator utama stabilitas ekonomi daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Stabilitas harga yang terjaga mencerminkan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa, serta menjadi fondasi dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung kepastian berusaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di daerah dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari sinergi kebijakan pengendalian inflasi nasional.

Pada tahun 2025, Provinsi Lampung mencatatkan inflasi sebesar 1,25% (ytd/yoy) dan menempati posisi terendah kedua secara nasional. Capaian ini menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara terintegrasi antara TPID Provinsi Lampung, TPID Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait. Inflasi yang rendah tersebut mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga sepanjang tahun, khususnya pada komponen pangan yang selama ini menjadi sumber utama tekanan inflasi daerah.

Meskipun inflasi Provinsi Lampung sebesar 1,25% berada sedikit di bawah rentang sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1\%$ atau 1,5%–3,5%, kondisi ini tidak mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Inflasi yang lebih rendah terutama dipengaruhi oleh faktor supply-side, yakni membaiknya produksi dan distribusi pangan, serta kebijakan daerah pada kelompok non-pangan yang berdampak terhadap struktur Indeks Harga Konsumen (IHK).



Salah satu kebijakan dimaksud adalah pembebasan uang komite sekolah tingkat SMA/ yang berdampak langsung pada kelompok pendidikan dalam komponen IHK. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap penurunan tekanan inflasi, dan pada bulan Agustus 2025 Provinsi Lampung tercatat mengalami deflasi sebesar - 1,47% (month to month). Deflasi tersebut bersifat temporer dan lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan administratif serta penyesuaian harga pada komponen tertentu, bukan akibat kontraksi permintaan agregat.

Secara struktural, terkendalnya inflasi tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh stabilnya komponen *volatile food*, komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai, bawang merah dan beras yang pada tahun-tahun sebelumnya berkontribusi signifikan terhadap fluktuasi inflasi, pada tahun 2025 dapat dikendalikan dengan lebih baik melalui penguatan intervensi sisi hulu dan hilir. Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program pemberian Pupuk Organik Cair (POC) untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta dukungan sarana pascapanen berupa dryer (alat pengering) guna menjaga kualitas hasil produksi dan mengurangi kehilangan hasil. Langkah tersebut berkontribusi terhadap kesinambungan pasokan dan menurunkan volatilitas harga pada periode puncak panen maupun musim paceklik.

Di sisi distribusi dan stabilisasi harga, TPID secara rutin melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah, penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas defisit, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi. Upaya tersebut dilengkapi dengan penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali. Sinergi kebijakan tersebut sejalan dengan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Secara keseluruhan, dinamika inflasi Provinsi Lampung tahun 2025 menunjukkan struktur inflasi yang semakin terkendali, dengan tekanan yang relatif moderat pada komponen inti (*core inflation*), stabilnya komponen *volatile food*, serta minimnya gejolak pada *administered prices*. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah serta meningkatnya efektivitas langkah antisipatif dibandingkan pendekatan reaktif.

Capaian inflasi Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan hasil konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi antara TPID Provinsi Lampung, TPID Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. Arah kebijakan daerah yang menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas pembangunan diwujudkan melalui penguatan intervensi sisi pasokan, peningkatan efisiensi distribusi, serta kebijakan afirmatif pada komponen tertentu yang berdampak langsung terhadap struktur Indeks Harga Konsumen (IHK).

Ke depan, pengendalian inflasi akan terus diarahkan pada penguatan ketahanan pangan daerah, pengurangan volatilitas komoditas strategis, peningkatan kualitas data dan sistem pemantauan harga, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan pendekatan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada stabilitas jangka menengah, TPID Provinsi Lampung berkomitmen menjaga inflasi tetap rendah dan stabil guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 3.71 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
Meningkatnya pasokan akibat panen beberapa komoditas seperti cabai merah, jeruk, telur ayam, cabai rawit, kangkong dan ikan mas	1. Penurunan permintaan masyarakat akibat pandemic <i>covid-19</i> 2. Peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti; mobil, beras, rokok kretek filter, sepeda motor dan kue kering minyak	1. <i>High Level Meeting</i> Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2. Review kecukupan pasokan dan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan Gudang oleh TPID 3. Kerjasama antar Daerah 4. Kelancaran distribusi	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Masuknya masa panen di beberapa sentra produksi sehingga terjadi peningkatan pasokan			
Penurunan harga pada beberapa komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam ras dan sabun detergen bubuk			

Sumber: Data Olahan BAPPEDA. Maret 2026.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.63 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka					
Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat				
IKU	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	4,19	-	-
2	2025	3,86-4	4,21	95,01	-
3	2029	3,25-3,73	-	88,6	-
4	Nas	-	4,85	115,20	-

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

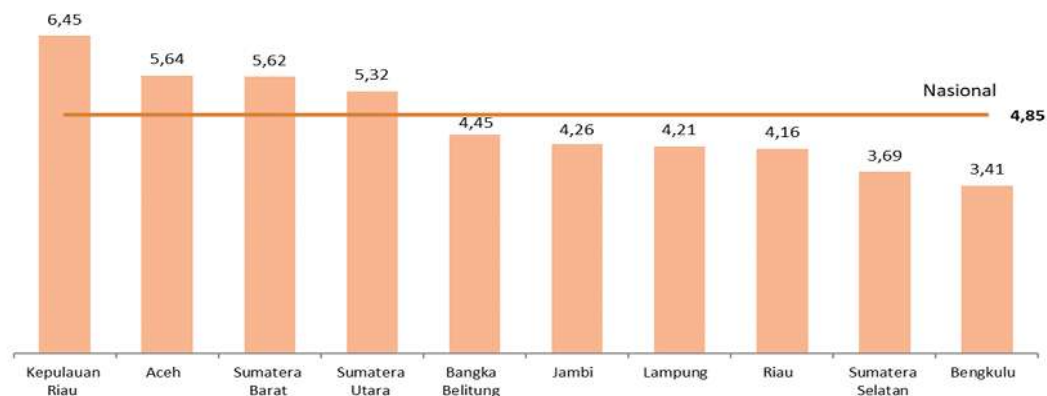


Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- Salah satu indikator dalam meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat adalah **Tingkat Pengangguran Terbuka** dengan realisasi kinerja 4,21% dari target 3,86%-4% yang direncanakan dalam Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2025 dan capaian kinerja mencapai 95,01%. Kategori kinerja **Sangat Memuaskan**.
- Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 4,19. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya maka kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,02%.
- Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian kinerja mencapai 88,6%.
- Realisasi Kinerja 2025 sebesar 4,21% apabila dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 4,85% maka capaian TPT Provinsi Lampung lebih rendah 0,64% dari nasional sehingga capaian kinerja mencapai 115,20%. Perhitungan TPT merupakan perhitungan yang menggambarkan semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin baik. Maka Provinsi Lampung memiliki TPT lebih rendah dari nasional, namun lebih baik dari pada tingkat nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi di Sumatera relatif bervariasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,45 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah sebesar 3,41 persen berada di Provinsi Bengkulu. TPT Lampung berada pada posisi keempat terendah yakni sebesar 4,21 persen.

Grafik 3.38 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Sumatera, Agustus 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Januari 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Konsep pengangguran mengacu pada konsep ketenagakerjaan berdasarkan ICLS 13, dimana penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi di pasar kerja, dimana penduduk angkatan kerja yang terserap di pasar kerja disebut sebagai bekerja, dan yang tidak terserap di pasar kerja disebut sebagai pengangguran. Sedangkan untuk penduduk yang tidak aktif secara ekonomi di pasar kerja dikelompokkan sebagai penduduk bukan angkatan kerja.

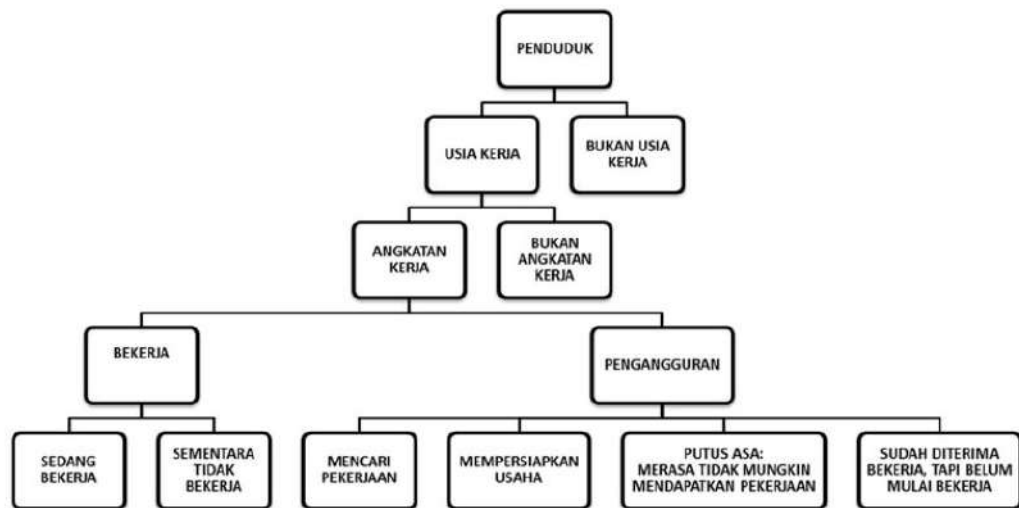
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja, sehingga dapat menggambarkan kondisi kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu wilayah. TPT diukur berdasarkan hasil bagi dari jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100.

Pengangguran banyak disalahartikan sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan tanpa melihat aktifitasnya, apakah aktif di pasar kerja atau tidak. Pengangguran seharusnya dimaknai sebagai penduduk yang tidak bekerja namun aktif di pasar kerja, ditandai dengan aktifitas yang dilakukan seperti aktif mencari pekerjaan, aktif dalam mempersiapkan usaha, ataupun jika tidak aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha mempunyai alasan seperti sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang disebabkan sudah berulang kali mencari atau mempersiapkan usaha

namun masih gagal. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja dan tidak aktif di pasar kerja, maka dianggap sebagai kelompok bukan angkatan kerja.

Komponen Penyusun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT disusun dari beberapa komponen utama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini:



Komponen yang mempengaruhi penghitungan TPT adalah jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja+pengangguran). Dimana secara rumus dapat dilihat sebagai berikut:

Rumus TPT

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Komposisi antara jumlah penduduk bekerja dan jumlah penganggur merupakan faktor utama yang menentukan besarnya TPT. Peningkatan jumlah penganggur yang tidak diimbangi oleh pertambahan jumlah penduduk bekerja akan menyebabkan proporsi penganggur dalam angkatan kerja meningkat, sehingga berdampak langsung pada kenaikan nilai TPT. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk bekerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penganggur akan menurunkan nilai TPT, karena proporsi penganggur dalam angkatan kerja menjadi semakin kecil.



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

Tren Pertumbuhan dan Perkembangan Dibandingkan Tahun Sebelumnya

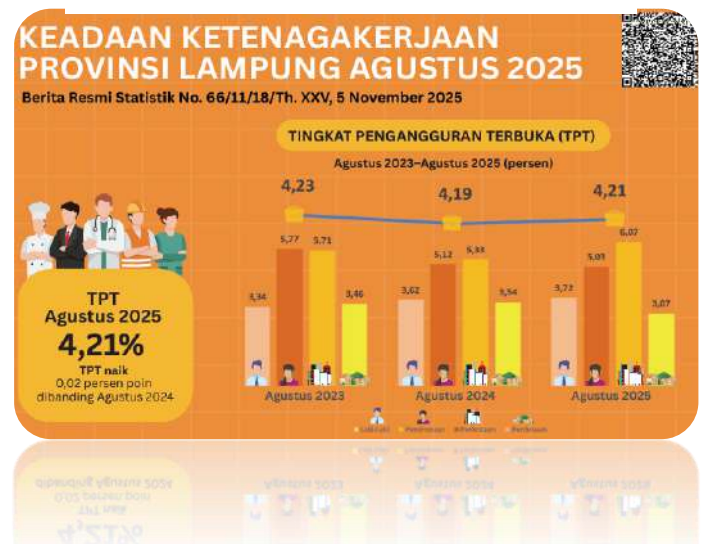
Dalam menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perlu memperhatikan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perubahan TPT tidak hanya mencerminkan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika masuk dan keluarnya penduduk usia kerja ke dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, tanpa memperhatikan TPAK, perubahan TPT berpotensi memberikan gambaran yang kurang utuh mengenai kondisi ketenagakerjaan. Di Provinsi Lampung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,21 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 4,19 persen. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan, dari 70,41 persen pada Agustus 2024 menjadi 70,44 persen pada Agustus 2025, atau meningkat sebesar 0,03 persen poin.

Peningkatan TPAK menunjukkan adanya penambahan penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Namun, kenaikan TPT mengindikasikan bahwa pertambahan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan angkatan kerja tersebut, sehingga proporsi penganggur dalam angkatan kerja mengalami peningkatan tipis. Secara umum, perkembangan TPT dan TPAK tersebut mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil, meskipun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi angkatan kerja.

Kondisi Provinsi Lampung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 5.066,55 ribu orang, naik 69,80 ribu orang dibanding Agustus 2024.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 4.853,38 ribu orang, naik sebanyak 65,79 ribu orang dari Agustus 2024.

Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Agustus 2025



3. Sebanyak 1.712,51 ribu orang (35,28 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 4,42 persen poin dibanding Agustus 2024.
4. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu pada Agustus 2025 naik masing-masing sebesar 1,66 persen poin dan 0,45 persen poin, dibandingkan Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,21 persen, naik sebesar 0,02 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.



Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Lampung. PUK pada Agustus 2025 sebanyak 7.192,54 ribu orang, naik sebanyak 96,32 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 5.066,55 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2.125,99 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 4.853,38 ribu orang penduduk yang bekerja dan 213,17 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 69,80 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 65,79 ribu orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 4,01 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 70,44 persen, naik 0,03 persen poin dibanding Agustus 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 86,40 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,85 persen.

Dibandingkan Agustus 2024, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sedangkan perempuan mengalami penurunan, pada penduduk laki-laki sebesar 0,79 persen poin dan -0,73 persen poin pada penduduk perempuan.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Agust 2024–Agust 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	7.003,29	7.096,22	7.192,54	96,32	1,36
Angkatan Kerja	4.904,90	4.996,75	5.066,55	69,80	1,40
- Bekerja	4.697,66	4.787,59	4.853,38	65,79	1,37
- Pengangguran	207,24	209,16	213,17	4,01	1,92
Bukan Angkatan Kerja	2.098,39	2.099,47	2.125,99	26,52	1,26
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,04	70,41	70,44	0,03	
- Laki-laki	87,30	85,61	86,40	0,79	
- Perempuan	52,01	54,58	53,85	-0,73	

Sumber: BPS, Maret 2026

Karakteristik Penduduk Bekerja

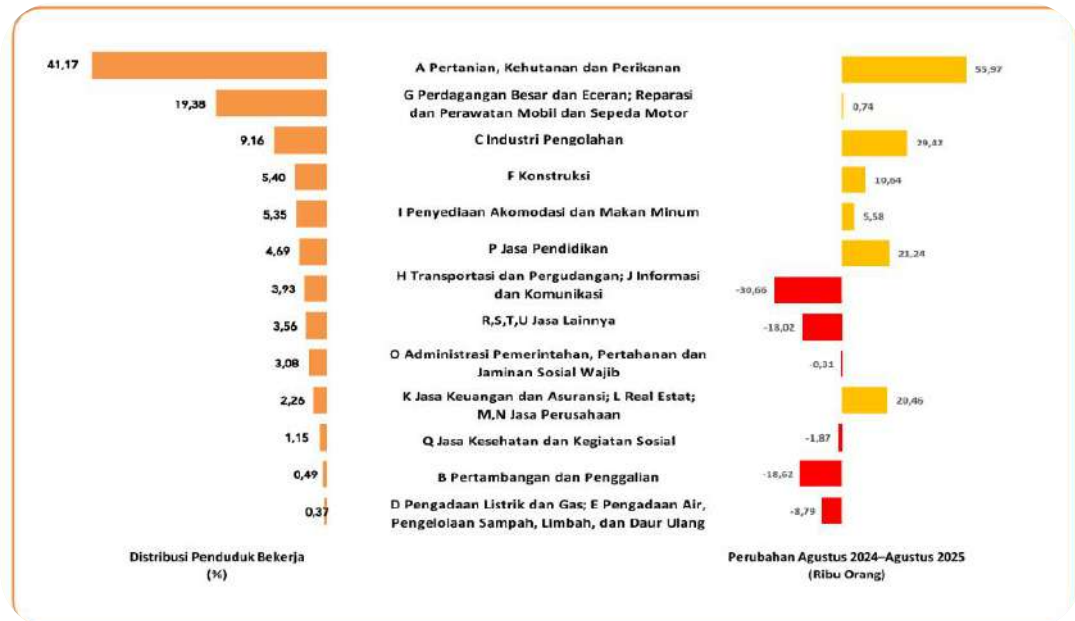
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Utama Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 41,17 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,38 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,16 persen. Pola lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2024 (Lampiran 1). Dibandingkan Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (55,97 ribu orang); Industri Pengolahan (29,42 ribu orang); Jasa Pendidikan (21,24 ribu orang).

Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi (30,66 ribu orang); dan Pertambangan dan Penggalan (18,62 ribu orang).

Grafik 3.39 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Agustus 2025



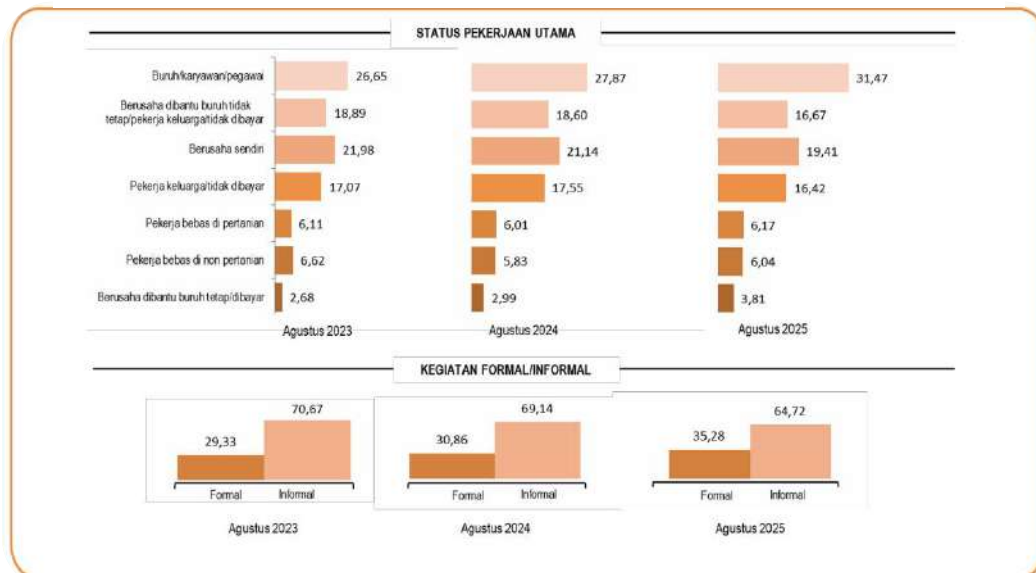
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Januari 2026

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,47 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,81 persen. Dibandingkan Agustus 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai yakni sebesar 3,60 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar berada pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/ tidak dibayar sebesar -1,93 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 3.140,87 ribu orang (64,72 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan

formal sebanyak 1.712,51 ribu orang (35,28 persen). Dibandingkan Agustus 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen poin.

Grafik 3.40 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2023–Agustus 2025

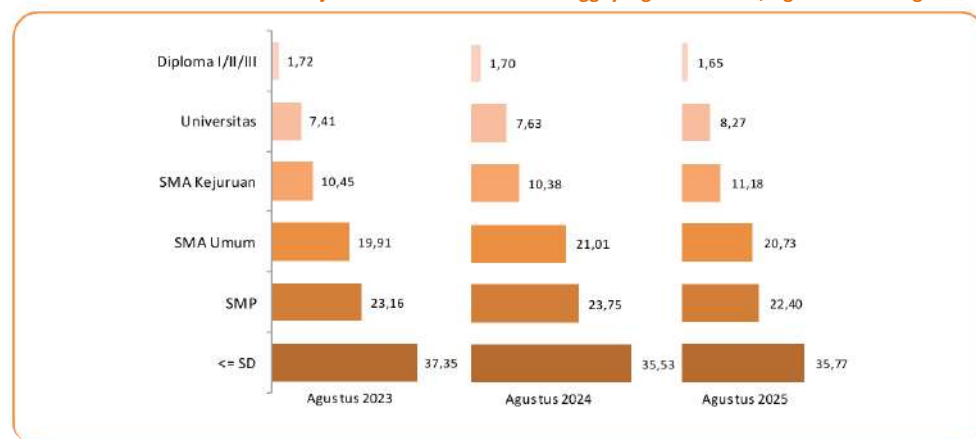


Sumber: BPS Provinsi Lampung, Januari 2026

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 35,77 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III/IV, S1, S2, S3 hanya sebesar 9,92 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2024.

Grafik 3.41 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2023–Agustus 2025



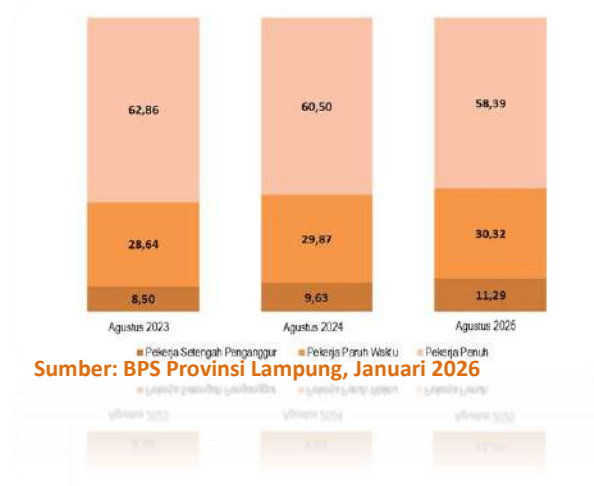
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Januari 2026

Dibandingkan dengan Agustus 2024, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA Umum, dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase sebesar 1,35 persen poin, 0,28 persen poin, dan 0,05 persen poin. Sedangkan penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tamatan SD ke bawah, SMA Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan (0,80 persen poin).

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 58,39 persen pada Agustus 2025. Sementara itu 41,61 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2024, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 2,11 persen poin. Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2025 adalah sebesar 11,29 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar sebelas orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen poin. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Lampung pada Agustus 2025 sebesar 30,32 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar tiga puluh orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin

Grafik 3.42 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025



Karakteristik Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termankaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 4,21 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.

Grafik 3.44 Karakteristik Pengangguran, Agustus 2023–Agustus 2025

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2023 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Agust 2023–Agust 2025 (persen poin)	Perubahan Agust 2024–Agust 2025 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	4,19	4,21	-0,02	0,02
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,34	3,62	3,72	0,38	0,10
- Perempuan	5,77	5,12	5,03	-0,74	-0,09
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	5,71	5,33	6,07	0,36	0,74
- Perdesaan	3,46	3,54	3,07	-0,39	-0,47

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Januari 2026

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 3,72 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,03 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2024 sebesar 0,10 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibanding Agustus 2024.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT daerah perdesaan sebesar 3,07 persen. Sedangkan, jika dibandingkan Agustus 2024, TPT perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,74 persen poin dan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin.

TPT berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2025 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2025, TPT tamatan SMA Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,16 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar

2,16 persen. Dibandingkan Agustus 2024, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 1,65 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan Universitas mengalami peningkatan TPT tertinggi yaitu sebesar 1,66 persen poin.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung diantaranya meningkatkan kompetensi Pencari Kerja melalui pelatihan Vokasi, memperluas kesempatan kerja didalam dan luar negeri, memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja. Perkembangan teknologi dan informasi telah membuat perusahaan dan industri menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melaksanakan:

A. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja dengan merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran, kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu penganggur dan setengah penganggur.

Kebijakan ketenagakerjaan bidang penempatan tenaga kerja diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, yakni melalui pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, pengembangan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing serta pemagangan tenaga kerja di perusahaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan setengah penganggur.



Sumber: Disnakertrans Provinsi Lampung,
Januari 2026

Berikut ini upaya yang telah dilaksanakan di tahun 2025, yaitu:

- 1) Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan lembaga-lembaga penempatan ketenagakerjaan dan dunia usaha sesuai dengan potensi daerah pada berbagai sektor melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- 2) Pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK) online guna memudahkan pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi lowongan (Perusahaan); Pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK) online guna memudahkan mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja dengan penyempurnaan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja dan penyerbarluasan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengoptimalkan pasar kerja online.
- 3) Perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN)/Pekerja Migran Indonesia, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Lokal (AKL) dengan tujuan menempatkan tenaga kerja sesuai kompetensi, minat, dan kemampuan, serta menjamin perlindungan dan hak tenaga kerja. Untuk memperkuat penempatan tenaga kerja khususnya melalui AKAD dan AKL, dilakukan kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga layanan informasi dan penempatan kerja pada SMK, LPKS, dan perguruan tinggi.

Gambar 3.17
AKAN dan AKAD Tahun 2025



Sumber: Disnakertrans Provinsi Lampung,
Januari 2026

- 4) Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Provinsi Lampung. Sebagaimana Anamat UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 3.65 Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas		Total
		L	P	
1	BATIK CIPRAT SILABI METRO	4	6	10
2	CAFÉ ENERGI POSITIF	3	2	5
3	CV. SHIHA ALI BERKAH	10	13	23
4	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7	2	0	2
5	PT. ADIRA FINANCE LAMPUNG	2	1	3
6	PT. BUMI MENARA INTERNUSA	4	2	6
7	PT. CAHAYA MURNI INDOLAMPUNG	2	0	2
8	PT. FAJAR AGUNG INDOCERLANG	1	0	1
9	PT. GREAT GIANT PINEAPPLE	8	4	12
10	PT. JAPFA COPEED INDONESIA	2	0	2
11	PT. LAMPUNG INTERPERTIWI KEBUN	2	0	2
12	PT. MUTIARA ARTHA HOTELINDO (AKAR Hotels & Resorts)	1	0	1
13	PT. NESTLE INDONESIA	1	0	1
14	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	24	3	27
15	PT. BARATSELATAN MAKMUR INVESTINDO	3	0	3
16	RS. GRAHA HUSADA	0	1	1
17	RS. MARDI WALUYO	4	2	6
18	RS. URIP SUMOHARJO	3	2	5
19	YAYASAN HARAPAN MASA DEPAN LAMPUNG	3	1	4
	Jumlah	79	37	116

Sumber: Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026

Gambar 3
Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Tahun 2025



Sumber: Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026



Dalam rangka meningkatkan perlindungan, kualitas, dan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi calon PMI, penguatan layanan informasi dan perlindungan, serta pencegahan penempatan nonprosedural. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah dalam mewujudkan penempatan tenaga kerja yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan PMI yang sesuai ketentuan, meningkatnya jumlah calon PMI yang terdaftar secara resmi, serta menurunnya potensi penempatan nonprosedural. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait turut memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan hak-hak PMI.

Tabel 3.66 Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN /KOTA	2023	2024		2025
		J	L	P	J
1.	Bandar Lampung	325	6	212	657
2.	Lampung Barat	173	24	156	138
3.	Lampung Selatan	2.139	620	1.753	2.178
4.	Lampung Tengah	3.051	982	2.722	3.827
5.	Lampung Timur	8.030	2.726	6.926	9.343
6.	Lampung Utara	797	225	819	996
7.	Mesuji	538	186	461	611
8.	Metro	215	14	103	413
9.	Pesawaran	1.252	339	1.069	1.315
10.	Pringsewu	1.160	385	796	1.213
11.	Tanggamus	1.506	409	1.066	1.232
12.	Tulang Bawang	760	163	794	835
13.	Tulang Bawang Barat	677	174	597	753
14.	Way Kanan	492	157	453	614
15.	Pesisir Barat	45	10	28	50
	Jumlah	21.160	6.420	17.955	24.175

Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi dengan pelayanan dan tatakelola penempatan, perlindungan serta peningkatan keterampilan bagi Pekerja Migran Indoensia (CPMI).

Gambar 3.19 Penghargaan ketenagakerjaan
Provinsi Lampung Menerima Penghargaan Tingkat nasional sebagai Provinsi
dengan pelayanan dan Tata Kelola yang baik terhadap Penempatan PMI



Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026

Gambar 3.20 Pemulangan tenaga migran
Pemulang jenazah Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Di Luar Negeri
yang akan dikembalikan ke daerah asal



Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri salah satu upaya yang dilakukan Disnaker adalah dengan Fasilitas Pemulangan PMI yang bermasalah (Meningggal, Sakit, Deportasi dan TPPO) yang akan di kembalikan ke daerah asal.

Tabel. 3.67 Data pencari kerja, pekerja dan penempatan
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Di Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENCARI KERJA TERDAFTAR			LOWONGAN TERDAFTAR			PENEMPATAN/PEMENUHAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Bandar Lampung	3.595	3.094	6.244	1.278	490	3.625	1.029	188	3.625
2	Lampung Barat	457	369	239	205	43	31	179	23	31
3	Lampung Selatan	3.873	1.687	2.874	2.498	1.102	1.572	2.305	69	1.261
4	Lampung Timur	9.459	6.017	4.779	8.178	252	171	8.038	213	171
5	Lampung Tengah	4.854	3.164	5.445	3.269	417	2.759	3.067	370	2.759
6	Lampung Utara	1.254	2.352	1.704	941	150	134	941	136	134
7	Mesuji	912	641	550	554	39	70	539	28	70
8	Metro	875	3.077	541	598	3.089	195	472	2.964	195
9	Pesawaran	2.541	1.010	1.283	1.389	44	127	1.389	21	127
10	Pringsewu	2.457	1.436	1.208	1.168	82	177	1.168	47	177
11	Tanggamus	2.654	4.616	954	1.513	3.333	125	1.513	3.327	125
12	Tulang Bawang	1.506	731	728	798	136	144	778	26	144
13	Tulang Bawang Barat	1.049	976	624	774	53	90	677	40	90
14	Way Kanan	4.337	1.416	959	2.812	189	229	2.798	163	229
15	Pesisir Barat	454	673	634	56	120	86	45	101	86
16	Provinsi Lampung	-	-	-	1.500	-	1.1126	1.111	-	-
	JUMLAH	40.277	31.259	28.746	27.531	9.539	10.661	26.049	7.716	9.224

Sumber ; Disnaker Provinsi Lampung, Februari 2026

Tabel 3.68 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung

No	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Solusi	Program/kegiatan yang dilaksanakan
2	Terbatasnya Kesempatan Kerja	1. Kurangnya Ketersediaan Tenaga Kerja yang kualifikasinya sesuai kebutuhan Dunia Usaha saat ini 2. Kurangnya informasi dan akses pencari kerja untuk mencari informasi tentang lowongan kerja di perusahaan 3. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak informal dibandingkan formal 4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di daerah perkotaan dibanding di daerah pedesaan. 5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill kepada pencari kerja	1. Terbukanya pasar tenaga kerja global 2. Regulasi investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta	1. Bekerjasama dalam menyupayakan penciptaan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha sesuai dengan potensi daerah pada berbagai sektor melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait 2. Koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah, BP2MI dan Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), CPMI/PMI, Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK-SMK dan Perguruan Tinggi untuk membantu sosialisasi serta mendorong perusahaan dalam penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja 3. Optimalnya penggunaan Aplikasi Sigajah oleh Perusahaan dalam melaporkan lowongan pekerjaan 4. Penempatan kerja melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Antara Kerja Antara Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL). 5. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD);	Program Unggulan Aplikasi si gajah Lampung Kegiatan Informasi Pasar Kerja Online Sub Kegiatan Pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kabupaten/ kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

10. Indeks Modal Manusia

Tabel 3.69 Capaian Indeks Modal Manusia					
Sasaran	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia				
IKU	Indeks Modal Manusia (IMM)				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	IMM: 0,53 IPM: 73,13	-	-
2	2025	IMM: 0,55 IPM: 71,59	IMM: - IPM: 73,98	103,33	IPM
3	2029	0,58	-	-	-
4	Nas	-	IMM: - IPM: 75,90	97,4	IPM

78
76
74
72
70

73,13 73,98 75,9

2024 2025 Nas

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia memiliki indikator **Indeks Modal Manusia** realisasi yang belum diril dari world bank dari target sebesar **0,55** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya belum dapat terhitung. Namun, karena komponen dari IMM menyerupai dengan komponen IPM maka untuk sementara indikator yang dapat dikonversikan adalah IPM. IPM Provinsi Lampung adalah 73,981%.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 0,55. Karena indikator IMM yang dikonversikan menjadi IPM maka diketahui bahwa IPM Provinsi Lampung tahun 2024 adalah 73,13 dan kinerja tahun 2025 adalah 73,98. Hal ini menggambarkan bahwa IPM Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,85%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2026 belum dapat terhitung karena belum dirilisnya IMM tahun 2025.
4. Realisasi Kinerja 2025 IMM yang dikonversikan dengan IPM, apabila dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2025 maka kinerja Provinsi Lampung masih berada lebih rendah 1,92% dengan capaian 97,47%.

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) dari Bank Dunia mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi mendatang, yang mencakup lima komponen utama: kelangsungan hidup anak, pertumbuhan sehat (stunting), kualitas belajar, partisipasi sekolah, dan angka



kelangsungan hidup dewasa. Indeks ini memproyeksikan produktivitas anak yang lahir saat ini dibandingkan dengan potensi penuhnya.

Komponen mendetail dari Indeks Modal Manusia (HCI) meliputi:

- **Kelangsungan Hidup Anak (Survival to School Age):** Probabilitas anak bertahan hidup dari lahir hingga usia sekolah (sekitar usia 5 tahun).
- **Pertumbuhan Sehat (Healthy Growth/Stunting):** Mengukur tingkat stunting pada anak, yang mencerminkan kesehatan fisik dan kognitif.
- **Kualitas Belajar (Quality of Learning):** Menilai hasil belajar siswa, sering diukur dengan skor PISA yang disesuaikan dengan lamanya sekolah.
- **Partisipasi Sekolah (School Enrollment):** Mengukur berapa lama anak-anak diharapkan bersekolah.
- **Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (Adult Survival Rate):** Probabilitas anak usia 15 tahun bertahan hidup hingga usia 60 tahun, yang mencerminkan tingkat kesehatan angkatan kerja.
- Komponen-komponen ini digabungkan untuk memberikan nilai antara 0 hingga 1, yang menunjukkan produktivitas angkatan kerja masa depan

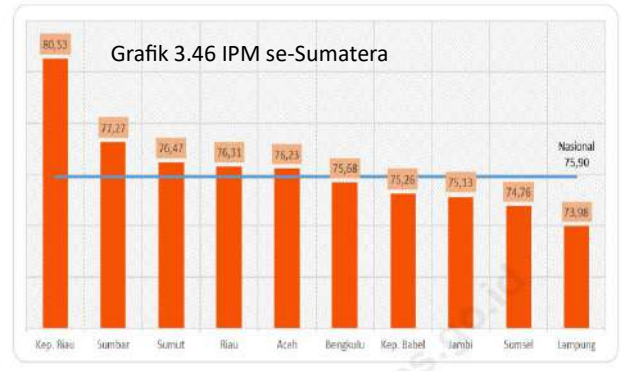
Tahun 2025 IMM Provinsi belum belum dirilis oleh world bank, pusat atau pihak manapun. Namun setelah mendalami lebih dalam makna dari IMM maka komponen IMM dapat dikonversikan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat meliputi dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
2. Pengetahuan meliputi dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.
3. standar hidup layak meliputi pengukuran menggunakan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Ketiga dimensi tersebut dinormalisasi dan digabungkan dengan metode rata-rata geometrik untuk menghasilkan nilai IPM.



IPM menurut provinsi di Sumatera relatif bervariasi. Ada lima provinsi memiliki IPM di atas angka nasional, sementara lima provinsi lainnya termasuk Lampung memiliki IPM di bawah angka nasional (75,90). IPM tertinggi dicapai Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 80,53. Sedangkan IPM yang paling rendah terdapat di Provinsi Lampung yaitu sebesar 73,98.



Sumber: Badan Pusat Statistik, BRS IPM

IPM Provinsi Lampung tahun 2025

Capaian ini menandai percepatan pembangunan manusia di Lampung dan mencerminkan perbaikan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan. Dalam periodenya, IPM Lampung tumbuh setiap tahun. Kondisi eksisting tahun 2025 berdasarkan dimensi sebagai berikut:



A. Dimensi Kesehatan

Pada tahun 2025, seluruh dimensi penyusun IPM Lampung mengalami peningkatan. UHH mencapai 74,71 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini bermakna bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,71 tahun, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020 LF).

Grafik 3.48

PERKEMBANGAN KOMPONEN IPM, 2020–2025 (1)



B. Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan, HLS meningkat menjadi 12,79 tahun, sementara RLS naik cukup signifikan menjadi 8,61 tahun, mencerminkan semakin panjangnya masa pendidikan penduduk, terutama pada kelompok usia dewasa.

Dimensi Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah / HLS (Tahun)

▲ Mengalami **peningkatan** 0,01 tahun (tumbuh 0,08%) dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini **lebih rendah** dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2024 (0,26%)

Rata-Rata Lama Sekolah / RLS (Tahun)

▲ Mengalami **peningkatan** 0,25 tahun (tumbuh 2,99%) dibandingkan tahun 2024, yang **lebih tinggi** dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2024 (0,95%)

Grafik 3.49 Perkembangan Dimensi Pendidikan IPM



Berikut data IPM Provinsi Lampung berdasarkan dimensi Pendidikan tahun 2022-2025 yang terus meningkat.

Tabel 3.70 IPM Lampung Menurut Komponen, 2022–2025

Komponen	Satuan	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UHH LF SP2020	Tahun	73,95	74,17	74,39	74,71
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,74	12,77	12,78	12,79
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,18	8,29	8,36	8,61
Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan	Rp 000	10.336	10.769	11.258	11.683
IPM dengan UHH LF SP2020		71,79	72,48	73,13	73,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, BRS IPM Provinsi Lampung

C. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak juga menunjukkan perkembangan positif. Pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan) pada 2025 mencapai Rp11,68 juta, meningkat sekitar Rp425 ribu atau 3,78 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan membaiknya daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.

Grafik 3.50 Perkembangan Dimensi Standar hidup layak IPM

Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)

▲ Mengalami **peningkatan** 425 Ribu Rupiah (tumbuh 3,78%) dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini **lebih tinggi** dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2024 yang sebesar 3,06%



Secara keseluruhan, peningkatan IPM Lampung tahun 2025 menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan manusia terjadi secara menyeluruh pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Namun, seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada tahun 2025, terdapat 1 kabupaten dengan status capaian IPM masih tergolong “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), yaitu Kabupaten Mesuji. Sedangkan 12 kabupaten lainnya sudah masuk pada kategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).



Sumber: Badan Pusat Statistik, BRS IPM Provinsi Lampung

Untuk wilayah kota di Provinsi Lampung, baik Kota Bandar Lampung maupun Kota Metro sudah masuk pada kategori IPM yang “sangat tinggi” (≥ 80). Selain itu, IPM Kota Bandar Lampung dan Kota Metro nilainya lebih tinggi dari IPM Lampung. Berikut IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (69,40), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (81,26).



Beberapa factor yang menjadi penghambat sekaligus tantangan dalam meningkatkan IPM Provinsi Lampung yaitu:

A. Sektor Kesehatan & Kelangsungan Hidup (Survival):

- 1) **Stunting:** Nilai stunting Provinsi Lampung tahun 2025 adalah 15,9% dimana kondisi ini berada di atas nasional (19,8%). Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Lampung masih memiliki tantangan di masa mendatang dengan asumsi bahwa semakin kecil stunting di Lampung maka perkembangan fisik dan kognitif anak serta tingkat kesehatan meningkat. Selanjutnya akan berdampak pada Tingkat pendidikan yang akan menjadi lebih baik secara kontinuitas.
- 2) **Penyakit Produktivitas:** Tingginya penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, dan kelainan neonatal menyebabkan angka *Disability-Adjusted Life Years* (DALYs) tinggi, yang mengurangi umur produktif. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi motor penggerak dalam menurunkan resiko pola hidup yang tidak baik.
- 3) **Kematian dini:** Kematian anak sebelum usia lima tahun dan rendahnya angka harapan hidup.

B. Sektor Pendidikan & Pembelajaran:

- 1) **Kualitas Pendidikan:** Pentingnya untuk meningkatkan Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan hasil belajar/skor PISA di Provinsi Lampung.
- 2) **Kesenjangan Akses:** Tidak meratanya kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkualitas, terutama di daerah terpencil.
- 3) **Kurangnya Keterampilan (Skills):** Rendahnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri.

C. Faktor Struktural & Ekonomi:

- 1) **Kurangnya Investasi SDM:** Pentingnya fokus pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan manusia.
- 2) **Kemiskinan:** Garis kemiskinan yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak.



11. Indeks Pembangunan Pemuda

Tabel 3.71 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda					
Sasaran	Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga				
IKU	Indeks Pembangunan Pemuda				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	55,67	-	-
2	2025	57,00	55,,67	97,66	Metode Lama 2024
3	2029	65,00	-	85,64	Metode baru
4	Nas	-	58,33	95,43	Metode Lama

Grafik 3.51 IPP
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IPP
2024	57,67
2025	55,67
Nas	58,33

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga memiliki indikator **indeks pembangunan pemuda** dengan realisasi kinerja sebesar 55,67 dari target sebesar **57,00** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **97,66%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi kinerja ini merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi tahun 2025 akan dirilis pertengahan tahun 2026.
2. Realisasi Kinerja 2025 yang masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 85,64%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 2,66 poin dengan capaian kinerja sebesar 95,43%.

Tabel 3.72 IPP se-Sumatera:

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DOMAIN KESEHATAN	DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	IPP
1	Aceh	67,65	69,72	67,54	46,39	63,68	63,04
2	Sumatera Utara	71,07	69,49	61,57	48,13	68,23	63,73
3	Sumatera Barat	72,29	64,58	63,00	43,20	65,28	61,74
4	Riau	71,02	60,01	75,19	46,99	64,00	63,51
5	Jambi	66,40	68,20	64,85	43,64	71,99	62,96
6	Sumatera Selatan	67,42	66,93	53,04	41,04	58,46	57,47
7	Bengkulu	69,55	66,38	64,08	50,18	60,36	62,20
8	Lampung	65,56	70,51	57,15	42,03	57,96	58,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,35	76,31	69,96	38,72	71,06	65,27
10	Kepulauan Riau	79,63	80,88	62,82	46,74	78,10	69,65

Sumber: Laporan IPP Kemenpora, 2024



Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, namun secara umum tetap mengalami peningkatan. Kerangka kebijakan pembangunan pemuda memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, sehingga di tahun 2024 telah dilakukan peninjauan ulang terhadap IPP untuk memastikan bahwa ukuran tersebut mampu merefleksikan capaian pembangunan pemuda dan mengangkat dinamika situasi pemuda saat ini. Pembaharuan tersebut mencakup struktur, ruang lingkup, indikator penyusun, definisi operasional, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. Dengan adanya perbedaan tersebut maka IPP metode lama tidak dapat diperbandingkan dengan IPP metode baru.

IPP metode baru terdiri dari 3 lapisan pembangunan, lima domain pembangunan pemuda yaitu:

1. Domain pendidikan dan pelatihan;
2. Domain kesehatan;
3. Ketenagakerjaan layak;
4. Domain partisipasi dan kepemimpinan; serta
5. Domain inklusivitas dan kesetaraan gender dengan 16 indikator penyusunnya.

Metode pengukurannya tidak lagi melalui proses normalisasi data dengan metode desil namun menggunakan metode persentil dan terdapat pembobotan pada setiap indikator maupun domain. Selain itu IPP metode baru dapat diagregasikan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

Mengingat IPP metode baru telah ditetapkan sebagai tolok ukur pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, maka diperlukan:

- b. penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. Pemerintah daerah yang telah memiliki RAD perlu segera melakukan penyesuaian program/intervensi dan target capaian, sedangkan daerah yang belum menyusun diharapkan segera menyusunnya sesuai amanat Peraturan Presiden tentang

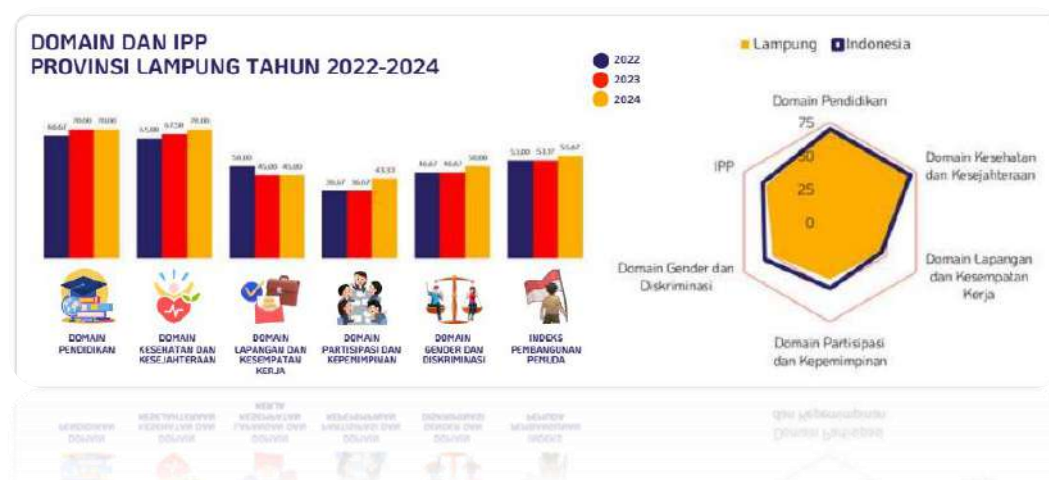
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal;

- d. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui asistensi teknis dan pemantauan berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif; dan
- e. Peran aktif setiap pemangku kepentingan dalam menjaga konsistensi capaian, serta mendorong peningkatan capaian pada domain yang masih lemah melalui program/kegiatan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan;
- f. membangun kesadaran, komitmen dan political will agar kebijakan dan program kepemudaan menjadi agenda strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.

IPP Provinsi Lampung (metode lama)

Pada tahun 2024, Provinsi Lampung memiliki persentase pemuda sebesar 22,71 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 2,5 poin, dari 53,17 pada tahun sebelumnya menjadi 55,67. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 67,50 menjadi 70, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 36,67 menjadi 43,33. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga menunjukkan perbaikan dari 46,67 menjadi 50, menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda. Sementara itu, domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi masing-masing di angka 70 dan 45.

Meskipun tidak terdapat domain yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian IPP Provinsi Lampung masih berada 2,66 poin di bawah capaian nasional.





Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Lampung dan nasional dapat dilihat pada Domain pendidikan (70), domain kesehatan dan kesejahteraan (70), serta domain kesempatan dan lapangan kerja (45) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional. Sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan (43,33) lebih rendah dari nilai nasional (50). Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi (50) lebih rendah dari capaian nasional (56,67).

Berdasarkan domain diatas maka keunggulan Provinsi Lampung berada pada empat indikator yaitu APK sekolah menengah, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan angka perkawinan usia anak. Meski begitu, masih terdapat tiga indikator yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dan berada di bawah capaian nasional, yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA.



Tabel 3.73 Faktor pendukung dan penghambat, Solusi serta program IPP

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/ Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi - Adanya Perda/Perkada tentang kepemudaan. - Integrasi program kepemudaan dalam RPJMD Provinsi Lampung. - Sinergi antara Dispora, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. 2. Bonus Demografi - Jumlah penduduk usia muda yang besar menjadi potensi pembangunan SDM unggul. 3. Program Kepemudaan dan Keolahragaan - Pelatihan kepemimpinan pemuda. - Wirausaha muda. - Keikutsertaan dalam event nasional (POPNAS, Peparnas, dll). 4. Dukungan Organisasi Kepemudaan - KNPI, Pramuka, Karang Taruna, dan komunitas kreatif.	1. Kualitas Pendidikan Belum Merata - Masih adanya putus sekolah. - Akses pendidikan tinggi belum optimal di daerah tertentu. 2. Pengangguran Usia Muda - Tingginya angka pengangguran terbuka usia 16–30 tahun. - Keterampilan belum sesuai kebutuhan dunia kerja. 3. Partisipasi Organisasi yang Fluktuatif - Pemuda belum seluruhnya aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial. 4. Keterbatasan Data Terpadu - Sinkronisasi data antar OPD belum optimal. - Belum semua kabupaten/kota memiliki data kepemudaan terbaru. 5. Masalah Sosial - Pernikahan dini. - Penyalahgunaan narkoba. - Kurangnya literasi digital.	1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan - Beasiswa pemuda berprestasi. - Pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. - Kerja sama dengan dunia usaha/industri. 2. Pemberdayaan Wirausaha Pemuda - Inkubator bisnis pemuda. - Bantuan modal usaha. - Pelatihan digital marketing. 3. Peningkatan Partisipasi Pemuda - Forum Pemuda Daerah. - Musrenbang Pemuda. - Pelatihan kepemimpinan dan bela negara. 4. Integrasi Data Kepemudaan - Pembentukan sistem database kepemudaan berbasis digital. - Koordinasi OPD dan kabupaten/kota 5. Pencegahan Masalah Sosial - Edukasi kesehatan reproduksi. - Kampanye anti narkoba. - Literasi digital dan keamanan siber.	kegiatan yang mendukung peningkatan IPP: - Seleksi dan pembinaan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) - Kejuaraan olahraga tingkat pelajar dan umum - Peringatan Hari Sumpah Pemuda - Coaching clinic olahraga - Sosialisasi bahaya narkoba - Pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi - Pengembangan pusat kreativitas pemuda

12. Indeks Perlindungan Anak

Tabel 3.74 Capaian Indeks Perlindungan Anak					
Sasaran	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan				
IKU	Indeks Perlindungan Anak (IPA)				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	64,78	-	-
2	2025	66,22	71,58	108,1	
3	2029	72,1	-	99,28	
4	Nas	-	71,02	100,78	

Grafik 3.52 IPA Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IPA
2024	64,78
2025	71,58
Nas	71,02

Sumber: Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan memiliki indikator **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** dengan realisasi kinerja sebesar 71,58 dari target sebesar **66,22** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **108,1%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 64,78. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya maka realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 6,8 poin.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 99,28%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,56 poin dengan capaian 100,78%.

Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Salah satu ukuran penting keberhasilan tersebut adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang merupakan indikator utama untuk menilai seberapa baik sebuah daerah dalam melindungi hak-hak anak dan menjamin lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Capaian IPA Provinsi Lampung untuk tahun 2025 tercatat sebesar 71.58%. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan dari angka capaian sebelumnya pada 2022, 2023 dan 2024, yang sama-sama berada di angka 64,78 % setelah melewati fluktuasi di



periode sebelumnya (misalnya penurunan di 2021). Angka IPA ini menggambarkan bahwa upaya perlindungan anak di Lampung terus dipertahankan dan diperkaya melalui berbagai intervensi kebijakan dan layanan Masyarakat.

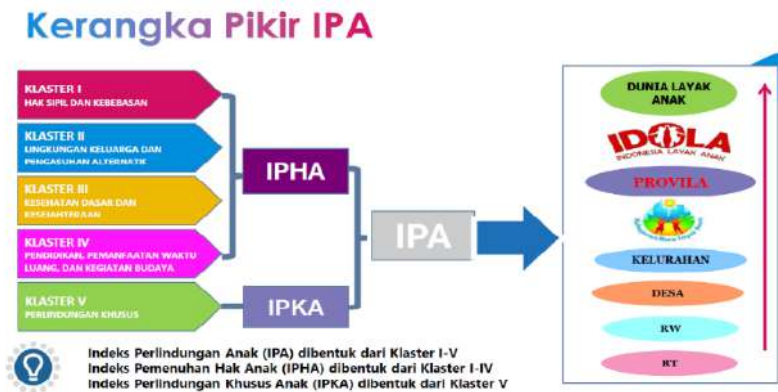
Pencapaian ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi, organisasi masyarakat sipil, lembaga perlindungan anak, serta berbagai stakeholder yang aktif dalam pencegahan kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial anak. Namun, catatan ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus ditangani, terutama dalam konteks kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Lampung sepanjang 2025, seperti ratusan laporan kekerasan yang tercatat melalui sistem SIMFONI-PPA.

Dengan dasar capaian IPA tersebut, Provinsi Lampung selanjutnya perlu memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak, serta memperluas akses pemenuhan hak dasar lain bagi anak untuk mendukung pertumbuhan sosial dan psikologis mereka secara optimal. Langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat, integrasi layanan data, kemitraan multi-sektor, serta perbaikan akses layanan psikososial diharapkan dapat meningkatkan nilai IPA di tahun-tahun berikutnya.

Tantangan dalam upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 masih banyak dirasakan, terutama dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Pemerintah harus terus mengupayakan program dan kegiatan yang berfokus pada kepentingan anak.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) didefinisikan sebagai ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Sementara ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Selanjutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat

menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak.



Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara, yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, untuk memastikan dan mengawasi usaha pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara utuh. Konvensi Hak Anak juga menjadi instrumen dan mekanisme hukum untuk mengukur pemenuhan hak anak dan pelanggaran hak anak di negara-negara dunia.

Klaster I sampai klaster IV merupakan 4 kluster pemenuhan hak anak, sehingga menjadi dimensi pembentuk dalam Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Sementara Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tersusun dari Klaster V. Gabungan dari kelima klaster tersebut merupakan penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Dalam upaya meningkatkan IPA Provinsi Lampung, stakeholder telah melaksanakan kebijakan di berbagai aspek yaitu :

- a. Hak Sipil dan Kebebasan melalui percepatan kepemilikan KIA gratis; standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Perpustakaan SMPN 2 Kota Bandar Lampung (predikat PRATAMA); Perpustakaan Sekolah SMPS Tunas Mekar Indonesia Kota Bandar Lampung dan pelantikan dan pembekalan bagi forum anak daerah (FAD) Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar. Pembekalan bagi FAD Kabupaten Lampung Tengah

- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif melalui peresmian dan standardisasi PUSPAGA Pinggungan Sebauai Provinsi Lampung; tersedia infrastruktur harus ramah anak (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak, ruang bermain ramah anak (RBRA) di RBRA TK IT Al.Mumtaza Kabupaten Lampung Selatan dan Taman Bermain Kalpataru Kota Bandar Lampung.

Proses Standardisasi RBRA Kab. Lampung Selatan dan Bandar Lampung



- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan melalui Mengembangkan mutu pelayanan melalui sosialisasi Pelayanan Ramah Anak (PRAP) di Kabupaten Lampung Selatan;

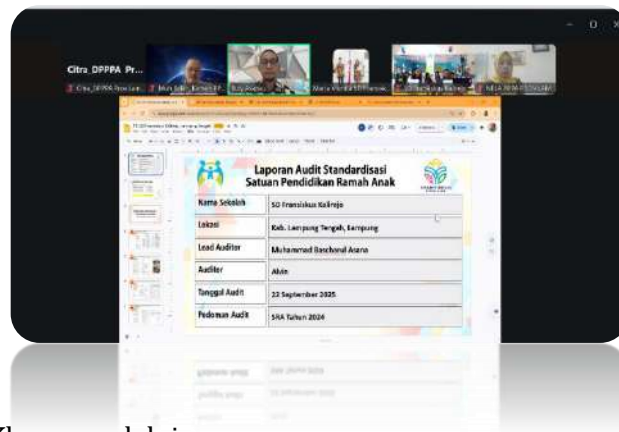
Gambar. sosialisasi Pelayanan Ramah Anak (PRAP) di Kabupaten Lampung Selatan



- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya melalui, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); memberikan anak kesempatan mengembangkan bakat dan minat diberikan hak berkreaitivitas Mengisi waktu luang dengan

berkegiatan yang positif, kreatif dan inovatif; Menyelenggarakan Bimtek Konvensi Hak Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak bagi tenaga pendidik; adanya Lembaga perlindungan khusus ramah anak yang terstandarisasi; Melakukan Standarisasi SRA, di Provinsi Lampung sudah terdapat 8 (delapan) sekolah yang sudah standarisasi (SRA /Satuan pendidikan ramah anak) antara lain : MIN 1 Pesawaran, SLB Insan Madani Metro, SMPN 1 Sukoharjo Pringsewu, MAN Insan Cendekia, SMP Negeri 14 Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (SMPN 1 Kalianda), Kabupaten Tulang Bawang Barat (MIN Nurul Iman Pulung Kencana), Sekolah Dasar Fransiskus Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Gambar. Proses standarisasi SRA di SD Fransiskus Kalirejo, Kab. Lampung Tengah



e. Perlindungan Khusus melalui

1. Kegiatan KKN Tematik Perlindungan Anak. KKN Tematik Perlindungan Anak adalah kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang berfokus pada perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak. Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan, mahasiswa berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta membangun lingkungan yang aman, ramah, dan peduli anak, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan KKN Tematik Perlindungan Anak ini berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebanyak 77 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) telah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) Pembekalan Pemenuhan Hak Anak serta edukasi perlindungan anak sebagai bekal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kegiatan KKN dilaksanakan selama 40 hari dan tersebar di 4 kelurahan di Bandar Lampung (Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras, kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling, Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi, dan Kelurahan

Penengahan Kecamatan Kedaton), sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

Selama pelaksanaan, mahasiswa berhasil merealisasikan 33 program wajib dan 14 program pilihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Program-program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif, khususnya dalam peningkatan kesadaran serta perlindungan terhadap anak. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan manfaat langsung kepada 792 anak sebagai penerima manfaat, menjadikan KKN ini tidak hanya sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mendukung pembangunan sosial di Masyarakat.

Gambar: Kegiatan KKN Tematik Perlindungan Anak Tahun 2025



2. Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Provinsi Lampung sudah terdapat 9 (sembilan) LPKRA yang terstandar antara lain : SMPN 1 Kalianda Kabupaten lampung Selatan, SLB Insan Madani Kota Metro, SMPN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, SMPN 2 krui Kabupaten Pesisir Barat. Loka rehabilitas BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan RSUP Dr. H.Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pondok Pesantren Al-Furqon), Kabupaten Tulang Bawang Barat (SDN 09 Lambu Kibang), Kabupaten Pesawaran (MTSN 2 Pesawaran);

Tabel 3.75 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IPA

Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Komitmen pemerintah daerah dan adanya regulasi perlindungan anak	Koordinasi lintas sektor belum optimal, kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi	Penguatan koordinasi lintas OPD dan integrasi program perlindungan anak
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran komunitas	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan perlindungan anak	Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan terkait hak dan perlindungan anak
	Tersedianya lembaga layanan perlindungan anak	Akses layanan dan sistem rujukan belum merata	Penguatan layanan, sistem pelaporan, dan pendampingan anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Dukungan lintas sektor dan keterlibatan lembaga pendidikan	Masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi anak	Penanganan kasus terpadu dan penguatan pencegahan berbasis komunitas Kerjasama dengan universitas UIN RIL untuk melaksanakan kegiatan KKN Tematik Perlindungan Anak (77 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) telah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) Pembekalan PHA serta edukasi perlindungan anak)

Provinsi Layak Anak (Provila)

Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diterima secara langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada Puncak Acara Malam Penganugerahan Apresiasi KLA, di Auditorium Kementerian Agama Jakarta Pusat Jumat (08/08/2025).





Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator PMK, Imam Machudi dan Menteri PPPA, Arifah Fauzi kepada 13 Provinsi yang memperoleh Predikat Provinsi Layak Anak, termasuk salah satunya adalah Provinsi Lampung. Penghargaan Provila ini telah tiga kali diraih oleh Provinsi Lampung semenjak tahun 2022 dan kembali diraih di tahun 2025.

Provila merupakan sebuah wujud sinergitas dan kerja keras baik di Kabupaten/Kota maupun lintas Kabupaten/Kota dalam setiap Provinsi dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

PROVILA (Provinsi Layak Anak) dapat tercapai jika semua Kabupaten dan Kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta seluruh kecamatan dan desa/kelurahan menjadi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak (KELANA dan DEKELA).

Adapun **15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung** yang memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu:

1. **KLA Peringkat Nindya:** Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan.
2. **KLA Peringkat Madya:** Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
3. **KLA Peringkat Pratama:** Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu

KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sesuai dengan Visi Gubernur *“Bersama Lampung Menuju Indonesia Emas 2045”* dan Misi Nomor 3, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlarant,



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
MAS

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) dengan mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung adalah melalui pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada kabupaten/kota terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan KLA, baik kebijakan, program maupun kegiatan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Atas capaian tersebut, maka pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung yaitu Penghargaan Provila (Provinsi Layak Anak) Tahun 2025.

13. Indeks Ketimpangan Gender

Sasaran 8					
Sasaran	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan				
IKU	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	0,399	-	-
2	2025	0,422	0,399	105,76	2024
3	2029	0,387	-	96,99	
4	Nas	-	0,421	105,51	

Grafik 3.53 IKG Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IKG
2024	0,399
2025	0,399
Nas	0,421

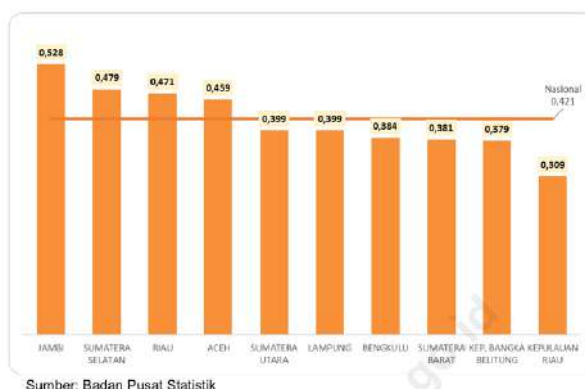
Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan memiliki indikator **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** dengan realisasi kinerja sebesar 0,399 dari target sebesar **0,422** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **105,76%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi kinerja ini merupakan realisasi kinerja tahun 2024 yang menjadi dasar perhitungan kinerja 2025 karena kinerja 2025 akan di rilis pertengahan tahun 2026.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 96,99%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka Provinsi Lampung lebih tinggi 0,022 poin dengan capaian 105,51%. Hal ini menunjukan Provinsi Lampung memiliki ketimpangan gender lebih rendah dari nasional.

Tabel 3.54 IKG se-Sumatera

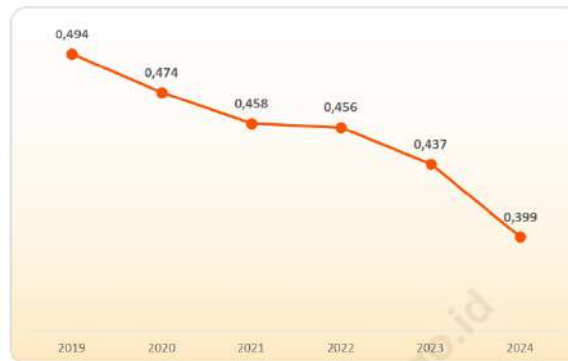


Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau Sumatera, IKG Lampung termasuk posisi 6 terendah. Sedangkan IKG tertinggi se-Sumatra diperoleh provinsi Jambi sebesar 0,528.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang mengukur ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Grafik 3.55 Penurunan IKG Provinsi Lampung 2019-2024

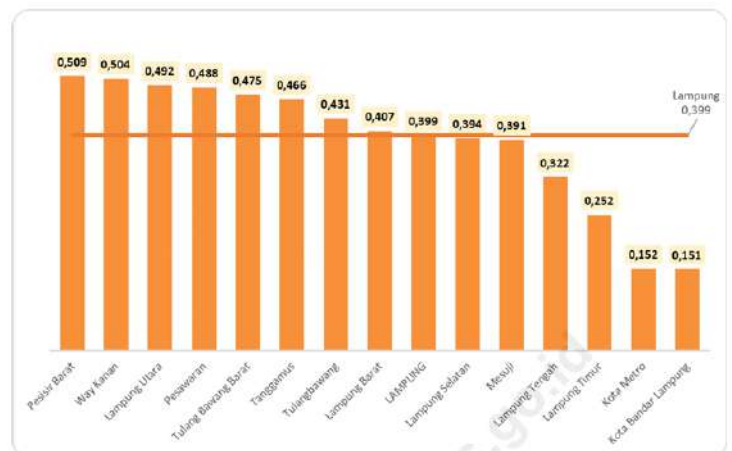


Sumber: Badan Pusat Statistik, BRS IKG Provinsi Lampung

Ketimpangan gender di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018 hingga 2024 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,038 poin, rata-rata turun 0,01 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

IKG Provinsi Lampung tahun 2024 sebesar 0,399, turun 0,038 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,437. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi terutama perbaikan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun yang turun dari 26,0 persen tahun 2023 menjadi 23,7 persen pada tahun 2024.

Pencapaian IKG pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2018-2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.



Sumber: Badan Pusat Statistik, BRS IKG Provinsi Lampung

Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Pringsewu, diikuti oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sebanyak 13 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, disusul Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro.

Tabel 3.77 IKG Lampung Menurut Komponen, 2020–2024

Dimensi/Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,143	0,111	0,114	0,087	0,057
MHPK20	Perempuan	0,289	0,275	0,269	0,260	0,237
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	80,00	81,18	81,18	81,18	82,35
	Perempuan	20,00	18,82	18,82	18,82	17,65
Pendidikan Minimal SMA (%)	Laki-laki	33,67	33,72	34,88	36,15	37,27
	Perempuan	28,33	28,77	30,44	32,12	32,21
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	85,41	85,55	85,84	87,30	85,61
	Perempuan	54,13	52,36	53,54	52,01	54,58

Sumber: Badan Pusat Statistik. BRS IKG Provinsi Lampung

Ketiga dimensi pembentuk IKG konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama 2020-2024 dapat dilihat di tabel diatas.

Dalam upaya meningkatkan IKG Provinsi Lampung, stakeholder telah melaksanakan kebijakan di berbagai aspek yaitu :

1. Bimtek Ekonomi Kreatif Perempuan Kepala Keluarga
Bimbingan teknis ekonomi kreatif bagi perempuan kepala keluarga merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kapasitas kewirausahaan perempuan yang berperan sebagai penopang utama rumah tangga, melalui penguatan keterampilan teknis dan kreativitas usaha berbasis potensi lokal, sehingga peserta tidak hanya dibekali kemampuan produksi dan inovasi produk, tetapi juga pemahaman pemasaran, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital.



Pada akhirnya diharapkan mampu memperluas peluang usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong peran aktif perempuan kepala keluarga dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3.22 Bimtek kepemimpinan Perempuan pedesaan



2. Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk komitmen dalam melindungi hak asasi dan martabat perempuan melalui layanan yang terpadu, responsif, dan berperspektif korban, mencakup upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dengan memberikan dukungan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta pendampingan sosial secara berkelanjutan, sehingga korban memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang layak, sekaligus mendorong terbangunnya lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.



Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025, tercatat sebanyak 80 kasus dengan 80 korban, di mana bentuk kekerasan yang paling dominan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 37 kasus, disusul oleh persetubuhan sebanyak 11 kasus, kekerasan fisik dan pencabulan/sodomi masing-masing 10 kasus, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO/KSBE) sebanyak 8 kasus, sementara bentuk kekerasan lainnya seperti hak asuh anak tercatat 2 kasus, serta TPPO/trafficking/eksploitasi dan perzinahan masing-masing 1 kasus, secara keseluruhan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih memerlukan penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 3.2.39 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IKG

Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Meningkatnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja yang mendorong perbaikan dimensi ekonomi. 2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender	1. Budaya patriarki yang masih kuat dan membatasi peran perempuan. 2. Keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan posisi strategis. 3. Kesenjangan pendidikan dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan.	1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan akses permodalan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi bagi perempuan. 3. Optimalisasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah. 4. Edukasi dan kampanye perubahan perilaku untuk mengurangi stereotip gender.

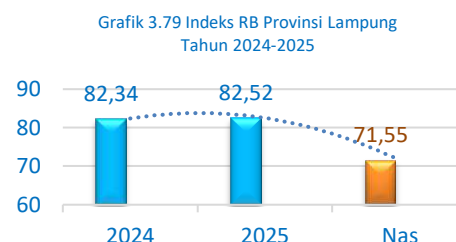
14. Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3.79 Capaian indeks reformasi birokrasi					
Sasaran	Terwujudnya birokrasi berintegritas				
IKU	Indeks Reformasi Birokrasi				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	82,34	-	-
2	2025	83,5	82,52	98,83	sementara
3	2029	87,01-88,00	-	94,83	-
4	Nas	-	71,55	111,81	2024

Grifik 3.79 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks RB
2024	82,34
2025	82,52
Nas	71,55

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi memiliki indikator **Nilai Reformasi Birokrasi** dengan realisasi sebesar 82,52 dari target sebesar **83,5** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **98,83%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan angka sementara yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB Februari 2025 dan masih angka sementara.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 82,34. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya realiasi kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin. Realisasi ini masih bergerak sehingga masih ada perubahan.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2026 maka capaian mencapai 94,83%.

4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2024 maka realisasi kinerja lebih tinggi 10,97 poin dengan capaian 111,81%. Realisasi nasional 2025 baru akan dirilis pertengahan Maret 2026.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan baik pada level pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan yang ada, range penilaian meliputi:

Tabel 3.80 Kategori Nilai RB

NO	KATEGORI	NILAI	INTERPRESTASI
		ANGKA	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Sangat Baik
3	BB	>70-80	Baik
4	B	>60-70	Cukup Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Buruk
7	D	>0-30	Sangat Buruk

Sumber : PermenPAN dan RB No. 26 Tahun 2020

Berdasarkan kategori diatas, nilai RB Provinsi Lampung berada pada kategori cukup dengan predikat C selama 3 tahun berturut dari tahun 2020-2022 kemudian meningkat menjadi B di tahun 2023 dan menjadi A di tahun 2024-2025.

Prioritas Pembangunan Nasional dalam RB terciptanya *World Class Bureaucracy* untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi RB agar pelaksanaannya berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 3.81 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Uraian	Total score idx	Ket.
	RB General		
1	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	40,58	
2	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	28,35	
3	Strategi Pelaksanaan RB General	3,26	
	RB Tematik		
1	Strategi Pembangunan	2,67	
2	Capaian Indikator Dampak	7,67	
	total	82,53	

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berikut ini angka sementara capaian RB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun

2025 yang dirilis oleh Kementerian PANRB dalam Portal RB:

Tabel 3.82 Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota se Lampung Tahun 2025

No.	Kelompok Instansi	Nama Instansi	RB General Awal	Koefisien	RB General	Bobot RB General	Bobot RB General Penyesuaian	RB General Penyesuaian	RB Tematik	Index RB
1	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	65,01	-	65,01	100,00	100,00	65,01	6,95	71,96
2	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	65,31	-	65,31	100,00	100,00	65,31	10,21	75,52
3	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah	57,39	-	57,39	100,00	100,00	57,39	9,90	67,29
4	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur	63,32	-	63,32	100,00	100,00	63,32	8,18	71,50
5	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara	62,73	-	62,73	100,00	100,00	62,73	9,38	72,11
6	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji	67,27	-	67,27	100,00	100,00	67,27	12,62	79,89
7	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran	66,05	-	66,05	100,00	100,00	66,05	10,23	76,28
8	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	62,13	-	62,13	100,00	100,00	62,13	6,39	68,52
9	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	61,41	-	61,41	100,00	100,00	61,41	7,97	69,38
10	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	66,67	-	66,67	100,00	100,00	66,67	7,80	74,47
11	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang	60,34	-	60,34	100,00	100,00	60,34	8,86	69,22
12	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	62,65	-	62,65	100,00	100,00	62,65	10,30	72,95
13	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	64,74	-	64,74	100,00	100,00	64,74	8,14	72,88
14	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	60,68	-	60,68	100,00	100,00	60,68	9,38	70,06
15	Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kota Metro	69,00	-	69,00	100,00	100,00	69,00	8,97	77,97

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

Berikut ini adalah capaian Nilai RB Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2024:

Tabel 3.83 Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota se Lampung Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN /KOTA	INDEKS									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai
1	Provinsi Lampung	CC	52,03	CC	58,38	CC	58,92	B	68,79	A	82,68
2	Kota Bandar Lampung	CC	59,98	CC	58,81	CC	58,77	CC	56,69	B	69,53
3	Kota Metro	B	-	B	61,22	B	65,01	B	65,72	BB	76,43
4	Kabupaten Lampung Barat	CC	55,06	CC	55,56	CC	54,91	B	61,28	BB	70,76
5	Kabupaten Lampung Selatan	C	47,35	CC	50,28	CC	55,53	BB	70,91	BB	75,6
6	Kabupaten Lampung Tengah	C	35,92	CC	53,57	CC	57,9	B	64,7	BB	73,48
7	Kabupaten Lampung Timur	C	48,40	CC	52,33	CC	55,32	CC	58,83	BB	71,3
8	Kabupaten Lampung Utara	C	40,31	C	41,31	C	48,86	CC	51,79	B	62
9	Kabupaten Mesuji	C		C	43,19	C	47,63	B	67,46	BB	77,62
10	Kabupaten Pesawaran	C	48,34	C	49,79	CC	54,27	B	68,27	BB	75,58
11	Kabupaten Pesisir Barat	-	-	C	39,47	C	39,89	CC	50,05	B	67,13
12	Kabupaten Pringsewu	CC	51,24	CC	55,24	CC	58,49	B	63,33	BB	73,99
13	Kabupaten Tanggamus	CC	54,64	CC	57,55	CC	59,14	CC	57,03	B	68,52
14	Kabupaten Tulang Bawang	C	49,62	CC	51,84	CC	54,91	CC	54,75	B	66,48
15	Kabupaten Tulang Bawang Barat	C	39,98	C	44,80	CC	51,1	CC	58,15	B	67,53
16	Kabupaten Way Kanan	CC	-	CC	51,43	CC	55,49	CC	55,56	BB	72,69

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026.



Indeks di atas merupakan hasil evaluasi Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode lama pada tahun 2019-2022 sedangkan pada tahun 2023-2024 sudah menggunakan metode penilaian yang baru. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi maka pada tahun 2024 ini evaluasi RB menggunakan metode penilaian evaluasi. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis evaluasi RB, yaitu: evaluasi internal yaitu evaluasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi eksternal pada tahapan pasca pelaksanaan.

Evaluasi internal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Implementasi reformasi birokrasi melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung. Oleh sebab itu perlu adanya Tim RB Provinsi Lampung yang menjadi leading sektor untuk mengkoordinir implementasi RB. Tim yang dimaksud telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/615/B.07/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dimana dalam SK tersebut telah dijelaskan tugas dan tanggungjawab dalam tahap perencanaan (ex-ante) dan tahap pelaksanaan (on going).
2. Dalam pengawasannya maka telah dibentuk tim pengawasan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/124/IV.01/HK/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Resiko oleh Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan tujuan pelaksanaan RB Provinsi Lampung dapat mencapai target-target meso dalam percepatan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Evaluasi Eksternal Provinsi Lampung dapat dilihat melalui hasil capaian dimensi general dan tematik oleh evaluator meso dan nasional.

- A. **Dimensi General**, terdiri dari dua komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Berikut ini hasil dan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam dimensi general:
 - i. Pemerintah Provinsi Lampung dalam menetapkan strategi pelaksanaan RB telah menetapkan Rencana Aksi RB yang tertuang dalam Surat Keputusan



Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 000.8.6/2168/07/2024 tentang

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

- ii. APIP Inspektorat Provinsi Lampung melalui Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi RB telah melaksanakan evaluasi Rencana Aksi RB Provinsi Lampung Tahun 2024 baik pada rencana aksi RB general dan tematik yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal RB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

B. **Dimensi Tematik.** Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan tema RB tematik. Berdasarkan LHE RB oleh evaluator internal Inspektorat Provinsi Lampung, rencana aksi tematik RB telah memenuhi aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, Pengawasan, teknologi informasi dan inovasi.

Tabel 3.84 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi IRB

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Aksi
a. Adanya acuan dalam meningkatkan implementasi RB di Lingkungan Pemprov Lampung seperti Perubahan Road Map RB, Rencana Aksi RB General dan Tematik; b. Adanya instrument pengawasan oleh APIP Provinsi Lampung pada tahap ex-ante, on going dan progress pencapaian 21 KU Provinsi Lampung; c. Adanya kolaborasi dan perhatian pimpinan dalam meningkatkan implementasi RB terbukti adanya Tim RB lintas sectoral; d. Survei Pengukuran Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK e. <i>Role Model</i> dan <i>Agent of Change</i> di Perangkat Daerah f. Seluruh Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis dan Pengukuran Kinerja secara bulanan	a. Penerapan manajemen SDM yang belum berorientasi pada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal secara menyeluruh. b. Sistem aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum sesuai dengan performance cascade; c. Kurangnya informasi oleh evaluator meso terkait fokus pencapaian serta penilaian meso. d. Belum optimalnya penggunaan SI dalam metode pengukuran pencapaian kinerja RB general dan tematik.	a. Meningkatkan komitmen bersama dalam rangka implementasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi b. Peningkatan predikat kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, Pemerintah Provinsi Lampung masih mendapatkan predikat Zona Kuning c. Intensifikasi Survei Kepuasan Masyarakat terutama pada PD Pelayanan Publik d. Intensifikasi implementasi Agen Perubahan, e. Intensifikasi nilai-nilai Core Values BerAKHLAK f. Intensifikasi Sistem Manajemen Talenta	1. Melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan PermenPANRB 20/2018; 2. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemprov Lampung 3. Menyusun arsitektur data, aplikasi, layanan, infrastruktur dan keamanan SPBE; 4. Monitoring dan evaluasi kualitas implementasi SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal) 5. Mengakomodir pembangunan system perizinan pendukung OSS dalam MPP digital; 6. Pendampingan dan asistensi pembangunan ZI di Lingkungan Pemprov Lampung; 7. Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta (SIMATA) untuk Tahap Awal Pemetaan Talenta PNS; 8. Monitoring harga dan pasokan serta terus menerus melakukan operasi pasar secara kontinuitas sebagai pegendalian inflasi; 9. Monitoring/pengawasan TPID bersama satgas pangan terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan dari Tingkat distributor sampai ke pengecer

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Februari 2026

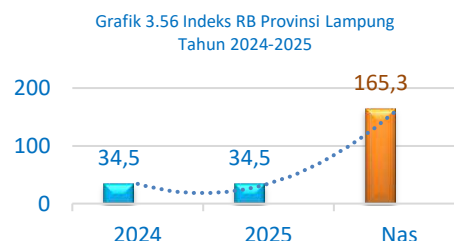
15. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

Tabel 3.85 Capaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca					
Sasaran	Terwujudnya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana				
IKU	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	60,64	-	-
2	2025	62,79	60,64 (34,551,5 02.5 juta ton CO2e)	96,57	Semen -tara 2025
3	2029	72,13	-	84,07	-
4	Nas	-	165,31 juta ton CO2e	20,6	-

Grafik 3.56 Indeks RB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Indeks RB
2024	34,5
2025	34,5
Nas	165,3

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana memiliki indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dengan realisasi kinerja sebesar 60,64 dari target sebesar **62,79** yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **96,57%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi kinerja ini merupakan realisasi kinerja tahun 2024 karena realisasi kinerja 2025 belum rilis.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 84,07%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka Provinsi Lampung telah menduduki 20,6% dari capaian Nasional.

Pemerintah Indonesia berhasil mencapai realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi sebesar 165,31 juta ton CO2e (CO2 equivalen) pada tahun 2025. Sedangkan Lampung mencapai realisasi 34,551,502.5 juta ton CO2e.



Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan isu global yang semakin mendesak. Emisi GRK adalah gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas ini menahan panas di atmosfer, sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi.

Penyebab Emisi Gas Rumah Kaca

– Aktivitas Pembakaran Fosil

Pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab utama dari emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂) (Sciences, 2014). Batu bara, minyak bumi, dan gas alam digunakan secara luas sebagai sumber energi dalam industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Proses pembakaran ini menghasilkan CO₂ sebagai produk sampingan, yang kemudian dilepaskan ke atmosfer dan berkontribusi pada peningkatan efek rumah kaca.

– Pertanian

Pertanian adalah sektor penting dalam perekonomian global, namun juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca (Szyba & Mikulik, 2022). Produksi hewan ternak, khususnya sapi dan domba, menjadi salah satu penyebab utama emisi metana.

– Penggundulan Hutan

Penggundulan hutan adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim global karena menghilangkan penyerap CO₂ dan melepaskan karbon yang disimpan dalam biomassa pohon ke atmosfer (Sinaga & Foekh, 2021). Selain itu, proses pembakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, menghasilkan emisi GHG yang signifikan.

– Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan energi dalam jumlah besar, yang seringkali diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil (Mikhaylov et al., 2020). Proses produksi semen, misalnya, membutuhkan pembakaran batu kapur dan batubara, yang menghasilkan emisi CO₂ sebagai produk sampingan.



Dampak Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap ekosistem bumi. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menekankan pentingnya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai strategi utama untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Melalui kebijakan ini, upaya mitigasi dan adaptasi diintegrasikan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk energi, transportasi, dan pertanian. RPJPN mendorong pengembangan teknologi bersih dan sumber energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010. Tahun 2010 dijadikan tahun dasar perhitungan PDB oleh Badan Pusat Statistik, mengacu pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB. Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK dihitung dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

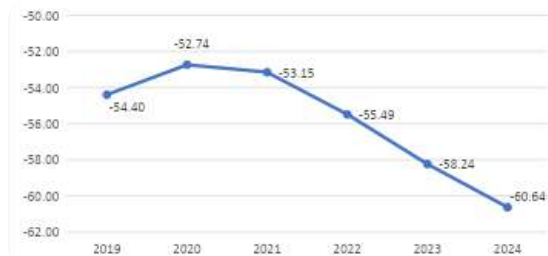


Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung. Sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC Tahun 2015, Indonesia terus mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Demikian juga dengan Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO₂e. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 menetapkan arah kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan dan penguatan daya tahan masyarakat terhadap perubahan iklim, dimana Indikator utama dalam kebijakan ini mencakup penurunan intensitas emisi GRK, yang diharapkan dapat mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi dan konsumsi. Selain itu, penurunan emisi GRK kumulatif (ton CO₂e) menjadi fokus utama, di mana target ambisius ditetapkan untuk meminimalkan akumulasi emisi dari tahun ke tahun. Penurunan emisi GRK tahunan (ton CO₂e) juga menjadi indikator penting, mencerminkan hasil nyata dari implementasi kebijakan yang diambil.

Nilai Intensitas Emisi (IE) GRK yang didefinisikan sebagai jumlah emisi GRK (CO₂e) per satuan output ekonomi (miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) pada jangka waktu dan wilayah tertentu. Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang ditangkap dalam aplikasi penerus PEP RAD GRK yakni AKSARA atau Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia.

Berikut adalah data capaian penurunan intensitas emisi GRK Tahun 2021-2024 serta target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025-2030.

Grafik 3.57 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2024



Sumber : Hasil Pemodelan Tim LCDI Bappenas 2025, diolah

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya maka beberapa cara mengatasi Emisi Gas Rumah Kaca diantaranya:

1. Pengembangan Energi Terbarukan. Pengembangan energi terbarukan merupakan langkah kunci dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Pertanian Berkelanjutan. Praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian
3. Konservasi Hutan. Konservasi hutan merupakan strategi penting dalam mengatasi emisi gas rumah kaca.
4. Efisiensi Energi. Meningkatkan efisiensi energi merupakan cara efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam berbagai sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga .
5. Kurangi Limbah. Manajemen limbah yang efektif merupakan strategi lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya metana

Hal di atas menjadi acuan Provinsi Lampung dalam menurunkan emisi GRK melalui implementasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2010, dimulai dengan penyusunan dan implementasi RAD-GRK dan dilanjutkan dengan PRK. Kegiatan PRK di provinsi Lampung dikoordinasikan oleh Bappeda dan implementasi dilaksanakan oleh OPD teknis terkait di bidang kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah.

Pada Tahun 2025 terlaksana 21 Aksi PRK. Secara total kumulatif sampai dengan Januari 2025, telah tercatat terdapat 481 kegiatan aksi PRK dalam sistem AKSARA dengan potensi capaian sebagai berikut:

Potensi Penurunan Emisi GRK 34,551,502.5 juta ton CO₂e
atau 16.3% dibandingkan dengan baseline tahun 2025.

Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Total kegiatan tahun 2025 yang dalam AKSARA adalah sebesar 0 kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Januari 2025, sebanyak 193. Kegiatan yang paling banyak dilaksanakan adalah penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun illegal logging).

Tabel 3.86 Aksi Mitigasi Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

No	Aksi Mitigasi	Jenis Kegiatan	Lokasi	Pelaksana Kegiatan	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ e)	Ket
1	Panamanan Agroforestr	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung, Pesawaran	Dinas Kehutanan	81.44523	
2	Penanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung, Pesawaran	Dinas Kehutanan	8.6064	
3	Rehabilitasi Mangrove	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung, Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Sri Mimosari	Dinas Kehutanan	535.3333	
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung, Lampung Utara, Bukit Kemuning, Sidomulyo	Dinas Kehutanan	45.9008	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2026

Bidang Pertanian

Total kegiatan tahun 2025 yang dalam AKSARA adalah sebesar 0 kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Januari 2025, sebanyak 65. Kegiatan yang paling banyak dilaporkan pada bidang pertanian adalah kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu.

Bidang Energi

Total kegiatan tahun 2025 yang dalam AKSARA adalah sebesar 0 kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Januari 2025, sebanyak 59. Kegiatan mitigasi yang mendominasi pelaporan pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan off grid dalam bentuk pembangunan PLTS dan PLTMH. Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung yang banyak dilaporkan adalah program sosialisasi ataupun penyusunan feasibility study suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

Bidang Transportasi

Total kegiatan tahun 2025 yang dalam AKSARA adalah sebesar 3 kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Januari 2025, sebanyak 21. Aksi mitigasi yang mendominasi pelaporan antara lain aksi mitigasi hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day), reformasi sistem transit (BRT), dan Smart Driving (Eco Driving).

Tabel 3.87 Aksi Mitigasi Bidang transportasi

No	Aksi Mitigasi	Jenis Kegiatan	Lokasi	Pelaksana Kegiatan	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ e)	Ket
1	Angkutan Aglomerasi Lampung_Tes	Reformasi Sistem Transit - BRT System	Lampung, Bandar Lampung, Kedaton, Kampung baru	Dinas Perhubungan	0	
2	Peremajaan Angkutan umum	Peremajaan Armada Angkutan Umum	Lampung, Lampung Selatan,	Dinas Perhubungan Lampung Selatan	0	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2026

Bidang Pengelolaan Limbah

Total kegiatan tahun 2025 yang dalam AKSARA adalah sebesar 18 kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Januari 2025, sebanyak 130. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh provinsi meliputi:

1. pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses reuse dan recycle sampah kertas/kardus/karton di Bank Sampah.
2. operasionalisasi IPAL atau septic tank komunal, baik itu secara aerobik dan anaerobic.

Tabel 3.88 Aksi Mitigasi Bidang Pengelolaan Limbah

No	Aksi Mitigasi	Jenis Kegiatan	Lokasi	Pelaksana Kegiatan	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2e)	Ket
1	Pembangunan MCK Rumah Sehat Baznas (RSB)	Pendukung	Lampung, Pesawaran, Gedung Tataan, Sukaraja	Dinas PKPCK	0	
2	Pembangunan MCK Desa Rekso Binangun	Pendukung	Lampung, Lampung Tengah, Rumbia, Rekso Binangun	Dinas PKPCK	0	
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat - MONITORING 1	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Lampung, Mesuji, Mesuji Timur, Dwi Karya Mustika	Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Lampung	9.198	
4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Belanja Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Instalasi Pengolahan Air Limba	Lampung, Mesuji, Simpang Pematang,	Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Lampung	0.73584	
5	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Belanja Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) - MONITORING 1	Instalasi Pengolahan Air Limba	Lampung, Mesuji, Tanjung Raya, Tri Karya Mulya	Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Lampung	0.73584	
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Lampung, Mesuji, Way Serdang, Tanjung Raya, Brabasan, Harapan Mukti Lampung, Muara Tenang, Mesuji Timur, Pangkal Mas Mulya Dwi Karya Mustika, Simpang Pematang, Margo Rahayu	Kabupaten Mesuji, Lampung		
7	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kot	Instalasi Pengolahan Air Limba		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Lampung	1.8396	
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Lampung, Mesuji, Mesuji Timur, Pangkal Mas Mulya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Lampung	9.198	
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Lampung G, Mesuji, Mesuji Timur, Dwi Karya Mustika	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Lampung	9.198	
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instalasi Pengolahan Air Limba	Lampung, Mesuji, Simpang Pematang, Margo Rahayu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Lampung	1.8396	

Tabel 3.89 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Program	Solusi	Kegiatan Pendukung
1. Kurangnya komitmen Kabupaten/Kota baik dalam melaksanakan aksi mitigasi RAD GRK maupun dalam melakukan PEP RAD GRK mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu. (Arahan peraturan perundang-undangan/Pemerintah Pusat, Pembentukan Pokja RAD GRK Kabupaten/Kota). 2. Kelompok Kerja (Pokja) RAD GRK Provinsi Lampung harus memiliki sistem manajemen data/informasi yang mempermudah penginputan/transfer data dari kabupaten/kota (dasar hukum/peraturan gubernur, surat edaran, MoU, dan surat biasa dan sistem aplikasi online).	1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, tahun 2021 hingga saat ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Diharapkan hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin ditingkatkan.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan penginputan data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 2. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Penanganan Sampah di TPA Regional 3. Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim dengan pembentukan desa program kampung iklim (Proklm)



Kampung Iklim (Proklam)

Proklam adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Perubahan suhu diyakini akibat terjadinya akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Berbagai kegiatan manusia dalam pembangunan menyebabkan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer semakin bertambah, termasuk penggunaan bahan bakar fosil, proses penguraian sampah dan limbah, penggunaan pupuk kimia serta pembakaran jerami. Keberadaan GRK di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Peningkatan GRK di atmosfer diperparah oleh berkurangnya luas hutan atau deforestasi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap CO₂.

Kenaikan suhu bumi meningkatkan ancaman terhadap resiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, keragaman hayati, kenaikan muka air laut serta kesehatan manusia. Perubahan iklim merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan emisi GRK sebagai komponen yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya penyadaran kepedulian masyarakat melalui program dan kegiatannya, maka perlu dilakukan rekonseptualisasi penyelenggaraan ProKlim relevan dan efektif.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa hal di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Lampung 59/2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, melalui Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup, dimana salah satu fungsinya melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca. Tugas dan fungsi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian 3.90 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
Sasaran	Terwujudnya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana				
IKU	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	73,11	-	-
2	2025	70,99	73,81	103,91	-
3	2029	71,84	-	102,74	-
4	Nas	-	78,76	93,71	-

Grafik 3.58 IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IKLH
2024	73,11
2025	73,81
Nas	78,76

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan ketangguhan bencana memiliki indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** dengan realisasi kinerja sebesar 73,81 dari target sebesar 70,99 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,91%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 73,11. Apabila dibandingkan dari sebelumnya realiasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,70%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 102,74%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih rendah 4,95% dengan capaian 93,71%.
5. Perlu adanya penyesuaian terhadap penetapan target di tahun mendatang pada dokumen perencanaan karena realisasi tahun 2025 sudah lebih tinggi daripada target tahun mendatang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung

IKLH merupakan indikator yang bersifat komparatif untuk menggambarkan kondisi suatu kabupaten dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Namun demikian, IKLH tidak ditujukan untuk pemeringkatan, melainkan sebagai instrumen evaluasi dan dorongan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikan IKLH sebagai referensi dalam menetapkan arah kebijakan menuju nilai ideal sebesar 100. Semakin rendah capaian IKLH

dibandingkan nilai ideal tersebut, semakin besar upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu dapat juga mengacu pada angka target nasional, yang apabila berada dibawahnya berarti masuk dalam kategori upayanya harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya berada dalam kategori pemeliharaan. Perhitungan IKLH dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks tersebut. Komponen indeks yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH, dikelompokkan berdasarkan level wilayah yaitu:

1. IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
2. IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
3. IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

$$\text{IKLH Kab/Kota } i = \text{IKLH}_i = (0,376 \times \text{IKA}_i) + (0,405 \times \text{IKU}_i) + (0,219 \times \text{IKL}_i)$$

Apabila Kab./Kota tidak memiliki badan air, maka:

$$\text{IKLH}_i = (0,649 \times \text{IKU}_i) + (0,351 \times \text{IKL}_i)$$

$$\text{IKLH Provinsi } j = \text{IKLH}_j = (0,340 \times \text{IKA}_j) + (0,428 \times \text{IKU}_j) + (0,133 \times \text{IKL}_j) + (0,099 \times \text{IKAL}_j)$$

Apabila Provinsi tidak memiliki perairan laut, maka:

$$\text{IKLH}_j = (0,376 \times \text{IKA}_j) + (0,405 \times \text{IKU}_j) + (0,219 \times \text{IKL}_j)$$

$$\begin{aligned} \text{IKLH Nasional} = \text{IKLH} = & (0,340 \times \text{IKA Nasional}) \\ & + (0,428 \times \text{IKU Nasional}) \\ & + (0,133 \times \text{IKL Nasional}) \\ & + (0,099 \times \text{IKAL Nasional}) \end{aligned}$$

Klasifikasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.91 Rentang Nilai IKLH

Klasifikasi	Nilai
Baik	$85 < x \leq 100$
Sedang	$60 < x \leq 85$
Buruk	$0 < x \leq 60$

Sumber : PermenLH Nomor 14 Tahun 2025

KLH Provinsi Lampung meliputi: menghitung rata-rata masing-masing komponen indeks semua kabupaten/kota, yang meliputi rata-rata IKA, rata-rata IKU, rata-rata

IKL, dan rata-rata IKAL; menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua rata-rata komponen indeks kabupaten/kota (IKA, IKU, IKL) dan komponen indeks provinsi (IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH provinsi.

Tren peningkatan IKLH Provinsi Lampung dipengaruhi oleh kombinasi antara membaiknya kualitas udara, upaya rehabilitasi dan perlindungan lahan, serta penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tekanan terhadap kualitas air dan lahan masih menjadi faktor pembatas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar peningkatan IKLH dapat berlangsung lebih signifikan dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara bertahap meningkatkan:

1. Kebijakan faktor struktural dengan penetapan dan implementasi dokumen lingkungan seperti RPPLH, KLHS, dan DDDTLH Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi dasar pengendalian pembangunan agar tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,
3. Pelaporan kinerja lingkungan secara lebih sistematis,
4. Integrasi indikator IKLH dalam dokumen perencanaan daerah, dan
5. Upaya rehabilitasi lahan kritis, konservasi kawasan lindung, serta rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir memberikan kontribusi terhadap perbaikan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan memperkuat peningkatan IKLH secara agregat.

Adapun sebaran status IKLH di Provinsi Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.





Tabel 3.92 IKLH Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2024-2025

Kabupaten/ Kota	Capaian IKA		Capaian IKU		Capaian IKL		Capaian IKAL		Capaian IKLH		Target IKLH (Kep Dirjen PPPL KLH 129/2024)		Status IKLH 2025
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Lampung Barat	69,00	79,26	93,52	79,47	42,32	66,14	-	-	73,09	76,47	66,61	74,64	Sedang
Lampung Selatan	67,04	76,43	91,71	72,48	33,52	55,69	-	-	69,69	70,29	62,45	66,68	Sedang
Lampung Tengah	58,89	71,72	86,24	74,49	26,43	54,86	-	-	62,86	69,15	63,58	65,65	Sedang
Lampung Timur	62,94	76,28	92,54	72,90	47,17	64,05	-	-	71,47	72,23	64,19	68,81	Sedang
Lampung Utara	63,33	76,64	91,95	74,48	34,57	57,72	-	-	68,62	71,62	65,27	68,68	Sedang
Mesuji	51,90	69,45	88,19	76,10	28,56	59,82	-	-	61,49	70,03	62,76	67,56	Sedang
Pesawaran	60,00	72,02	89,51	75,44	41,16	58,15	-	-	67,82	70,37	63,77	68,59	Sedang
Pesisir Barat	70,00	82,28	93,12	78,85	78,60	88,23	-	-	81,25	82,20	74,20	76,45	Sedang
Pringsewu	52,22	73,92	89,59	75,22	34,52	54,88	-	-	63,48	70,28	63,80	66,91	Sedang
Tanggamus	68,75	72,61	92,7	76,29	44,19	62,36	-	-	73,07	71,85	66,21	69,14	Sedang
Tulang Bawang	62,50	73,32	93,54	76,40	25,00	55,69	-	-	66,86	70,71	61,73	65,61	Sedang
Tulang Bawang Barat	64,29	73,16	91,95	75,09	25,03	58,12	-	-	66,89	70,65	65,09	66,80	Sedang
Way Kanan	70,00	77,11	92,13	76,80	33,12	58,15	-	-	33,12	58,15	69,04	70,78	Sedang
Kota Bandar Lampung	62,63	75,84	86,86	72,03	32,69	44,56	-	-	32,69	44,56	62,28	63,01	Sedang
Kota Metro	51,33	63,14	90,56	74,17	36,58	43,90	-	-	36,58	43,90	61,04	65,55	Sedang
Provinsi Lampung	62,97	74,21	90,94	75,35	38,49	61,40	-	-	38,49	61,40	69,52	70,99	Sedang
Nasional	54,76	72,97	90,17	82,63	62,25	78,19	-	-	62,25	78,19	69,74	76,49	Sedang



Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung Tahun 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 74,21 dan berada pada kategori SEDANG. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi baik (Memenuhi) baku mutu (148 titik) dan (128 titik kondisi tercemar Ringan), perlu upaya peningkatan capaian IKA di kota metro yang masih dibawah target. itu pada tahun 2025 tercatat seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan kondisi air provinsi lampung mengalami trend yang positif dalam upaya perbaikan kualitas air melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan persampahan di area jalur sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga air.

Tabel 3.93 IKA Kab/Kota se Provinsi Lampung

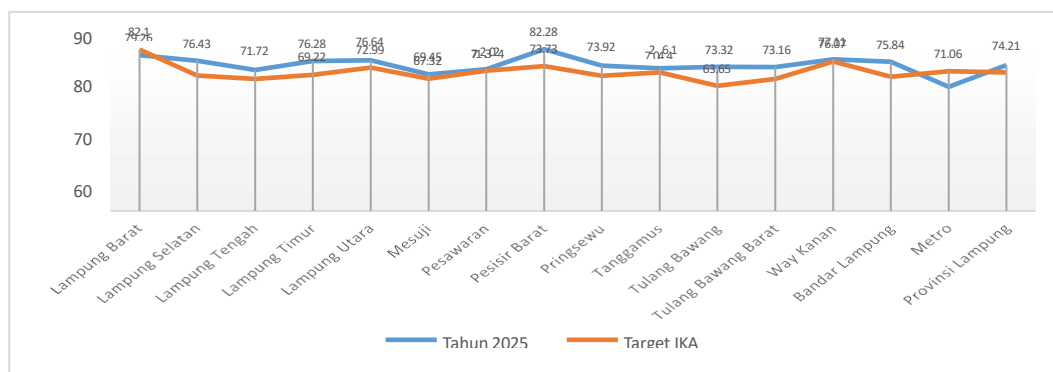
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA	IKA INA dan Mutu	
		M	R	S	B	M	R	S	B			
1	Lampung Barat	7	4	0	0	44.55	18.18	0	0	62.73	79.26	Sedang
2	Lampung Selatan	20	5	0	0	56	10	0	0	66	76.43	Sedang
3	Lampung Tengah	13	27	0	0	22.75	33.75	0	0	56.5	71.72	Sedang
4	Lampung Timur	14	8	0	0	44.55	18.18	0	0	62.73	76.28	Sedang
5	Lampung Utara	15	7	0	0	47.73	15.91	0	0	63.64	76.64	Sedang
6	Mesuji	5	1	0	0	58.33	8.33	0	0	66.67	69.45	Sedang
7	Pesawaran	9	7	0	0	39.38	21.88	0	0	61.25	72.02	Sedang
8	Pesisir Barat	2	0	0	0	70	0	0	0	70	82.28	Sedang
9	Pringsewu	2	4	0	0	23.33	33.33	0	0	56.67	73.92	Sedang
10	Tanggamus	33	30	0	0	36.67	23.81	0	0	60.48	72.61	Sedang
11	Tulang Bawang	1	7	0	0	8.75	43.75	0	0	52.5	73.32	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	7	0	0	0	70	0	0	0	70	73.16	Sedang
13	Way Kanan	9	6	0	0	42	20	0	0	62	77.11	Sedang
14	Bandar Lampung	9	10	0	0	33.16	26.32	0	0	59.47	75.84	Sedang
15	Metro	2	12	0	0	10	42.86	0	0	52.86	63.14	Sedang
16	Provinsi Lampung	148	128	0	0	37.54	23.19	0	0	60.72	74.21	Sedang

Sumber : KLHK, 2025 (<https://sitata.kemenuh.go.id/iklh/login>)

Keterangan:

*M: (Memenuhi); R : Ringan; S : Sedang; B : Berat

Grafik 3.59 tren IKA Provinsi Lampung tahun 2025:

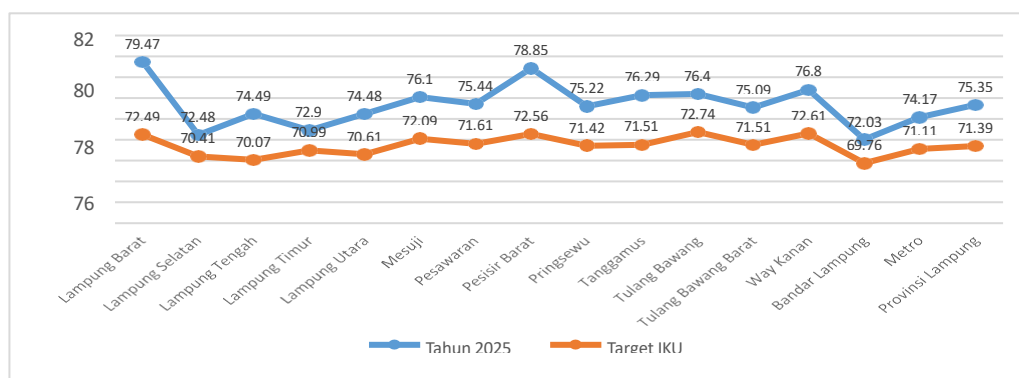


Sumber: Dinas LH Provinsi Lampung, Februari 2026

Berdasarkan data trend indeks kualitas air Provinsi Lampung di tahun 2025 sebesar 74,21. Terdapat 1 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kota Metro. Capaian indeks kualitas air di Kota Metro berada dibawah target diduga karena banyak limbah domestik (rumah tangga & UMKM) dan industri, limbah pertanian yang masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. Selain itu, kota tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan mengalami pengembangan/pembangunan perekonomian yang berdampak terhadap penurunan kualitas air.

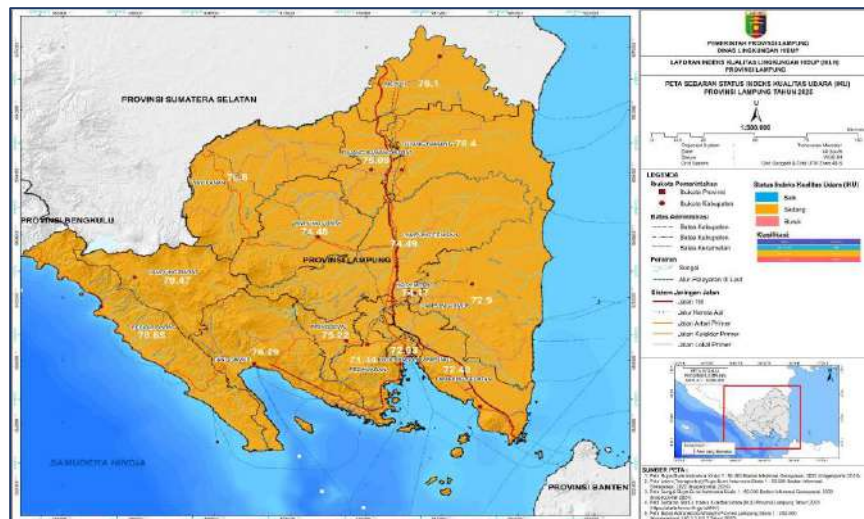
Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Lampung Tahun 2025

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Lampung memiliki angka 73,35 dan berada pada kategori **SEDANG**.



Sumber: Dinas LH Provinsi Lampung, Februari 2026

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Lampung Tahun 2025 berada diatas target dengan capaian 75,35 dan semua kabupaten/kota sudah mencapai target. Capaian yang paling rendah yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 72,03 (Sedang). Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan perhatian khusus terutama pada proporsi ruang terbuka hijau yang belum optimal yang berpengaruh pada kemampuan kota dalam menyerap polutan udara. Minimnya vegetasi peneduh dan penyangga udara bersih memperbesar akumulasi pencemar di wilayah perkotaan karena menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa sehingga memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi. Emisi gas buang kendaraan bermotor, khususnya partikulat (PM_{2.5}), NO₂, dan CO, menjadi kontributor utama penurunan/rendahnya kualitas udara ambien. Adapun sebaran status IKU di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

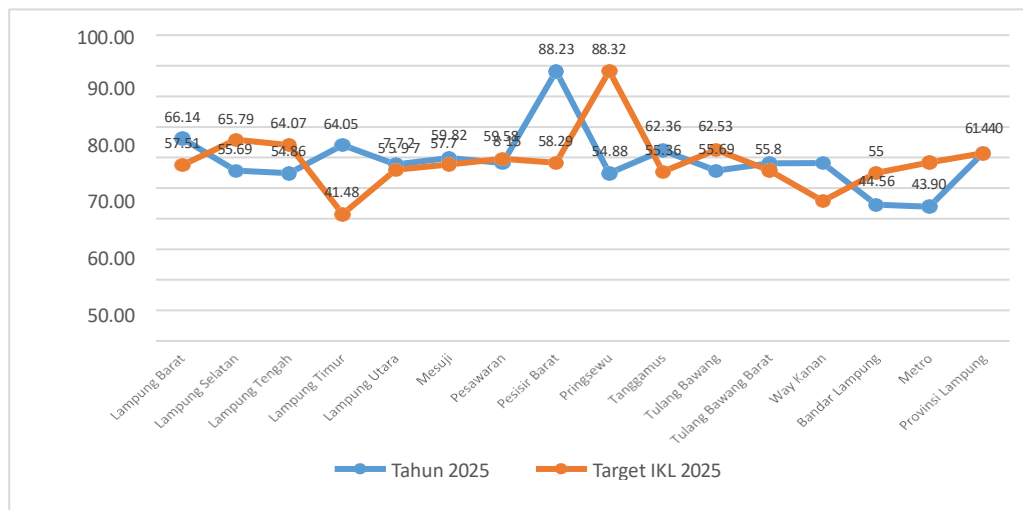


Sumber: Dinas LH Provinsi Lampung, Februari 2026

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung Tahun 2025

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung mendapatkan nilai sebesar **61,44** berada pada kategori **SEDANG**. Pada umumnya kondisi lahan di 1 kabupaten (Pesisir Barat) masuk kategori baik, 3 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tanggamus) masuk kategori sedang dan 11 kabupaten/kota masuk kategori buruk (Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Kota Metro, Lampung Tengah dan Way Kanan).

Grafik 3.85 IKL Provinsi Lampung tahun 2025



Sumber: Dinas LH Provinsi Lampung, Februari 2026

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung Tahun 2025 masih berada dibawah target, hal ini diduga karena persentase luas kawasan hutan terhadap luas daratan provinsi lampung (28,45%) dengan fungsi sebagai Kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan Kawasan hutan produksi. Selain itu kabupaten/kota belum mampu menyediakan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana seyogyanya dalam amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar minimal 30% dari luas wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat, dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, termasuk tipologi RTH (Rim Kota, Taman Kota, Jalur Hijau, dll) dan mekanisme pengakuan RTH Bersama. Permasalahan penyediaan RTH dan kurangnya tutupan lahan bervegetasi yaitu:

- Keterbatasan Lahan: Padatnya pembangunan dan mahalnya harga tanah, khususnya di area pusat kota, membuat penyediaan RTH sulit diwujudkan
- Alih Fungsi Lahan: Tekanan pembangunan sering kali mengubah lahan potensial RTH/Tutupan hutan menjadi kawasan terbangun/Pertanian/perkebunan.
- Keterbatasan Anggaran: Pembebasan lahan untuk RTH membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang tidak selalu dimiliki oleh pemerintah daerah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Lampung Tahun 2025

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Lampung mendapatkan nilai sebesar **82,41** berada pada kategori **SEDANG**.



Sumber: Dinas LH Provinsi Lampung, Februari 2026

Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinu. Demi mencapai IKLH yang lebih baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan IKLH, yaitu:

1. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (*Decision making support*);
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup menjadi urusan wajib sehingga penyusunan program dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sinergis, oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah pusat dan sinergisitas program lingkungan hidup antara Provinsi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan isu-isu strategis permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.
3. Dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan peran dan partisipasi aktif stakeholders (Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Perusahaan, masyarakat, dll), untuk itu setelah rapat koordinasi dipandang perlu untuk ditindaklanjuti segera dengan mengundang stakeholders tersebut agar bekerjasama dan terlibat dalam program/kegiatan penanganan permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.



4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung perlu mengadakan workshop tentang Inventarisasi dan Investasi Program-program Lingkungan Hidup *Stakeholders* di Provinsi Lampung (khususnya LSM lokal dan Internasional, Perusahaan, Universitas,dll), sehingga dapat menghasilkan peta (“mapping”) fokus program-program *stakeholders* yang dapat memberikan informasi bagi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dan membuat program penanganannya sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah masing-masing (kabupaten/kota se Provinsi lampung).
5. Penyempurnaan dan melengkapi isian Indeks Respon Kinerja Daerah melalui Program Kali Bersih, Program Langit Biru, Program Pantai Lestari, Program Indonesia Hijau dan Program Gambut Lestari.
6. Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,81 provinsi berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah tanggungjawab bersama, dan hanya dicapai melalui serangkaian tindak perbaikan terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan yang telah atau akan dilakukan. Dengan kata lain IKLH tidak akan meningkat apabila program/kegiatan yang akan dilakukan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan peningkatan kualitas lingkungan.
7. Secara umum permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Provinsi Lampung berkaitan dengan air, sampah, dan daya dukung lingkungan yang terus berkurang, oleh karena itu pada setiap OPD kabupaten/kota yang terkait dengan lingkungan hidup harus mampu membuat program/kegiatan yang tepat dan terukur sehingga dapat meminimalisir dampak permasalahan tersebut.

Tabel 3.86nFaktor pendukung, penghambat dan solusi dalam mendukung IKLH

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
1	Konsistensi rencana operasional kinerja program kegiatan lingkungan hidup sesuai dengan prioritasnya; Regulasi investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	IKLH hanyalah sebatas sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota, untuk itu penurunan IKLH dapat menyimpulkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, tujuan maupun target dari program atau kegiatan tersebut sehingga pada masa mendatang harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Upaya meningkatkan IKLH Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan wajib terciptanya sinergisitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung dengan kabupaten/kota khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dilain pihak sangat memerlukan dukungan peran serta masyarakat maupun stakeholder lainnya (Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Perusahaan, Masyarakat, dll) untuk pencapaian IKLH Provinsi Lampung maupun pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan dengan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan program dan penanganan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah hendaknya tidak hanya melalui pendekatan secara fisik saja, melainkan pula diperlukan pendekatan sosial seperti melakukan edukasi masyarakat, mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga pelaksanaan program dan penyelesaian masalah lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik. Perlunya tata kelola lembaga penanggung jawab pengelolaan sampah di Kabupaten/ Kota. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dilakukan masih jauh dari cukup, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sebanding dengan volume timbulan sampahnya	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup menjadi urusan wajib sehingga penyusunan program dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sinergis, oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah pusat dan sinergisitas program hidup antara Provinsi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan isu-isu strategis permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung. Dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan peran dan partisipasi aktif stakeholders (Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Perusahaan, masyarakat, dll), untuk itu setelah rapat koordinasi dipandang perlu untuk ditindaklanjuti segera dengan mengundang stakeholders tersebut agar bekerjasama dan terlibat dalam program/kegiatan penanganan permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung perlu mengadakan workshop tentang Inventarisasi dan Investasi Program-program Lingkungan Hidup Stakeholders di Provinsi Lampung (khususnya LSM lokal dan Internasional, Perusahaan, Universitas, dll), sehingga dapat menghasilkan peta ("mapping") fokus program-program stakeholders yang dapat memberikan informasi bagi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dan membuat program penanganannya sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah masing-masing (kabupaten/kota se Provinsi Lampung).

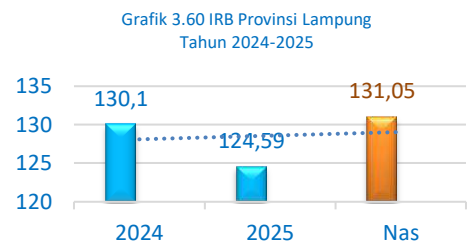
17. Indeks Resiko Bencana

Tabel 3.87 Capaian Indeks Resiko Bencana					
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana				
IKU	Indeks Resiko Bencana				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	130,1	-	-
2	2025	129,97	124,59	104,31	
3	2029	121,85-125,86	-	96,83	
4	Sumsel	-	131,05	105,18	

Grafik 3.60 IRB Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	IRB
2024	130,1
2025	124,59
Nac	131,05

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki indikator **Indeks Resiko Bencana** dengan realisasi kinerja sebesar 124,59% dari target sebesar 129,97% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **104,31%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 130,1%. Apabila dibandingkan dari sebelumnya kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 5,5%. Berdasarkan peningkatan diatas maka resiko terhadap bencana menurun dan menjadi lebih aman dari tahun sebelumnya.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 99,41%. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi tahun 2025 dengan nilai tengah absolut 124,85% sehingga menghasilkan realisasi kinerja 96,83%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan daerah lain Provinsi Sumatera Selatan maka lebih Lebih tinggi 6,46% dengan capaian 105,18%. Berdasarkan capaian di atas maka Provinsi Lampung memiliki resiko bencana yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pembanding ini dilihat dari variasi karakteristik wilayah, tingkat kerentanan, kapasitas penanggulangan, serta efektivitas program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di masing-masing daerah. Sementara itu, nilai indeks di Sumatera Selatan yang masih berada di atas Lampung menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi tantangan risiko yang relatif lebih tinggi. Hal ini dapat



dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luasnya wilayah rawan bencana, kompleksitas ancaman multi-hazard (banjir, karhutla, cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan), tingkat eksposur penduduk dan aset terhadap ancaman, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur mitigasi

Indeks Risiko Bencana Tahun Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dan konsisten menurun dari tahun ke tahun. Penurunan indeks ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana di wilayah semakin terkendali sebagai hasil dari pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Secara konseptual, semakin rendah nilai indeks, maka semakin kecil tingkat risiko bencana yang dihadapi, yang berarti kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan masyarakat semakin meningkat.

Tren ini juga mencerminkan keberhasilan transformasi pendekatan penanggulangan bencana dari paradigma tanggap darurat menuju paradigma pengurangan risiko dan pembangunan berketahanan (resilient development). Dengan semakin menurunnya indeks risiko bencana, diharapkan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga, potensi kerugian akibat bencana dapat diminimalkan, serta masyarakat menjadi lebih aman, tangguh, dan adaptif terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim.

Indeks Risiko Bencana adalah alat ukur tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup 9 (sembilan) jenis ancaman yaitu: gempabumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrim dan abrasi

Penempatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan di Provinsi Lampung didasari oleh 3 (tiga) hal, yaitu **pertama**, kondisi risiko bencana, **kedua**, kemampuan daerah untuk

menjawab kondisi risiko bencana, dan **terakhir**, peluang atau potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanggulangan bencana di Provinsi Lampung;

Untuk menjawab kondisi risiko bencana, UU 24/2007 mengamanatkan terbentuknya kelembagaan yang menangani, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana BNPB di tingkat pusat, BPBD adalah lembaga yang diamanatkan sebagai unsur pelayanan tugas pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dengan fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana lingkup kewenangan daerah.

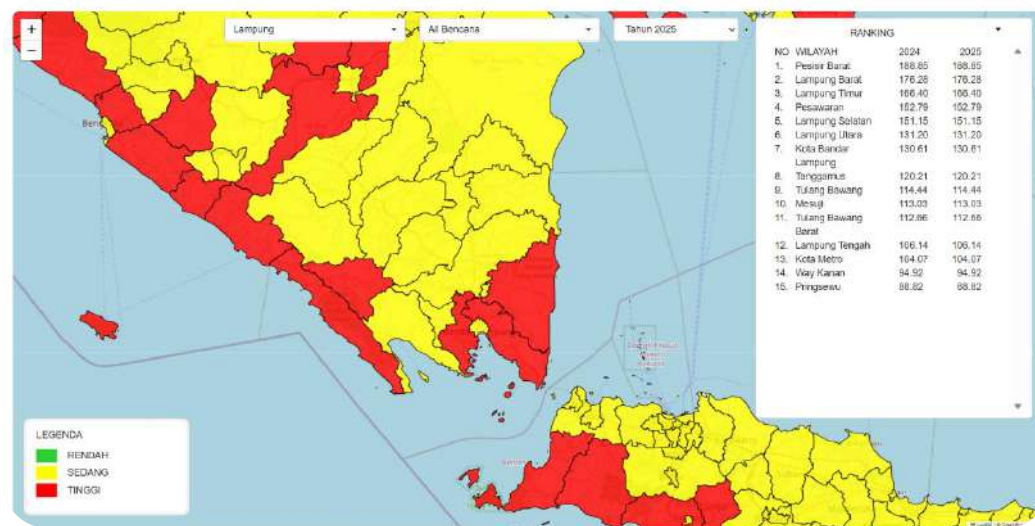
KONDISI KEBENCANAAN LAMPUNG

Perkembangan IRB Provinsi Lampung menunjukkan bahwa:

- 1) Terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko **TINGGI** (Merah);
- 2) Terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya berkategori **SEDANG** (Kuning);
- 3) Terdapat tidak ada Kabupaten/Kota dengan Risiko bencana RENDAH (Hijau);
- 4) Terdapat **7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko Tinggi (Merah)**, yaitu: Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung;
- 5) Terdapat **8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya berkategori Sedang (Kuning)**, yaitu: Kab. Tanggamus, Pringsewu, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Kota Metro.

Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Lampung memetakan Kab/Kota berdasarkan jenis ancaman bencana alam sebagai berikut:

- Risiko Tinggi **Banjir** yaitu: Kab. Way Kanan dan Tulang Bawang Barat;
- Risiko Tinggi **Longsor** TIDAK ADA, namun dapat terjadi di wilayah sisi barat Lampung, a.l Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Way Kana, Lampung Tengah, dan Lampung Utara;
- Risiko Tinggi Cuaca Ekstrem **Puting Beliung** yaitu: Kab. Pesawaran dan Lampung Timur;
- Risiko Tinggi **Tsunami** yaitu: Kab. Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Kekeringan** yaitu Kab. Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Tengah
- Risiko Tinggi **Gempa** yaitu: Kab. Pesawaran (Keterpaparan TINGGI);
- Risiko Tinggi **Gelombang Tinggi dan Abrasi** yaitu: Kab. Pesisir Barat;
- Risiko Tinggi **Kebakaran Hutan dan Lahan** yaitu: Kab. Way Kanan, Pesisir Barat, dan Lampung Timur.
- Risiko Tinggi **Letusan Gunung Api** yaitu: Kab. Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Likuefaksi atau Pencairan Tanah** yaitu: Kab. Tulang Bawang (DAS Mesuji-Tulang Bawang) – *Peta Likuefaksi Indonesia, KemenESDM 2020*.



Dengan melihat ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas, dari aspek *Penguatan Kebijakan* hingga *Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana*, mengindikasikan bahwa Pelaksanaan pilar-pilar penanggulangan bencana harus dibangun diatas pondasi kelembagaan bencana daerah yang kuat, yang

terbentuk melalui pemahaman yang sama tentang bencana disemua pihak (*pentahelix*) di daerah, yang akan bermuara pada kesepahaman untuk menjadikan bencana sebagai isu bersama dan menjadi peluang bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana daerah dalam membangun ketangguhan di tingkat lokal secara sinergis, antara lain menjadi sarana mobilitas dan realokasi *resosurces* (sumber daya manusia, dan sarana prasarana), keterpaduan kegiatan dan anggaran, serta berbagi pengetahuan dan pemahaman (*sharing knowledge*) bencana. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi. Penguatan dan Sinergitas Kelembagaan dalam kerangka **Kolaborasi Pentahelix** dalam penanggulangan bencana diyakini akan menjadi penopang keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan **Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**. Dan BPBD Provinsi, selaku Lembaga yang diamanatkan sebagai unsur pelayanan tugas pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana di Provinsi Lampung, sebagai *leading sector* dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.88 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi IRB

No	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
1	Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung yang masih katagori sedang	- Peningkatan Kapasitas Daerah terhadap Penanggulangan Bencana yang tersusun dalam Program Penanggulangan Bencana - Urusan Bencana merupakan Urusan Bersama	- Kurangnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi - Kurangnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Kurangnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Kurangnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Menyediakan Informasi Rawan Bencana di Provinsi Lampung, dengan melakukan : - Penyusunan Kajian Risiko Bencana - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) - Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan melakukan : - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Penyusunan Rencana Kontijensi - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

No	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				h. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana i. Pengelolaan Risiko Bencana j. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 3. Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan melakukan : a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas b. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana f. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi h. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi 4. Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan melakukan : a. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam b. Penanganan Pasca Bencana Provinsi c. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota d. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi f. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi g. Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) h. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi i. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah j. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan k. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

No	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				l. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana m. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Sumber: BPBD Provinsi Lampung, Maret 2026

Strategi yang perlu diperkuat meliputi:

1. Konsistensi integrasi pengurangan risiko bencana dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan investasi pada mitigasi struktural dan teknologi sistem peringatan dini.
3. Penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, simulasi, dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana.
4. Pemanfaatan data risiko sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
5. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan capaian yang telah diraih.

Dengan demikian, pencapaian Indeks Risiko Bencana tidak hanya menunjukkan keberhasilan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berketahanan iklim, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

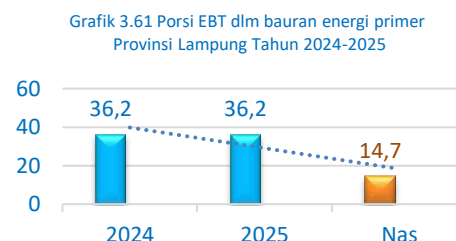
18. Porsi EBT dalam bauran energi primer

Tabel 3.89 Capaian Porsi EBT dalam bauran energi primer					
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana				
IKU	Prosi EBT dalam bauran energi primer				
Satuan	Persentase				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	36,32	-	-
2	2025	36	36,32	100,89	2024
3	2029	37,8	-	96,08	-
4	Nas	-	14,7	247,07	

Grifik 3.61 Porsi EBT dlm bauran energi primer
Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Porsi EBT (%)
2024	36,2
2025	36,2
Nas	14,7

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026

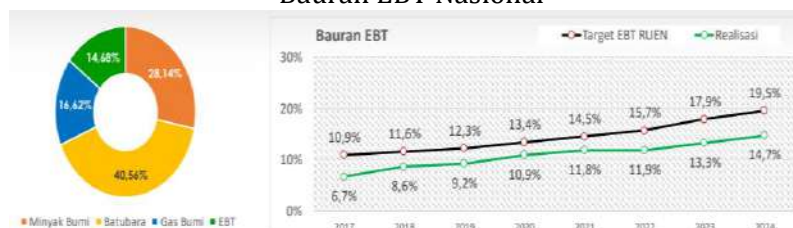


Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana memiliki indikator porsi EBT dalam bauran energi primer dengan realisasi kinerja 36,32 (data akhir kinerja tahun 2024) dari target sebesar 36 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100,89%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi kinerja adalah 36,32. Kinerja ini menjadi dasar perhitungan tahun 2025 karena data rilis tahun 2025 baru akan diterbitkan pada Bulan Desember 2026.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2025-2029 maka capaian mencapai 96,08%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 21,63 % dengan capaian 247,07%.

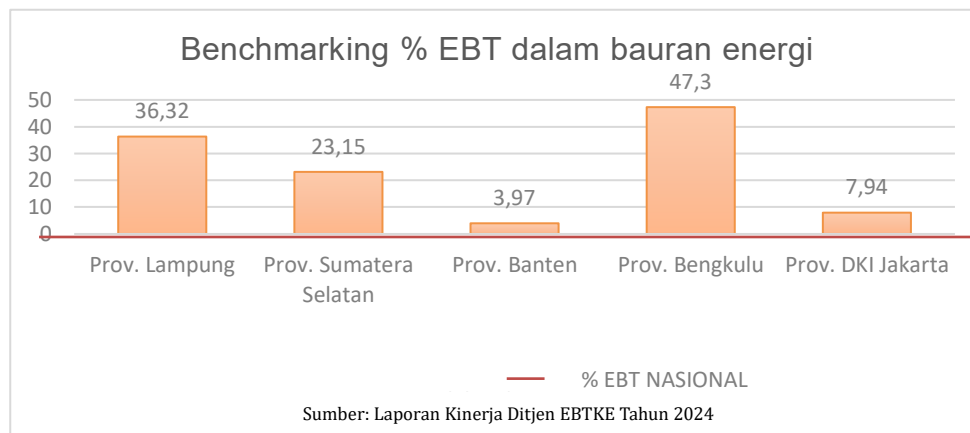
Dengan realisasi ini, Lampung termasuk dalam jajaran provinsi yang menjadi motor penggerak bauran energi terbarukan di Indonesia, sekaligus menunjukkan potensi besar yang dimiliki untuk terus memperkuat peran EBT dalam mendukung ketahanan energi daerah maupun nasional.

Bauran EBT Nasional



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen EBTKE Tahun 2024

Grafik 3.62 Realisasi EBT Provinsi Lampung dengan daerah Lain



Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain, Provinsi Lampung berada di urutan ke 4, dibawah provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,23%, Bengkulu sebesar 47,30% dan Sumatera Utara sebesar 46,07%. Realisasi Provinsi Lampung sebesar 36,32% tidak hanya menempatkannya di posisi keempat nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Lampung berhasil melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 36,0%. Keberhasilan ini mencerminkan kontribusi nyata Provinsi Lampung dalam mendorong pemanfaatan energi bersih dan mendukung transisi energi sesuai dengan arah kebijakan nasional.



Berikut grafik benchmarking Persentase EBT dalam bauran energi antara realisasi Provinsi Lampung, Nasional, dan beberapa provinsi lain di sekitar Provinsi Lampung

Tabel Benchmarking Realisasi Nasional dan Provinsi Lain

NO	PROVINSI	EBT			MINYAK BUMI			GAS BUMI			BATUBARA			TOTAL PASOKAN (MTOE)	
		TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
		2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024		
1	ACEH	25,50%	11,08%	9,43%	46,50%	58,07%	43,95%	19,50%	8,37%	3,47%	8,50%	22,49%	43,15%	1,61	2,81
2	SUMATERA UTARA	23,98%	40,45%	46,07%	45,80%	30,77%	27,03%	17,88%	13,04%	9,51%	12,34%	15,74%	17,39%	10,80	11,61
3	SUMATERA BARAT	51,70%	29,71%	30,59%	24,00%	35,07%	33,60%	9,40%	0,00%	0,00%	14,90%	35,22%	35,81%	3,27	3,38
4	RIAU	31,22%	26,14%	28,02%	19,45%	28,93%	27,95%	28,36%	15,04%	15,65%	20,97%	29,90%	28,37%	8,24	8,52
5	KEPULAUAN RIAU	15,42%	14,62%	15,63%	29,03%	39,94%	46,92%	37,27%	37,55%	33,35%	18,28%	7,89%	4,10%	3,85	2,77
6	JAMBI	24,00%	22,00%	30,81%	34,08%	43,83%	39,22%	10,37%	19,28%	8,68%	31,56%	14,88%	21,29%	1,99	1,88
7	BENGKULU	37,00%	42,13%	47,30%	42,00%	27,05%	26,02%	6,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,82%	26,69%	1,34	1,47
8	BANGKA BELITUNG	17,21%	18,39%	19,61%	42,15%	56,96%	57,27%	16,87%	0,00%	0,00%	23,76%	24,65%	23,12%	1,16	1,32
9	SUMATERA SELATAN	21,06%	24,18%	23,15%	31,69%	19,64%	16,94%	25,54%	23,07%	21,98%	21,72%	33,10%	37,93%	11,46	12,34
10	LAMPUNG	36,00%	35,22%	36,32%	27,00%	38,48%	37,80%	16,00%	9,35%	4,88%	21,00%	16,95%	21,00%	4,15	4,08
11	KALIMANTAN TIMUR	12,39%	11,44%	12,14%	50,15%	46,37%	43,34%	25,22%	26,49%	28,19%	12,24%	15,70%	16,34%	10,17	10,65
12	KALIMANTAN SELATAN	19,60%	11,32%	11,96%	34,70%	64,48%	64,01%	2,60%	0,00%	0,00%	43,10%	24,20%	24,02%	3,12	3,14
13	KALIMANTAN BARAT	32,20%	28,78%	29,63%	25,10%	32,21%	34,35%	17,60%	0,00%	0,00%	25,10%	39,01%	36,02%	3,35	4,29
14	KALIMANTAN UTARA	55,95%	23,87%	30,80%	20,96%	49,77%	64,85%	7,15%	0,13%	0,00%	20,96%	26,23%	4,36%	0,94	0,76
15	KALIMANTAN TENGAH	17,00%	15,71%	53,23%	46,00%	33,75%	17,10%	14,00%	8,96%	4,66%	22,00%	41,58%	25,01%	1,94	3,25
16	NUSA TENGGARA BARAT	28,20%	22,43%	23,55%	40,90%	57,68%	58,40%	11,80%	0,00%	0,00%	19,10%	19,89%	18,05%	1,39	1,73
17	NUSA TENGGARA TIMUR	24,00%	17,68%	19,27%	54,00%	57,11%	60,95%	10,00%	0,00%	0,00%	12,00%	25,21%	19,78%	1,27	1,21
18	PAPUA TENGAH	9,03%	-	7,524%	89,57%	-	35,96%	1,38%	-	4,86%	0,02%	-	51,66%	-	1,63
19	PAPUA BARAT	6,00%	n.a	n.a	51,00%	n.a	n.a	35,00%	n.a	n.a	8,00%	n.a	n.a	n.a	n.a
20	MALUKU	27,30%	11,94%	18,69%	51,50%	88,06%	81,31%	20,30%	0,00%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,58	0,58
21	MALUKU UTARA	21,27%	n.a	1,90%	60,81%	n.a	4,80%	14,23%	n.a	0,00%	3,69%	n.a	93,30%	n.a	16,21
22	SULAWESI SELATAN	31,22%	28,82%	27,33%	19,45%	28,94%	37,78%	28,36%	0,02%	0,02%	20,97%	42,22%	34,88%	4,87	5,89
23	SULAWESI TENGAH	30,51%	10,50%	10,33%	5,14%	5,93%	6,34%	12,29%	0,00%	0,00%	52,06%	83,57%	83,33%	10,04	10,46
24	SULAWESI BARAT	46,00%	22,63%	24,72%	42,00%	45,93%	51,05%	6,00%	0,00%	0,00%	6,00%	31,44%	24,23%	0,43	0,40
25	GORONTALO	15,40%	12,35%	10,58%	36,80%	53,14%	33,87%	21,20%	13,64%	0,01%	26,60%	20,87%	55,54%	0,40	0,62
26	SULAWESI UTARA	38,10%	31,25%	22,20%	30,40%	45,52%	31,83%	12,40%	0,00%	0,00%	19,00%	23,23%	45,97%	1,54	2,19
27	SULAWESI TENGGARA	7,00%	3,69%	3,30%	30,00%	19,77%	11,96%	8,00%	0,00%	0,00%	55,00%	76,55%	84,74%	4,75	7,36
28	BALI	11,15%	2,45%	2,72%	29,30%	68,52%	72,35%	56,23%	0,01%	0,01%	3,32%	29,01%	24,91%	2,66	3,34
29	JAWA TENGAH	21,31%	9,53%	11,03%	39,36%	63,07%	60,96%	9,56%	4,84%	5,30%	29,77%	22,55%	22,71%	10,90	10,89
30	JAWA TIMUR	17,09%	9,96%	10,57%	20,34%	45,14%	45,27%	38,10%	16,72%	11,59%	24,47%	28,18%	32,57%	16,04	13,88
31	BANTEN*	11,20%	3,03%	3,97%	24,90%	13,33%	15,83%	20,50%	9,33%	7,86%	43,30%	74,31%	72,34%	27,41	22,92
32	DI YOGYAKARTA	9,00%	6,91%	7,65%	74,00%	93,09%	92,35%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93	0,97
33	JAWA BARAT	20,10%	24,36%	24,46%	27,66%	28,84%	27,54%	27,71%	20,92%	16,84%	24,53%	25,88%	31,17%	29,35	31,27
34	DKI JAKARTA	4,40%	7,99%	7,94%	28,00%	63,29%	70,90%	48,60%	11,70%	7,32%	19,10%	17,02%	13,84%	8,35	8,47

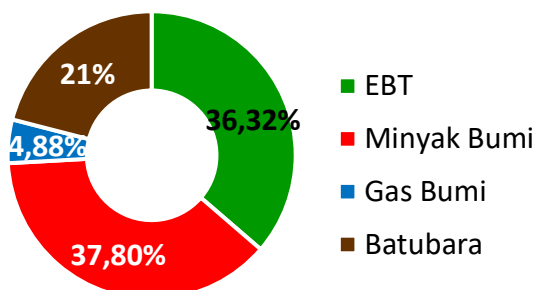
*) termasuk pemanfaatan biomassa tradisional

Porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi primer Indonesia merupakan persentase kontribusi sumber energi terbarukan—seperti air, panas bumi, surya, dan bioenergi—terhadap total konsumsi energi nasional.

Porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Lampung merupakan persentase perbandingan antara jumlah energi terbarukan yang dikonsumsi terhadap total keseluruhan dari energi yang tersedia di Provinsi Lampung. Porsi EBT (Energi Baru

Terbarukan) Provinsi Lampung diperhitungkan dari pengukuran jumlah konsumsi EBT terhadap Konsumsi Keseluruhan Energi. Berikut ini EBT Provinsi Lampung:

Grafik 3.63 Bauran Energi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024



Tabel 3.91 Konsumsi Energi Provinsi Lampung Tahun 2024

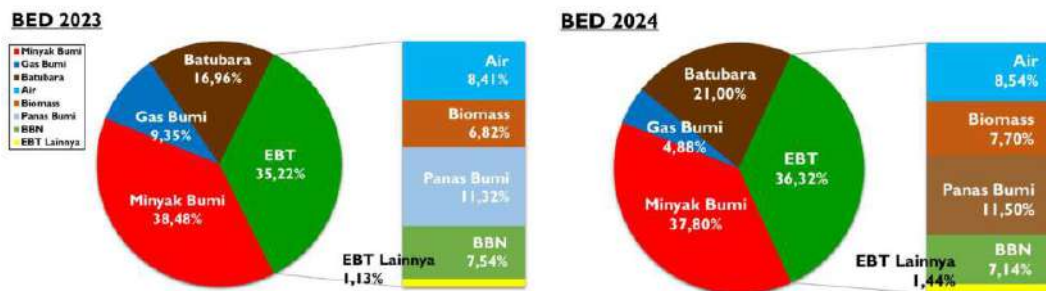
No	Jenis Energi	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	10.594.331,59	1.483.206,42	1,48	36,32%
2	Minyak Bumi	11.026.496,32	1.543.709,48	1,54	37,80%
3	Gas Bumi	1.424.441,36	199.421,79	0,20	4,88%
4	Batubara	6.123.336,77	857.267,15	0,86	21%
Total		29.168.606,03	4.083.604,84	4,08	100,00%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Januari 2026

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1.1, konsumsi energi di Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai total 29.168.606,03 BOE (Barrel of Oil Equivalent) atau setara dengan 4.083.604,84 TOE (Tonnes of Oil Equivalent), dengan komposisi bauran energi sebagai berikut:

6. **Energi Baru Terbarukan (EBT)** sebesar **36,32%** (10.594.331,59 BOE),
7. **Minyak Bumi** sebesar **37,80%** (11.026.496,32 BOE),
8. **Gas Bumi** sebesar **4,88%** (1.424.441,36 BOE), dan
9. **Batubara** sebesar **21%** (6.123.336,77 BOE).

Secara visual, grafik lingkaran memperlihatkan dominasi terbesar konsumsi energi masih berasal dari minyak bumi (**37,80%**), diikuti oleh EBT (**36,32%**), batubara (**21%**), dan gas bumi (**4,88%**). Kondisi ini mengindikasikan peran EBT yang semakin kuat dalam bauran energi daerah, sejalan dengan arah kebijakan transisi energi. Berikut Perbandingan Capaian Bauran Energi Daerah dari tahun sebelum nya



Gambar 2. Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 dan 2024

Sumber: Capaian Bauran Energi Daerah, DEN Desember 2025

Pemanfaatan EBT menunjukkan kenaikan sebesar 1,3% atau 0,02 MTOE dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total capaian bauran EBT sebesar 36,32%, kontribusi dari pemanfaatan EBT Non listrik sebesar 9,91% dan dari EBT listrik sebesar 26,41%. Pada tahun 2024, pemanfaatan EBT terbesar berasal dari pemanfaatan energi panas bumi dan air. Tercatat pemanfaatan BBN sebesar 0,32 juta kL (0,29 MTOE), biogas rumah tangga sebesar 8,25 juta m³ dan biomassa industri sebesar 0,22 juta ton. Selain itu, kapasitas terpasang pembangkit EBT menunjukkan peningkatan dari 570,27 MW menjadi 575,27 MW atau naik 0,9%, dari penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pemanfaatan panas bumi sendiri cukup besar mencapai 229 MW. Sementara itu, produksi listrik dari pembangkit EBT tercatat mencapai 575,27 GWh.



Pada tahun 2025, bauran EBT pada Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai 36,00%, namun demikian hingga tahun 2024 bauran EBT telah mencapai 36,32% dan melebihi target yang diproyeksikan. Secara rinci berikut Bauran Energi Baru Terbarukan di Provinsi Lampung.

Tabel 3.92 Bauran EBT Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Jenis	Kapasitas Terpasang (MW)	Nilai Konsumsi (Satuan Asli)	Nilai Konsumsi (MTOE)	%
1	EBT				36,32
	a. Listrik	575,27		1,08	26,41
	• PLTA/M/MH	235,51		0,349	8,53
	• PLTP	229,00		0,470	11,49
	• PLTS/Atap	4,94		0,006	0,15
	• PLTSa	0		0	0
	• PLTB	0		0	0
	• PLTBm	86,82		0,209	5,11
	• PLTBg	19,0		0,046	1,12
	b. Non Listrik			0,40	9,91
	- Biofuel		0,32 juta kL	0,29	7,14
	- Biogas RT		8,25 juta m ³	0,01	0,18
	- Biomassa		0,22 juta ton	0,11	2,59

Sumber: Capaian Bauran Energi Daerah 2024, DEN Desember 2025

Dalam upaya meningkatkan Energi Baru Terbarukan Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya antara lain

1. Membuka ruang kolaborasi pengembangan EBT melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan badan usaha di luar negeri;
2. Mendorong masuknya investasi EBT dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum investasi daerah;
3. Memperkuat sinergi antar daerah penghasil migas dan energi terbarukan melalui keikutsertaan aktif dalam ADPMET;
4. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi di Provinsi Lampung untuk mendukung riset, kajian, dan pengembangan energi terbarukan;
5. Menyelaraskan substansi RUED ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD, guna memperkuat arah kebijakan EBT;

6. Membangun sistem informasi energi terbarukan serta menyiapkan pembentukan Forum Energi Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan akses informasi EBT di Provinsi Lampung

Pada tahun 2024 terkait energi baru terbarukan, Dinas Energi dan Sumber telah melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan kepada kelompok masyarakat di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Gambar 3.23

Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Pelaksanaan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi-potensi, manfaat yang didapat dari pemanfaatan energi terbarukan khususnya potensi Biogas di Kabupaten tersebut, serta menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk menerima hibah pembangunan biogas. Selanjutnya kelompok masyarakat yang terverifikasi untuk dapat menerima hibah

pembangunan biogas, akan dilakukan pembangunan biogas skala rumah tangga, yang pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Kemudian pada tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber telah melaksanakan Pendataan potensi biogas di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Metro.

Gambar 3.24
pendataan Potensi Biogas



Sejak tahun 2011 pemerintah provinsi lampung dan pemerintah pusat telah membangun sebanyak 1258 unit biogas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.93
Biogas yang telah dibangun di Provinsi Lampung

No.	Lokasi			Tipe	Ukuran	Jumlah	Tahun	Sumber Pendanaan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa					
1	Metro	Metro Selatan	Rejomulyo	Beton	20 m3	1	2011	APBN
2	Metro	Metro Selatan	Rejomulyo	Beton	6 m3	5	2011	APBN
3	Lampung Barat	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	Beton	20 m3	1	2011	APBN
4	Lampung Barat	Ngambur	Pekon Gedong Cahaya	Beton	6 m3	5	2011	APBN
5	Pesawaran	Padang Cermin	Pesawaran Indah	Beton	20 m3	1	2011	APBN
6	Pesawaran	Padang Cermin	Pesawaran Indah	Beton	6 m3	5	2011	APBN
7	Tanggamus	Talangpadang	Sukanegeri Jaya	Beton	20 m3	1	2011	APBN
8	Tanggamus	Talangpadang	Sukanegeri Jaya	Beton	6 m3	5	2011	APBN
9	Lampung Timur	Waway Karya	Ngesti Karya	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
10	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Karang Endah	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
11	Lampung Utara	Abung Timur	Pungguk Lama	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
12	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Fiber	3 m3	5	2012	APBD
13	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
14	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Fiber	3 m3	3	2012	APBD
15	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
16	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
17	Way Kanan	Banjit	Simpang asam	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
18	Pringsewu	Pagelaran	Gemah Ripah	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
19	Pesawaran	Negeri Katon	Purworejo	Fiber	3 m3	5	2012	APBD
20	Pesawaran	Negeri Katon	Purworejo	Fiber	3 m3	6	2012	APBD
21	Tanggamus	Air Naningan	Karang Sari	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
22	Lampung Barat	Bengkunat	Pardasuka	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
23	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Kertosari Dusun 4	Fiber	3 m3	3	2012	APBD
24	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Kertosari Dusun 3	Fiber	3 m3	3	2012	APBD
25	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Kertosari Dusun 3	Fiber	3 m3	2	2012	APBD
26	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Kertosari Dusun 8	Fiber	3 m3	3	2012	APBD
27	Tulang Bawang	Gedung Aji Baru	Suka Bhakti	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
28	Tulang Bawang	Gedung Aji Baru	Suka Bhakti	Fiber	3 m3	4	2012	APBD



29	Tulang Bawang	Penawartama	Wiratama	Fiber	3 m3	6	2012	APBD
30	Mesuji	Simpang Pematang	Jaya Sakti	Fiber	3 m3	11	2012	APBD
31	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Daya Asri	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
32	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Daya Asri	Fiber	3 m3	2	2012	APBD
33	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Morgodadi 3	Fiber	3 m3	3	2012	APBD
34	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Margo Mulyo	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
35	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Pulung Kencana	Fiber	3 m3	2	2012	APBD
36	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Chandra Kencana	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
37	Tulang Bawang Barat	Tumijajar	Mulyo Asri	Fiber	3 m3	1	2012	APBD
38	Lampung Tengah	Banjar Agung	Seputih Mataram	Fiber	3 m3	8	2013	APBD
39	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Bandarjaya Timur	Fiber	3 m3	8	2013	APBD
40	Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Jatibaru	Fiber	3 m3	8	2013	APBD
41	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Desa Wawasan	Fiber	3 m3	8	2013	APBD
42	Pesawaran	Tegineneng	Gunung Gumanti	Beton	4 m3	10	2015	APBD
43	Tanggamus	Gisting	Gisting Permai	Beton	4 m3	10	2015	APBD
44	Lampung Timur	Purbolinggo	Taman Sari	Beton	4 m3	30	2016	DAK
45	Lampung Timur	Purbolinggo	Tegal Yoso	Beton	4 m3	30	2016	DAK
46	Lampung Timur	Raman Utara	Rukti Sediyo	Beton	4 m3	30	2016	DAK
47	Lampung Timur	Raman Utara	Kota Raman	Beton	4 m3	30	2016	DAK
48	Metro	Metro Utara	Banjarsari	Beton	4 m3	15	2016	DAK
49	Metro	Metro Utara	Purwosari	Beton	4 m3	10	2016	DAK
50	Metro	Metro Utara	Karangrejo	Beton	4 m3	23	2016	DAK
51	Metro	Metro Timur	Yosodadi	Beton	4 m3	5	2016	DAK
52	Metro	Metro Pusat	Hadimulyo Timur	Beton	4 m3	7	2016	DAK
53	Metro	Metro Barat	Mulyosari	Beton	4 m3	10	2016	APBD
54	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	Beton	4 m3	25	2016	DAK



55	Tulang Bawang Barat		Candra Mukti	Beton	4 m3	40	2016	DAK
56	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III Kertosari	Beton	4 m3	5	2016	DAK
57	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun VI Kertosari	Beton	4 m3	12	2016	DAK
58	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun VII Kertosari	Beton	4 m3	5	2016	DAK
59	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun VIII Kertosari	Beton	4 m3	4	2016	DAK
60	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III Purwodadi Dalam	Beton	4 m3	10	2016	DAK
61	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III Purwodadi Dalam	Beton	4 m3	4	2016	DAK
62	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III B Wonodadi	Beton	4 m3	4	2016	DAK
63	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III Wonodadi	Beton	4 m3	4	2016	DAK
64	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun III Malang Sari	Beton	4 m3	10	2016	DAK
65	Lampung Selatan	Tanjung Sari	RT.004/002 WAWASAN	Beton	4 m3	4	2016	DAK
66	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun Cinta Jaya, Wawasan	Beton	4 m3	4	2016	DAK
67	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun Arsi Jaya, Wawasan	Beton	4 m3	11	2016	DAK
68	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun Cinta Jaya, Wawasan	Beton	4 m3	19	2016	DAK
69	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun I Mulyosari	Beton	4 m3	8	2016	DAK
70	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun V Sidomukti	Beton	4 m3	4	2016	DAK
71	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun I bangunsari	Beton	4 m3	8	2016	DAK
72	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Dusun II bangunsari	Beton	4 m3	4	2016	DAK
73	Pesisir Barat	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	Beton	4 m3	30	2016	DAK
74	Pesisir Barat	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Beton	4 m3	10	2016	DAK
75	Pesisir Barat	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	Beton	4 m3	10	2016	APBD
76	Pringsewu	Adiluwih	Waringinsari Timur	Beton	4 m3	30	2016	DAK
77	Pringsewu	Adiluwih	Tunggul Pawenang	Beton	4 m3	10	2016	DAK
78	Lampung Tengah	Punggur	Badran Saroi	Beton	4 m3	20	2016	DAK
79	Lampung Tengah	Punggur	Toto Katon	Beton	4 m3	7	2016	DAK
80	Lampung Tengah	Punggur	Ngesti Rahayu	Beton	4 m3	5	2016	DAK



81	Lampung Tengah	Seputih Raman	Rejo Asri	Beton	4 m3	30	2016	DAK
82	Lampung Tengah	Seputih Raman	Ratna Chaton	Beton	4 m3	7	2016	DAK
83	Lampung Tengah	Seputih Raman	Rama Gunawan	Beton	4 m3	10	2016	DAK
84	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Gunung Sari	Beton	4 m3	14	2016	DAK
85	Lampung Tengah	Gunung Sugih	Putra Buyut	Beton	4 m3	10	2016	DAK
86	Lampung Tengah	Kota Gajah	Sritejo Kencono	Beton	4 m3	10	2016	DAK
87	Lampung Tengah	Seputih Banyak	Sari Bakti	Beton	4 m3	25	2016	DAK
88	Lampung Tengah	Rumbia	Rekso Binangun	Beton	4 m3	12	2016	DAK
89	Lampung Timur	Pekalongan	Adijaya	Beton	4 m3	23	2017	DAK
90	Lampung Timur	Pekalongan	Tulus Rejo	Beton	4 m3	19	2017	DAK
91	Lampung Timur	Sukadan	Bumi Ayu	Beton	4 m3	10	2017	DAK
92	Lampung Tengah	Kota Gajah	Purworejo	Beton	4 m3	17	2017	DAK
93	Lampung Tengah	Kota Gajah	Sritejo Kencono	Beton	4 m3	10	2017	DAK
94	Lampung Tengah	Seputih Raman	Rukti Endah	Beton	4 m3	10	2017	DAK
95	Lampung Tengah	Trimurjo	Tempuran	Beton	4 m3	17	2017	DAK
96	Lampung Tengah	Kota Gajah	Sritejo Kencono	Beton	4 m3	10	2017	APBD
97	Lampung Timur	Pekalongan	Sidodadi	Beton	4 m3	20	2018	DAK
98	Lampung Timur	Pekalongan	Sidodadi	Beton	4 m3	20	2018	DAK
99	Lampung Timur	Pekalongan	Tulus Rejo	Beton	4 m3	8	2018	DAK
100	Lampung Timur	Batanghari	Buana Sakti	Beton	4 m3	25	2018	DAK
101	Lampung Tengah	Seputih Raman	Ratna Chaton	Beton	4 m3	25	2018	DAK
102	Lampung Tengah	Rumbia	Rukti Basuki	Beton	4 m3	25	2018	DAK
103	Metro	Metro Utara	Karangrejo	Beton	4 m3	28	2018	DAK
104	Metro	Metro Utara	Purwo Asri	Beton	4 m3	11	2018	DAK
105	Metro	Metro Selatan	Sumber Sari	Beton	4 m3	23	2018	DAK
106	Lampung Tengah	Sendangagung	Sendangasih	Beton	4 m3	13	2018	APBD
107	Pringsewu	Sukoharjo	Sukoharjo I	Beton	4 m3	13	2018	APBD
108	Lampung Timur	Batanghari Nuban	Sukacari	Beton	4 m3	13	2018	APBD
109	Lampung Tengah	Sendangagung	Sendangmukti	Beton	4 m3	12	2019	APBD



110	Pringsewu	Banyumas	Nusawungu	Beton	4 m3	12	2019	APBD
111	Lampung Tengah	Sendangagung	Sendang Rejo	Beton	4 m3	10	2022	APBD
112	Lampung Timur	Batanghari	Bumi Harjo	Beton	4 m3	10	2022	APBD
113	Pringsewu	Banyumas	Nusawungu	Beton	4 m3	10	2022	APBD
114	Metro	Metro Timur	Yosodadi	Beton	4 m3	10	2022	APBD
115	Lampung Tengah	Kalirejo	Sri Way Langsep	Beton	4 m3	10	2023	APBD
116	Pringsewu	Sukoharjo	Pandan Surat	Beton	4 m3	10	2023	APBD
TOTAL						1258		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Adapun hambatan yang dihadapi provinsi lampung dalam pelaksanaan RUED-P khususnya dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan antara lain

1. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi di tingkat provinsi;
2. Keterbatasan dukungan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
3. Belum terciptanya permintaan energi yang optimal untuk mendukung pengembangan potensi energi daerah;
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung terutama jaringan transmisi di wilayah yang memiliki potensi EBT besar;
5. Pembangunan pembangkit berbasis EBT terutama PLTS belum sesuai target RUED;
6. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dari sisi jumlah maupun kompetensi.
7. Pengumpulan data pemanfaatan energi terbarukan, khususnya pada sektor industri, masih menghadapi kesulitan sehingga menghambat perencanaan yang akurat

Tabel 3.94 Faktor pendukung, penghambat, Solusi IKU Persentase EBT dalam Bauran Energi

FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
- Potensi sumber daya alam yang besar: Potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan EBT. - Kebijakan pemerintah yang mendukung: Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan EBT. - Kesadaran masyarakat yang meningkat: Kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya pengembangan EBT. - Teknologi yang semakin maju: Teknologi yang semakin maju untuk pengembangan EBT. - Biaya investasi yang semakin rendah: Biaya investasi yang semakin rendah untuk pengembangan EBT. - Keterlibatan swasta yang meningkat: Keterlibatan swasta yang meningkat dalam pengembangan EBT. - Dukungan dari lembaga internasional: Dukungan dari lembaga internasional untuk pengembangan EBT. - Ketersediaan lahan yang luas: Ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan EBT. - Potensi penyerapan tenaga kerja yang besar: Potensi penyerapan tenaga kerja yang besar dalam pengembangan EBT. - Kebijakan harga yang mendukung: Kebijakan harga yang mendukung pengembangan EBT.	- Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pengembangan EBT. - Biaya investasi yang tinggi: Biaya investasi yang tinggi untuk pengembangan EBT. - Keterbatasan sumber daya manusia: Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengembangan EBT. - Ketertarikan pada energi fosil: Ketertarikan pada energi fosil yang masih tinggi di Provinsi Lampung. - Peraturan yang belum mendukung: Peraturan yang belum mendukung pengembangan EBT. - Keterbatasan akses ke teknologi: Keterbatasan akses ke teknologi yang lebih maju untuk pengembangan EBT. - Ketertarikan pada subsidi: Ketertarikan pada subsidi untuk energi fosil yang masih tinggi. - Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan EBT. - Keterbatasan sumber daya alam: Keterbatasan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pengembangan EBT. - Ketertarikan pada impor: Ketertarikan pada impor untuk energi fosil yang masih tinggi.	- Meningkatkan investasi pada infrastruktur EBT: Meningkatkan investasi pada infrastruktur EBT untuk mendukung pengembangan EBT. - Mengembangkan teknologi EBT yang lebih maju: Mengembangkan teknologi EBT yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang EBT: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang EBT untuk meningkatkan permintaan dan partisipasi. - Mengembangkan kebijakan yang mendukung EBT: Mengembangkan kebijakan yang mendukung EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan. - Meningkatkan keterlibatan swasta dalam EBT: Meningkatkan keterlibatan swasta dalam EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan. - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi EBT: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi EBT untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. - Meningkatkan kerja sama internasional dalam EBT: Meningkatkan kerja sama internasional dalam EBT untuk meningkatkan transfer teknologi dan investasi. - Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan EBT: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan EBT untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. - Meningkatkan penggunaan EBT dalam sektor industri dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. - Mengembangkan sistem insentif untuk EBT: Mengembangkan sistem insentif untuk EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan.	Program Unggulan: - Sosialisasi pemanfaatan Energi baru terbarukan Kegiatan: - Promosi pembangunan sektor energi pada pekan raya lampung dalam rangka investasi sektor energi - Kerjasama dengan institusi teknologi suamtera dalam rangka transfer knowledge teknologi EBT - Sosialisasi pemanfaatan EBT pada masyarakat - Penyusunan kajian potensi EBT - Berpartisipasi pada forum ADPMET - Kolaborasi dengan IREEM dalam rangka konservasi energi - Sosialisasi pemanfaatan EBT pada masyarakat - Inisiasi SPKLU dalam rangka peningkatan penggunaan kendaraan listrik - Kolaborasi dengan masyarakat energi biomassa indonesia dalam rangka peningkatan investasi dalam pengembangan EBT

Sumber: Olahan Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung



Program Unggulan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Lampung dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan energi bersih di daerah.

Langkah sosialisasi diawali dengan promosi pembangunan sektor energi melalui ajang Pekan Raya Lampung 2024, yang menjadi sarana efektif memperkenalkan potensi dan capaian EBT kepada masyarakat luas. Upaya ini dilengkapi dengan kerja sama bersama institusi teknologi dalam rangka transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas, baik untuk aparaturnya pemerintah daerah maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam pemanfaatan energi.

Selain itu, dilakukan pula penyusunan kajian potensi EBT sebagai dasar perencanaan, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai manfaat dan peluang penggunaan energi terbarukan di tingkat lokal. Dinas ESDM juga tergabung dalam ADPMET (Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan sebagai ruang koordinasi dan berbagi pengalaman antar daerah dalam mengembangkan kebijakan energi terbarukan.

Tidak hanya itu, Dinas ESDM Lampung menjalin kolaborasi dengan IREEEM untuk program konservasi energi, menginisiasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung transisi kendaraan berbasis listrik, serta bekerja sama dengan Masyarakat Energi Biomassa Indonesia untuk mendorong investasi sekaligus pengembangan energi biomassa di daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, kegiatan sosialisasi EBT diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman publik, tetapi juga memperkuat komitmen daerah dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan, mendukung pencapaian target bauran energi, serta mewujudkan pembangunan energi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

19. Indeks Demokrasi Provinsi

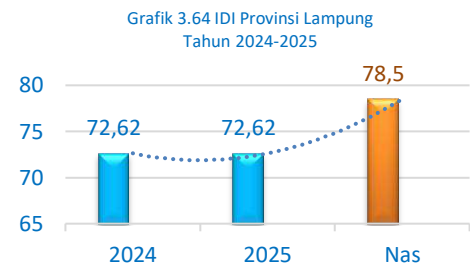
Tabel 3.95 Capaian Indeks Demokrasi Provinsi

Sasaran	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya				
IKU	Indeks Demokrasi Provinsi				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	72,62	-	-
2	2025	79,5	72,62	91,34	2024
3	2029	81-82	-	96,54	-
4	Nas	-	78,5	92,5	2024

Grafik 3.64 IDI Provinsi Lampung Tahun 2024-2025

Tahun	Realisasi	Target
2024	72,62	-
2025	72,62	79,5
2026	-	81-82

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya memiliki indikator indeks demokrasi provinsi dengan realisasi kinerja sebesar 72,62% dari target sebesar 79,5 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **91,31%** dengan **kategori sangat memuaskan**. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2024 karena realisasi tahun 2026 baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2026.
2. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 96,54%.
3. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2024 maka kinerja Provinsi Lampung lebih rendah 5,88% dengan capaian 92,50%.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan kualitas demokrasi di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun provinsi. IDI disusun untuk memberikan gambaran yang lebih objektif, terukur, dan dapat dibandingkan antarwilayah terkait bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui IDI, kita dapat melihat apakah praktik demokrasi di suatu daerah berjalan secara sehat, terbuka, adil, serta didukung oleh kelembagaan yang kuat.

IDI tidak hanya memotret demokrasi dari sisi pemilu atau pergantian kepemimpinan, tetapi juga menilai aspek-aspek penting lain seperti kebebasan warga, kesetaraan dalam hak politik dan sipil, serta kapasitas lembaga demokrasi dalam menjalankan



fungsinya. Dengan demikian, IDI menjadi instrumen strategis untuk mengevaluasi kondisi demokrasi secara lebih menyeluruh, sekaligus menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai indikator pembangunan sosial politik, IDI juga memiliki peran penting dalam mendukung agenda reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Ketika nilai IDI meningkat, hal ini dapat mencerminkan bahwa demokrasi semakin matang, ruang kebebasan semakin terjaga, dan lembaga demokrasi semakin efektif. Sebaliknya, ketika IDI menurun, hal tersebut menjadi sinyal bahwa terdapat tantangan atau hambatan yang perlu segera ditangani bersama.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung tahun 2024 tercatat sebesar 72,62. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Provinsi Lampung berada pada level yang perlu terus diperkuat melalui pembenahan dan penguatan pada berbagai dimensi demokrasi. Hal yang menjadi perhatian penting adalah bahwa nilai IDI Lampung tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa terdapat dinamika atau tantangan yang memengaruhi pelaksanaan demokrasi di daerah, baik dari sisi kebebasan warga, kesetaraan, maupun efektivitas lembaga demokrasi.

Komponen Penyusun IDI disusun dari beberapa komponen utama yang saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi demokrasi. Dalam paparan IDI Provinsi Lampung, komponen penyusun IDI terdiri dari tiga aspek besar, yaitu:

a. Aspek Kebebasan

Aspek ini menggambarkan sejauh mana kebebasan masyarakat dijamin dan dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan sosial politik. Kebebasan yang dimaksud mencakup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, berkumpul, serta kebebasan memperoleh informasi. Kebebasan merupakan fondasi demokrasi, karena demokrasi hanya dapat tumbuh jika warga memiliki ruang yang aman dan setara untuk berpartisipasi.



b. Aspek Kesenjangan

Aspek kesetaraan menunjukkan adanya perlakuan yang adil bagi semua warga negara dalam mengakses hak politik dan hak sipil. Kesenjangan mencerminkan apakah setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyalurkan aspirasi, berpartisipasi dalam proses politik, serta mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Demokrasi yang sehat menuntut adanya inklusivitas dan tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek ini menilai seberapa kuat dan efektif lembaga demokrasi dalam menjalankan perannya. Lembaga demokrasi mencakup institusi pemerintah, lembaga legislatif, serta berbagai perangkat pendukung tata kelola yang memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Kapasitas lembaga yang baik akan memperkuat stabilitas demokrasi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga kualitas proses pengambilan keputusan publik.

Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Kebebasan yang tinggi tanpa kesetaraan dapat menimbulkan ketimpangan partisipasi. Kesenjangan yang baik tanpa dukungan kapasitas lembaga yang kuat dapat membuat demokrasi rapuh secara kelembagaan. Oleh sebab itu, peningkatan IDI harus dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut.

Tren Perkembangan IDI Lampung 2023–2024, dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, IDI Lampung tercatat 72,62 dan mengalami penurunan sebesar 5,75 poin dibandingkan tahun 2023. Tren penurunan ini menjadi catatan penting karena IDI seharusnya terus didorong naik sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Penurunan IDI Lampung 2024 dapat dimaknai sebagai sinyal perlunya evaluasi terhadap dinamika demokrasi yang terjadi. Evaluasi tersebut dapat diarahkan pada penguatan ruang kebebasan yang bertanggung jawab, peningkatan kesetaraan akses partisipasi publik, serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Upaya perbaikan ini penting agar demokrasi di Lampung tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Ke depan, tren IDI Lampung perlu terus dipantau dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan memperkuat ketiga aspek penyusun IDI secara seimbang, Lampung memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan bermakna.

Analisis Perbandingan IDI Lampung dengan IDI Provinsi se-Sumatera Tahun 2024, jika dilihat dalam perspektif regional Sumatera, posisi IDI Provinsi Lampung tahun 2024 perlu menjadi perhatian karena mengalami penurunan di saat sebagian besar provinsi lain justru menunjukkan tren perbaikan. Dalam paparan perbandingan IDI provinsi se-Sumatera tahun 2023 dan 2024, disebutkan bahwa dari 10 provinsi yang dianalisis, terdapat 5 provinsi berkategori TINGGI dan 5 provinsi berkategori SEDANG.

Artinya, secara umum kualitas demokrasi di Sumatera relatif terbagi seimbang antara daerah yang sudah cukup kuat dalam pelaksanaan demokrasi dan daerah yang masih memerlukan penguatan. Secara umum, kualitas demokrasi di kawasan Sumatera pada tahun 2024 menunjukkan arah yang positif, karena mayoritas provinsi mengalami peningkatan nilai IDI pada 2024 dibandingkan 2023. Kondisi ini menandakan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan demokrasi di sebagian besar wilayah, baik melalui penguatan ruang kebebasan, peningkatan kesetaraan, maupun perbaikan kapasitas lembaga demokrasi. Namun demikian, di Pulau Sumatera, masih terdapat dua provinsi yang mengalami penurunan nilai IDI.

Dibandingkan provinsi lain di Sumatera yang mengalami peningkatan, Lampung perlu mempercepat langkah perbaikan agar tidak tertinggal dalam kualitas demokrasi regional. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kondisi ini berpotensi memperlebar jarak dengan provinsi-provinsi berkategori TINGGI yang mampu menjaga stabilitas dan konsistensi kualitas demokrasi dari tahun ke tahun. Sementara itu, bagi provinsi yang masih berada pada kategori SEDANG, persaingan perbaikan kualitas demokrasi juga menjadi penting karena peningkatan IDI dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan meningkatnya partisipasi publik.

Dengan demikian, analisis perbandingan ini menegaskan bahwa capaian IDI Lampung 2024 bukan hanya angka statistik, melainkan bahan evaluasi strategis. Lampung perlu memperkuat kembali demokrasi secara substantif, terutama melalui penguatan aspek

kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi secara seimbang. Upaya ini penting agar Lampung mampu kembali mengejar tren perbaikan kualitas demokrasi di Sumatera, sekaligus memastikan demokrasi menjadi fondasi pembangunan daerah yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Tabel 3.96 indicator IDI Provinsi Lampung tahun 2024:

No.	[Metode Baru] Indikator IDI	IDI Provinsi Lampung 2024
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79,38
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	85,27
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100
4.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	81,25
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	72,49
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja	38,5
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	62,04
8.	Kesetaraan Gender	89,29
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	30,59
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi	66,33
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	77,12
12.	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,81
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik	63,4
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	77,67
15.	Kinerja Lembaga Legislatif	74,07
16.	Kinerja Lembaga Yudikatif	89,37
17.	Netralitas Penyelenggara Pemilu	46,88
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kebijakan pejabat pemerintah	78,12
19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	73,11
20.	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	85,71
21.	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	85,4
22.	Pendidikan Politik pada kader partai politik	20
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung		72,62

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga aspek dalam demokrasi adalah sebagai berikut:

1. **Focus Group Discussion (FGD) IDI Provinsi Lampung, dan Rapat Tim Pokja Pengembangan IDI Provinsi Lampung.**

FGD bertujuan untuk mendalami indikator komposit demokrasi dengan metode baru, menghasilkan angka IDI yang akurat dan memahami pelaksanaan demokrasi di Lampung. Selain itu, bertujuan untuk memvalidasi silang metode kuantitatif dan kualitatif (FGD) untuk mengonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder dan menyamakan persepsi tentang langkah tindak intervensi terhadap kesahihan informasi/data, sekaligus mensosialisasikan tentang mulai tahun 2025 IDI akan menjadi IKU Wajib bagi seluruh Gubernur yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dinilai oleh Pemerintah Pusat. Berikut ini gambar dokumentasi untuk kegiatan pendukung IDI yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024. FGD melibatkan berbagai stakeholder seperti perwakilan dinas/instansi/Lembaga /LSM terkait (LBH,, AJI, PGI, Polda, UBL. PKS, PDIP, WALUBI, Biro Hukum, MUI, dan PWI).



Sumber: Olahan Data Kesbangpol Provinsi Lampung, Februari 2025

Beberapa faktor pendukung, penghambat dan solusi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.97 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi IDI

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Kegiatan Pendukung
1. Berita-Berita dari Koran maupun dari Media Sosial. 2. Berita yang bersumber dari BPS. 3. Sudah terbentuknya Tim Pokja Pengembangan IDI Provinsi Lampung. 4. Terlaksananya FGD IDI Provinsi Lampung yang membahas strategi meningkatkan nilai IDI setiap tahunnya.	1. Adanya kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh masyarakat. 2. Adanya kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan. 3. Adanya Pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. 4. Menurunnya Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi. 5. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi. 6. Menurunnya Indeks Persaingan Usaha Provinsi. 7. Menurunnya Indeks Pelayanan Publik Pemda. 8. Menurunnya Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD.	1. Meningkatkan kapasitas dari lembaga/instansi/satker terkait yang masuk dalam Indikator Aspek IDI (Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi). 2. Melaksanakan FGD IDI Provinsi Lampung secara rutin dan berkala dalam rangka meningkatkan nilai IDI Provinsi Lampung	1. Rapat Tim Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung. 2. FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung

Sumber: Olahan Data Kesbangpol Provinsi Lampung, Februari 2025.

Program unggulan dalam meningkatkan demokrasi Indonesia adalah **Lampung Merawat Indonesia** melalui kolaborasi kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperkuat 3 (tiga) aspek pada IDI, yaitu: aspek kebebasan, kesetaraan, dan lembaga demokrasi dengan 22 (dua puluh dua) indikatornya. Program prioritas yang mendukung program unggulan ini adalah:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

20. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tabel 3.98 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sasaran	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya				
IKU	Indeks Pembangunan Kebudayaan				
Satuan	Indeks				
Capaian kinerja:					
No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2024	-	60,97	-	-
2	2025	58,5	60,97	104,22	2024
3	2029	63	-	96,78	-
4	Nas	-	59,98	101,65	-

61
60,5
60
59,5

60,79 60,79 59,98

2024 2025 N

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79 59,98

60,79 60,79

Sumber: Olahan data Bappeda Provinsi Lampung, Maret 2026



Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya memiliki indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan realisasi kinerja capaian sebesar 60,97% dari target sebesar 58,5% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **103,75%** dengan **kategori sangat memuaskan**.
2. Pada tahun sebelumnya realisasi adalah 60,97%. Realisasi kinerja ini merupakan realisasi kinerja tahun 2024 karena realisasi tahun 2025 diperkirakan akan dipublish pertengahan 2026.
3. Realisasi Kinerja 2025 yang mengambil angka realisasi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian mencapai 96,78%.
4. Realisasi Kinerja 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 0,99 poin dengan capaian 101,65%.

Pembangunan kebudayaan bukan hanya mampu berperan terhadap peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan semata, akan tetapi mampu memberikan investasi tersendiri terhadap peradaban bangsa. Menyadari hal tersebut, pembangunan kebudayaan mulai menjadi perhatian tersendiri guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional, salah satunya melalui IPK. Sebagai salah satu instrumen yang mampu mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kebudayaan secara komprehensif, IPK merupakan wujud nyata perhatian pemerintah bersama para pemerhati budaya dalam menjaga sinergitas kontribusi unsur kebudayaan pada pembangunan nasional.



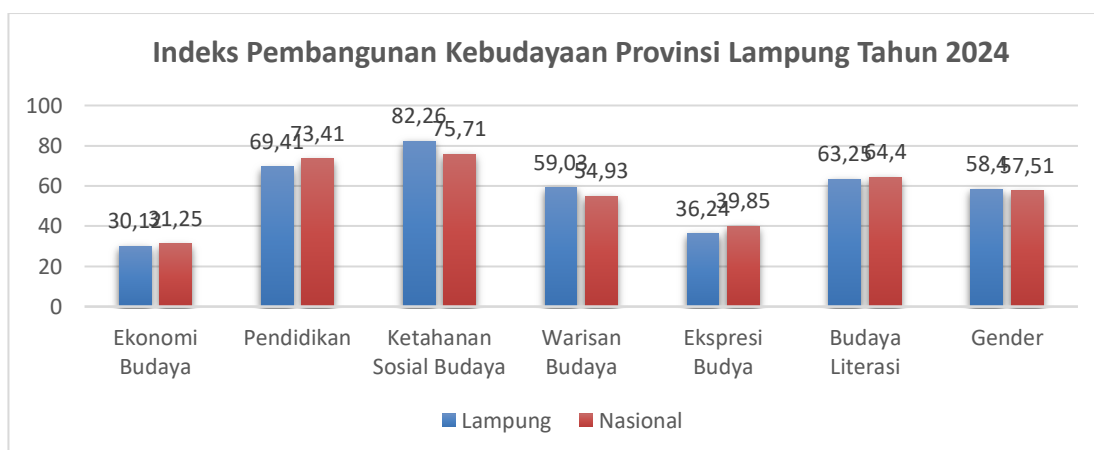
IPK disusun dari beberapa Dimensi diantaranya Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Untuk dapat meningkatkan nilai IPK, pemerintah setempat perlu untuk melaksanakan program program terkait dimensi tersebut. Dengan kerja keras pemerintah dan dukungan dari masyarakat setempat diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Tabel 3.99 IPK Nasional dan Provinsi Lampung

Kode	Nama Dimensi	Tahun 2024	
		Lampung	Nasional
D1	Ekonomi Budaya	30,25	31,25
D2	Pendidikan	69,41	73,41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	82,26	75,71
D4	Warisan Budaya	59,03	54,93
D5	Ekspresi Budaya	36,24	39,85
D6	Budaya Literasi	63,25	64,40
D7	Gender	58,40	57,51
TOTAL		60,97	57,13

Catatan : IPK pada Tahun 2025 masih menggunakan data pada Tahun 2024 dikarenakan hasil perhitungan IPK untuk Tahun 2025 baru akan dirilis pada Pertengahan Tahun 2026 mendatang.

Grafik 3.66 IPK Provinsi Lampung berdasarkan komponen



Sumber : Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Maret 2026



Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah indeks pembangunan kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 60,97 dimana indeks ini merupakan perhitungan yang didapat dari 7 komponen dan capaian ini masih diatas nilai IPK nasional sebesar 59,98.

Berikut ini beberapa aksi yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat berbudaya yaitu:

1. Dimensi Ekonomi Budaya

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Pekan Raya Lampung, Festival Krakatau bertemakan “Nemui Nyimah”, Lampung Craft, Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) Recaka Musik Lampung sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah mendorong perkembangan ekonomi kreatif untuk dapat memulihkan sektor ekonomi daerah.



Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan ruang dan sarana bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam berkreasi, berproduksi dan bertransaksi selama masa pandemi. Pada kegiatan tersebut, penyelenggara melibatkan UMKM dan koperasi lokal. Kegiatan ini diselenggarakan di Provinsi Lampung pada tahun 2023.

2. Dimensi Budaya Literasi

Pandemi Covid-19 tidak serta merta menggambarkan penurunan minat membaca masyarakat Lampung. Sebaliknya, Dimensi Budaya Literasi IPK Lampung justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan menghasilkan skor tertinggi selama periode 2018-2022. Pertumbuhan skor tersebut salah satunya dipengaruhi oleh indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan inovasi baru dalam bidang perpustakaan melalui ePerpus Lampung (Perpustakaan Digital Provinsi Lampung).





Aplikasi ini memiliki 5.227 salinan buku digital dan 2.397 judul buku yang bisa diakses melalui Android dan Windows. Website dan Aplikasi ePerpus paling sedikit dikunjungi 30 user setiap harinya.

3. Dimensi Gender

Pertumbuhan skor Dimensi Gender IPK Lampung salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen Perwakilan Lampung sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan, mengoptimalkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peran keterwakilan perempuan di parlemen. Organisasi tersebut dibentuk untuk mewujudkan kesamaan, keadilan dan kesetaraan gender melalui fungsi perempuan di parlemen yang selama ini belum mendapatkan kedudukan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan politik. Adapun anggotanya terdiri dari perkumpulan perempuan parlemen partai politik yang berasal dari Lampung.

4. Dimensi Pendidikan

Pertumbuhan skor Dimensi Pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh Indikator Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya. Pemerintah Provinsi Lampung paham betul pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah sehingga demi meningkatkan minat masyarakat untuk terus melestarikan bahasa daerah Lampung pemerintah provinsi Lampung memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Lampung.

5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Provinsi Lampung memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama. Artinya dengan komposisi masyarakat majemuk, ketahanan sosial budaya masih relatif kuat. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 1,79. Dari Beberapa indikator pendukung Dimensi yang mengalami peningkatan, terdapat dua indikator yang mengalami penurunan salah satunya Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari. Kejahatan di malam hari yang masih sering terjadi di kota maupun Kabupaten di Provinsi Lampung menjadi pemicu menurunnya capaian indikator ini.

6. Ekspresi Budaya

Pada Tahun 2023 Dimensi Ekspresi Budaya mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dengan capaian 27,73. Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada indikator Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat dengan capaian 17,83 mengalami kenaikan sebesar 7,14 dari Tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 10,69.



Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat dimana masyarakatnya masih kental dengan perayaan adat istiadat di daerah mereka masing masing. Salah satunya adalah Upacara Gawi merupakan sebuah ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Upacara ini merupakan tradisi masyarakat adat Lampung yang bermarga Bunga Mayang Sungkai. Upacara ini biasanya dilakukan cukup lama, yaitu 10 hari. Uniknya, para tamu biasanya membawa sebuah persembahan seperti sapi, kerbau, telur, atau amplop yang berisi uang. Tak sembarang orang dapat melaksanakan tradisi ini karena biaya yang harus dikeluarkan sangat besar.

Tabel 3.100 Faktor pendukung, penghambat dan solusi IPK

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisioanal 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 2. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan; 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya; 4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional; 5. Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi; 6. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestarian cagar budaya; 7. Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; 8. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; 9. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum.	Faktor pendukung: Penentuan program kegiatan priotitas; Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara optimal; Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan instansi yang terkait. Faktor Penghambat: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; Keterbatasan anggaran bidang kebudayaan untuk mendukung peningkatan pembangunan kebudayaan yang lebih optimal.	Dalam mengatasi hambatan tersebut, solusi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas bidang Kebudayaan.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Januari 2025

Gambar 4.4.25 Kegiatan Pagelaran Seni Tari, Musik, dan Teater yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2022 oleh Taman Budaya Lampung



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berikut Ini realisasi anggaran yang menjadi sumber daya mendukung pencapaian 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung tahun 2025:

Tabel 3.101 Realisasi P-APBD Tahun 2025

No	IKU	PAPBD	Realisasi	Sisa pagu anggaran	% realisasi per IKU	% Realisasi P-APBD
1	Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 168.451.077.660,12	Rp. 148.569.274.395,40	Rp. 19.881.803.264,72	88,20%	1,90%
2	Indeks Ketahanan Pangan	Rp. 233.269.363.976,55	Rp. 142.334.611.732,43	Rp. 90.934.752.244,12	61,02%	1,82%
3	Persentase Desa Mandiri	Rp. 28.685.631.307,77	Rp. 25.869.868.416,00	Rp. 2.815.762.891,77	90,18%	0,33%
4	Kemantapan Jalan	Rp. 1.051.591.016.568,84	Rp. 938.500.410.328,99	Rp. 113.090.606.239,85	89,25%	12,01%
5	Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar	Rp. 434.670.511.793,85	Rp. 275.858.322.191,81	Rp. 158.812.189.602,04	63,46%	3,53%
6	Tingkat Kemiskinan	Rp. 70.657.369.971,48	Rp. 64.794.007.822,26	Rp. 5.863.362.149,22	91,70%	0,83%
7	Gini Rasio					
8	Tingkat Inflasi	Rp. 2.081.740.000,00	Rp. 546.427.300,00	Rp. 1.535.312.700,00	26,25%	0,01%
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp. 38.588.824.684,00	Rp. 36.521.310.824,00	Rp. 2.067.513.860,00	94,64%	0,47%
10	Indeks Modal Manusia	Rp. 3.054.927.394.020,14	Rp. 2.839.514.039.765,25	Rp. 215.413.354.254,89	92,95%	36,34%
11	Indeks Pembangunan Pemuda	Rp. 71.236.451.772,52	Rp. 58.378.307.281,22	Rp. 12.858.144.491,30	81,95%	0,75%
12	Indeks Perlindungan Anak	Rp. 271.915.900,00	Rp. 269.245.368,00	Rp. 2.670.532,00	99,02%	0,00%
13	Indeks Ketimpangan Gender	Rp. 12.800.420.616,00	Rp. 11.725.212.379,00	Rp. 1.075.208.237,00	91,60%	0,15%
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 2.406.372.335.042,92	Rp. 1.924.697.893.159,38	Rp. 481.674.441.883,54	79,98%	24,63%
15	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Rp. 63.223.885.507,58	Rp. 60.928.791.747,00	Rp. 2.295.093.760,58	96,37%	0,78%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 15.994.410.395,44	Rp. 15.609.147.961,16	Rp. 385.262.434,28	97,59%	0,20%
17	Indeks Resiko Bencana	Rp. 55.740.065.754,00	Rp. 51.840.948.481,90	Rp. 3.899.117.272,10	93,00%	0,66%
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Rp. 18.630.015.381,10	Rp. 16.680.605.260,00	Rp. 1.949.410.121,10	89,54%	0,21%
19	Indeks Demokrasi Provinsi	Rp. 78.368.071.198,01	Rp. 65.620.803.986,00	Rp. 12.747.267.212,01	83,73%	0,84%
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rp. 7.483.779.820,00	Rp. 7.022.720.067,00	Rp. 461.059.753,00	93,84%	0,09%
	TOTAL	Rp. 7.813.044.281.370,32	Rp. 6.685.281.948.466,80	Rp. 1.127.762.332.903,52	85,57%	85,57%

Sumber Olahan data Biro Organisasi dan BPKAD Provinsi Lampung, Maret 2026.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pagu Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 adalah pagu yang digunakan sebagai sumberdaya pendukung dalam menjalankan 20 IKU pada perencanaan RPJMD 2025-2029. Pagu Perubahan APBD senilai Rp.7.813.044.281.370,32 (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 6.685.281.948.466,80 (Enam triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam) sehingga realisasi anggaran senilai 85,57%.
2. Serapan anggaran tertinggi terdapat pada IKU IPA, IKLH, IPK, Angka Kemiskinan dan Gini Ratio.
3. Komposisi serapan terbesar dalam P-APBD ada pada IKU IMM senilai 36,34%, IRB senilai 24,63% dan Kemantapan Jalan senilai 12,01%. Hal ini menggambarkan prioritas Provinsi Lampung dalam meningkatkan masing komponen dalam setiap IKU. IMM didukung dengan adanya peningkatan pada berbagai sektor seperti: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan. Sedangkan IRB didukung dengan adanya peningkatan RB dari 2 komponen RB general dan tematik dimana masing-masing komponen ini membutuhkan kolaborasi kinerja yang cukup luas dari hampir seluruh PD.

3.4 Efisiensi dan Efektifitas

Tingkat efiesni dan efektifitas adalah parameter dimana membandingkan antara capaian kinerja dengan anggaran. Kinerja dapat dikatakan efektif dan efisien apabila capaian kinerja lebih tinggi daripada serapan anggaran. Berikut Ini tingkat efektifitas dan efisiensi dalam 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung tahun 2025:

Tabel 3.102 efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama 2025-2029	Kinerja 2025			Anggaran 2025		%	Ket.
		Target	realisasi	%	P-APBD	Realisasi		
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	5,28	107,75	168.451.077.660,12	148.569.274.395,40	88,20	
2	Indeks Ketahanan Pangan	83,07	86,95 (9 ik) 73,05 (12 ik)	104,67	233.269.363.976,55	142.334.611.732,43	61,02	
3	Persentase Desa Mandiri	21,42	22,89	106,86	28.685.631.307,77	25.869.868.416,00	90,18	
4	Kemantapan Jalan	78,29	79,79	101,92	1.051.591.016.568,84	938.500.410.328,99	89,25	
5	Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar	26,21	26,82	102,35	434.670.511.793,85	275.858.322.191,81	63,46	
6	Tingkat Kemiskinan	9,5-10,0	9,66	101,68	70.657.369.971,48	64.794.007.822,26	91,70	
7	Gini Rasio	0,300-0,295	0,287	103,78				
8	Tingkat Inflasi	2,5 ± 1	1,25	83,33	2.081.740.000,00	546.427.300,00	26,25	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86 – 4,0	4,21	95,01	38.588.824.684,00	36.521.310.824,00	94,64	
10	Indeks Modal Manusia	IMM: 0,55 IPM: 71,59	IMM: - IPM: 73,98	103,33	3.054.927.394.020,14	2.839.514.039.765,25	92,95	
11	Indeks Pembangunan Pemuda	57,00	55,67	97,66	71.236.451.772,52	58.378.307.281,22	81,95	
12	Indeks Perlindungan Anak	66,22	71,58	108,1	271.915.900,00	269.245.368,00	99,02	
13	Indeks Ketimpangan Gender	0,42	0,399	105,76	12.800.420.616,00	11.725.212.379,00	91,60	
14	Indeks Reformasi Birokrasi	83,5	82,52	98,83	2.406.372.335.042,92	1.924.697.893.159,38	79,98	
15	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	62,79	60,64 (34,551,5 02.5 juta ton CO2e)	96,57	63.223.885.507,58	60.928.791.747,00	96,37	
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	73,81	103,91	15.994.410.395,44	15.609.147.961,16	97,59	
17	Indeks Resiko Bencana	129,97	124,59	104,31	55.740.065.754,00	51.840.948.481,90	93,00	
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	36	36,32	100,89	18.630.015.381,10	16.680.605.260,00	89,54	
19	Indeks Demokrasi Provinsi	79,5	72,62	91,34	78.368.071.198,01	65.620.803.986,00	83,73	
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,5	60,97	104,2	7.483.779.820,00	461.059.753,00	93,84	
Total					7.813.044.281.370,32	6.685.281.948.466,80	85,57	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026.



Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029, telah ditetapkan IKU Provinsi Lampung tahun 2025 sejumlah 20 (dua puluh) dengan perincian capaian kinerja berdasarkan kategorinya sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 19 (sembilan belas) IKU dengan kategori kinerja **Sangat Memuaskan**;
 - 2) Terdapat 1(satu) IKU dengan kategori kinerja **Memuaskan**.
2. Pagu Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 yang dikelola dalam mencapai 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 senilai Rp.7.813.044.281.370,32 (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 6.685.281.948.466,80 (Enam triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam) sehingga realisasi anggaran **85,57%**.
3. Tingkat capaian kinerja dari 20 (dua puluh) IKU lebih tinggi daripada tingkat serapan anggaran masing-masing IKU. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing IKU telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.



3.5 Refokusing Anggaran

Berikut ini tabel refokusing anggaran Provinsi Lampung tahun 2025:

Tabel 3.103 Refokusing Provinsi Lampung tahun 2025

IKU RPD 2025-2026		APBD 2025 (Rp.)	IKU RPJMD 2025-2029		P-APBD 2025 (Rp.)	+/- (Rp.)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	225.707.536.730,31	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	168.451.077.660,12	-57.256.459.070,19
2	Laju Inflasi	1.417.515.000,00	2	Laju Inflasi	2.081.740.000,00	664.225.000,00
3	Indeks Gini	21.116.249.353,00	3	Indeks Gini		
4	Persentase Angka Kemiskinan	74.350.470.824,60	4	Angka kemiskinan	70.657.369.971,48	-3.693.100.853,12
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	43.669.611.267,65	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	38.588.824.684,00	-5.080.786.583,65
6	Indeks Perlindungan Anak	15.384.452.626,80	6	Indeks Perlindungan Anak	271.915.900,00	-15.112.536.726,80
7	Indeks Ketimpangan Gender	776.166.300,00	7	Indeks Ketimpangan Gender	12.800.420.616,00	12.024.254.316,00
8	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah	1.182.779.999.033,37	8	Tingkat Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar	434.670.511.793,85	-748.109.487.239,52
9	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca	80.045.353.035,85	9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	63.223.885.507,58	-16.821.467.528,27
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22.011.792.408,40	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	15.994.410.395,44	-6.017.382.012,96
11	Indeks Resiko Bencana	2.478.744.028.067,52	11	Indeks Resiko Bencana	55.740.065.754,00	-2.423.003.962.313,52
12	Indeks Reformasi Birokrasi	55.101.546.015,57	12	Indeks Reformasi Birokrasi	2.406.372.335.042,92	2.351.270.789.027,35
13	Indeks Pelayanan Publik	181.627.252.590,38				
14	Indeks Demokrasi Indonesia	1.000.000.000,00	13	Indeks Demokrasi Provinsi	78.368.071.198,01	77.368.071.198,01
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	11.941.616.000,00	14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	7.483.779.820,00	-4.457.836.180,00
16	Pertumbuhan PMTB	419.000.000,00	15	Persentase Desa Mandiri	28.685.631.307,77	28.266.631.307,77
17	Indeks Pembangunan Manusia	2.905.336.667.952,15	16	Indeks Modal Manusia	3.054.927.394.020,14	149.590.726.067,99
18	Pravalensi Stunting	149.940.853.187,00	17	Indeks Pembangunan Pemuda	71.236.451.772,52	-78.704.401.414,48
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	155.460.967.685,90	18	Kemantapan Jalan	1.051.591.016.568,84	896.130.048.882,94
20	Indeks Kewaspadaan Dini	26.078.639.769,78	19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	18.630.015.381,10	-7.448.624.388,68
			20	IKP	233.269.363.976,55	-
Total		7.632.909.717.848,28		Total	7.813.044.281.370,32	180.134.563.522,04 (2,35%)

Sumber : Olahan data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2026

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pagu APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.7.632.909.717.848,00 (Tujuh triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Kemudian pada akhir tahun terdapat perubahan anggaran dan P-APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp.7.813.044.281.370,32 (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah).
2. Penambahan anggaran sebesar 2,35% senilai dengan Rp.180.134.563.522,04 (seratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua).
3. Beberapa IKU yang sama pada dokumen RPD 2025-2026 maupun RPJMD 2025-2029 terlihat penambahan/pengurangan anggarannya. Namun untuk beberapa IKU tidak dapat terlihat karena adanya IKU yang berbeda pada kedua dokumen perencanaan.
4. TAPD telah melakukan identifikasi terhadap efisiensi belanja perangkat daerah sampai dengan program, kegiatan, subkegiatan, dan rincian belanja. Efisiensi belanja yang dilakukan antara lain merujuk kepada Surat Menteri Keuangan Nomor: S 37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 diantaranya:
5. Berikut ini adalah tindak lanjut Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025 adalah sebagai berikut;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Tindak Lanjut Pemprov Lampung	Ket
- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion; - Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen); - Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional; - Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur; - Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan	- Belanja alat tulis kantor mencapai kurang lebih 90% - Belanja makan dan minum rapat dan tamu mencapai kurang lebih 80% - Belanja cetak, cover dan penggandaan mencapai kurang lebih 70% - Belanja Perjalanan Dinas mencapai kurang lebih 60% - Belanja Pemeliharaan mencapai kurang lebih 75% - Belanja Modal Peralatan dan perlengkapan Kantor kurang lebih 95% - Belanja Sewa Gedung/Hotel/Ruang Pertemuan kurang lebih 95%	

pemerataan antar perangkat daerah pada tahun anggaran sebelumnya; - Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, maupun, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.	- Belanja Honorarium mencapai kurang lebih 50% - Belanja Konsultan mencapai kurang lebih 50% - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan kurang lebih 75% - Dan belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.	
---	--	--

6. Berikut ini adalah struktur Belanja Daerah/Pagu Perangkat Daerah APBD 2025 :

No	Perangkat Daerah	APBD TA 2025	Pengurangan Dana Transfer	Efisiensi Belanja	Total Pengurangan	Pagu Perubahan Atas Pergub Penjabaran APBD TA 2025
1	2	3	4	5	6	7=3-6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.135.100.114.669,70		17.316.899.247,50	17.316.899.247,50	2.117.783.215.422,20
2	Dinas Kesehatan	251.605.123.023,04		13.659.881.681,65	13.659.881.681,65	237.945.241.341,39
3	Rumah Sakit Abdul Moeloek	524.870.220.829,38		22.666.729.599,60	22.666.729.599,60	502.203.491.229,78
4	Rumah Sakit Jiwa	62.467.447.834,58		1.033.839.633,72	1.033.839.633,72	61.433.608.200,86
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	773.361.625.814,64	66.379.890.000	17.729.565.633,75	84.109.455.633,75	689.252.170.180,89
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	180.423.467.265,00	12.436.371.000	8.125.924.978,45	20.562.295.978,45	159.861.171.286,55
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	181.978.752.874,83		19.216.499.226,46	19.216.499.226,46	162.762.253.648,37
8	Satuan Polisi Pamong Praja	61.167.316.685,90		6.686.030.281,95	6.686.030.281,95	54.481.286.403,95
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.101.546.015,57		22.418.329.740,00	22.418.329.740,00	32.683.216.275,57
10	Dinas Sosial	55.073.379.196,55		9.188.396.197,21	9.188.396.197,21	45.884.982.999,34
11	Dinas Tenaga Kerja	43.669.611.267,65		2.991.091.092,00	2.991.091.092,00	40.678.520.175,65
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.488.088.926,80		4.549.387.819,50	4.549.387.819,50	11.938.701.107,30
13	Dinas Lingkungan Hidup	18.529.438.108,40		2.364.066.548,50	2.364.066.548,50	16.165.371.559,90
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.671.174.044,00		2.361.501.155,00	2.361.501.155,00	6.309.672.889,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Transmigrasi	21.319.012.628,05		6.164.622.096,75	6.164.622.096,75	15.154.390.531,30
16	Dinas Perhubungan	23.917.738.736,21		5.550.685.477,21	5.550.685.477,21	18.367.053.259,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	51.311.498.420,00		7.421.098.330,00	7.421.098.330,00	43.890.400.090,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	22.659.649.352,96		5.066.761.073,72	5.066.761.073,72	17.592.888.279,24
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.489.840.094,86		2.475.727.950,00	2.475.727.950,00	17.014.112.144,86
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	89.263.439.782,45		18.926.228.613,73	18.926.228.613,73	70.337.211.168,72
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.305.043.408,85		1.803.182.700,00	1.803.182.700,00	15.501.860.708,85
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.239.772.150,80		4.885.602.298,25	4.885.602.298,25	24.354.169.852,55
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27.476.180.356,88		7.835.548.090,00	7.835.548.090,00	19.640.632.266,88



No	Perangkat Daerah	APBD TA 2025	Pengurangan Dana Transfer	Efisiensi Belanja	Total Pengurangan	Pagu Perubahan Atas Pegub Penjabaran APBD TA 2025
1	2	3	4	5	6	7=3-6
24	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	75.524.594.072,75	11.079.878.000	17.833.541.423,48	28.913.419.423,48	46.611.174.649,27
25	Dinas Perkebunan	27.970.071.351,32		4.539.159.225,13	4.539.159.225,13	23.430.912.126,19
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34.903.751.275,16	2.605.468.000	5.342.456.879,75	7.947.924.879,75	26.955.826.395,41
27	Dinas Kehutanan	72.465.195.335,85		4.767.877.593,75	4.767.877.593,75	67.697.317.742,10
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.470.926.342,90		3.947.299.887,40	3.947.299.887,40	19.523.626.455,50
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.640.402.723,40		7.826.283.467,60	7.826.283.467,60	31.814.119.255,80
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.118.089.519,00		11.963.796.490,00	11.963.796.490,00	30.154.293.029,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	1.625.110.295.100,78	21.487.208.000	33.198.881.310,70	54.686.089.310,70	1.570.424.205.790,08
32	Badan Pendapatan Daerah	134.872.046.337,97		44.281.381.000,00	44.281.381.000,00	90.590.665.337,97
33	Badan Kepegawaian Daerah	22.081.788.116,34		2.488.658.675,40	2.488.658.675,40	19.593.129.440,94
34	Badan Pengembangan Sdm Daerah	30.761.962.403,70		5.668.714.154,91	5.668.714.154,91	25.093.248.248,79
35	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	12.780.377.446,12		2.382.446.682,60	2.382.446.682,60	10.397.930.763,52
36	Badan Penghubung	21.012.959.885,84		4.835.337.575,00	4.835.337.575,00	16.177.622.310,84
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.860.000.000,00		1.716.601.710,00	1.716.601.710,00	1.143.398.290,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	94.293.651.000,00		4.672.416.330,00	4.672.416.330,00	89.621.234.670,00
39	Biro Hukum	2.815.341.000,00		1.120.562.620,00	1.120.562.620,00	1.694.778.380,00
40	Biro Perekonomian	3.060.279.800,00		1.800.707.670,00	1.800.707.670,00	1.259.572.130,00
41	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000.000,00		2.116.778.370,00	2.116.778.370,00	1.383.221.630,00
42	Biro Administrasi Pembangunan	2.420.000.000,00		1.413.166.270,00	1.413.166.270,00	1.006.833.730,00
43	Biro Organisasi	3.200.000.000,00		2.227.695.235,00	2.227.695.235,00	972.304.765,00
44	Biro Umum	182.618.852.400,90		51.032.723.470,00	51.032.723.470,00	131.586.128.930,90
45	Biro Administrasi Pimpinan	6.120.000.000,00		3.192.910.951,75	3.192.910.951,75	2.927.089.048,25
46	Sekretariat DPRD	413.140.289.346,00		185.705.181.649,90	185.705.181.649,90	227.435.107.696,10
47	Inspektorat Provinsi	58.600.723.133,32		7.953.066.620,00	7.953.066.620,00	50.647.656.513,32
48	Badan Kesbang dan Politik	27.078.639.769,78		4.094.160.650,00	4.094.160.650,00	22.984.479.119,78
	Jumlah	7.632.909.717.848,21	113.988.815.000	626.559.405.377,32	740.548.220.377,32	6.892.361.497.470,91

3.6 Tindak Lanjut LHE 2025

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi dan berikut ini adalah tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
	Komponen Perencanaan Kinerja						
1	Melakukan perbaikan pohon kinerja pada tingkat Perangkat Daerah (PD) yang diselaraskan dengan pohon kinerja tingkat Pemda dan menggunakan prinsip yang sama yakni prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta mengidentifikasi CSF yang dapat menjadi area atau aspek kunci, kritis, dan berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Kemudian melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya mencapai kinerja, khususnya pada kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja tersebut tercapai secara optimal.	Provinsi Lampung telah melaksanakan perbaikan pohon kinerja pada Perangkat Daerah yang dilakukan pada tanggal 15-18 Desember 2025	49 PD di Lingk Pemprov Lampung	15-18 Desember 2025	BAPPEDA	Selesai	Masih terdapat beberapa PD yang perlu dilakukan perbaikan kembali. Evidence : Pohon kinerja 49 PD di Lingk Prov Lampung yang telah diupload pada aplikasi ESR.
2	Melakukan reviu dan perbaikan penjabaran kinerja mulai dari tingkat pimpinan hingga individu dengan memperhatikan logical framework, critical success factor (CSF), dan kondisi hasil/outcome yang sesuai dengan tingkat jabatannya, mulai dari tingkat Kepala PD hingga tingkat individu di bawahnya. Hal tersebut untuk memastikan penurunan kinerja telah selaras dan memastikan kinerja setiap individu telah mendukung kinerja organisasi.	Provinsi Lampung telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memperhatikan pohon kinerja yang telah disusun oleh PD dan memanfaatkannya sebagai dasar penyusunan e-Kinerja PD sebagai tolak ukur indikator kinerja dari level pimpinan sampai dengan individu pada masing-masing PD.	49 PD di Lingk Pemprov Lampung	Januari 2026	BAPPEDA dan BKD dan 49 PD di Lingk Pemprov Lampung	Selesai	Evidence: Pokin 49 PD dan e-kinerja Provinsi Lampung

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
3	Melakukan reviu dan penyempurnaan/perbaikan terhadap indikator kinerja pada tingkat PD agar indikator tersebut memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran.	Pada penyusunan RPJMD, Provinsi Lampung telah menetapkan indikator (tujuan dan sasaran) dengan jumlah total sebanyak 34 Indikator. Selanjutnya melalui tahapan menurut Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, maka telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 Indikator (baik indikator tujuan maupun sasaran). Indikator tersebut telah kami konsultasi ke Kemenpan pada tanggal 26 Mei 2025. Sehingga pemilihan IKU tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor G/650/VI.01/HK/2025 tanggal 19 September 2025 perihal IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029Selanjutnya untuk Indikator Sasaran "Ekspresi Budaya" dan semua indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD telah dicantumkan di defisini operasional yang memuat formulasi perhitungan masing-masing indikator tersebut pada lampiran I RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029Untuk indikator "jumlah hari operasi" pada dinas Kelautan dan Perikanan merupakan indikator dari Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025, namun penulisan indikatornya belum lengkap sepenuhnya. Karena yang sebenarnya indikator tersebut adalah "Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan" Akan dilakukan perbaikan dokumen perencanaan PD dengan memperhatikan pohon kinerja yang telah disusun oleh PD	48 PD di Lingk Pemprov Lampung	4-11 Maret 2026	BAPPEDA	Selesai	Evidence : RPJMD Prov. Lampung 2025-2029 dan Renstra pada PD ; BA Pelaksanaan Desk.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
4	Melakukan reviu atas penetapan target yang diperjanjikan pada setiap jenjang organisasi agar selaras dan logis dalam mendukung kinerja dan target di level atasnya	Provinsi Lampung telah melakukan perbaikan/perubahan dokumen perencanaan PD dengan memperhatikan pohon kinerja yang telah disusun oleh PD dengan memperhatikan target tahun sebelumnya dan target yang bersifat akumulasi pada unit kerja.	49 PD	Maret-September 2026	BAPPEDA	Proses	Evidence: Perubahan Renja 2026 dan Perubahan PK 2026 pada aplikasi ESR.
5	Mereviu kembali rencana aksi pada PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut dan disertai dengan target yang dapat diukur, bukan hanya sebatas pada pelaksanaan kegiatan. Kemudian memastikan rencana aksi PD yang disampaikan diperbarui setiap tahunnya melalui E-Sakip Reviu.	Provinsi Lampung telah melakukan optimalisasi pemanfaatan pohon kinerja, renja kemudian dituangkan dalam rencana aksi dengan penjabaran langkah perjanjian kinerja pada level pimpinan yang dituangkan dalam sampai dengan level individu. PD dengan memperhatikan pohon kinerja yang telah disusun oleh PD	49 PD	4-11 Maret 2026 (Rencana)	BAPPEDA	Selesai	Evidenec: evaluasi rencana aksi PD tahun 2025 (tw I-IV) dan tahun 2026 (tw I) pada aplikasi ESR.
	Komponen Pengukuran kinerja						
1	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi siMonev sebagai sarana monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja utama/strategis Pemda maupun PD, tidak hanya sebatas pada program, kegiatan, atau sub kegiatan.	Provinsi Lampung telah melaksanakan optimalisasi pengukuran melalui pengembangan fitur yang lebih kompleks pada aplikasi siMonev sebagai media pengukuran kinerja yang telah terintegrasi dengan eSAKIP Provinsi Lampung. Pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta IKU pada PD dari aplikasi SIMONEV telah menjadi dasar perencanaan untuk tahun berikutnya, baik pada perubahan Renja maupun saat desk penyusunan Renja/ Pra RKA Tahun 2027. penyusunan dok ini telah terlaksana pada tanggal 21 Januari 2026	49 PD	21-29 Januari 2026	BAPPEDA	Selesai	Evidence : BA Desk dan Dokumentasi, Paparan Persiapan Desk, aplikasi siMonev Provinsi Lampung.



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
2	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi agar tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan atau penyerapan anggaran, namun juga pada capaian kinerja strategis maupun aksi yang dilakukan untuk mendukung kinerja pada level di atasnya. Selanjutnya, memastikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan disampaikan melalui E-Sakip Reviu.	Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui dokumen evaluasi RKPD pada level pemda dan evaluasi renja pada level PD serta adanya evaluasi rencana aksi PD per triwulan dan telah di upload pada aplikasi E-Sakip Reviu Kemenpan RB	Provinsi Lampung dan 48 PD di Lingk Pemprov Lampung	Januari-Desember 2026	BAPPEDA	Proses	Evidence : 1 Dok. Ev. RKPD 2024 dan 3 Dok Ev. RKPD TW I,II,III Tahun 2025
3	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, maupun anggaran guna mencapai kinerja PD yang telah ditetapkan.	Provinsi Lampung telah melaksanakan desk penyusunan Renja/ Pra RKA tahun 2027 pada tanggal 21 Januari 2026 dimana dalam desk ini PD wajib menyediakan analisis informasi terkait capaian IKU PD serta Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Disamping itu, desk pula memuat pembahasn strategis program prioritas untuk pencapaian IKU Provinsi Lampung dan IKU PD	49 PD di Lingk Pemprov Lampung	21-29 Januari 2026	BAPPEDA	Selesai	Evidence : BA Desk dan Dokumentasi, Paparan Persiapan Desk
	Komponen Pelaporan kinerja						
1	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi upaya <i>refocussing</i> program/kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan rencana kinerja tahun selanjutnya.	Biro Organisasi, BPKAD dan BAPPEDA telah berkolaborasi dalam penyajian data mengenai refokusing program/kegiatan yang akan disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Data dan informasi ini akan dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja tahun mendatang.	Provinsi Lampung	Februari 2026	BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi	Selesai	Evidence: Penjelasan LKJ Provinsi Lampung dan PD pada BAB III sub bab refokusing (ESR).



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
2	Menetapkan metode pengukuran kinerja yang mengatur secara jelas metode perhitungan capaian kinerja pada indikator-indikator tertentu khususnya yang memiliki target dalam bentuk rentang, termasuk penjelasan mengenai penggunaan angka dasar yang dipilih (batas atas/batas bawah), perlakuan terhadap realisasi yang melampaui target, dan pembatasan nilai capaian maksimum. Hal ini juga dapat diberlakukan pada PD.	Biro Organisasi dan BAPPEDA telah menetapkan angka absolut untuk metode pengukuran pada target yang memiliki "range" dan menetapkan dasar perhitungan yang diselaraskan dengan seluruh PD yang memiliki target serupa. Metode ini dibahas dalam bab III pada laporan akuntabilitas tahun 2025.	Provinsi Lampung	Februari 2026	BAPPEDA, Biro Organisasi	Selesai	Evidence: Penjelasan LKJ Provinsi Lampung dan PD terkait yang memiliki target berupa "range" pada BAB III sub bab pengukuran kinerja (ESR).



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
		<u>Kronologis penyusunan:</u> Untuk diketahui, pada tanggal 5 Mei 2025, saat konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 oleh Kemendagri, didapat masukan oleh Kemenpan RB untuk menampilkan angka dasar/ mutlak untuk indikator yang bersifat rentang. Dan masukan tersebut telah kami akomodir pada tahap Rancangan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dan telah kami konsultasi ke Kemenpan RB pada tanggal 26 Mei 2025 angka dasar/ mutlak tersebut sekaligus dengan IKU yang akan digunakan oleh Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2025, Kementrian PPN/ BAPPENAS melakukan penyesuaian terhadap RPJMN dgn Rancangan RPJMD Provinsi Lampung. Pada agenda tersebut Kementrian PPN/ BAPPENAS mengamanatkan untuk indikator yang mempunyai angka dasar/ mutlak tersebut dikembalikan ke nilai rentang kembali. Karena hal hal itu tidak sesuai dengan RPJMN yang telah disusun. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahap Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, kami kembali menggunakan nilai rentang. Evidence akan kami lampirkan berupa Rancangan RPJMD yang pada saat itu masih memiliki angka dasar pada indikator bersifat rentang (Rancangan RPJMD, halaman III-14)	Provinsi Lampung	2025	BAPPEDA	tidak terimplementasinya penetapan angka absolut pada penetapan target 2025-2029 pada target bersifat range sesuai dengan arahan tim kemendagri dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.	Evidence : Rancangan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
		Biro Organisasi dan BAPPEDA telah menetapkan angka absolut untuk metode pengukuran pada target yang memiliki "range" dan menetapkan dasar perhitungan yang diselaraskan dengan seluruh PD yang memiliki target serupa. Metode ini dibahas dalam bab III pada laporan akuntabilitas.	Provinsi Lampung	Februari 2026	BAPPEDA, Biro Organisasi	Selesai	Evidence: Penjelasan LKJ Provinsi Lampung dan PD terkait yang memiliki target berupa "range" pada BAB III sub bab pengukuran kinerja (ESR).
3	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan target, strategi, dan aktivitas, serta dituangkan dalam dokumen perencanaan berikutnya sehingga dapat menggambarkan peningkatan kinerja.	Provinsi Lampung telah memanfaatkan laporan kinerja baik pada level pemda dan perangkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen perubahan RKPD pada level pemda dan Perubahan Renja pada level perangkat daerah. Dalam kedua dokumen tersebut terdapat target pada IKU yang telah disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya diturunkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sehingga menjadi dasar penyusunan laporan kinerja.	49 PD	2025-2026	BAPPEDA, Biro Organisasi	Selesai	<u>Evidence 1:</u> Perubahan RKPD, Perubahan Renja, Perubahan PK pada aplikasi ESR dan Penjelasan LKJ BAB II sub bab keselarasan dokumen SAKIP pada aplikasi ESR. <u>Evidence 2:</u> Dinas Koperas UKM Rentra 2025-2026 target tahun 2025 iku, "Persentase koperasi yang berkualitas," targetnya 36,66% dimana lebih rendah dari capaian tahun 2024 sebesar 43,05% namun renstra 2025-2029 terdapat perubahan/revisi iku yg berbeda dengan iku tersebut;



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
							Evidence 3: KPCK, indikator kinerja Persentase Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani, berdasarkan hasil berita acara rapat capaian penanganan kawasan kumuh provinsi lampung nomor BA.01/II.01/V.05/2024 baseline awal penanganan kumuh di Provinsi Lampung ditetapkan sebesar 0% yaitu dengan luas 0 Ha, untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Hal menggambarkan adanya perubahan satuan target. sehingga tidak dapat dibandingkan Evidence 4: KPTPH sesuai dimana Realisasi th 2024 kurang dari target tahun 2025; Evidence 5: Disdukcapil telah disesuaikan di P Renja dan P PK



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
4	Dalam hal telah terdapat dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029, maka Laporan Kinerja tahun 2025 perlu menyajikan informasi capaian kinerja atas PK tahun 2025 atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dan PK tahun 2025 atas RPJMD 2025-2029.	Provinsi Lampung dan seluruh PD dilingkungannya telah menyusun LKj dengan menjawab PK dan Perubahan PK tahun 2025 dengan berlandaskan dokumen perencanaan RPD 2025-2026 dan RPJMD 2025-2029 pada level Pemda serta Renja 2025-2026 dan Renja 2025-2029 pada level PD.	50 Dokumen LKj	Januari-Maret 2026	Biro Organisasi dan seluruh PD	Selesai	Evidence: Dokumen LKj pada ESR, Outline dan sistematika penyusunan LKj PD.
Komponen Evaluasi Internal							
1	Memanfaatkan fitur tindak lanjut hasil evaluasi yang tersedia dalam aplikasi Eva SAKIP sebagai dasar pemantauan tindak lanjut setiap PD yang dilakukan secara berkala, sehingga dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat PD.	Inspektorat Provinsi Lampung telah memanfaatkan fitur dalam aplikasi EvaSAKIP sebagai dasar pemantauan tindak lanjut setiap Perangkat Daerah secara berkala	48 PD	Maret 2026	Inspektorat	Selesai	Evidence: SS aplikasi EvaSAKIP
		Inspektorat Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Lampung untuk memperbaiki fitur-fitur yang ada dalam aplikasi EvaSAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja Perangkat Daerah	1 Surat	April 2026	Inspektorat	Proses	Evidence: Surat ke Dinas Kominfo

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Ket.
2	Mempertahankan dan mengoptimalkan pemberian SAKIP Award secara konsisten dan berkelanjutan untuk memicu PD meningkatkan kualitas implementasi SAKIP. Pemberian penghargaan ini agar disertai dengan pembinaan yang lebih intensif bagi PD dengan capaian rendah.	Pada tahun 2026 ini, Inspektorat Provinsi Lampung akan tetap mempertahankan dan mengoptimalkan pemberian SAKIP Award secara konsisten dan berkelanjutan	6 PD	Oktober 2026	Inspektorat	Proses	Evidence: SK Gubernur Reward and Punishment
		Melakukan pembinaan yang intensif bagi Perangkat Daerah dengan capaian rendah	3 PD	Maret 2026	Inspektorat	Proses	Evidence: Surat Perintah Tugas, Surat Undangan, Notulen, Dokumentasi, Berita Acara, daftar hadir
3	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP internal dengan menyusun standar yang jelas terkait muatan isi laporan sehingga sesuai dengan interpretasi predikat SAKIP yang dimiliki dan diterapkan merata di seluruh PD.	Membuat Surat Edaran Inspektur tentang standar penyusunan evaluasi AKIP sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	1 Surat Edaran	April 2026	Inspektorat	Proses	Evidence: Surat Edaran Inspektur
		Melaksanakan Bimtek/Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kompetensi evaluator AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	1 kali Bimtek	April 2026	Inspektorat	Proses	Evidence: Surat Undangan, Dokumentasi, daftar hadir

Sumber : Olahan data Tim SAKIP Provinsi Lampung, Maret 2026

3.7 Prestasi dan Penghargaan

Kunjungi Polinela, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Pendidikan Vokasi Hadapi Bonus Demografi (22 Juli 2025)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengunjungi Politeknik Negeri Lampung (Polinela) pada 22 Juli 2025 sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah dengan pendidikan vokasi. Ia menyebut Polinela sebagai "pabrik ide dan laboratorium inovasi" serta menekankan pentingnya vokasi untuk menghadapi bonus demografi dan meningkatkan kesejahteraan. Lampung memiliki potensi besar di pertanian dan maritim, namun masih menghadapi tantangan IPM rendah, pengangguran, dan kemiskinan. Gubernur mengajak civitas akademika mendukung tiga cita besar pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu ditandatangani perjanjian hibah lahan 50 hektare, serta peninjauan budidaya unggulan Polinela yang siap mendukung pembangunan Lampung.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Pemprov Lampung Raih Penghargaan Kemenhut RI atas Prestasi dalam Implementasi Program SSF (24 Juni 2025)

Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Kehutanan RI atas keberhasilan dalam implementasi program Strengthening of Social Forestry (SSF). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, disaksikan Dirjen Perhutanan Sosial Mahfudz, pada Selasa (24/06/2025) di Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam acara tersebut juga dilakukan deklarasi dukungan keberlanjutan program SSF oleh kepala daerah penerima penghargaan, yang meliputi empat provinsi dan enam kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai perwakilan dari daerah Lampung.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Penghargaan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (30 Juli 2025)

Provinsi Lampung menjadi pilot project nasional Kelas Migran Vokasi SMK/SMA setelah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menandatangani MoU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (30/7/2025). Menteri Abdul Kadir Karding mengapresiasi program ini sebagai solusi pengangguran dan kemiskinan melalui migrasi kerja legal. Program melibatkan 44 guru bahasa Jepang untuk membekali ribuan siswa, dengan manfaat peningkatan keterampilan, jejaring global, dan kesejahteraan keluarga. Gubernur menekankan pentingnya program bagi 90 ribu lulusan SMA yang tak melanjutkan kuliah, dengan 8.500 siswa berminat. Program ini menyiapkan tenaga kerja terampil sekaligus duta bangsa.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Penghargaan Provila (Provinsi Layak Anak) Tahun 2025 (8 Agustus 2025)

Provinsi Lampung kembali meraih Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) 2025, yang diterima Wakil Gubernur Jihan Nurlela pada acara pengukuhan di Auditorium Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (08/08/2025). Penghargaan diserahkan oleh Menko PMK Imam Mahdi dan Menteri PPPA Arifah Fauzi kepada 13 provinsi, termasuk Lampung. Ini menjadi capaian ketiga Lampung sejak 2022. Tahun 2025, sebanyak 15 kabupaten/kota di Lampung meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan peringkat Nindya, Madya, dan Pratama. Pemprov Lampung berkomitmen mendukung terwujudnya Provila melalui pembinaan, pengawasan, serta pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Upacara Unik, Gubernur Rahmat Mirzani Jadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-80 RI di Atas Laut (16 Agustus 2025)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin Upacara HUT ke-80 RI dengan cara unik di atas laut Pantai Mutun, Pesawaran (16/8/2025). Ratusan peserta dari Komunitas Perenang Antar Pulau membentuk formasi angka "80". Acara dihadiri Wagub Jihan Nurlela, Sekdaprov Marindo Kurniawan, dan Danrem 043/Gatam. MURI mencatat rekor sebagai Gubernur pertama di dunia menjadi inspektur upacara di laut dengan peserta terbanyak, 565 orang. Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan upacara ini simbol keberanian, kebersamaan, dan inovasi, sekaligus komitmen membangun Lampung sebagai pusat maritim dan wisata bahari berkelanjutan. Ia mengapresiasi komunitas perenang yang kembali menorehkan rekor.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Gubernur Mirza Raih Penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia dari Baznas (28 Agustus 2025)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia dari Baznas RI pada ajang Baznas Awards 2025 bertema "Menguatkan Baznas, Mendukung Asta Cita" di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/08/2025). Penghargaan diberikan atas komitmen dan dukungan Pemprov Lampung dalam memperkuat pengelolaan zakat serta mendorong sinergi antara Baznas, pemerintah, dan masyarakat. Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut, sementara Ketua Baznas RI Prof. Noor Aednurd menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam keberhasilan gerakan zakat nasional.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akademi, Komunitas, Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

Penganugerahan Mandaya Awards 2025 dengan Kategori "Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat"

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI menganugerahkan Mandaya Award 2025 kategori Dedikasi dan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmennya membangun ekosistem pemberdayaan berkelanjutan. Penghargaan diserahkan oleh Menko Abdul Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Jakarta (16/10/2025). Muhaimin menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari bantuan menjadi pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Ia menilai Mandaya Award bukan sekadar seremoni, tetapi tonggak gerakan nasional pemberdayaan. Deputy Abdul Haris melaporkan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan desa mandiri sebagai bukti keberhasilan program pemberdayaan.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

Torehkan Penghargaan di Forum Internasional, Gubernur Mirza Terima Anugerah Tun Perak dari DMDI yang diikuti oleh 18 Negara

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima Anugerah Tun Perak dari Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) pada Konferensi DMDI Ke-23 di Jakarta (24/10/2025). Penghargaan tertinggi DMDI ini diberikan atas dedikasi beliau dalam pengembangan masyarakat Melayu, penguatan nilai Islam, serta kerja sama budaya dan ekonomi di kawasan Melayu-Islam. Acara dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dihadiri perwakilan dari 18 negara anggota. DMDI menegaskan komitmennya memperkuat jaringan Melayu-Islam global melalui diplomasi kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan, termasuk kerja sama perguruan tinggi antarnegara anggota.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

Penghargaan Excellence in Agriculture and Food Prosperity

Pemerintah Provinsi Lampung meraih Excellence in Agriculture and Food Prosperity pada Indonesia Kita Awards 2025 oleh Garuda TV di Jakarta, sebagai apresiasi atas komitmen memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan. Lampung dinilai berkontribusi besar melalui penyediaan lahan petani, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok yang berdampak pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Penghutangan Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih dan harapan agar penghargaan ini menjadi motivasi bersama. Selain itu, Kota Bandar Lampung meraih Excellence in Public Service Innovation, dan Kabupaten Lampung Selatan meraih Excellence in Tourism and Food Sustainability Integration.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

Penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision pada ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025

Sekdaprov Lampung Dr. Marinda Kurniawan meraih Sekda Terbaik Kategori Vision dan peringkat ke-4 nasional pada ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 di Surabaya. Penilaian sebelumnya dilakukan melalui visitasi ASKOMPSI, di mana Marinda menegaskan pentingnya integrasi data sebagai dasar digitalisasi pemerintahan. Ia memaparkan program unggulan Lampung in, super app layanan publik yang mengintegrasikan data dan menjadi kanal pengaduan masyarakat. Penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hemendagri kepada perwakilan Pemprov Lampung. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Lampung dalam memperkuat tata kelola digital dan inovasi pelayanan publik.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

PUSPOM AD Anugerahi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Warga Kehormatan dan Pin Emas Polisi Militer (26 September 2025)

Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Militer 11/3 Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (26/09/2025). Penyerahan dilakukan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal kepada Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana. Hibah berupa tanah seluas 4,7 hektare di Kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, dituangkan dalam NPHD dan diperkuat melalui SK Gubernur Nomor G/45/V.1.02/HK/2025. Sebagai apresiasi, Danpuspomad memberikan plagam dan menganugerahkan Gubernur sebagai warga kehormatan Korps Polisi Militer TNI AD dengan penyematan PIN dan Baret Polisi Militer. Acara turut dihadiri pejabat Forkopinda dan OPD Provinsi Lampung.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

Pemprov Lampung Raih Penghargaan Sutami Award 2025 dari Kementerian PU

Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan RMD meraih Sutami Award 2025 peringkat pertama untuk Kategori Kelola Air. Penghargaan diterima Wagub Jihan Nurlela karena Gubernur menghadirkan aera lain. Penilaian mencakup kolaborasi antar lembaga, efisiensi aset SDA, konservasi DAS, dan efektivitas pengurangan daya rusak air, berdasarkan lima komponen: perencanaan terpadu, manajemen aset SDA, mitigasi banjir-lukereng berbasis sains, kolaborasi multipihak, dan dampak ekonomi SDA. Menteri PU menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Capaian ini memperkuat komitmen Lampung dalam pengelolaan SDA, sinergi pusat daerah, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar

Penghargaan dari Menkop Ferry Juliantono atas Pencapaian Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Kopdes Merah Putih Tercepat secara Nasional

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djaal menerima penghargaan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono atas pencapaian Lampung sebagai provinsi tercepat dalam

berbadan hukum, menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian ekonomi desa. Jihan menekankan pentingnya pengelolaan profesional dan kolaborasi antara pemerintah, Kelakasan, dan dunia usaha. Kelakasan melalui program Jaga Desa mendukung pengawasan, keperasi dan tata kelola desa. Menteri Pery mengisahkan, program ini menjadi solusi pengusir ekonomi desa dan target nasional pembentukan 80 ribu koperasi pada 2026.



BerAKHLAK
Berorientasi Pada penerapan Akhlakul Kiamah
mengapa Lu'lu' Adipati Kolaborasi?

Pemprov Lampung Raih Penghargaan Kemenhut RI atas Prestasi dalam Implementasi Program SSF (24 Juni 2025)

Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Kehutanan RI atas keberhasilan dalam implementasi program Strengthening of Social Forestry (SSF). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri

Wanabakti, Jakarta. Dalam acara tersebut juga dilakukan deklarasi dukungan keberlanjutan program SSF oleh kepala daerah penerima penghargaan, yang meliputi empat provinsi dan enam kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai perwakilan dari daerah Lampung.



BerAKHLAK
Berakhlaklah Pelayananku & buktikanlah Kepuasan
manusianya supaya tidak jadi khabibullah!

**Penghargaan "Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025" pada sektor
Penanggulangan Kemiskinan - Fiskal Tinggi**

misin (PO) dan kedisiplinan kemiskinan (PI). Lampung mencatat penurunan PO sebesar 0,69% dan PI sebesar 0,10%, lebih baik dari rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan efektivitas program sosial, dukungan fiskal, dan pergerakan ekonomi masyarakat dalam menekan kemiskinan secara nyata serta menjadi contoh bagi daerah lain.



BerAKHLAK
BerAKHLAK: Policy van der Universiteit van Amsterdam
voor een eerlijke en verantwoorde wetenschap



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Komitmen,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

b. Daftar Inovasi

No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
1	KU COBA TERPIKAT (Kegiatan Uji Coba Intercropping Kopi-Lada Kabupaten Tanggamus)	aplikasi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, sistem intercropping (tumpang sari) antara kopi dan lada merupakan teknik budidaya yang mengombinasikan kedua tanaman tersebut dalam satu lahan untuk memaksimalkan penggunaan ruang dan meningkatkan pendapatan petani	Optimalisasi Lahan yaitu mengisi ruang kosong di antara pohon kopi dengan tanaman lada yang tumbuh merambat pada pohon panjat	Peningkatan Pendapatan petani	
2	Du'Laper (Duta Pelayanan Perizinan)	aplikasi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Optimalisasi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Pelayanan publik yang lebih ramah dan berkualitas	
3	e-SiBen Perkebunan (eKPB)	aplikasi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	mempermudah layanan pertanian, peternakan, perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Meningkatkan LPE	
4	Pringsewu Heritage Fun Run 10K and 5K	Dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Pringsewu Heritage Fun Run adalah ajang lari santai tahunan yang mengombinasikan olahraga dengan promosi potensi wisata dan budaya lokal (sport tourism) di Kabupaten Pringsewu, Lampung	Selain meningkatkan kesehatan, ajang ini bertujuan memperkenalkan potensi kerajinan lokal (seperti Kain Tapis di Pekon Lugusari) serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pringsewu.	Dampak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu	
5	Edukasi dan Sosialisasi Wisata Hutan Lampung	Dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Edukasi dan sosialisasi wisata hutan di Lampung berfokus pada konsep agroforestri dan ekowisata berbasis masyarakat	untuk menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan ekonomi warga sekitar hutan	Dampak ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup	
6	BANAWA NUSANTARA	Dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, merupakan armada kapal kayu (kapal pelayaran rakyat) yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan RI untuk mendukung konektivitas dan wisata bahari di berbagai wilayah Indonesia	untuk meningkatkan aksesibilitas warga antarpulau dan menjadi sarana edukasi serta promosi wisata bahari	Dampak peningkatan ekonomi dan pendidikan tentang bahari	
7	APEL MUSANG (Alur Pelayaran Muara Sungai Tulang Bawang)	Dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah proyek strategis percepatan pengerukan lumpur dan penataan alur pelayaran di muara Sungai Tulang Bawang, Lampung	Mengatasi sedimentasi parah di muara agar kapal-kapal besar, terutama kapal logistik dan kapal nelayan, dapat melintas tanpa terjebak dangkal.	mendukung integrasi transportasi antara jalur darat (Tol Trans Sumatera) dengan jalur laut melalui dermaga-dermaga di sepanjang sungai	
8	JALEPAH (JAKSTRADA PENGELOLAAN SAMPAH)	Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi adalah instrumen kebijakan strategis tingkat daerah untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara terpadu di wilayah Lampung	Menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 melalui aksi pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali (3R).	Menjadi fondasi bagi program edukasi wisata hutan dan pesisir agar pengunjung tetap menjaga kebersihan destinasi	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
9	Buletin Digital (Bulidi)	Dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung , merupakan buletin digital kegiatan BPSDM	Sarana untuk informasi kegiatan dan sosialisasi kebijakan secara digital	Meningkatkan informasi	
10	E-MAHAN	Dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung merupakan aplikasi sistem informasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengelola data perumahan, khususnya terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program bantuan perumahan	Berfungsi sebagai basis data digital untuk memasukkan dan memverifikasi data rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Provinsi Lampung secara akurat.	sinkronisasi data kemiskinan ekstrem	
11	H2M (Hunian Hijau Masyarakat)	Dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dinas Perumahan, adalah konsep pengembangan pemukiman di Lampung yang mengintegrasikan aspek hunian layak dengan prinsip kelestarian lingkungan	Mendorong penanaman pohon peneduh atau tanaman produktif di pekarangan rumah bantuan, sejalan dengan semangat agroforestri	Pemanfaatan lahan sempit di sekitar hunian untuk apotek hidup atau warung hidup guna mendukung ekonomi keluarga	
12	SIMTARU	Dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) adalah platform digital yang menyajikan data geospasial dan rencana tata ruang wilayah secara terbuka, akurat, dan transparan	sistem ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lampung 2023–2043	Memberikan kemudahan bagi warga dan investor untuk mengetahui fungsi kawasan tertentu (misal: kawasan industri, permukiman, atau hutan lindung).	
13	PESAN PERILAKU (Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Perizinan Bagi Pelaku Usaha)	Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung untuk memperkuat pengawasan pasca-perizinan	Aplikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) tetap patuh terhadap standar dan aturan yang berlaku	Meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan dan melakukan pengendalian di lapangan	
14	SI-PERI (Sistem Informasi Penerapan Sistem Merit Perangkat Daerah)	Dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah aplikasi berbasis digital yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengelola dan memantau manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil.	merupakan alat utama bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengimplementasikan Sistem Merit, yaitu kebijakan manajemen SDM yang mengabaikan latar belakang politik, ras, atau gender, dan lebih mengutamakan prestasi kerja.	Mendata profil kompetensi setiap pegawai (pendidikan, pelatihan, keahlian) untuk penempatan jabatan yang tepat (right man on the right place).	
15	e-Lelang (e-KPB)	Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah fitur inovatif dalam ekosistem Kartu Petani Berjaya (KPB) Terintegrasi di Lampung yang berfungsi sebagai pasar lelang komoditas pertanian berbasis digital	fitur ini mempertemukan petani secara langsung dengan pembeli (buyer) atau vendor tanpa melalui rantai tengkulak yang panjang	Mekanisme lelang memungkinkan petani mendapatkan penawaran harga tertinggi dari berbagai peminat.	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
16	SI_MALA	Dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Pelayanan laboratorium yang dapat diakses melalui website	Masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan lebih cepat karena cukup melalui akses internet/website saja, Adanya integrasi dalam setiap jenis layanan, mulai dari pendaftaran sampai dengan hasil.	Informasi cepat digital	
17	Si-Peti	Dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen sipil tanpa harus mengantre lama di kantor dinas	Memfasilitasi pendaftaran dokumen	Pelayan publik cepat berkualitas	
18	SEPAKAT SEHAT (Sistem Informasi Pelatihan Bidang kesehatan)	Dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah platform digital yang dikembangkan oleh UPTD Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) Provinsi Lampung untuk mendigitalisasi seluruh manajemen pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.	bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Lampung agar lebih profesional dan terstandarisasi	Berkas digital, memudahkan registrasi	
19	e-sakip	Dikelola oleh Biro Organisasi Provinsi Lampung aplikasi terintegrasi pada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi pada level pemda dan PD	menyajikan data dan informasi terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi secara real time yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut	meningkatkan akuntabilitas kinerja	
20	POCADI (POjok baCA DIgital)	Dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung inovasi layanan perpustakaan modern dari pemerintah daerah di Lampung untuk menghadirkan akses bacaan digital di tempat-tempat umum	dirancang untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan cara yang lebih santai dan kekinian	Meningkatkan literasi masyarakat	
21	e-KPB NEW	Dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Program e-KPB tersedia untuk petani di 6 sektor, yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, dan holti-kultura. Selain petani, akun e-kpb juga menyediakan akun untuk anggota pemerintah daerah, bank dan lembaga keuangan, lembaga ekonomi desa/pasar, dan penyedia/penyalur sarana produksi.	mempermudah layanan pertanian, peternakan, perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Meningkatkan LPE	
22	e-Labling Lampung (Elektronik Laboratorium Lingkungan Lampung)	Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, adalah inovasi layanan publik berbasis digital yang dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung	dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun masyarakat dalam mengakses layanan pengujian kualitas lingkungan (air, udara, tanah) secara transparan dan akuntabel	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
23	SIKEP BAMET (Sikep Berbasis Metaverse)	Dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, mengintegrasikan sistem informasi kependudukan (Si-Kep Temen) ke dalam teknologi Metaverse (dunia virtual 3D) untuk memberikan pengalaman pelayanan yang lebih imersif dan modern	Masyarakat dapat "hadir" di kantor pelayanan secara virtual menggunakan avatar, berinteraksi dengan petugas, dan mendapatkan informasi tanpa harus datang secara fisik ke kantor	Pelayan publik cepat berkualitas	
24	NEW POSBINDU CERDIK JIWA	Dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, inovasi model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Lampung yang memperluas fungsi Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) konvensional dengan mengintegrasikan deteksi dini kesehatan jiwa.	Mengintegrasikan kesehatan jiwa ke dalam layanan kesehatan umum (Posbindu) membantu mengurangi rasa malu atau diskriminasi terhadap masalah mental.	menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik sekaligus tangguh secara mental	
25	SI PAUS (Sistem Pelayanan Untuk SNI)	Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (Sistem Pelayanan Untuk SNI) adalah inovasi layanan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) secara lebih mudah dan terarah	Memberikan panduan langkah demi langkah bagi pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis SNI, mulai dari pengujian produk hingga audit sistem manajemen	meningkatkan daya saing produk lokal Lampung di pasar nasional maupun internasional	
26	SI-JALA (SISTEM JALAN LAMPUNG) VERSI 1	Dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, aplikasi yang digunakan masyarakat dalam berpartisipasi melaporkan kerusakan jalan di Provinsi Lampung serta memberikan informasi mengenai jalan di Provinsi Lampung	percepatan dalam pemeliharaan, pembangunan jalan provinsi	Meningkatnya kemandirian jalan dan kepuasan masyarakat	
27	DONGKOL (DOCKING ONLINE)	Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sistem informasi manajemen perawatan kapal	memastikan kapal-kapal milik daerah maupun kapal rakyat, termasuk armada hibah seperti Banawa Nusantara, tetap dalam kondisi prima dan laik laut.	Pelayan publik cepat berkualitas	
28	Si Jelabat	Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah aplikasi berbasis peta digital (GIS)	Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Lampung	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
29	YANSOS JEJAMA	Dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan cara penjangkauan langsung ke daerah-daerah bahkan hingga ke tingkat desa di Provinsi Lampung	penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin.	berkontribusi dalam salah satu strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem yaitu Mengurangi Beban Pengeluaran dengan cara pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas sehingga diharapkan para penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dan mandiri.	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
30	NASI PERA (Pembinaan dan Edukasi Perda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, program inovasi unggulan dari Satpol PP Provinsi Lampung untuk meningkatkan kepatuhan warga melalui pendekatan humanis dan edukatif	program ini mengedepankan sosialisasi agar masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku di wilayah Lampung.	Penindakan humanis	
31	PRAKTER BELAJAR KERJA (PBK) KOMPUTER	Dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah program pelatihan keterampilan teknis (vocational training)	menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang menguasai teknologi informasi guna mendukung digitalisasi berbagai layanan publik di Lampung.	Peningkatan skill tenaga kerja	
32	Warung Sehat	Dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, inovasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan penyediaan pangan bergizi dengan edukasi kesehatan dasar	Menjual atau menyediakan hasil bumi dari kebun warga	Kamandirian ekonomi	
33	EvaSAKIP	Dikelola oleh Inpektorat Provinsi Lampung, aplikasi evaluasi internal SAKIP yang meningkatkan kemudahan evaluator dan PD.	memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung, dan memudahkan Perangkat Daerah untuk mendapatkan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan.	meningkatkan kualitas evaluasi internal SAKIP Provinsi Lampung	
34	RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center)	Lembaga sosial di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi individu yang mengalami trauma fisik maupun psikis	Lembaga ini merupakan bagian penting dari sistem jaring pengaman sosial untuk menangani kondisi darurat bagi kelompok rentan.	Menyediakan tempat penampungan sementara yang aman bagi korban kekerasan atau penelantaran	
35	Desa Siger	Desa siger merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana menyeluruh berkelanjutan. Fokus dalam desa siger adalah: Bebas Stunting; Peduli Anak; Ramah Perempuan	memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Selain itu desa Siger (bebas stunting peduli anak dan ramah perempuan) juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.	Meningkatnya pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	
36	Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (simonev)	aplikasi perencanaan dan pengukuran capaian kinerja pada level pada pemda dan	menyajikan data dan informasi terkait perencanaan, pengukuran secara real time yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut	meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran capaian kinerja	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
37	RAMBU (Ruang Multimedia bagi UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah fasilitas digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung (melalui Dinas Koperasi dan UMKM atau Diskominfo) untuk membantu pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas pemasaran produk mereka di dunia maya.	Fasilitas ini menjadi jembatan bagi UMKM agar naik kelas melalui konten visual yang profesional dan estetik		
38	Program Smart Village	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung program unggulan Pemerintah Provinsi untuk mendorong kemandirian desa melalui digitalisasi pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan tata kelola data yang terintegrasi			
39	SIPONTAN (SISTEM PEMANTAUAN KONDISI HUTAN)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, platform digital yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan kondisi hutan secara akurat dan transparan	alat bantu bagi otoritas kehutanan dan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dari berbagai ancaman	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
40	PROMA "PROGRAM MATCHMAKING"	inisiatif strategis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pengusaha atau investor besar	untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal agar dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas serta mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif di Lampung	Mempermudah pencarian mitra lokal yang kompeten untuk mendukung kebutuhan produksi atau pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan	
41	APLIKASI ROJANA V2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, adalah platform pendaftaran online resmi dari RS Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung untuk masyarakat yang ingin melakukan tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba	pengembangan dari versi sebelumnya untuk mengatasi masalah antrean panjang dan risiko kesalahan administrasi pada pendaftaran manual	Pelayan publik cepat berkualitas	
42	Optimalisasi BUM Desa dalam Program Makan Bergizi Gratis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan rantai pasok lokal dengan kebutuhan nutrisi nasional.	sebagai konsolidator dan penjamin mutu hasil bumi dari desa untuk disalurkan ke dapur-dapur umum atau satuan pelayanan makan bergizi.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
43	Aplikasi SIKUMBA (Sistem Informasi Kalibrasi dan Pengujian Mutu Barang)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah platform layanan digital yang dikembangkan oleh UPTD BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	aplikasi ini hadir untuk memodernisasi proses layanan teknis di laboratorium pengujian dan kalibrasi	Pelayan publik cepat berkualitas	
44	SI OPPA (kegiatan irigasi dioperasikan dan dipelihara secara padat karya atau melibatkan masyarakat secara langsung)	adalah inovasi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung yang mengedepankan model padat karya dalam merawat jaringan irigasi.	Program ini mengalihkan pola pemeliharaan dari sistem kontraktual pihak ketiga menjadi pelibatan langsung kelompok tani atau masyarakat setempat (P3A - Perkumpulan Petani Pemakai Air)	Efisiensi Anggaran	



No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak	
45	BerTAPIS (Ber-Talenta, Aktif, Profesional, dan Smart)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	untuk mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul.	ASN berkualitas	
46	SIP KONSER (Sistem Pengawasan Kawasan Konservasi)	adalah inovasi sistem pemantauan digital yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung untuk memperkuat perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah konservasi perairan	Memfasilitasi pemantauan aktivitas di dalam kawasan konservasi perairan secara real-time untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
47	Pandu PTM	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sistem pelayanan kesehatan di Lampung yang mengintegrasikan deteksi dini dan manajemen kasus penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes)	penguatan layanan primer untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit degeneratif.	Masyarakat sehat	

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi **“Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”** yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2025-2029 telah menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran akuntabilitas kinerja dan anggaran pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dokumen perencanaan antara dokumen RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Sehingga dalam dokumen Lkj ini membahas realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 serta pembahasan realisasi, capaian kinerja dan anggaran tahun 2025.



2. Berikut ini simpulan realisasi dan capaian kinerja serta anggaran berdasarkan dokumen perencanaannya:

a. RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

- 1) Berdasarkan dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, terdapat 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung;
- 2) Penetapan target yang menjadi dasar dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 dan RKPD Provinsi Lampung 2025;
- 3) Realisasi 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung bersumber dari data rilis oleh Kementerian/Lembaga dan sebagian berdasarkan dari PD Provinsi Lampung;
- 4) Capaian dari 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung terdapat 18 (delapan belas) IKU dengan kategori Sangat Memuaskan, 1 (satu) IKU dengan kategori Memuaskan dan 1 (satu) IKU dengan kategori Baik;
- 5) Terdapat 2 (dua) IKU yang tidak memiliki perbandingan dengan nasional atau daerah lain yaitu IKU Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah dan Indeks Kewaspadaan Dini. Penyebabnya adalah karena definisi operasional yang disusun berdasarkan kapasitas, kualitas, sumber daya PD di Provinsi Lampung dan karena adanya rilis data dari pusat (Kemendagri terhadap IKD) yang tidak secara periodik.
- 6) Terdapat 8 (delapan) IKU yang menggunakan data rilis realisasi tahun 2024 sebagai dasar realisasi 2025. Hal ini karena adanya *time frame* data rilis yang berbeda-beda.
- 7) Terdapat 11 (sebelas) IKU Provinsi Lampung dimana realisasinya lebih tinggi dari realisasi nasional.

b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029:

- 1) Dalam mencapai sasaran strategis dalam dokumen RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 telah ditetapkan 20 (dua puluh) IKU. Realisasi 20 IKU yang dimaksud terhitung berdasarkan formulasi yang telah dibahas pada BAB II dan bersumber dari berbagai pihak yang mempublikasikan data rilis. Berikut ini adalah perincian capaian kinerja Provinsi Lampung berdasarkan kategori kinerja:
 - a. Terdapat 18 (delapan belas) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Sangat Memuaskan;
 - b. Terdapat 1 (satu) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Memuaskan;
 - c. Terdapat 1 (satu) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja Baik.
- 2) Dalam mencapai sasaran strategis dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 telah ditetapkan 20 (dua puluh) IKU. Realisasi 20 IKU yang dimaksud terhitung berdasarkan formulasi yang telah dibahas pada BAB II dan bersumber dari berbagai pihak yang mempublikasikan data rilis. Berikut ini adalah perincian capaian kinerja Provinsi Lampung berdasarkan kategori kinerja:
 - a. Terdapat 19 (sembilan belas) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja **Sangat Memuaskan**, dan
 - b. Terdapat 1 (satu) IKU dengan Provinsi Lampung tahun 2025 memiliki kategori kinerja kategori **Memuaskan**.
- 3) Terdapat beberapa IKU yang masih menggunakan data rilis tahun sebelumnya, hal ini karena data rilis kinerja tahun 2025 belum dipublikasikan.
- 4) Terdapat 2 (dua) IKU yang menggunakan metode hitung konversi, yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Indeks Pembangunan Pemuda karena adanya perubahan metode hitung dari evaluator pusat yang merilis nilai indeks.
- 5) Pada IKU IMM menggunakan data capaian kinerja IPM karena data capaian IMM belum dirilis. Namun komponen dari IMM menyerupai dengan IPM.
3. Pagu Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2025 yang dikelola dalam mencapai 20 (dua puluh) IKU Provinsi Lampung tahun 2025 senilai Rp.7.813.044.281.370,32 (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 6.685.281.948.466,80 (Enam triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus

delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam) sehingga realisasi anggaran **85,57%**.

4. Tingkat capaian kinerja dari 20 (dua puluh) IKU lebih tinggi daripada tingkat serapan anggaran masing-masing IKU. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing IKU telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
5. Pagu APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.7.632.909.717.848,00 (Tujuh triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Kemudian pada akhir tahun terdapat perubahan anggaran dan P-APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp.7.813.044.281.370,32 (Tujuh triliun delapan ratus tiga belas miliar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu rupiah). Penambahan anggaran sebesar 2,35% senilai dengan Rp.180.134.563.522,04 (seratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua). Beberapa IKU yang sama pada dokumen RPD 2025-2026 maupun RPJMD 2025-2029 terlihat penambahan/pengurangan anggarannya. Namun untuk beberapa IKU tidak dapat terlihat karena adanya IKU yang berbeda pada kedua dokumen perencanaan.
6. Implementasi SAKIP Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan adanya beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Lampung dari berbagai sektoral. Pada tahun 2025, penghargaan yang diperoleh mencapai 16 penghargaan.
7. Pentingnya dukungan system informasi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Provinsi Lampung dalam monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Dalam mendukung pencapaian prioritas daerah maka Provinsi Lampung memiliki beberapa program unggulan pada level pemda dan inovasi daerah yang ada pada level perangkat daerah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Provinsi Lampung Tahun 2025 maka rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan guna perbaikan kinerja mendatang adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Provinsi Lampung tahun 2025 dapat memberikan pertimbangan dalam penetapan target kinerja tahun mendatang untuk indikator yang sama.
2. Perlu adanya strategi dan langkah kebijakan yang handal pada beberapa IKU yang belum tercapai pada tahun 2025.
3. Melaksanakan internalisasi implementasi SAKIP pada level pemda dan PD agar implementasi SAKIP Provinsi Lampung akan terus berprogress positif dengan dukungan komitmen pimpinan atas peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik serta melaksanakan publish kinerja kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
5. Meningkatkan koodinasi, kolaborasi, dan kerjasama lintas sektoral dalam mencapai target IKU Provinsi Lampung;
6. Dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada level provinsi dan perangkat daerah sebaiknya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pimpinan dan menjadi dasar perbaikan kinerja perangkat daerah masa mendatang;
7. Penyesuaian target pada IKU Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah dapat diselaraskan dengan dokumen perencanaan melalui matrik RPJMD/Renstra yang disesuaikan dengan RKPD/Renja dan apabila ada perubahan kondisi yang mempengaruhi target kinerja utama maka akan diperlukan penyusunan perubahan RKPD/Renja dan diselaraskan dengan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan anggaran tahun berjalan yang kemudian akan dipertanggungjawabkan dalam dokumen laporan akuntabilitas kinerja;
8. Pentingnya peranan APIP dalam monitoring dan evaluasi pada *ex-ante*, *on-going* dan *ex-post* kualitas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran/potret kinerja Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung tercinta serta memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

Telukbetung, 26 Maret 2026



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

LAMPIRAN



BERSAMA
LAMPUNG
MAJU
MENUJU
INDONESIA
EMAS

Berikut ini adalah foto pernyataan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal SAKIP Provinsi Lampung pada akhir Maret 2026.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo No. 42 Telukbetung Utara - Bandar Lampung, Kode Pos : 35213
Telp. (0721) 252332, 253729, 252960. Fax. (0721) 254895
Laman : <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, 26 Maret 2026

INSPEKTUR,



Dra. BAYANA., M. Si, CGCAE
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP 19690401 199003 2 004